



PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJMD

KOTA PALU

TAHUN 2025-2029





WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
3. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
4. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
7. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Daerah adalah Kota Palu.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Pasal 2

- (1) RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Wali Kota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang Bersifat Indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum daerah;
 - c. bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2025



Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irmayanti', is written over a large, faint circular stamp.

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 29, 04/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Palu, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJMD

KOTA PALU

TAHUN 2025-2029



BAPPEDA KOTA PALU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RPJMD ini disusun dengan pendekatan, metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan Kota Palu diakhir tahun perencanaan, merupakan hasil dari proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain pemerintah Kota Palu, yaitu akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat Kota Palu.

Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat Visi Pembangunan Kota Palu Periode Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Palu 2025-2045, yaitu arah pembangunan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan pada periode perencanaan jangka menengah 5 tahun pertama RPJPD Kota Palu 2025-2045 dengan Visi Pembangunan RPJMD Kota Palu 2025-2029 "Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif", yang sejalan dengan Visi Kota Palu tahun 2045 "Palu sebagai *Global City* yang Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan" seperti tertuang dalam RPJPD Kota Palu 2025-2045.

RPJMD Kota Palu 2025-2029 merupakan tolok ukur menuju pencapaian Palu *Global City* 2045 dengan wujud capaian *Green City-Resilient City-Livable City-Geopark City*, dan untuk mencapai hal ini penyelenggaraannya dilakukan melalui 4 Misi Pembangunan: (1) Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing; (2) Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni; (3) Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas; dan (4) Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional.

Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan kemudahan pemahaman akan arah kebijakan yang harus ditransformasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Palu 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 kami ucapkan terima kasih.

Palu, Agustus 2025
WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

RPJMD

KOTA PALU TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	8
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045.	8
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029.	9
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.	9
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Palu.	9
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu.	9
1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan RPKD Kota Palu.	9
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kota Palu.	10
1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Palu	10
1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya	10
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.4.1 Maksud	11
1.4.2 Tujuan	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	12
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	63
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	77
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	91
2.2 Keuangan Daerah	126
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	126
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	131
2.2.3 Kerangka Pendanaan	134
2.3 Permasalahan Isu Strategis	137
2.3.1 Permasalahan	137
2.3.2 Isu Strategis	140
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	151

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	151
3.1.1 Visi dan Misi	151
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	154
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	158
3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah	158
3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	182
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	186
4.1 Program Perangkat Daerah	186
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	197
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	198
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	198
4.2.3 Target Keberhasilan Pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	203
BAB V PENUTUP	241
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	241
5.2 Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi.....	242

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)



A photograph of two Indonesian police officers in white uniforms standing in front of a crowd. The officer on the left is a man with a mustache, wearing a white uniform with a dark tie and a dark cap with a gold emblem. The officer on the right is a woman wearing a white uniform with a dark tie and a white hijab with a dark cap. Both are smiling. In the background, there is a crowd of people, including a woman in a pink hijab and a man in a suit and glasses. The text "Bab. 1" is overlaid in large black font, and "PENDAHULUAN" is overlaid in smaller black font below it.

Bab. 1

PENDAHULUAN

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota diselenggarakan. Salah satu syarat administratif yang harus disertakan dalam pendaftaran pasangan calon adalah naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan Program Kerja Calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Dokumen visi-misi dan program kerja dimaksud merupakan dokumen yang sangat strategis dan penting karena dokumen tersebut berisi janji pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat, yang harus diwujudkan pada akhir periode jabatan apabila pasangan tersebut terpilih.

Visi-misi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003

tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Palu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan yang partisipatif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku kepentingan.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan top-down dan bottom-up merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan

berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah :

- 1) Pendekatan teknokratis, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana
- 1) pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dandapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
- 2) Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
- 3) Pendekatan politis, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan lima tahun;
- 4) Pendekatan top-down dan bottom-up, hasil pendekatan Bottom- Up melalui hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan Top-Down berupa penyalarsan dokumen perencanaan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran, seperti terkandung dalam makna filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional;
- 5) Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- 6) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- 7) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan, dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kota Palu tentang RPJMD Tahun 2025- 2029.

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode pertama dari RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
- 14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 15) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 16) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 27) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

- 
- 
- 29) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 30) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 31) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 32) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 33) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 41) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 43) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - 44) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 60);
 - 45) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 - 46) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 175);
 - 47) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2);
- 48) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 6);
 - 49) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2023-2053;
 - 50) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 - 51) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palu Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 13);
 - 52) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Responsif Gender;
 - 53) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Tahun 2023-2043;
 - 54) Perda nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182, tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 168

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yaitu RPJMD dan RPJPN, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, Dokumen RPJMD Kota Palu tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Palu tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan Visi Kota Palu sebagai "Global City " melalui penguatan fondasi transformasi dengan Kota Layak Huni atau Livable City untuk seluruh generasi, Kota Tangguh atau Resilient City, sebagai Kota Hijau atau Green City, dan Kota Taman Bumi atau Geopark City yang

ekologis, berkelanjutan dan ramah lingkungan, seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan. Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Palu tahun 2021-2041 yang berkaitan dengan pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menyusun kebijakan pembangunan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Palu sehingga rencana pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan , RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Renstra OPD Kota Palu Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Pusat. Penyusunan RPJMD ini ingin mewujudkan Visi " Terwujudnya Kota Palu Mantap, Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif". Selain itu, RPJMD Kota Palu juga selaras dengan usaha pencapaian Visi Ekonomi RPJPN Tahun 2025-2045 yakni "terwujudnya transformasi ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi". Melalui pembangunan daerah di Kota Palu, pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan, Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni, Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional dalam

pembangunan, pengelolaan kota, serta pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025- 2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, target dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Palu juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Palu dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Palu juga harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kota Palu.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Palu.

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif” Makna dari visi tersebut adalah :

- Kota Palu Mantap Berkelanjutan, bermakna kota yang maju, aman, nyaman, dan tangguh yang dikelola secara profesional dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Akselerasi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial
- Inovasi tata kelola pemerintah (pelayanan dasar dan pelayanan publik)

- Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kota Palu digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Palu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang. Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Palu. Selain itu, Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat juga arah pembangunan pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan RPKD Kota Palu.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 selaras dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang mempedomani Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program-Program dalam Bab IV RPJMD selaraskan dan menjadi acuan dokumen RPKD dan dokumen RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD Kota Palu sesuai Ayat 3 Pasal 20 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menyatakan dokumen RPKD Provinsi dan dokumen RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kota Palu.

Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

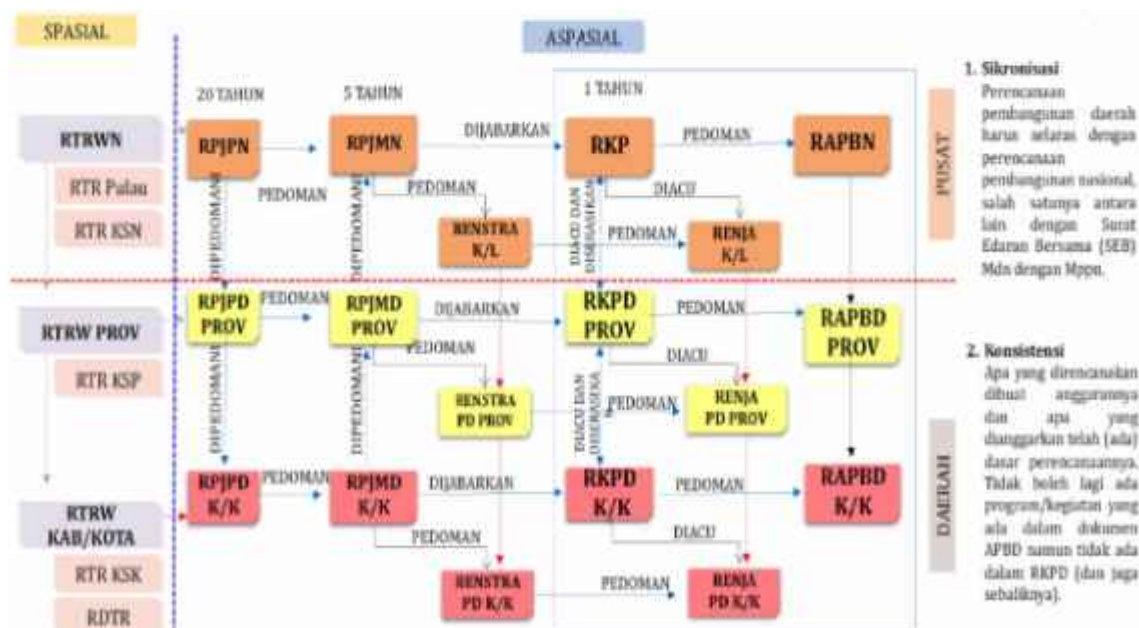
1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Palu

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memperhatikan juga prioritas pembangunan Kota Palu yang terjabarkan dalam Renstra OPD Kota Palu Tahun 2025-2029 lalu menjadi acuan dalam penyusunan RKPD selama periode tersebut. Berbagai program dan kegiatan

yang tercantum dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Kota Palu diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Kota Palu. Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Palu yang dilaksanakan secara berjenjang. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD Sustainable Development Goals (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2029 adalah memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Palu.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kota Palu, untuk menetapkan prioritas program-program pembangunan yang perlu dilakukan guna melaksanakan otonomi daerah dan mekanisme monitoring, serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 2) Merupakan rujukan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Palu;

- 3) Menjadi landasan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
- 4) Menjadi panduan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai pelaksanaan strategi dan arah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kota Palu disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Daerah

Bab III. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab V. Penutup

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)



An aerial night photograph of a city, featuring a large, brightly lit stadium with a green field in the center. The stadium is surrounded by dense urban development, including residential buildings and commercial structures. The city lights are visible in the background, creating a vibrant night scene.

Bab. 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Palu dapat dijelaskan dan digambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi mencakup dan dapat pula digambarkan antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%), dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tergambar dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,29	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,76
3.	Ulujadi	90,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,93
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,56
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		393,00	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2023

Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa, di mana sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, dan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;

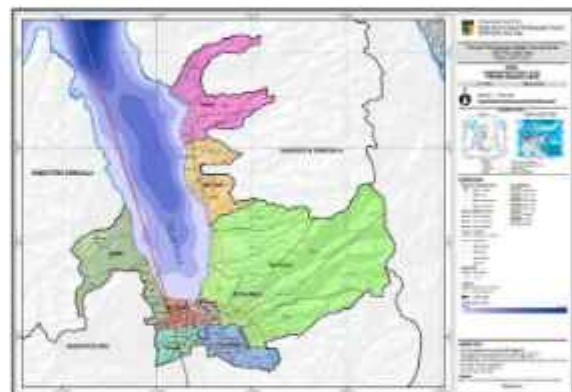
Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara 0°36" - 0°56" Lintang Selatan dan 119°45" - 121°1" Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan Zenithal atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palu

Sumber: RTRW Kota Palu, 2021-2041

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Letak kecamatan dengan sejumlah kelurahannya di Kota Palu menurut posisi pantai dijabarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu.

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
1	Palu Barat	0	1	3
2	Tatanga	0	-	0
3	Ulujadi	0	3	2
4	Palu Selatan	3	-	3
5	Palu Timur	3	1	2
6	Montikulore	0	4	3
7	Palu Utara	3	0	2
8	Tawaeli	3	4	1
Kota Palu		40	10	30

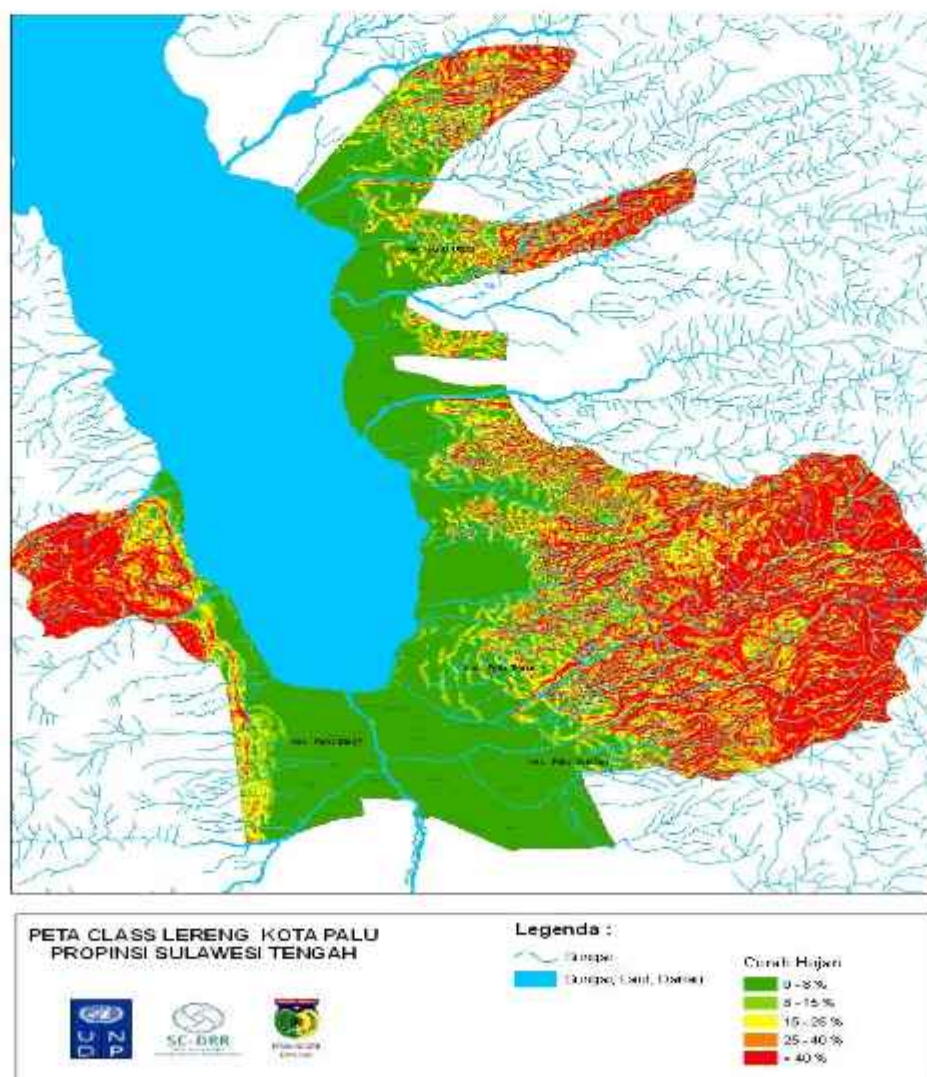
Sumber: DPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa letak Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan berada pada wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Di sisi lain, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli memiliki masing-masing lima kelurahan yang hampir semuanya berada pada pesisir pantai, 3 (tiga) kelurahan berada pada pesisir pantai dan 2 (dua) kelurahan berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat)

diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya (TAHURA).



Gambar 2.2 Peta Class Kelerengan
Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2023

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

- 1) Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya;
- 2) Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
- 3) Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll;
- 4) Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, Buluri dan Watusampu.

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu :

- 1) Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut (mdpl).
- 2) Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl).
- 3) Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Kondisi Geologi

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan alluvial dan colluvial yang berasal dari etamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah ini terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, granit, granodiorit, riolit, quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

- 1) Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini;
- 2) Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
- 3) Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini berada di utara-selatan, juga di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota Palu berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpmata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu

Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.3 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada di wilayah Kota Palu.

Tabel 2.3 Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Uluqadi	Sungai Batu Mpenata, dan Sungai Ngile
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantidoken	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Wanetela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2023

Suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu pada Tahun 2024 adalah 34,7°C terjadi pada bulan Maret. Begitu pula suhu udara minimum terjadi pada bulan yang sama di Desember yaitu sebesar 18,6°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 28°C, dan Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 24,1°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 84 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Desember yaitu 74 persen.

Rata-rata suhu udara, dan kelembabannya di Kota Palu Tahun 2024 tertera dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2024

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban (%)
	Minimum	Maximum	Rata-rata	
Januari	28,3	33,2	30	78
Februari	28,3	34,0	30,9	72
Maret	28,9	34,6	30,9	72
April	28,8	34,7	30,1	73
Mei	28,5	35,5	30,0	81
Juni	28,3	32,0	29,9	80
Juli	28,8	32,5	29,8	84
Agustus	28,8	32,2	29,8	78
September	28,3	34,5	30,0	79
Oktober	26,1	34,7	30,0	70
November	28,3	34,0	29,7	72
Desember	26,0	33,9	29,9	74

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2024 dapat dijelaskan di mana tekanan udara tertinggi tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2024 terjadi pada Bulan Februari dan Maret sebesar 1.012,7 mb, sedangkan tekanan

udara terendah terjadi pada bulan November sebesar 1010,0 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat variatif antara 3 - 4 knots. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari tiga arah mata angin yaitu Utara, Selatan, dan Timur Laut dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah Utara wilayah Kota Palu.

Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin terbanyak setiap bulan di Kota Palu Tahun 2024 terlihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023

Bulan	Tekanan Udara (mbar)	Kecepatan Angin (knot)
Januari	1012,0	4
Pebruari	1012,7	4
Maret	1011,7	4
April	1010,2	4
Mei	1010,3	3
Juni	1011,7	3
Juli	1011,4	3
Agustus	1011,8	3
September	1010,8	4
Oktober	1010,9	4
November	1010,0	4
Desember	1009,7	4
Kota Palu	1012,0	4

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2023

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2024 terjadi pada Bulan Mei yaitu 156,5 mm dan Bulan Agustus yaitu 129,0 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Februari yaitu 9,0 mm dan Bulan Desember yaitu 24,5 mm. Berikut curah hujan setiap bulan di Kota Palu Tahun 2024 tertera dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan setiap Bulan di Kota Palu, Tahun 2024

Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)	Hari Hujan (hari)
Januari	113,2	34
Pebruari	9,0	33
Maret	25,8	31
April	48,9	36
Mei	156,5	34
Juni	102,8	33
Juli	102,7	33
Agustus	129,0	30
September	95,8	34
Oktober	95,2	36
November	57,8	34
Desember	24,5	33

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman, perkotaan dan

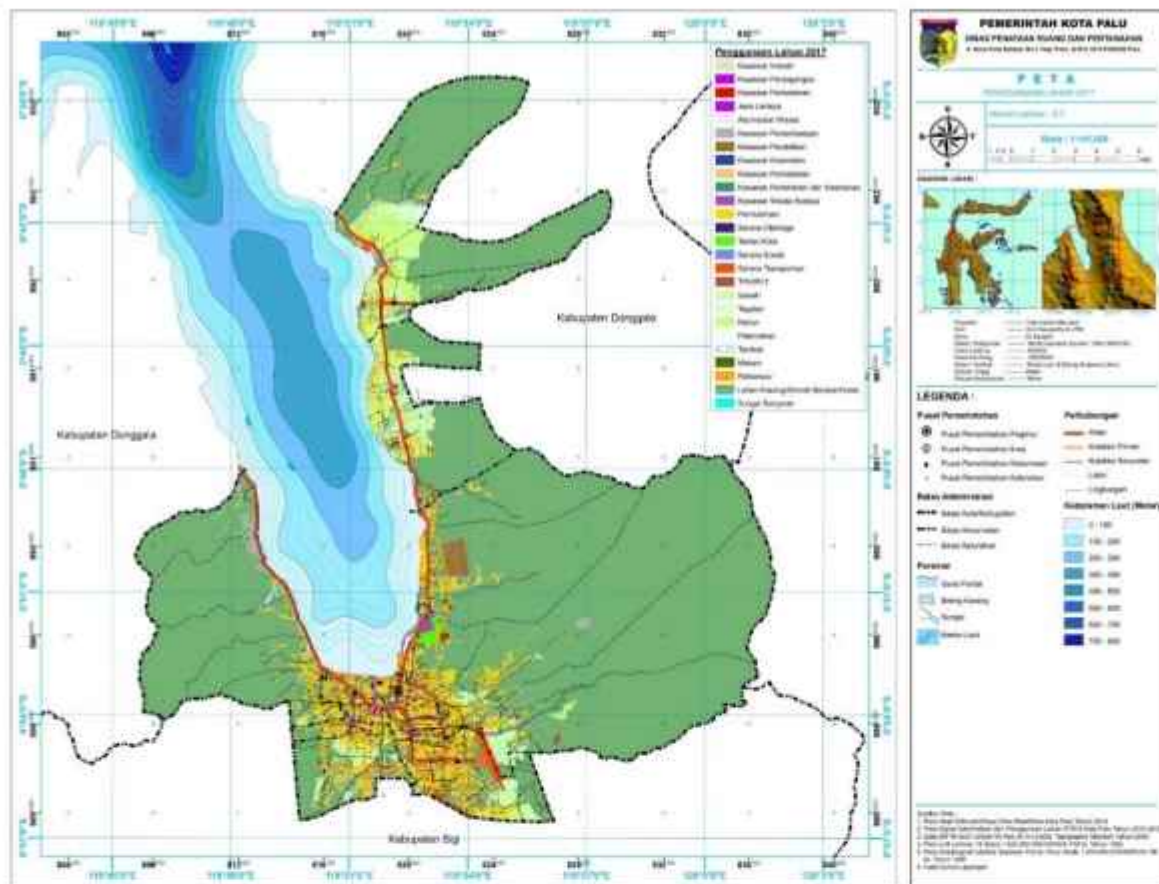
persawahan. Penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari permukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota

(makam, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Guna lahan pada kawasan budi daya Kota Palu didominasi oleh kawasan permukiman seluas 3.975,01 ha atau sebesar 10,06%. Namun secara garis besar penggunaan lahan di Kota Palu didominasi berupa lahan kosong/semak belukar/hutan seluas 30.839,85 ha atau sebesar 78,06%.

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kota Palu

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)								Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Mantiku Iore	Palu Barat	Palu Selatan	Palu Timur	Palu Utara	Tatanga	Unjaji	Tawaeli		
1	Akomodasi Wisata	2,31	2,56	2,26	7,53	1,72	0,99	4,67		22,04	0,06
2	Permukiman	969,80	397,38	883,85	354,94	274,13	491,67	368,55	234,69	3.975,01	10,06
3	Kawasan Bersejarah		1,82		0,81					2,63	0,01
4	Kawasan Industri	18,93	1,04	4,39	1,31	67,05	1,64	12,69	66,77	173,82	0,44
5	Kawasan Kesehatan	6,93	4,80	1,58	3,11	6,19	0,59	1,63	0,76	25,59	0,06
6	Kawasan Pantai Berhutan Bakau				0,94					0,94	0,00
7	Kawasan Pariwisata					9,60				9,60	0,02
8	Kawasan Pendidikan	226,25	28,47	15,38	29,01	11,41	10,16	5,91	4,12	331,01	0,81
9	Kawasan Perdagangan	78,19	93,27	90,81	102,60	12,15	34,58	5,00	22,00	438,90	1,11
10	Kawasan Peribadatan	7,10	8,75	7,06	1,57	0,76	3,44	1,76	1,34	35,08	0,09
11	Kawasan Perkantoran	50,56	11,65	21,37	55,59	3,78	0,34	1,38	6,08	153,75	0,39
12	Kawasan Portabanan dan Keamanan	4,89	0,21	15,23	21,13	4,82	1,11		0,28	47,67	0,12
13	Kawasan Pertambangan	25,82		0,83		24,91	13,51	183,39		248,48	0,63
14	Kebun	43,22		59,16		158,57			784,16	1.045,11	3,40
15	Lahan Kosong/ Semak Belukar/ Hutan	17264	146,18	522,50	6,18	1788,75	766,75	5728,21	4617,28	30.839,85	78,06
16	Lapangan Golf	32,82								32,82	0,08
17	Makam	11,81	3,33	2,38	1,35	1,43	0,62	0,88	0,89	22,69	0,06
18	Pasir Pantai	2,34			2,19	3,52			1,80	9,85	0,02
19	Pelabuhan Kecil								0,11	0,11	0,00
20	Penggarahan Talise	18,63				1,29			0,68	20,60	0,05
21	Pergudangan	16,51				4,64				21,15	0,05
22	Hutan Mangrove					0,32			2,40	2,72	0,01
23	Peternakan			8,22			1,87	0,31		10,40	0,03
24	Reklamasi	6,21	1,82					3,62		11,65	0,03
25	Ruang Kegiatan Sektor Informal	10,76	5,84	0,31	0,33			1,21		18,45	0,05
26	Ruang Terbuka Hijau	82,16	1,25	0,01	8,41		0,15		0,89	92,87	0,24
27	Sarana Olahraga	11,44	2,03	1,92	1,84	5,13	4,26	1,18	5,15	33,25	0,08
28	Sarana Sosial	0,64	3,97	5,81	0,59	0,19			0,17	11,37	0,03
29	Sarana Transportasi	39,77	0,60	101,21		4,18		0,27	35,96	182,29	0,46
30	Sawah	232,58	2,86	183,91		274,45	172,24	9,66	102,53	978,23	2,48
31	Sungai Temporer	67,17	9,71	24,34	11,94	52,14	13,02	15,73	90,87	284,92	0,72
32	Tegalan	1,13							106,37	107,50	0,27
33	TPA/IPIT	14,63								14,63	0,04
34	Jasa Lainnya		0,55		0,13		0,04			0,72	0,00
Jumlah		19.247,20	728,09	1.955,55	614,50	3.011,43	1.517,28	6.346,05	6.085,90	39.506,00	100,00



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kota Palu
Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Peran Strategis

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas :

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu

Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan New Town Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Hunatap) di Kelurahan Tondo dan Talise dengan

jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu.

- b. Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
 - c. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako (Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas, dilewati Jalan Lingkar Luar, Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Perimer K2
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Mempunyai Resiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran permukiman eksisting terjadi pemusatan pada bagian tengah, dengan tingkat kepadatan tinggi kemudian menyebar kesisi barat dan kesisi timur dengan kepadatan rendah.
 - b. Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan lingkungan lainnya.
 - c. Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatan permukiman eksisting, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat

kerawanan 3 sampai 4. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Pertanian

Kontribusi sector pertanian / perkebunan ADHB dan ADHK di Kota Palu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian di Kota Palu cenderung mengalami penurunan kontribusi. Berikut gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan di Kota palu yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak Tahun 2020 hingga 2024 tertera dalam Gambar 2.4 di bawah ini :



Gambar 2.4 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kota Palu dapat dilihat dari masing-masing tanaman pertanian dan perkebunan sebagai berikut :

a. Padi

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024 produksi padi di Kota Palu menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, produksi padi tercatat sebesar 334 ton GKG, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 764 ton, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dan mencapai puncaknya di angka 888,75 ton. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi 600,03 ton, kemungkinan karena faktor cuaca, serangan hama, atau kendala teknis pertanian. Namun pada tahun 2024, produksi kembali meningkat menjadi 831,32 ton yang menandakan adanya pemulihan.

Tabel 2.8 Produksi Padi di Kota Palu tahun 2020 – 2024 Kota Palu

Produksi Padi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Padi (tan GKG)	484	109	308,53	600,00	881,82
Produksi Padi Setara Beras (100)	601	651	354,81	354,18	490,7

Sumber/Sources: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Tahun 2024

Hal yang sama juga terjadi pada produksi beras setara beras. Dari 201 ton pada tahun 2020, terjadi lonjakan menjadi 451 ton pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 524,61 ton pada tahun 2022. Produksi menurun pada tahun 2023 menjadi 354,18 ton, namun membaik menjadi 490,70 ton pada tahun 2024. Bila dilihat dari rasio antara GKG terhadap produksi beras, rata-rata konversinya cukup stabil pada kisaran 60%–61%, yang menunjukkan efisiensi pengolahan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, tren produksi beras menunjukkan pola naik-turun yang erat kaitannya dengan faktor eksternal dan internal sektor pertanian. Namun demikian, pemulihan pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bagi potensi usahatani padi di masa mendatang, terutama apabila dukungan terhadap petani dan inovasi teknologi pertanian terus ditingkatkan

b. Palawija

Berdasarkan data produksi tanaman pangan yang diterbitkan BPS periode 2020 hingga 2024 di Kota Palu, terlihat bahwa tiga komoditas utama, yakni jagung, kacang tanah, dan ubi kayu, mengalami tren pertumbuhan yang cukup positif di awal periode. Berikut gambaran produksi tanaman palawija menurut jenis tanamannya sejak Tahun 2020-2024 di Kota Palu.

Tabel 2.9 Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Tanaman (ton), 2020-2024 Kota Palu

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jagung	1.913,2	3.253,6	3.019,2	137,4	2.709,4
Kacang Tanah	45,6	206,3	362,7	47,0	389,6
Ubi Kayu	310,9	616,8	593,5	33,7	680,4

Sumber/Sources: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan 2024

Tanaman Jagung menunjukkan peningkatan tajam dari 1.913,2 ribu ton pada 2020 menjadi 3.255,6 ribu ton pada 2021, kemudian disusul dengan angka yang masih tinggi pada 2022. Kacang tanah dan ubi kayu juga mengalami peningkatan yang konsisten selama tiga tahun pertama, mencerminkan kondisi pertanian yang cukup stabil dan produktif pada periode tersebut. Pertumbuhan tersebut dapat saja dipengaruhi oleh kebijakan pertanian yang mendukung,

kondisi cuaca yang relatif baik, dan peningkatan kegiatan budidaya.

Namun, memasuki 2023, semua komoditas mengalami penurunan produksi yang sangat drastis. Produksi jagung anjlok hingga hanya 157,4 ribu ton, kacang tanah turun hingga 47,0 ribu ton, dan ubi kayu hanya tercatat sebesar 35,7 ribu ton. Penurunan ini terjadi secara bersamaan, yang mengindikasikan adanya gangguan besar di sektor pertanian nasional. Kemungkinan penyebabnya antara lain bencana alam seperti banjir atau kekeringan ekstrem, gangguan distribusi akibat faktor ekonomi atau pandemi, kerusakan infrastruktur, dan meluasnya serangan hama dan penyakit tanaman. Tahun 2023 dapat disebut sebagai masa krisis produksi tanaman pangan di Indonesia.

Tahun 2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Produksi semua komoditas meningkat signifikan, bahkan dalam beberapa kasus melampaui capaian sebelum krisis. Jagung kembali naik menjadi 2.723,4 ribu ton, kacang tanah mencapai 389,6 ribu ton, dan singkong mencatat rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 680,4 ribu ton. Pemulihan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat tangguh dan mampu bangkit dari tekanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya pemulihan, baik yang dilakukan pemerintah, sektor swasta, maupun petani sendiri, telah berjalan efektif. Pemanfaatan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan pendampingan petani kemungkinan besar akan berperan penting dalam memulihkan produktivitas secara nasional.

c. Hortikultura

Data produksi hortikultura BPS tahun 2020 hingga 2024 di Kota Palu menunjukkan pola yang beragam pada berbagai jenis sayur dan buah. Berikut gambaran produksi hortikultura menurut tanamannya di Kota Palu Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.10 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Palu (kuintal), 2020–2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sayuran					
Bawang Merah	5.101	5.210	5.612	5.288	1.950
Cabai Rawit	2.400	6.947	9.659	3.095	6.975
Bayam	98	134	147	609	744
Tomat/Sawi	1.400	5.124	9.543	9.310,40	5.124
Tomat	8.016	9.087	9.087	9.377	7.483
Kangkung	810	505	300	470	203
Terung	151	211	145	120	38
Kacang Panjang	144	126	104	220	140
Ketimun	296	26	286	115	15
Semangka	155	112	88	18	-

Sumber/Sources: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-525/SPS Statistik Indonesia, Agricultural Statistics for Horticulture SPH-525

Produksi bawang merah terbilang stabil hingga tahun 2022, namun menurun tajam dari 5.613 ton (2022) menjadi 1.950 ton (2024), mungkin karena perubahan iklim, hama, atau menurunnya minat petani. Sebaliknya, cabai rawit menunjukkan tren positif, meningkat dari 5.405 ton (2020) hingga mencapai puncaknya di angka 9.659 ton (2022), meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 (6.975 ton), masih lebih tinggi dibanding awal periode. Tomat juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, mencapai puncaknya di angka 9.377 ton pada tahun 2023 sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Sementara itu, sawi putih merupakan satu-satunya komoditas yang terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.400 ton (2020) menjadi 5.124 ton (2024), yang mencerminkan tingginya permintaan dan efisiensi produksi. Bayam juga mengalami lonjakan besar, dari 98 ton menjadi 744 ton dalam kurun waktu lima tahun, yang menunjukkan adanya perluasan budidaya atau peningkatan konsumsi masyarakat.

Tidak semua komoditas mengalami pertumbuhan. Kangkung sempat naik pada tahun 2022, namun turun drastis menjadi 203 ton pada tahun 2024. Terung dan kacang panjang tetap pada skala kecil dan relatif stabil, tanpa perubahan signifikan. Ketimun mengalami penurunan tajam, dari 296 ton (2022) menjadi hanya 15 ton (2024), menandakan kemungkinan menurunnya minat budidaya. Yang paling mencolok adalah semangka, yang produksinya terus turun hingga nihil pada tahun 2024, menunjukkan potensi hilangnya budidaya di wilayah yang disurvei.

Tabel 2.11 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Palu (kg), 2020–2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sawi	1.400	5.124	9.543	9.310	5.124
Laos/Lengkuas	2.400	-	3.107	3.095	1.440
Kunyit	2.875	9	8.736	2.890	1.800
Kabai Buaya	110	80	240	140	240
Mahkota Dewa	-	11.870	2.140	3.400	5.400

Sumber/Sources: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura Tahun 2024

Berdasarkan data BPS mengenai produksi beberapa tanaman obat dan rempah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya mahkota signifikan yang mencerminkan dinamika sektor hortikultura Indonesia. Jahe mengalami produksi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3.639 ton, naik tajam dari 1.980 ton pada tahun 2021. Namun, produksi kemudian menurun drastis menjadi 925 ton pada tahun 2024, yang menunjukkan penurunan minat budidaya atau gangguan dalam produksi. Laos (lengkuas) juga menunjukkan tren serupa, dengan produksi tertinggi 3.787 ton pada tahun 2022, namun turun menjadi 1.440 ton pada tahun 2024. Data untuk tahun 2021 tidak tersedia, yang mungkin menandakan kendala pencatatan atau gangguan produksi.

Kunyit mencatat perubahan drastis dari hanya 3 ton pada tahun 2021 menjadi 4.754 ton pada tahun 2022, kemudian turun signifikan menjadi 1.320 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan luar biasa yang bisa disebabkan oleh perubahan pola tanam, permintaan pasar, atau dukungan program pertanian. Lidah buaya juga menunjukkan kenaikan tidak stabil, dengan puncak produksi 380 ton pada tahun 2022, namun angkanya relatif kecil dibandingkan komoditas lainnya. Sementara itu, mahkota dewa tampil mencolok dengan produksi sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar 11.670 ton, kemudian menurun tiap tahun hingga hanya 2.400 ton pada tahun 2024. Tren penurunan tajam ini patut dicermati, mengingat tanaman ini sempat melonjak drastis dalam satu tahun.

Berdasarkan data produksi tanaman hias dari tahun 2020 hingga 2024 yang dirilis oleh BPS, terlihat bahwa setiap jenis tanaman memiliki dinamika produksi yang beragam, mencerminkan penurunan minat pasar, kebijakan pertanian, serta faktor lingkungan dan ekonomi. Aglaonema menunjukkan tren relatif stabil, meskipun sempat menurun pada tahun 2022 (1.066), namun kembali meningkat pada tahun berikutnya dan tetap tinggi hingga 2024 (1.405). Sementara itu, anggrek pot mengalami fluktuasi ekstrem, dari 8.804 unit pada tahun 2020 turun tajam menjadi 1.184 pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 8.460 pada tahun 2022, dan kembali turun drastis menjadi hanya 127 pada tahun 2023. Penurunan drastis ini kemungkinan terkait dengan penurunan permintaan pasar atau gangguan distribusi.

Tabel 2.12 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman (tangkai), Tahun 2020-2024 di Kota Palu

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aglanema	1.310	1.739	1.088	1.445	1.403
Anggrek Pot	8.804	1.144	8.460	187	930
Anthurium Bangs	823	1.773	841	5.231	1.890
Gerbera	365	380	630	1.140	1.075
Heliconia	0.331	4.384	0.400	4.671	3.490
Ixora	2.885	1.711	1.673	1.280	1.010
Mawar	784	711	982	630	1.525
Melati	531	1.181	682	912	1.050
Pakis	1.301	2.056	1.600	1.391	2.350
Palem	2.885	1.381	1.314	1.270	1.265
Sedap Malam	557	1.713	1.090	1.353	1.125

Sumber/Sources: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TN Tahun 2024

Anthurium bunga menampilkan tajam pada tahun 2023 dengan produksi 5.231 unit, naik drastis dari tahun sebelumnya, meskipun kemudian turun kembali ke 1.280 pada tahun 2024. Gerbera dan heliconia menampilkan tren pertumbuhan yang relatif positif. Gerbera meningkat stabil dari 365 (2020) menjadi 1.075 (2024), menandakan adanya pertumbuhan pasar yang konsisten. Heliconia juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2021 dan 2023, masing-masing mencapai 4.384 dan 4.671 unit, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Sebaliknya, ixora menunjukkan tren menurun terus-menerus, dari 2.885 unit pada tahun 2020 menjadi hanya 1.010 pada tahun 2024.

Tanaman hias lainnya seperti mawar, melati, dan pakis juga menunjukkan pola yang menarik. Produksi mawar meningkat signifikan di 2024 mencapai 1.525, setelah sebelumnya sempat berada di bawah 800. Melati juga mengalami peningkatan dari 531 unit (2020) ke 1.050 unit (2024), menunjukkan pemulihan stabil. Pakis sempat mengalami penurunan di 2022 dan 2023, namun melonjak ke angka tertinggi 2.350 di 2024. Untuk palem dan sedap malam, tren produksinya lebih fluktuatif, palem mengalami penurunan sejak 2020 dan cenderung stagnan di angka sekitar 1.200-an di 2023–2024, sementara sedap malam mengalami peningkatan pada 2021 dan 2022, namun kembali menurun di 2024.

Tabel 2.13 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Palu (kuintal), 2020–2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buah-Buahan/Fruits					
Alpukat	308	443	330	419	854,4
Anggur	200	222	807	829	676,15
Belimbing	222	179	217	142	43
Durian		5	5	100	30
Jambu Air	203	297	210,1	226	233,55
Jambu Biji	158	154	188	92	48
Mangga	4.532	2.173	4.847	3.437	4.086,28
Nenas	3.682	1.743	1.748	0.511	1.508,23
Nanas	181	137	130	117	100,63
Pepaya	763	757	985	3.110	483
Pisang	3.134	3.884	3.008	4.334	2.077,71
Rambutan	104	83	13	139	982,1
Sawo	30	34	57	12	2
Srikak	229	138	184	304	138,24
Sukun	274	236	880	822	440,38

Sumber/Sources: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TN; Statistik Indonesia, Agricultural Statistics for Horticulture SPH-TN

Berdasarkan data produksi buah-buahan dari tahun 2020 hingga 2024 yang diterbitkan BPS, terlihat bahwa komoditas buah mengalami transmisi yang cukup mencolok, tergantung pada jenisnya. Beberapa buah seperti alpukat, anggur, dan mangga menunjukkan tren kenaikan yang stabil, sedangkan lainnya seperti belimbing, jambu biji, dan sawo mengalami penurunan signifikan.

Alpukat mengalami peningkatan produksi yang konsisten dari 308 ton pada tahun 2020 menjadi 854,4 ton pada tahun 2024. Demikian pula anggur, yang naik dari 200 ton pada tahun 2020 menjadi 676,15 ton pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan permintaan dan perluasan budidaya. Mangga juga menunjukkan performa kuat dengan ketinggian ringan namun tetap dalam skala tinggi, dari 4.532 ton pada tahun 2020 hingga mencapai 4.086,28 ton pada tahun 2024, menjadikannya salah satu komoditas unggulan. Jambu air dan pepaya mengalami peningkatan tajam pada tahun 2023, namun menurun kembali pada tahun 2024, menandakan kemungkinan tidak adanya penayangan produksi musiman atau program budidaya sementara.

Komoditas seperti belimbing, jambu biji, dan sawo mengalami penurunan drastis. Belimbing misalnya turun dari 222 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 43 ton pada tahun 2024. Jambu biji pun menurun dari 158 ton menjadi 48 ton dalam lima tahun. Hal serupa terjadi pada sawo, yang terus menyusut hingga hanya 5 ton pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya minat pasar, pergeseran pola tanam, atau keterbatasan lahan. Durian, meskipun awalnya tidak tercatat pada tahun 2020, meningkat hingga 100 ton pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024.

Buah-buahan seperti pisang, nangka, dan sukun menunjukkan penampilan yang tajam. Produksi pisang naik dari 3.138 ton (2020) menjadi 4.224 ton (2023), lalu turun menjadi 2.077,71 ton pada tahun 2024. Nangka sempat anjlok pada tahun 2021–2022, namun melonjak ke 5.351 ton pada tahun 2023 sebelum kembali turun drastis di tahun 2024. Rambutan justru menunjukkan angka yang signifikan, dari hanya 12 ton pada tahun 2022 menjadi 262,1 ton pada tahun 2024. Buah lainnya seperti nanas dan sirsak cenderung menurun, sementara sukun mengalami peningkatan cukup stabil hingga mencapai 469,36 ton pada tahun 2024.

Perkebunan

Sektor perkebunan adalah salah satu fondasi ekonomi agraris yang memainkan peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam konteks ketahanan ekonomi lokal, diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, dan pelestarian ekosistem lahan kering. Dinamika produksi perkebunan mencerminkan interaksi kompleks antara faktor klimatologis, teknologi budidaya, pengelolaan lahan, kondisi pasar, dan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, analisis tren produksi komoditas perkebunan menjadi instrumen penting untuk memahami transformasi struktural sektor agraris dan merancang strategi pembangunan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan dinamika ekonomi.

Tabel 2.14 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (Ton), Tahun 2020-2024 di Kota Palu

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	977.31	270.06	230.63	148.99	134.20
Kakao	32.99	32.17	39.35	9.00	6.74
Jambu Mele	1.44	1.46	1.40	1.00	2.00
Kemiri	10.00	12.30	12.80	8.85	30.32
Cengkeh	0.55	0.52	0.70	0.23	1.37

Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2025

Secara keseluruhan, sektor perkebunan di Kota Palu telah mengalami kontraksi signifikan selama periode 2020-2024, yang dipicu terutama oleh penurunan drastis dalam produksi komoditas utama. Total produksi semua jenis tanaman perkebunan menurun dari 345,27 ton pada 2020 menjadi 175,03 ton pada 2024, menunjukkan kontraksi sekitar 49,3% selama periode ini. Pola penurunan ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh sektor perkebunan, yang mungkin terkait dengan degradasi lahan, perubahan iklim, konversi

lahan, atau pergeseran orientasi ekonomi masyarakat dari pertanian tradisional ke sektor lainnya.

Cokelat, sebagai komoditas perkebunan terbesar kedua, menunjukkan volatilitas yang ekstrem dengan pola penurunan yang lebih dramatis. Produksi cokelat berfluktuasi dari 55,99 ton pada tahun 2020, menurun menjadi 39,92 ton pada tahun 2022, kemudian jatuh drastis menjadi 4,00 ton pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit pemulihan menjadi 6,74 ton pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya guncangan yang sangat signifikan dalam sistem budidaya cokelat, yang mungkin disebabkan oleh faktor klimatologi ekstrem, serangan hama dan penyakit, atau masalah teknis dalam pengelolaan perkebunan. Volatilitas ini dalam cokelat mencerminkan kerentanan komoditas perkebunan terhadap guncangan eksternal dan pentingnya diversifikasi risiko dalam pengembangan sektor Perkebunan.

Sebaliknya, kemiri menunjukkan dinamika yang kontras dengan pertumbuhan yang fluktuatif tetapi diakhiri dengan lonjakan yang signifikan. Produksi kemiri berfluktuasi dari 10,00 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 13,60 ton pada tahun 2022, menurun menjadi 8,95 ton pada tahun 2023, dan kemudian melonjak drastis menjadi 30,52 ton pada tahun 2024. Pola pertumbuhan eksponensial di tahun terakhir ini menunjukkan adanya investasi atau inovasi dalam budidaya kemiri, yang mungkin terkait dengan meningkatnya permintaan pasar, adopsi teknologi budidaya yang lebih efektif, atau perluasan area tanam yang signifikan.

Komoditas minor seperti kacang mete dan cengkeh menunjukkan kontribusi yang relatif kecil tetapi dengan pola pertumbuhan yang beragam. Kacang mete mempertahankan tingkat produksi yang stabil dalam kisaran 1-2 ton dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024, sementara cengkeh menunjukkan volatilitas tinggi dengan produksi yang sangat rendah tetapi mengalami peningkatan signifikan dari 0,23 ton pada tahun 2023 menjadi 1,57 ton pada tahun 2024. Meskipun kontribusi numerik dari kedua komoditas tersebut relatif minimal, pola pertumbuhan positif di akhir periode menunjukkan potensi untuk mendiversifikasi komoditas perkebunan sebagai strategi mitigasi risiko.

Peternakan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mengenai jumlah hewan ternak dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan perubahan populasi, pola konsumsi masyarakat, serta potensi dalam budidaya ternak. Berikut gambaran populasi ternak di Kota Palu :

Tabel 2.15 Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor), 2020 – 2024 Kota Palu

Jenis Hewan Ternak	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Besar					
Sapi	6.300	7.309	7.067	6.279	6.305
Kuda	295	311	289	295	330
Ternak Sedang					
Kambing	20.972	21.276	21.306	18.245	20.493
Domba	4.218	5.261	5.261	4.229	4.865
Ternak Kecil					
Ayam Pedaging	-	8.000.700	8.440.349	846.731	810.000
Ayam Petelur	-	290.824	231.424	245.235	243.222
Ayam Buras	121.883	104.434	107.405	111.246	144.189
Itik/bebek	10.850	7.300	6.138	6.383	6.338

Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2023

Ternak besar seperti sapi relatif stabil di kisaran 6.000–7.500 ekor. Populasi sapi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 7.567 ekor, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 6.279 ekor pada tahun 2023 dan hanya sedikit naik menjadi 6.305 ekor pada tahun 2024. Kuda, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil, menunjukkan tren meningkat dari 295 ekor (2020) menjadi 330 ekor (2024), stabilitas dan mungkin peningkatan minat terhadap ternak non-konsumsi.

Ternak sedang, yaitu kambing dan domba, jumlah populasi tergolong besar. Kambing sempat naik dari 20.972 ekor di 2020 menjadi 21.306 ekor di 2022, lalu menurun cukup tajam pada 2023 (18.245) sebelum naik kembali ke 20.493 ekor di 2024. Domba menunjukkan tren yang lebih stabil, meski mengalami penurunan dari 5.261 ekor (2022) menjadi 4.529 ekor (2023), dan sedikit naik ke 4.865 pada tahun berikutnya. Penurunan di tahun 2023 bisa mengindikasikan adanya faktor eksternal, seperti penyakit ternak atau kondisi ekonomi peternak yang menurun.

Ternak kecil, terdapat fluktuasi yang sangat mencolok. Ayam pedaging, yang tidak tercatat pada 2020, mencatat angka sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022 (di atas 4 juta ekor), tetapi anjlok drastis pada 2023 menjadi hanya 846.731 ekor dan hanya sedikit naik di 2024. Ini menunjukkan gangguan besar dalam produksi ayam broiler yang mungkin disebabkan oleh

harga pakan, wabah penyakit, atau masalah distribusi. Ayam petelur cenderung stabil dari 2021 hingga 2024 di kisaran 240–251 ribu ekor. Sementara itu, ayam buras justru menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari 121.883 (2020) menjadi 144.189 ekor pada 2024, menandakan pertumbuhan di sektor unggas lokal. Itik atau bebek mengalami penurunan dari 10.850 ekor (2020) menjadi sekitar 6.300 ekor dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan tren menurun yang cukup signifikan.

Perikanan

a. Produksi Perikanan Laut

Sektor perikanan laut adalah salah satu pilar ekonomi maritim yang memainkan peran strategis dalam pengembangan daerah pesisir, khususnya dalam konteks ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas nelayan. Dinamika produksi perikanan laut di suatu daerah mencerminkan interaksi kompleks antara faktor-faktor ekologi, teknologi penangkapan ikan, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan pembangunan di sektor kelautan.

Tabel 2.16 Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan (Ton), Tahun 2020-2024 Kota Palu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
i	ii	iii	iv	v	vi
Palu Barat	174,8	196,3	371	579,1	907,4
Unjaji	236,5	257,0	341,9	298,7	237,8
Mantikulore	307,7	341,5	349	530,1	879,1
Palu Utara	179,5	197,0	333,1	248,8	356,2
Tawaeli	201,0	228,4	453,1	436,5	418,2
Kota Palu	985,6	997,20	1.119	1.885	2.078,5

Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2023

Dalam konteks Kota Palu sebagai salah satu kota pesisir di Sulawesi Tengah, pengembangan produksi perikanan laut selama periode 2020-2024 menunjukkan transformasi signifikan dengan karakteristik pertumbuhan yang beragam di setiap kecamatan. Secara keseluruhan, produksi perikanan laut di Kota Palu mengalami pertumbuhan yang konsisten dan substansial selama periode lima tahun tersebut. Total produksi untuk seluruh kota meningkat dari 985,6 ton pada tahun 2020 menjadi 2.078,5 ton pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan lebih dari dua kali lipat atau sekitar 111% selama periode ini. Pertumbuhan yang paling dramatis terjadi antara tahun 2022 dan 2023, di mana terjadi lonjakan produksi dari 1.119 ton menjadi 1.885 ton, menunjukkan percepatan signifikan dalam

aktivitas penangkapan ikan dan pengembangan sektor perikanan laut.

Dari perspektif spasial, Kecamatan Mantikulore menunjukkan dinamika yang paling mencolok dalam produksi perikanan laut. Wilayah ini telah mengalami fluktuasi produksi yang cukup ekstrem, dimulai dari 207,7 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 344 ton pada tahun 2022, kemudian meningkat drastis menjadi 552,1 ton pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya di 679,1 ton pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan transformasi yang sangat signifikan dalam aktivitas perikanan laut di wilayah Mantikulore, yang mungkin mencerminkan modernisasi armada penangkapan ikan, perluasan area tangkapan, atau peningkatan kapasitas nelayan lokal. Kecamatan Palu Barat dan Tawaeli menunjukkan pola pertumbuhan produksi perikanan yang relatif stabil dan konsisten. Palu Barat berkembang dari 174,6 ton pada tahun 2020 menjadi 407,4 ton pada tahun 2024, sementara Tawaeli tumbuh dari 201,0 ton menjadi 418,2 ton dalam periode yang sama. Kedua kecamatan ini menunjukkan tren pertumbuhan produksi yang dapat diprediksi tanpa fluktuasi yang ekstrem, mengindikasikan pengembangan sektor perikanan yang terencana dan berkelanjutan dengan peningkatan kapasitas penangkapan yang gradual.

Sebaliknya, Kecamatan Ulujadi dan Palu Utara menunjukkan pola produksi yang lebih kompleks dengan adanya periode penurunan hasil tangkapan. Ulujadi mengalami puncak produksi pada tahun 2022 dengan 381,4 ton, namun kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 226,7 ton sebelum sedikit pulih menjadi 237,6 ton pada tahun 2024. Demikian pula, Palu Utara mencapai puncak produksi pada tahun 2022 dengan 334,1 ton, turun menjadi 268,6 ton pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 336,2 ton pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya tantangan dalam aktivitas perikanan laut di kedua wilayah tersebut, yang mungkin disebabkan oleh faktor oseanografi, perubahan pola migrasi ikan, degradasi lingkungan laut, atau tantangan teknis dalam operasional penangkapan.

b. Produksi Perikanan Darat

Perikanan darat merupakan komponen integral dari sistem pangan lokal yang berperan penting dalam mendiversifikasi produksi perikanan dan

memastikan keamanan pangan bagi komunitas perkotaan. Berbeda dengan perikanan laut yang bergantung pada kondisi oseanografi dan teknologi penangkapan ikan, perikanan darat lebih dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, sistem irigasi, teknologi budidaya ikan, dan pengelolaan sumber daya air tawar. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan kota-kota pesisir, pengembangan perikanan darat menjadi alternatif strategis untuk mengurangi tekanan pada sumber daya laut sekaligus meningkatkan produktivitas keseluruhan sektor perikanan.

Tabel 2.17 Produksi Perikanan Darat Menurut Kecamatan (Ton) Tahun , 2020-2024 Kota Palu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Palu Barat	0,5	7,21	2,06	0,35	0,69
Tanaga	29,21	29,24	29,4	29,96	29,61
Ulujadi	20,82	37,12	34,91	22,02	20,34
Palu Selatan	10,21	21,20	30,12	42,22	40,02
Palu Timur	1,16	1,20	0,91	1,02	0,55
Mantikulore	5,22	7,14	7,30	6,42	6,01
Palu Utara	6,21	4,45	6,01	3,12	6,22
Tawaeli	27,02	4,24	5,52	3,22	3,22
Kota Palu	119,41	117,70	124,22	127,12	121,71

Sumber/Sources: Dinas Pertanian dan Kelautan Pangan Kota Palu 2025

Secara keseluruhan, produksi perikanan air tawar di Kota Palu menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat tetapi konsisten selama periode 2020-2024. Total produksi meningkat dari 119,41 ton pada tahun 2020 menjadi 131,71 ton pada tahun 2024, menandakan pertumbuhan sekitar 10,3% atau rata-rata 2,5% per tahun. Pola pertumbuhan ini relatif stabil tanpa fluktuasi ekstrem, mencerminkan karakteristik perikanan air tawar yang lebih terkontrol dibandingkan dengan perikanan laut. Meskipun terjadi penurunan sedikit pada tahun 2021 menjadi 117,70 ton, produksi kemudian pulih dan menunjukkan tren naik hingga tahun 2024.

Dari perspektif distribusi spasial, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam kontribusi produksi perikanan air tawar di antara kecamatan. Kecamatan Palu Selatan menunjukkan dinamika pertumbuhan yang paling mengesankan, dengan produksi meningkat secara konsisten dari 10,31 ton pada tahun 2020 menjadi 46,65 ton pada tahun 2024, yang merupakan pertumbuhan lebih dari empat kali lipat. Pola pertumbuhan eksponensial ini menunjukkan adanya investasi substansial dalam pengembangan infrastruktur perikanan air tawar, adopsi teknologi budidaya modern, atau ekspansi signifikan area budidaya perikanan di daerah tersebut.

Potensi Sumber Daya Wisata

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi, dan juga wisata pengetahuan dan pendidikan kebencanaan.

Pembangunan Kepariwisata Kota Palu menggunakan Konsep Geowisata berbasis 5 Bentang Alam yang spesifik sebagai kota 5 (lima) dimensi (Teluk, Sungai, Lembah, Bukit, dan Pegunungan), serta ekologis dan sosial-budaya, didukung oleh daya tarik wisata buatan yang moderen dan harmoni. Konsep ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki masyarakat, dan lingkungan Kota Palu. Keberadaan Konsep wisata alam berkelanjutan ditopang prinsip konservasi dan pemberdayaan tersebut merupakan pengejawantahan dari kebijakan pemerintah secara kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan peka terhadap potensi lingkungan sekitar.

Pengembangan pariwisata sebagai hal tersebut terutama dalam pemanfaatan kawasan sempadan sesar Palu Koro dan Kawasan Segi Tiga Sejarah Kebencana Kota Palu atau Segi Tiga Geo Koro meliputi kawasan Pesir Teluk Palu - Area Nalodo (likuefaksi) Balaroa - Area Nalodo (likuefaksi) Petobo. Pengembangan konsep kepariwisataan Kota Palu mengambil tema besar sebagai Kota Wisata Dunia yang dikembangkan dengan Konsep Geopark City atau Kota Taman bumi yang berkelanjutan. Palu sebagai Kota Taman Bumi menunjukkan nilai tambah yang dapat diperoleh para pengunjung dalam melakukan kegiatan Pariwisata di Kota Palu. Berikut potensi wisata geopark Kota Palu yang dapat dikembangkan dengan konsep Palu Geopark City :

- 1) Kawasan Sempadan Sesar Palu Koro Merupakan Lokasi Utama Geowisata Taman Bumi PASIGALA. Sesar Palu Koro adalah sesar aktif yang berperan signifikan dalam dinamika geologi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (PASIGALA). Aktivitas sesar ini menjadi penyebab utama terjadinya gempa bumi besar pada 28 September 2018, yang membawa dampak luar biasa di Kawasan PASIGALA. Berwisata di sempadan Sesar Palu Koro meningkatkan pengetahuan kebumian dan kebencanaan.

- 2) Kawasan Eks Area Tsunami Teluk Palu. Kawasan ini meninggalkan jejak sejarah terjadinya tsunami pada tanggal 28 September 2018 berupa situs-situs kebencanaan seperti eks jembatan Palu 4 atau jembatan kuning, mesjid terapung, dan situs-situs bencana seperti kawasan dan bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa dan tsunami di pesisir Teluk Palu. Eks Area Tsunami Teluk Palu bersama dengan Eks Area Likuefaksi Balaroa dan Eks Area Likefaksi Petobo merupakan Kawasan Segi Tiga Sejarah Kebencanaan Kota Palu atau Kawasan Segi Tiga Geokoro.
- 3) Kawasan Eks Area Likuefaksi Balaroa dan Eks Area Likefaksi Petobo bukan hanya merupakan area yang terdampak bencana, tetapi juga memiliki potensi untuk edukasi, penelitian, dan pengembangan wisata. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menjadi lokasi yang menarik untuk belajar tentang geologi dan mitigasi bencana. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk mewujudkan potensi ini secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan destinasi geopark city dalam RIPPARKOT telah ditetapkan perencanaan peningkatan kualitas destinasi geopark melalui pembuatan menara geopark di lima KPP, pembangunan Palu River Front City, penataan dan pembangunan geopark: Taman Teluk, Taman Sungai, Taman Lembah, Taman Bukit dan Taman Pegunungan (Taman Lima Dimensi), dan pembuatan studio alam Palu (KPP Bukit dan KPP Pegunungan).

Visi Pembangunan Kepariwisata Kota Palu berdasarkan Ripparkot Palu adalah "Terwujudnya Kota Palu sebagai Kota Wisata Dunia melalui pengembangan Taman Bumi Lima Dimensi yang Berkelanjutan, Tangguh, Dikelola secara Profesional Berbasis Kekayaan Budaya dan Kelestarian Lingkungan yang Dihuni oleh Masyarakat Pariwisata yang Religius".

Daya Tarik Objek Wisata di Kota Palu dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.18 Daya Tarik Alam untuk Berwisata di Kota Palu

Kode	Jenis Wisata	No	Nama Objek	Kelurahan	Kawasan (Bentang Alam/Kelompok)
Kecamatan Tawaeli					
1.I	Kawasan Wisata Alam	1	Danau Sibili	Pantoloan	Lembah
		2	Liku - Agrowisata - Tempat Permandian Magau Dusu (Mariana) Pandina Kota - Areal Perkemahan Janedo	Lambara	Bukit
1.V	Kawasan Wisata Bahari	3	Mina Bahari	Pantoloan, Panau, Baiya	Teluk dan Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	4	Pesisir Teluk Palu	Pantoloan, Panau, Baiya	Teluk
Kecamatan Palu Utara					
1.V	Kawasan Wisata Bahari	5	Mina Bahari	Kayumalue Pajeko, Taipa	Teluk dan Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	6	Pesisir Teluk Palu	Mamboro, Taipa, Kayumalue Pajeko	Teluk
Kecamatan Mantikulore					
1.I	Kawasan Wisata Alam	7	Hutan Kota Kaombona	Talise	Lembah dan Bukit
		8	Hutan Uwentumbu	Kawatuna	Bukit
1.V	Kawasan Wisata Bahari	9	Pantai Talise	Talise	Teluk dan Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	10	Pesisir Teluk Palu	Talise, Tondo, Layana Indah	Teluk

Lanjutan Tabel 2.18 Daya Tarik Alam untuk Berwisata di Kota Palu

Kode	Jenis Wisata	No	Nama Objek	Kelurahan	Kawasan (Bentang Alam/Kelompok)
Kecamatan Palu Timur					
1.V	Kawasan Wisata Bahari	11	Pantai Besusu	Besusu Barat	Teluk dan Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	12	Pesisir Teluk Palu	Besusu Barat	Teluk
Kecamatan Palu Selatan					
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	13	Area Nalodo (likuefaksi) Petobo	Petobo	Bukit
Kecamatan Tatanga					
2.II	Kawasan Sempadan Sesar	14	Sesar Palu-Koro	Duyu, Bayaoge, Pengawu	Lembah
		15		Palupi	Bukit
Kecamatan Palu Barat					
1.V	Kawasan Wisata Bahari	16	Pantai Lere	Lere	Teluk dan Lembah
2.II	Kawasan Sempadan Sesar	17	Sesar Palu-Koro	Lere	Teluk dan Lembah
		18		Kamonji, Donggala Kodi	Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	19	Pesisir Teluk Palu	Lere	Lembah
		20	Area Nalodo (likuefaksi) Balaroa	Balaroa	Lembah dan Bukit
Kecamatan Ulujadi					
1.I	Kawasan Wisata Alam	21	Bukit Selenia	Buluri	Pegunungan
1.V	Kawasan Wisata Bahari	22	Pantai Silae	Silae	Teluk dan Lembah
2.III	Kawasan Segitiga Geo Koro	23	Pesisir Teluk Palu	Watusampu, Buluri, Tipo, Silae	Teluk

Sumber: Ripparkot Palu, 2022 dan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 431/1136/Parwisata/2022 tentang Destinasi Pariwisata Kota Palu

Tabel 2.19 Daya Tarik Budaya untuk Berwisata di Kota Palu

Kode	Jenis Wisata	No	Nama Objek	Kelurahan	Kawasan (Be Alam/Kelora
Kecamatan Tawaeli					
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	1	Makam Lovengau (Raja Lembah Panau)	Panau	Lembah
		2	Makam Bulagigi (Daeng Konda/Pue Bulangisi) Penyiar Agama Islam Pertama di Tawaeli	Panau	Lembah
Kecamatan Mantikulore					
1. III	Kawasan Wisata Religi	3	Kawasan Pura Hindu	Talise	Lembah dan E
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	4	Makam Pue Mpoluku	Poboya	Bukit
Kecamatan Palu Timur					
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	5	Makam Pue Nggari	Besusu Barat	Lembah
1. X	Kawasan Wisata Sejarah	6	Gedung Juang	Lolu Utara	Lembah
Kecamatan Palu Selatan					
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	7	Makam Pue Lasatande Dunia	Petobo	Bukit
Kecamatan Tatanga					
1. III	Kawasan Wisata Religi	8	Kawasan Wihara Budha	Nunu	Lembah
Kecamatan Palu Barat					
1. III	Kawasan Wisata Religi	9	Kawasan Religi Sis Aljufri	Siranindi	Lembah
		10	Kawasan Religi Masjid JAMI	Baru	Lembah
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	11	Makam Dato Karama	Lere	Lembah
		12	Makam Guru Tua	Siranindi	Lembah
1. IX	Kawasan Wisata Cagar Budaya	13	Banua Oge	Lere	Lembah
Kecamatan Ulujadi					
1. IV	Wisata Situs Makam Religi	14	Makam Pue Njidi	Kabonena	Bukit
1. VIII	Kawasan Wisata Budaya	15	Lingkungan Salena	Buluri	Pegunungan

Tabel 2.20 Daya Tarik Buatan untuk Berwisata di Kota Palu

Kode	Jenis Wisata	No	Nama Objek	Kelurahan	Kawasan (Bentang Alam/Kelompok)
Kecamatan Mantikulore					
1.II	Taman Rekreasi	1	Taman Vatulemo	Tanamodindi	Lembah
1.VI	Kawasan Wisata Kuliner	2	Wisata Kuliner Hutan Kota Kaombona	Talise	Lembah dan Bukit
Kecamatan Palu Timur					
1.II	Taman Rekreasi	3	Taman GOR	Besusu Tengah	Lembah
		4	Taman Nasional	Lolu Utara	Lembah
		5	Tugu Sambulu	Lolu Utara	Lembah
1.VI	Kawasan Wisata Kuliner	6	Wisata Kuliner Bantaran Sungai	Besusu Barat, Lolu Utara	Sungai dan Lembah
Kecamatan Palu Selatan					
1.II	Taman Rekreasi	7	Taman Doyata	Petobo	Lembah dan Bukit
Kecamatan Tatanga					
1.II	Taman Rekreasi	8	Tugu Songgolangi	Palupi	Lembah
1.VI	Kawasan Wisata Kuliner	9	Wisata Kuliner Jembatan Lalove	Nunu	Sungai dan Lembah
1.VII	Kawasan Agro Wisata	10	Kebun Anggur	Duyu	Bukit
Kecamatan Palu Barat					
1.II	Taman Rekreasi	11	Taman Lasoso	Lere	Lembah
1.VI	Kawasan Wisata Kuliner	12	Wisata Kuliner Pasar Bambaru	Baru	Lembah
		13	Wisata Kuliner Pasar Manonda	Kamonji	Lembah
Kecamatan Ulujadi					
1.VII	Kawasan Agro Wisata	14	Budi Daya Ikan	Kabonena	Lembah
		15	Budi Daya Ikan Lekatu	Tipo	Bukit

Sumber: Ripparkot Palu, 2022 dan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 431/1136/Pariwisata/2022 tentang Destinasi Pariwisata Kota Palu

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kota Palu 2025-2029, berikut ini diuraikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup Kota Palu

Daya Dukung Penyedia Air

Di Kota Palu, proporsi daya dukung indikator berbasis jasa ekosistem penyediaan air didominasi kategori sedang hingga sangat tinggi, yakni hampir 60% dari total luas jasa penyedia air di Kota Palu. Perhitungan daya dukung air menggunakan asumsi ketersediaan air tetap disertai peningkatan kebutuhan karena jumlah penduduk dan pemanfaatannya meningkat. Selain itu, sebaran penduduk yang bervariasi di setiap kecamatan juga

mempengaruhi jumlah kebutuhan air. Kondisi ini dinilai baik. Kendala utama adalah distribusi air bersih. Apalagi setelah terjadi gempa bumi, bahkan hingga saat ini, distribusi air bersih masih menjadi masalah.



Gambar 2.5 Persentase Luas dan Distribusi Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih di Setiap Kecamatan Kota Palu

Sumber: KLHS RPJMD Kota Palu, 2025-2029

Gambar di atas dan Tabel berikut memperlihatkan sebaran jasa lingkungan penyedia air di Kota Palu

Tabel 2.21 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu (Ha)

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Mantikulore	878,18	5.348,04	2.330,99	7.696,99	6,89	18.711,10
Palu Barat	16,33	360,19	221,86	38,46	0,87	617,91
Palu Selatan	1,10	716,87	379,29	480,69	6,37	2.099,81
Palu Timur	7,90	484,18	813,15	64,89	0,81	867,00
Palu Utara	294,117	300,04	1.130,34	407,14	1,39	2.033,14
Tatanga	0,00	145,88	796,82	301,08	3,88	1.277,80
Tawaeli	62,44	1.690,82	1.018,82	1.223,87	7,70	4.875,82
Ulujadi	144,19	1.151,28	123,85	1.269,61	3,89	4.193,21
Jumlah	1.477,95	9.235,67	5.782,92	10.300,29	23,63	26.820,46

Sumber: KLHS RPJMD Kota Palu, 2023-2029

Data yang disajikan di atas menunjukkan status penyediaan air bersih di Kota Palu di dominasi kondisi sedang dan rendah terutama pada Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur dan Palu

Barat. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Palu, dimana jumlah penduduk menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan kebutuhan dan ambang batas air di suatu wilayah. Data kebutuhan dan status air di Kota Palu untuk setiap kecamatan dianalisis menggunakan data penduduk yang diproyeksikan dari tahun 2023-2045 kemudian dikalikan dengan standar kebutuhan air perkapita yaitu 1600 m3/tahun berdasarkan Permen LH Nomor 17 tahun 2009 tentang Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Berikut disajikan jumlah kebutuhan air di Kota Palu berdasarkan Kecamatan dalam kurung waktu 2023-2053.

Tabel 2.22 Kebutuhan, Ketersediaan dan Ambang Batas Air Kota Palu Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Kebutuhan Air (Jumlah Penduduk x 1600 m ³						Ketersediaan Air	Ambang
	2023	2028	2033	2038	2043	2048		
Palu Barat	109.780.386	116.986.783	125.883.144	133.095.304	140.812.523	150.066.963	167.776.095	639.822.463
Tatanga	70.146.777	73.723.914	81.797.493	88.248.280	95.290.710	102.842.650	111.021.704	142.464.343
Ulujadi	88.728.578	92.839.863	96.887.238	91.434.350	86.368.219	71.895.354	77.456.560	311.712.467
Palu Selatan	123.647.370	133.349.423	145.812.763	155.097.113	167.286.894	180.391.363	194.546.560	92.592.439
Palu Timur	125.113.912	124.547.171	143.337.630	156.644.193	168.330.337	181.364.344	198.120.307	42.103.437
Mantikulore	111.813.702	103.436.478	119.520.721	130.512.876	113.933.601	106.476.263	117.013.339	230.581.338
Palu Utara	40.653.668	43.688.804	47.931.313	51.069.441	55.102.798	59.454.702	64.150.310	70.252.874
Tawaeli	36.295.348	39.188.383	42.203.444	45.005.994	48.212.881	53.108.040	57.203.024	72.888.877

Laporan KLHS RPJMD Kota Palu, 2023-2029

Keterangan : * Ketersediaan air dianggap statis/tetap diperoleh dari analisis debit air limpasan permukaan dari DAS yang ada disekitar kota Palu\

* Tutupan lahan dianggap statis/tetap

Jumlah kebutuhan air per kecamatan yang tersaji pada di atas menunjukkan nilai yang terus meningkat, hal ini tentu sejalan dengan jumlah pengguna yaitu penduduk dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Lebih lanjut berdasarkan tabel diatas menampilkan ambang batas penggunaan air bersih, data tersebut diperoleh dari perhitungan antara jumlah ketersediaan air dibagi dengan kebutuhan yaitu 1.600 m3/kapita/tahun, dimana ambang batas air untuk setiap kecamatan menunjukkan nilai yang berbeda-beda tergantung jumlah ketersediaan air dan besarnya jumlah penduduk sebagai pembagi. Data di atas kemudian juga dijadikan acuan untuk menentukan status ketersediaan air menurut kecamatan di Kota Palu dalam kurung waktu 2023-2053 dengan mengurangi ketersediaan air bersih dengan jumlah kebutuhan.

Berikut disajikan hasil perhitungan status daya dukung air dalam kurung waktu 2023-2053 menurut kecamatan di Kota Palu.

Tabel 2.23 Status Daya Dukung Air di Kota Palu Berdasarkan Kecamatan 2023-2053

Kecamatan	Status Daya Dukung Air						
	2023	2028	2033	2038	2043	2048	2053
Palu Barat	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
Tatanga	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
Ulujadi	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
Palu Selatan	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit
Palu Timur	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit
Mantikulore	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
Palu Utara	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus
Tawaeli	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: KLHS RPJMD Kota Palu, 2023-2029

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan bahwa status daya dukung air untuk kecamatan Palu Barat, Tatanga, Ulujadi, Mantikulore, Palu Utara dan Tawaeli berstatus surplus 2023-2053, sedangkan di kecamatan Palu Selatan dan Palu Timur berstatus devisit. Diperlukan langkah-langkah konkrit dari Pemerintah Kota Palu kedepanya terkait status daya dukung air di Kecamatan Palu Selatan dan Palu Timur yang berstatus devisit seperti peningkatan sarana perpipaan dari PDAM atau penguraian kepadatan penduduk melalui perizinan pembangunan hunian di dua kecamatan tersebut.

Daya Dukung Pangan

Nilai kebutuhan pangan dihitung dalam satuan energi atau kalori dari bahan pangan yang

dikonsumsi oleh setiap individu dari penduduk kota Palu berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022 dibuat suatu prakiraan jumlah kebutuhan pangan di kota Palu yaitu dengan cara, jumlah jiwa penduduk pada setiap kecamatan, dikalikan dengan Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150/orang/hari yang kemudian dikonversi dalam satuan waktu setahun. Kebutuhan bahan pangan Kota Palu Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.24 Kebutuhan Pangan Kota Palu Tahun 2022

No	Kecamatan	Populasi 2022	Kebutuhan Pangan per Tahun (Populasi AKE 2.150)
1	Mantikulore	81032,00	63.589.862.000
2	Palu barat	47118,00	36.972.850.500
3	Palu selatan	74481,00	58.448.964.750
4	Palu timur	44021,00	34.545.479.750
5	Palu utara	25431,00	19.956.977.250
6	Tatanga	55093,00	43.234.231.750
7	Tawaeli	23521,00	18.458.104.750
8	Ulujadi	36796,00	28.875.661.000
Total		387.493	304.085.131.750

Sumber : Dokumen Data Dukung Pangan Kota Palu, 2025.

Pemantauan ketersediaan (Supply) dan permintaan (demand) merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah daya dukung penyediaan pangan tercapai atau tidak, yang dapat dihitung dengan mengurangi nilai potensi pangan dengan kebutuhan pangan. Apabila hasil dari selisih atau pengurangan adalah

bersifat negatif (defisit), maka hal tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan lahan untuk mendukung ketahanan pangan di suatu daerah telah melampaui kapasitasnya. Sebaliknya, apabila angka selisih tersebut positif (surplus), ini menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan di suatu wilayah belum melebihi batasnya.

Berdasarkan data potensi pangan dan kebutuhan pangan yang tercantum pada Tabel di atas, ditemukan bahwa terdapat ketersediaan pangan sebesar 60.243.491 Kkal/tahun untuk jumlah populasi penduduk pada tahun 2024 sebesar 387.493. Sementara kebutuhan pangan yang dibutuhkan mencapai 304.085.131.750 Kkal/tahun. Dengan demikian, perhitungan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan menunjukkan nilai negatif atau defisit sebesar 304.024.964.410 Kkal/tahun. Ini menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan untuk mendukung produksi pangan di kota Palu telah terlampaui. Dengan perhitungan sederhana tersebut, maka dapat diketahui status daya dukung pangan untuk setiap wilayah kecamatan di kota Palu sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.25 Data Selisih Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Pangan Kota Palu Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Tahun 2024	Ketersediaan Pangan (Kkal/thn)	Kebutuhan Pangan (Kkal/thn)	Selisih	Status
Mantikulore	81032	9.532.807	63.589.862.000	-63.580.329.193	Terlampau
Palu barat	47118	3.667.752	36.975.850.500	-36.972.182.748	Terlampau
Palu selatan	74481	1.259.655	58.448.964.750	-58.447.705.095	Terlampau
Palu timur	44021	8.461	34.545.479.750	-34.545.471.289	Terlampau
Palu utara	25431	29.488.502	19.956.977.250	-19.927.488.748	Terlampau
Tatanga	55093	5.749.762	43.234.231.750	-43.230.481.988	Terlampau
Tawaeli	23521	7.060.570	18.458.104.750	-18.451.044.180	Terlampau
Ulujadi	36796	5.399.831	28.875.661.000	-28.870.261.169	Terlampau
Total	387.493	60.167.340	304.085.131.750	-304.024.964.410	Terlampau

Sumber : KLHS RPJMD Kota Palu, 2025-2029.

Data yang tertera dalam Tabel di atas mengindikasikan status daya dukung pangan berdasarkan selisih kuantitatif antara jumlah penyediaan pangan dan kebutuhan pangan. Informasi ini masih terpaku pada batas administratif umum, dan belum menyertakan informasi terkait sebaran kawasan atau lingkungan yang telah atau belum melampaui kapasitas, mengenai daya dukung penyedia pangan secara spasial berdasarkan kondisi

lingkungan atau batas ekologis di setiap wilayah kecamatan di Kota Palu. Untuk menyajikan informasi mengenai penyebaran status daya dukung penyedia pangan di Kota Palu secara spasial, diperlukan tidak hanya pemanfaatan data potensi pangan dan kebutuhan pangan (yang direpresentasikan dalam bentuk sebaran kepadatan populasi secara spasial), tetapi juga perlunya masukan data indeks jasa ekosistem penyedia pangan bersama dengan peta jasa

ekosistem penyedia pangan yang dikenal sebagai peta status daya dukung indikatif penyedia pangan, sebagaimana yang diperlihatkan dalam Sumber: RPPLH Kota Palu, 2022 (Dengan Penyesuaian)

Informasi tentang cakupan luas wilayah dari status daya dukung pangan pada tiap kecamatan di Kota Palu pada tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Sebaran dan Luasan Status Daya Pangan Kota Palu Tahun 2024

Kecamatan	Status Daya Dukung Penyedia Pangan				Total Luas (ha)
	Belum Terlampaui		Terlampaui		
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
Mantikulore	18564.83	70.30%	7838.21	29.70%	19720.83
Palu Barat	0.00	0.00%	613.89	100.00%	613.89
Palu Selatan	110.87	3.37%	3995.44	96.63%	4038.16
Palu Timur	0.04	0.01%	829.78	99.99%	829.80
Palu Utara	928.68	32.69%	1912.14	67.31%	2840.82
Tatanga	0.33	0.03%	1271.69	99.97%	1272.02
Tawaeli	8929.18	51.17%	8188.31	48.83%	16375.71
Ulujadi	5033.12	30.11%	1076.08	69.89%	6161.18
Jumlah Total	19229.94	33.91%	36991.71	66.09%	56220.36

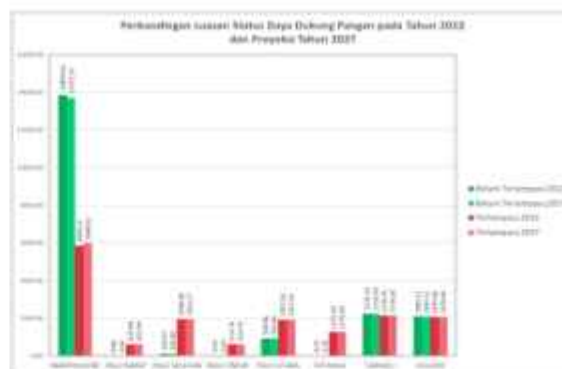
Sumber: ELHS RPJMD Kota Palu, 2022-2029

Terdapat seluas 16.441,71 ha atau 46,09 % dari total luas wilayah Kota Palu, merupakan kawasan lingkungan yang mempunyai status daya dukung pangan yang telah terlampaui. Kecamatan yang luas wilayahnya telah lebih dari 90% berstatus telah terlampaui daya dukung pangannya adalah kecamatan Palu Barat, kecamatan Palu Timur, kecamatan Tatanga, dan kecamatan Palu Selatan. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling pesat perkembangan dan pembangunan di wilayahnya. Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur yang memiliki luas wilayah yang kurang dari 700 ha, keterbatasan ruang untuk kegiatan pembangunan dan daya dukung yang telah terlampaui dalam penyediaan pangan, perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus untuk menjaga rantai pasok bahan pangan di wilayah tersebut tetap terjaga dan dapat berkelanjutan. Informasi cakupan luas wilayah dan sebaran dari status daya dukung pangan berdasarkan proyeksi kebutuhan penduduk tahun 2027, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Proyeksi Sebaran dan Luasan Status Daya Pangan Kota Palu Tahun 2027

Kecamatan	Status Daya Dukung Penyedia Pangan tahun 2027				Total Luas (ha)
	Belum Terlampaui		Terlampaui		
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
Mantikulore	13722.33	69.60%	5898.52	30.40%	19720.83
Palu Barat	0.00	0.00%	613.89	100.00%	613.89
Palu Selatan	105.30	3.14%	3933.27	96.86%	4038.16
Palu Timur	0.04	0.01%	829.78	99.99%	829.80
Palu Utara	928.68	32.69%	1912.14	67.31%	2840.82
Tatanga	0.33	0.03%	1271.69	99.97%	1272.02
Tawaeli	2259.08	51.17%	2138.98	48.83%	4375.71
Ulujadi	8063.18	30.11%	1076.08	69.89%	6161.18
Jumlah Total	18901.54	33.89%	36991.04	66.11%	55892.58

Sumber: Dokumen Daya Dukung Pangan Kota Palu, 2022



Gambar 2.6 Grafik Perbandingan Luasan Status Daya Dukung Pangan Kota Palu Tahun 2022 dengan Proyeksi 2027

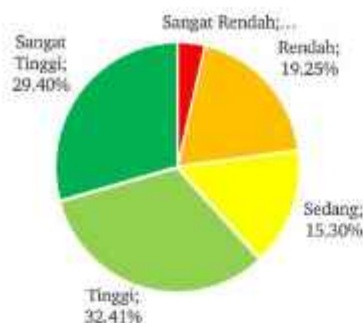
Sumber: Dokumen Daya Dukung Pangan Kota Palu, 2022

Daya Dukung Pengaturan Kualitas Udara Berbasis Jasa Lingkungan

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan udara dengan faktor -faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Suhu udara dapat mempengaruhi konsentrasi bahan pencemar di udara sesuai dengan cuaca tertentu. Suhu udara yang tinggi menyebabkan udara makin renggang sehingga konsentrasi bahan pencemar menjadi rendah, sebaliknya pada suhu yang dingin keadaan udara makin padat sehingga konsentrasi pencemar semakin meningkat.

Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa lingkungan, kemampuan lingkungan alami di Kota Palu yang berkontribusi dalam pemeliharaan kualitas udara dengan kinerja tinggi hingga sangat tinggi meliputi wilayah seluas 61,81 % dari total luas wilayah, sisanya memiliki kelas kinerja sangat rendah sampai sedang seluas 38,19% dari total luas wilayah. Adapun gambaran persentase daya dukung berbasis jasa lingkungan fungsi pengaturan pemeliharaan kualitas udara Kota Palu disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.7 Persentase Luas Daya Dukung Berbasis Jasa Lingkungan Fungsi Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Palu
Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi di Kota Palu yaitu pada area transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran. Hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kualitas udara (IKU) Kota Palu 88,0889 (sangat baik), hal tersebut di buktikan belum dilewatinya nilai ambang batas masing-masing parameter yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsentrasi SO_2 pada 4 lokasi tersebut berkisar antara 7,45 – 14,00 $\mu g/Nm^3$, dan NO_2 berkisar antara 2,63–16,04 $\mu g/Nm^3$ (DLH Kota Palu, 2019).

Persebaran wilayah dengan kinerja jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara yang masuk kategori tinggi umumnya berada di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi. Kedua kecamatan tersebut masih memiliki vegetasi dan tutupan lahan hutan, kebun campuran yang memberikan kualitas udara yang baik. Namun beberapa daerah di kedua kecamatan tersebut memiliki kualitas udara yang tidak baik, karena adanya aktivitas industri dan pertambangan.

Pencemaran udara di Kota Palu juga bersumber dari aktivitas penambangan bahan galian batuan yaitu debu. Lokasi penambangan tersebut tersebar di wilayah barat Kota palu, tepatnya Kecamatan Ulujadi. Adapun gambaran sebaran usaha penambangan bahan galian batuan di Kota Palu di sajikan pada Gambar 3.30 (DLH Kota Palu, 2018). Adapun kondisi kualitas udara yang berada di Kota Palu sesuai hasil penelitian menunjukkan konsentrasi merkuri di udara telah melampaui baku mutu demikian halnya kadar debu di sekitar PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power >230 mg/Nm^3 (DLH Sulawesi Tengah, 2017).

Di Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat dan Palu Selatan termasuk wilayah yang memiliki daya dukung berbasis jasa lingkungan fungsi pengaturan pemeliharaan kualitas udara berkategori rendah. Ketiga kecamatan tersebut didominasi oleh tutupan lahan bangunan permukiman, perkantoran dan industri. Hasil kajian DLH Kota Palu (2019), bahwa sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai jenis kegiatan, antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Penggunaan bahan bakar dari aktivitas industri maupun transportasi menjadi faktor pemicu terhadap penurunan kualitas udara. Distribusi jasa lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu (Ha)

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Mantikulore	944,20	2.006,17	0.170,30	6.889,11	7.843,38	16.701,73
Palu Barat	18,28	369,48	29,30	33,72	12,07	410,10
Palu Selatan	1,88	1.892,33	87,35	889,28	9,49	2.059,81
Palu Timur	7,80	236,80	26,83	34,73	0,88	289,06
Palu Utara	87,94	636,33	817,04	941,22	525,77	2.945,12
Tatanga	0,06	686,96	41,80	380,78	222,90	1.272,00
Tawaeli	114,81	400,00	1.284,10	1.988,74	682,18	4.373,63
Ulujadi	87,28	686,96	625,29	1.190,18	1.518,27	4.101,67
Jumlah	1.289,08	8.007,83	2.137,20	11.380,79	10.007,39	33.872,00

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup. Beberapa upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan oleh Kota Palu melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun pihak swasta. Pengendalian pencemaran yang terjadi seperti udara dan air sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan. Pengendalian aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum dan pemberian sanksi dan atau penghentian aktivitas bertambang yang berkontribusi cemaran pada lingkungan hidup. Selain itu perlu melakukan penambahan ruang terbuka hijau perkotaan, pengujian emisi kendaraan bermotor secara periodik dan pemantauan kualitas udara secara periodik. Gambar berikut memperlihatkan distribusi persentase luas pengaturan pemeliharaan kualitas udara Kota Palu.

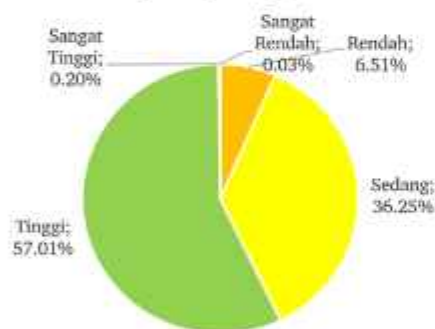


Gambar 2.8 Distribusi Persentase Luas Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Daya Dukung Pengaturan Tata Air dan Banjir Berbasis Jasa

Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa lingkungan, kemampuan lingkungan alami di Kota Palu yang berkontribusi dalam pengaturan tata air dan banjir dengan kinerja tinggi hingga sangat tinggi meliputi wilayah seluas 57,21 % dari total luas wilayah, sisanya memiliki kelas kinerja sangat rendah sampai sedang. Persentase jasa pengaturan tata air dan banjir di Kota Palu disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.9 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Palu

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan tata air dan banjir adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial.

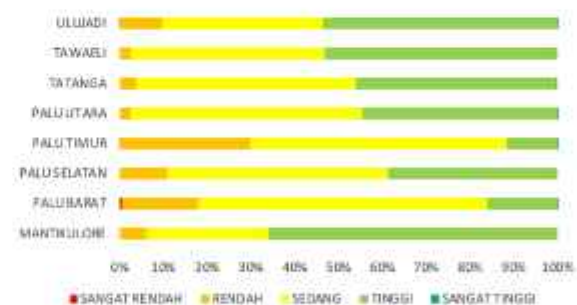
Tingginya daya jasa pengaturan tata air dan banjir ini disumbangkan oleh tutupan lahan yang sebagian besar adalah hutan lahan kering primer dengan ekoregion berupa pegunungan dan perbukitan. Persebaran wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir yang tinggi umumnya berada di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan. Ketujuh kecamatan ini, memiliki daya tampung yang tinggi karena ekoregion, lahan bervegetasi dan tutupan lahan berhutan dan kebun campuran. Sementara Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat Sebagian besar wilayahnya berkategori rendah dan sedang dalam daya dukung jasa pengaturan tata air dan banjir.

Gambaran distribusi daya dukung berbasis jasa lingkungan fungsi pengaturan tata air dan banjir disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.29 Distribusi Luas Daya Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu (Ha)

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Jumlah
Mantikulore	0,05	1.188,79	5.510,05	10.970,63	44,89	19.721,73
Palu Barat	3,60	107,15	106,90	83,33	0,98	315,10
Palu Selatan	0,03	801,14	1.040,79	299,08	8,17	6.059,11
Palu Timur	1,34	164,20	365,75	72,49	0,19	625,69
Palu Utara	88,95	1.203,40	1.944,30	4,40	0,00	3.941,10
Tatanga	0,00	50,35	811,01	431,18	9,97	1.302,62
Tawaeli	0,03	100,04	1.367,79	8.074,76	9,87	4.875,89
Ulujadi	4,26	899,90	1.265,00	2.223,28	3,80	4.191,27
Jumlah	9,13	2.521,37	12.932,61	20.396,76	78,77	33.875,68

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020



Gambar 2.10 Distribusi Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan Kota Palu

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Terdapat 4 sungai besar yang harus diperhatikan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu Sungai Uentumpu, Sungai Amalak, Sungai Wera, dan Sungai Ngolo sebagai potensi pengatur tata air untuk kebutuhan Kota Palu. Permasalahan

pengaturan tata air dan banjir di Kota Palu adalah adanya alih fungsi lahan dan hutan, banyaknya sampah di saluran drainase yang menghambat laju air sehingga air meluber ke jalan dan mengakibatkan genangan. Adanya badan sungai yang dijadikan tempat tinggal.

Keberadaan tutupan lahan hutan dan bervegetasi cukup berperan dalam mengatur tata air dan banjir, peranan paling dominan dalam menjaga keberlangsungan aliran sungai dari pada mengurangi debit puncak. Selain itu keberadaan hutan berperan penting dalam mengurangi debit sedimen yang mengalir ke sungai. Peranan terbesar dalam mengurangi kekuatan erosi pada lahan hutan adalah tumbuhan tanaman bawah dan serasah, bukan tajuk vegetasi tanaman besar. konversi tutupan lahan hutan menjadi tutupan penggunaan lahan lain (kebun campuran atau ladang) akan menurunkan keberlangsungan aliran pada musim kemarau dan dapat mengurangi pengaturan tata air dan terjadinya banjir.

Arahan mitigasi untuk bahaya yakni sistem jaringan drainase yang baik perlu diperhatikan pada setiap kawasan permukiman, begitu pun dengan kawasan peruntukan lainnya. Perhutanan kembali (afforestation/reforestation) sebaiknya dilaksanakan pada sub DAS yang berkontribusi buruk dalam menjaga tata air dan proses sedimentasi pada DAS. Pengkonversian lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain perlu mempertahankan luasan optimal tutupan lahan hutan. Program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya terintegrasi pengendalian banjir. Review masterplan drainase kota dan pengembangan sistem jaringan drainase kota secara berjenjang dan menerus serta terintegrasi dengan sistem drainase alamiah kota.

Daya Dukung Biodiversitas

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi jasa lingkungan terhadap per kehidupan.

Keberadaan lahan dalam menjamin keberadaan keanekaragaman hayati di Kota Palu masih tergolong tinggi, karena Kota Palu mempunyai luasan hutan yang cukup atau tidak kekurangan hutan. Berdasarkan fungsinya, hutan di Kota Palu dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : Hutan lindung seluas 6.670,75 Ha, hutan produksi seluas 4.442,64 Ha. Selain itu juga terdapat hutan konservasi yang berupa Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 5.043 ha dan Taman Hutan Raya (TAHURA) seluas 5.015,59 Ha serta Kawasan Lindung Lainnya (Kawasan Mangrove), 3.02 Ha.

Hutan Kota Palu

Hutan Kota Palu termasuk kawasan RTH Kota Palu yang terdapat di Kecamatan Palu Timur bertujuan sebagai zona konservasi, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat. Hutan Kota Palu memiliki luas 4,0 ha, berada pada areal dengan ketinggian sekitar 57 mdpl, di areal Hutan Kota Palu terdapat tiga jenis pohon yang termasuk ke dalam tiga famili, yakni akasia (*Acacia greggi*), johar (*Senna siamea*), dan gamal (*Gliricidia sepium*). Keanekaragaman vegetasi di Hutan Kota Palu tergolong rendah, yakni dengan nilai indeks Shannon sebesar $H' = 0,51$. Namun demikian berdasarkan strata tajuk pohon maka di Hutan Kota ini memiliki strata yang lengkap, yakni dari tingkat E hingga tingkat stratum A. Tinggi pohon di areal Hutan Kota Palu berkisar antara 5–10 m. Akasia (*A. greggi*) merupakan salah satu jenis pohon yang termasuk dalam stratum B dengan tinggi pohon 10 m.

Taman Hutan Raya (Tahura)

Tahura Sulawesi Tengah yang berada sekitar Kota Palu memiliki ketinggian tempat sekitar 396 mdpl, di RTH ini ditemukan lima jenis vegetasi tingkat pohon, yakni: kemiri (*Aleurites moluccanus*), johar (*S. siamea*), malapoga (*Cauropita guianensis*), benoa (*Octomeles sumatrana*), dan gersen (*Muntingia calabura*). Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan menurut Shannon di Tahura Sulawesi Tengah ini tergolong sedang, yakni $H' = 2,51$. Stratifikasi tajuk vegetasi tergolong lengkap, yakni terdapat lima strata tajuk dari stratum E hingga stratum A. Tinggi pohon berkisar antara 17–35 m. Malapoga (*C. guianensis*) dan kemiri (*A. moluccanus*) merupakan salah satu jenis pohon yang termasuk dalam stratum A dengan tinggi pohon maksimum 35 m.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Taman Kota Palu Selatan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. RTH ini memiliki ketinggian 101 mdpl. Kekayaan jenis tumbuhan pada tingkat pohon di RTH Taman Kota Palu Selatan tergolong rendah. Namun demikian, berdasarkan komposisi taksa tumbuhan maka RTH ini relatif lebih lengkap karena terdiri atas rerumputan, epifit, semak belukar dan tanaman hias. Jenis vegetasi tanaman hias yang dominan adalah bunga kupu-kupu (*Bauhinia purpurea*).

Taman Kota Palu Timur memiliki dengan ketinggian sekitar 2,5 mdpl. Vegetasi yang menyusun stratifikasi tajuk RTH Taman Kota Palu Timur terdiri atas empat jenis tumbuhan, yakni angsa (*Pterocarpus indicus*), beringin (*Ficus benjamina*), palem (*Arecaceae*), dan asam (*Tamarindus indica*). Tinggi pohon berkisar antara 7–26 m. Angsa (*P. indicus*) merupakan spesies pohon yang termasuk dalam strata A dengan tinggi terbesar mencapai 26 m.

Taman Kota Palu Barat memiliki ketinggian tempat sekitar 3 mdpl, nilai Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan tergolong rendah, yakni hanya mencapai $H' = 0,25$. Stratifikasi tajuk di RTH Taman Kota Palu Barat terdapat lima strata tajuk yaitu stratum E hingga stratum A. Tinggi pohon berkisar antara 11–24 m. Cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) dan Trembesi (*Samanea saman*) merupakan jenis pohon yang termasuk dalam stratum A dengan tinggi pohon maksimum 24m.

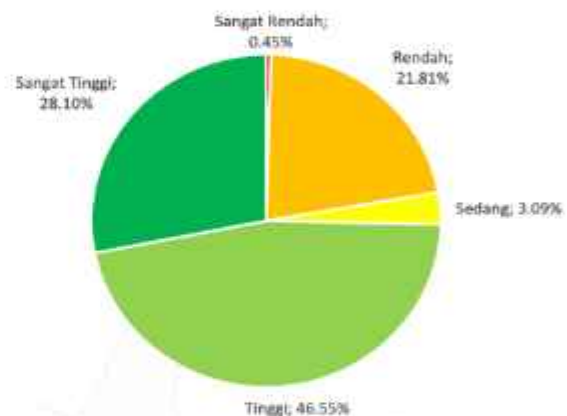
Sebanyak 58 jenis burung dari 31 famili dijumpai selama penelitian. Famili columbidae merupakan famili dengan anggota terbanyak sembilan jenis (15,5%). Indeks kekayaan jenis tertinggi dan keanekaragaman tertinggi dijumpai di Tahura Sulawesi Tengah ($DMg = 9,94$: $H' = 2,62$), dan indeks pemerataan tertinggi diperoleh di Hutan Kota Palu ($E = 0,79$). Indeks kekayaan jenis terendah didapatkan di Taman Kota Palu Timur ($DMg = 4,59$) dan indeks keanekaragaman terendah didapatkan di Taman Kota Palu Selatan yang juga memiliki indeks pemerataan terendah ($H' = 1,97$: $E = 0,60$).

Keanekaragaman jenis burung yang ditemukan di RTH Tahura Sulawesi tengah memiliki jumlah jenis yang tinggi sehingga nilai keanekaragaman di area ini cukup tinggi. Sesuai nilai indeks keanekaragaman burung di RTH Tahura menurut Shannon yaitu $H' = 2,62$ dan keanekaragaman tumbuhan $H' = 2,51$. Kondisi tersebut dapat diasumsikan karena

ketersediaan sumber hidup seperti pakan, tempat berlindung dan berkembang biak yang cukup bagi spesies-spesies burung yang ditemukan di area ini. Tingginya keanekaragaman jenis burung pada RTH, disebabkan oleh faktor ketersediaan makanan dan kompleksitas vegetasi.

Berdasarkan hasil kajian kinerja jasa lingkungan, kemampuan lingkungan alami di Kota Palu sebagai fungsi pendukung biodiversitas dengan kinerja tinggi hingga sangat tinggi meliputi wilayah seluas 74,65 % dari total luas wilayah Kota, sisanya memiliki kelas kinerja sangat rendah sampai sedang.

Persentase daya dukung berbasis jasa lingkungan pendukung biodiversitas di Kota Palu disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.11 Persentase Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Palu

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

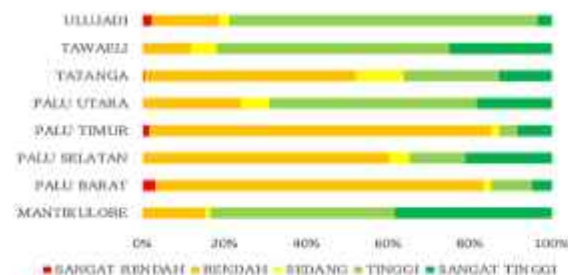
Persebaran wilayah dengan jasa lingkungan pendukung biodiversitas yang memiliki persentase tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara. Keberadaan hutan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi pada ketiga kecamatan tersebut membuat jasa lingkungan pendukung biodiversitas masih tergolong baik. Kecamatan yang memiliki berbasis jasa lingkungan berkategori sangat rendah, rendah dan sedang di kecamatan Tatanga, Palu Barat, Palu Timur dan Palu Selatan.

Distribusi daya dukung berbasis jasa lingkungan fungsi pendukung biodiversitas di Kota Palu, disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.30 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu (Ha)

Kecamatan	Luas					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Mantiklore	26,87	2379,00	887,18	8.877,74	7.880,59	18.721,38
Palu Barat	14,88	488,09	10,59	81,73	98,54	616,93
Palu Selatan	1,39	1.136,09	104,01	280,43	104,49	2.036,41
Palu Timur	8,88	325,11	10,59	81,73	20,38	446,69
Palu Utara	0,10	846,34	183,08	1.441,79	316,51	3.691,82
Tatanga	8,10	861,29	147,31	297,07	103,04	1.497,81
Tawaeli	7,80	510,00	987,84	2.490,58	1.099,09	4.575,31
Ungai	83,06	846,74	107,17	8.129,35	145,83	9.112,15
Jumlah	186,78	7.778,68	1.101,18	18.008,49	10.096,79	36.871,92

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung berbasis Kota Palu, 2020



Gambar 2.12 Distribusi Persentase Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kota Palu

Sumber: Dokumen Kajian dan Pemetaan Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Palu, 2020

Menurut IKPLHD Tahun 2018, bahwa hasil arahan rekomendasi kajian lahan kritis di Kota Palu diprioritaskan pada kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat) dan kawasan hutan produksi (tetap dan terbatas) dengan tingkat kekritisan lahan mulai dari "sangat kritis" hingga "agak kritis". Kegiatan rehabilitasi lahan secara umum adalah, kegiatan konservasi vegetatif melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pengayaan jenis tanaman untuk memperbaiki kesuburan tanah, konservasi sipil teknis melalui pembuatan bangunan dam pengendali, dam penahan, terasering, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, dan biopori untuk pencegahan erosi dan sedimentasi.

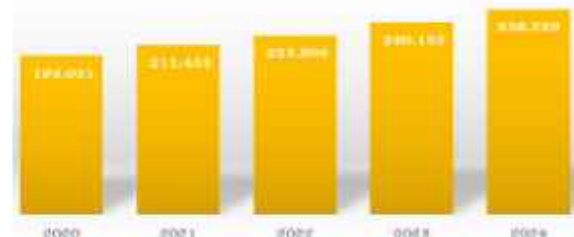
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan Energi dan Air

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2020-2024 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Jumlah pelanggan rumah

tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2024 mencapai 256.329 pelanggan, Tahun 2023 sebesar 240.189 pelanggan naik 16,28% dari tahun sebelumnya sebesar 223.908 pelanggan. Persentase ini diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik terhadap total jumlah rumah tangga yang tersedia di Kota Palu. Besarnya jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik mengakibatkan nilai persentase menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 (satu) meteran listrik untuk 1 rumah tangga. Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah ketersediaan rumah sewa atau kost. Untuk 1 orang pemilik atau 1 rumah tangga yang memiliki rumah sewa/kost dapat menggunakan beberapa meteran listrik sesuai dengan jumlah petak rumah sewa/kost yang disediakan.

Adapun persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.13 berikut ini:



Gambar 2.13 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Berikut persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2020-2024 yang tertera dalam Gambar 2.14 di bawah ini:



Gambar 2.14 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2025

Data di atas memperlihatkan terjadi penurunan dari 87,47% (2020) menjadi 81,83% (2021), menunjukkan adanya gangguan sementara dalam akses air bersih. Pada Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan peningkatan menjadi 84,70%, demikian pula Tahun 2023 mencapai 93,69%, menandakan keberhasilan program peningkatan layanan air bersih. Tahun 2024 sedikit menurun ke 93,58%, namun tetap menunjukkan cakupan yang sangat baik.

Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Palu mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama sejak 2022. Capaian di atas 93% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas layanan air bersih dan menjaga kualitasnya.

Kemandirian Pangan

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Gambaran umum terkait ketahanan pangan di antaranya dapat dilihat dari gambaran konsumsi energi dan konsumsi protein masyarakat Kota Palu dalam Tabel 2.31 berikut ini:

Tabel 2.31 Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Urutan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.041,50	1.085,10	1.041,50	1.860,80	2.022,00
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	66,30	64,60	60,40	58,80	61,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi energi masyarakat Kota Palu Tahun 2019 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan sebelum turun menjadi 2.041,5 kkal/kap/hari di Tahun 2021 dan 1.860,8 kkal/kap/hari di Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 naik sebesar 2.022,00 kkal/kap/hari. Sementara konsumsi protein masyarakat Kota Palu yang lebih dahulu mengalami penurunan sejak Tahun 2020 sebesar 64,6 kkal/kap/hari dari tahun sebelumnya yaitu dari kondisi 66,3 kkal/kap/hari menjadi 64,60 kkal/kap/hari. Konsumsi protein terus mengalami penurunan hingga Tahun 2022 menjadi 58,8 kkal/kap/hari, dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi 61,00 kkal/kap/hari.

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah atau negara dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakatnya, baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi gangguan atau bencana, berikut gambaran indeks ketahanan pangan Kota Palu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir



Gambar 2.15 Indeks Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2024

Terlihat dari grafik bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kota Palu mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan kecenderungan meningkat di akhir periode. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 79,63, yang bisa menjadi cerminan awal upaya Kota Palu dalam menjaga ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi masyarakat pascabencana gempa beberapa tahun sebelumnya.

Pada 2021, indeks meningkat cukup signifikan menjadi 80,92, hal ini menunjukkan adanya perbaikan, mungkin dipengaruhi oleh berbagai program pemulihan, pendampingan petani, serta dukungan distribusi logistik pangan yang lebih baik. Namun, pada 2022 terjadi sedikit penurunan ke angka 79,96, kemungkinan dipengaruhi oleh tantangan baru seperti dampak pandemi yang masih terasa atau kendala cuaca dan distribusi.

Menariknya, pada 2023 indeks kembali naik tipis ke 80,07, menandakan adanya konsistensi dalam upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas pangan meskipun tantangan belum sepenuhnya hilang. Peningkatan signifikan terlihat pada 2024, dengan indeks melonjak ke 82,43. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa Kota Palu semakin

siap dalam memastikan ketahanan pangan melalui kebijakan yang tepat sasaran, inovasi di sektor pertanian, perbaikan infrastruktur distribusi, dan penguatan peran masyarakat.

Secara keseluruhan, tren ini patut diapresiasi karena menunjukkan kerja keras bersama antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Harapannya, peningkatan ini dapat terus dijaga agar masyarakat Kota Palu semakin tangguh menghadapi risiko krisis pangan di masa depan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah adalah gambaran ringkas tentang kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH ini berfungsi sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kota Palu Tahun 2020-2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Grafik ini menggambarkan bagaimana kualitas lingkungan hidup di Kota Palu mengalami perubahan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks kualitas lingkungan hidup tercatat di angka 67,2. Angka ini mencerminkan adanya tantangan yang cukup besar dalam menjaga kebersihan, kualitas udara, air, dan kesehatan ekosistem. Pada tahun 2022, indeks meningkat menjadi 69,08, menunjukkan perbaikan dan adanya langkah nyata yang mulai dirasakan, seperti penanganan sampah yang lebih baik, penghijauan, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan lonjakan signifikan ke angka 76,5. Angka ini merupakan kabar baik, karena berarti berbagai

program perlindungan lingkungan, penataan ruang hijau, rehabilitasi pascabencana, serta kolaborasi berbagai pihak benar-benar memberikan dampak yang positif. Pada 2024, indeks menurun menjadi 73,25. Meskipun masih lebih baik dibanding awal periode, penurunan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kualitas lingkungan bukanlah pekerjaan sekali selesai, tetapi butuh konsistensi dan komitmen bersama. Penurunan bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bencana, polusi baru, atau penambahan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Secara keseluruhan, tren ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar 2.17 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Grafik ini memperlihatkan pada tahun 2020, angka akses sanitasi berada di posisi yang sangat tinggi yaitu 99,27%. Ini menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Sebuah pencapaian besar yang menunjukkan perhatian serius terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas hidup warga. Pada tahun 2021 terlihat penurunan ke angka 91,74%, kemudian turun lagi cukup tajam pada 2022 menjadi 83,72%. Penurunan signifikan ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan infrastruktur pascabencana, pertambahan penduduk tanpa diiringi pembangunan sanitasi memadai, atau

tantangan pendanaan untuk perawatan dan pembangunan fasilitas sanitasi baru.

Pada tahun 2023, grafik menunjukkan adanya perbaikan dengan naiknya angka menjadi 87,64%, dan di tahun 2024 sedikit meningkat lagi ke 89,49%. Peningkatan ini menjadi sinyal positif bahwa ada upaya perbaikan dan penanganan masalah sanitasi yang perlahan membuahkan hasil. Sanitasi layak sangat penting karena berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, serta kualitas lingkungan sekitar. Maka, meski tren penurunan di awal terlihat cukup tajam, langkah-langkah perbaikan yang mulai tampak di tahun-tahun terakhir patut diapresiasi dan terus dilanjutkan.

Melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, akses layanan sanitasi di Kota Palu dapat kembali mencapai tingkat optimal. Sebab, sanitasi yang baik bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran, kepedulian, dan gaya hidup bersih yang harus dijaga bersama demi masa depan yang lebih sehat.

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Palu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.18 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Palu Tahun 2022-2024

Sumber: DLH Kota Palu 2025

Grafik menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada proporsi rumah tangga di Kota Palu yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, hanya 30% rumah tangga yang terlayani secara penuh. Angka ini mencerminkan masih terbatasnya jangkauan layanan pengelolaan sampah pada periode tersebut, yang kemungkinan besar

dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, prasarana, maupun sumber daya operasional.

Memasuki tahun 2023, proporsi tersebut melonjak menjadi 54%, atau mengalami kenaikan sebesar 24 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah atau pihak terkait dalam memperluas cakupan pelayanan, melalui penambahan armada pengangkut sampah, optimalisasi rute pengumpulan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem pengelolaan sampah.

Pada tahun 2024, proporsi rumah tangga yang terlayani penuh mencapai 75%, menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Peningkatan ini tidak hanya memperlihatkan keberhasilan dalam aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan capaian tersebut, Kota Palu berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan target layanan persampahan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Persentase jumlah timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.19 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Grafik ini memperlihatkan bagaimana upaya pengelolaan sampah di Kota Palu berkembang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sekitar 80,85% timbulan sampah berhasil terolah di fasilitas pengolahan sampah. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah sudah ditangani dengan baik, meski masih ada ruang untuk perbaikan. Pada 2021, persentase

sampah terolah meningkat menjadi 85,59%, menandakan adanya perbaikan sistem pengangkutan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pada 2022, angka ini sedikit menurun ke 84,39%, yang bisa jadi disebabkan oleh kendala teknis, kerusakan infrastruktur, atau volume sampah yang meningkat tanpa diimbangi kapasitas pengolahan yang memadai.

Puncaknya terlihat pada 2023, di mana timbulan sampah yang terolah melonjak tajam menjadi 96,47%. Angka ini patut diapresiasi karena menunjukkan lonjakan upaya pengelolaan sampah yang hampir mendekati pengolahan total. Peningkatan ini kemungkinan besar hasil kolaborasi pemerintah, pihak swasta, komunitas bank sampah, hingga masyarakat yang makin peduli dengan praktik *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan ke angka 87,19%. Meski masih cukup tinggi, penurunan ini menjadi pengingat bahwa menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah tidak mudah. Tantangan seperti kapasitas fasilitas pengolahan, kebiasaan masyarakat, serta faktor pendanaan dan kebijakan tetap harus diantisipasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan langkah maju yang nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Harapannya, semua pihak tetap bergotong royong menjaga lingkungan dengan bijak, mendukung fasilitas pengolahan sampah, dan membangun kesadaran kolektif bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka dalam pemenuhan pengembangan ruang terbuka hijau untuk Kota Palu di Tahun 2023 terdapat 2,265 Ha yang telah dilakukan dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Kota Palu merupakan kota yang majemuk dengan keberagaman penduduk dan merupakan pusat aktivitas sosial ekonomi yang bukan saja berasal dari penduduk lokal namun mencakup aktivitas dinamis penduduk dari luar kota. Kota ini lebih utama bergerak di bidang jasa sehingga daya tarik aktivitas jasa, niaga perdagangan dan lainnya membuat suasana kota menjadi ramai di pagi hingga sore hari. Selain kekayaan sosial ekonomi, kota ini menyimpan banyak cerita terkait bencana alam. Setiap penduduk kota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam urusan bencana.

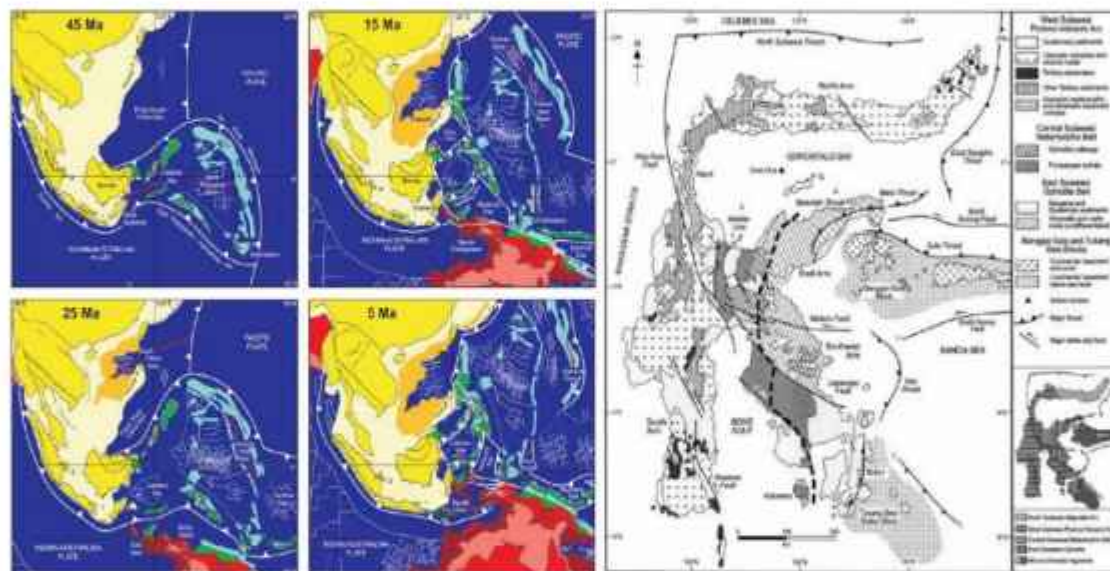
Sejarah Kebencanaan Kota Palu

Nilai Indeks Risiko Bencana (BNPB; 2022) di Kota Palu dari Tahun 2015 hingga 2021 secara berurutan adalah sebesar 181,2; 181,2; 162,7; 162,7; 162,7; 162,7; dan 168,25 (tinggi) dengan catatan terdiri dari beberapa jenis ancaman bencana. Karakteristik geologi dan tektonik Pulau Sulawesi mempunyai bentuk seperti huruf "K" yang ujung kiri bagian atas memanjang dan terputar searah jarum jam sehingga memiliki arah gerak barat - timur. Bagian itu dinamai Lengan Utara, sedangkan di bawahnya memanjang dengan arah barat laut-tenggara diberi nama Lengan Timur. Kaki bagian kirinya disebut Lengan Selatan dan kaki kanan dinamai Lengan Tenggara. Daerah pertemuan keempat lengan itu dikenal sebagai bagian Tengah Sulawesi, sedangkan bagian yang melengkung, menghubungkan bagian Tengah Sulawesi dengan Lengan Utara disebut Leher Sulawesi yang letaknya di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.

Berdasarkan sejarah tektonik regional, tektonik Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya dapat dibagi menjadi lima proses pergerakan tektonik, yaitu: tektonik ekstensional Mesozoikum, tunjaman Kapur, tunjaman Paleogen, tumbukan Neogen, dan tunjaman Ganda Kuartar. Tektonik ekstensional Mesozoikum merupakan peristiwa di mana kepingan benua yang sekarang berada di

Bagian Timur Sulawesi, berpisah dari tepi utara benua Australia. Selama perjalanan ke utara, kepingan benua itu pecah menjadi beberapa kepingan yang lebih kecil. Pada Kapur, tunjaman mengalami proses miring ke barat di proto Sulawesi. Tunjaman Paleogen berhubungan dengan pergerakan kepingan benua ke arah barat-barat laut, bertubrukan dengan tunjaman di bagian timur Sulawesi dan zona akresi Kapur Awal Benua Eurasia. Batuan gunung api Paleogen di Lengan Selatan Sulawesi ditafsirkan sebagai hasil subduksi kepingan benua dari Australia dengan tepi timur Kraton Sunda. Tumbukan Neogen merupakan peristiwa pengalihempatan / dislokasi beberapa kepingan benua ke arah barat-barat laut sehingga menabrak struktur kompleks ofiolit di Bagian Timur Sulawesi. Tumbukan

Paleogen ini sangat penting dalam pembentukan Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya. Tunjaman Kuartar terjadi di utara dan tunjaman ganda terjadi di Timur Laut Sulawesi. Di utara, Lengan Utara Sulawesi, kerak samudra Laut Sulawesi menunjam di bawah Lengan Utara Sulawesi pada Paleogene akhir. Penunjaman ini menghasilkan gunung api aktif di Lengan Utara Sulawesi. Tunjaman ganda di timur laut Sulawesi menghasilkan gunung api aktif di ujung timur Lengan Utara Sulawesi, aktivitas subduksi yang terjadi pada antar lempeng ini berakhir pada masa Neogene yang ditandai dengan adanya zona tumbukan Eastern Sulawesi Ophiolite Belt dengan Banggai-Sula Platform di sepanjang Batui Thrust di bagian Selatan (Angga Jati Widiatama; 2017 dan PusGEN; 2017).



Gambar 2.20 Perkembangan Tektonik Sulawesi menurut Hall dan Smyth (2008) dan Peta Geologi Sulawesi menurut Hall dan Wilson (2000)

Sumber: Struktur Geologi Sulawesi karya Armstrong F. Sompotan (2012)

Menurut Armstrong F. Sompotan dalam bukunya Struktur Geologi Sulawesi (2012), berdasarkan struktur litotektonik maka Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 4 (empat) mandala, yaitu Mandala Barat yang merupakan bagian Barat dan Utara Pulau Sulawesi yang merupakan daerah Busur Gunung Api Plutonik dengan jalur magmatik bagian ujung Paparan Sunda. Mandala Tengah yang merupakan Sabuk Metamorfik Sulawesi Bagian Tengah, tersusun dari batuan malihan yang ditumpangi batuan bencuh dari blok Australia, Mandala Timur yang dikenal sebagai Sabuk Ophiolite Sulawesi Bagian Timur tersusun dari ofiolit segmen kerak samudera yang berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen dan

terakhir Fragmen Benua Banggai – Sula – Tukang Besi, di bagian Timur dan Tenggara Pulau Sulawesi yang merupakan pecahan struktur benua yang berpindah ke barat karena faktor gerak patahan strike – slip dari Pulau Papua (New Guinea).

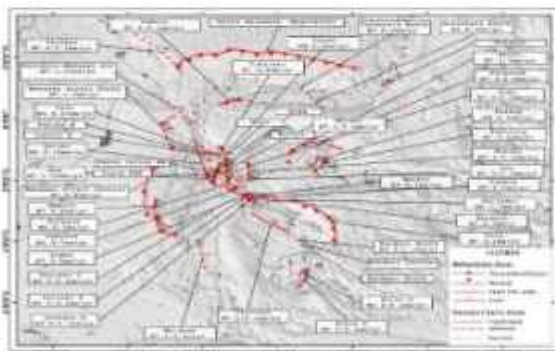
Secara khusus untuk bagian Mandala Barat yang memanjang dari lengan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sulawesi, terdiri dari batuan gunung api plutonik berusia Paleogen – Kuartar dengan batuan Mesozoikum – Tersier dan batuan metamorf. Secara garis besar, mandala ini terbagi atas bagian utara dari Kabupaten Buol hingga Manado yang bersifat riodasitik sampai Andesit pada Miosen– Resen dengan batuan dasar Basaltik yang terbentuk

pada Eosen – Oligosen dan bagian barat dari Kabupaten Buol hingga Kota Makassar dengan sifat kontinen yang tersusun dari batuan gunung api – sedimen berumur Mesozoikum – Kuartar dan batuan malihan Kapur, dimana batuanannya diterobos oleh batuan granit (granitoid), utamanya granodiorit sampai granit yang berupa batolit, stok dan retas.

Kota Palu tersusun dari endapan sedimen kuartar dalam lingkungan pengendapan kipas alluvium, endapan sungai, pantai dan laut dangkal, serta memiliki lapisan Molasa Celebes yang tersusun atas konglomerat, batupasir, batulumpur, batugamping koral dan napal. Ketebalan batuan dasar yang paling dangkal berada di kisaran 200 meter dari permukaan, ini berarti lapisan sedimen di lembah Palu atau tepatnya di pusat kota berkisar antara 200 – 300 meter dan masuk dalam kategori tebal.

Sejarah Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu

Dengan adanya proses tektonik yang rumit, maka menurut Buku Peta Bahaya Gempa Bumi di Indonesia (PUSGEN; 2017) setidaknya terdapat sekitar 48 patahan aktif pemicu gempa bumi di Sulawesi. Zona subduksi Utara Sulawesi perlu diwaspadai, sebab gempa besar diperkirakan dapat terjadi dengan kekuatan Mw 8,5 yang dapat memicu potensi tsunami di sepanjang pesisir bagian Utara Sulawesi.



Gambar 2.21 Peta Sumber Gempa Indonesia Tahun 2017

Sumber: Wilayah Sulawesi (PUSGEN; 2017)



Gambar 2.22 Peta Gempa Bumi Merusak dan Tsunami di Sulawesi Tahun 1904-2019

Sumber: (Stage of Palu; 2019)

Berdasarkan sejarah kegempaan dan kejadian tsunami maka Kabupaten Toli-Toli pernah dilanda gempa bumi merusak pada tahun 1983 (Mw6,0) dengan dua kejadian dan 1996 (Mw6,0), serta tsunami pada tahun 1904 (Mw6,0) di Kota Tolitoli dan 1996 (Mw7,9) di daerah Tonggolobibi – Kabupaten Donggala dan berdampak hingga di Soni – Kabupaten Toli-Toli. Sedangkan untuk tingkat guncangan gempa bumi, diperkirakan dapat mencapai intensitas maksimum yang bervariasi, berkisar antara 0,6 – 1,0 g atau setara VI-VIII MMI, bergantung pada tapak lokal pada setiap daerahnya. Kabupaten Tojo Una-Una pernah dilanda gempa bumi merusak pada tahun 2021 (Mw6,3) dengan tingkat guncangan di wilayah Ampana mencapai hingga VI MMI. Variasi intensitas tingkat guncangan gempa maksimum kabupaten ini, termasuk wilayah Kepulauan Wakai dan Togean diperkirakan berkisar antara 0,3 – 0,5 g atau setara VI-VIII MMI, bergantung pada tapak lokal pada setiap daerahnya. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai, pernah dilanda tsunami pada tahun 2000 dengan Mw7,6 dengan intensitas tingkat guncangan gempa maksimum kabupaten ini dapat mencapai 0,6 – 0,7 g atau setara VI-IX MMI. Catatan menarik terkait peluang keterpaparan tsunami di wilayah lengan timur Sulawesi bagian utara yakni dari Taopa – Pantai Timur, Parigi Moutong hingga Longkonga, Banggai yang berasal dari gempa yang terjadi di sekitaran Teluk Tomini. Sejarah gempa Mw7,6 (1938) di Pantai Timur dan Mw8,6 (1939) di Teluk Tomini (bagian selatan Gorontalo) serta kejadian gunung api Colo meletus di tahun 1983 dapat berdampak pada kejadian tsunami, namun tidak ada catatan resmi kejadian tsunami tersebut seberapa parah dampaknya dan di wilayah mana saja yang terdampak.

Untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala pernah terdampak gempa merusak M6,8 (1907), M7,1 (1909), M6,1 (1998), M6,3 (2005) dan M6,2 (2012) serta gempa merusak diikuti kejadian tsunami yaitu M6,0 (1927), Tambu Mw7,3 (1968), Tonggolobibi Mw7,9 (1996) di daerah Tanah Runtuh dan Tonggolobibi dengan gelombang tsunami setinggi 4 meter (m) dan terakhir, Mw7,4 (2018) yang gelombang tsunaminya mencapai 9 meter di Teluk Palu dengan kisaran intensitas tingkat guncangan

gempanya mencapai kisaran VI-IX MMI di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Adapun berdasarkan hasil penelitian PusGEN (2017), tingkat guncangan di kota Palu dapat mencapai 0,8-0,9 g atau dengan intensitas IX-X MMI dan menurut hasil survei mikrozonasi peta indeks kerentanan gempabumi di Kota Palu yang dilaksanakan oleh Stageof Palu sebelum tanggal 28 September 2018 (BPBD Palu; 2018) mencapai nilai sebesar 0,5 g atau sebesar VII-IX MMI.

Tabel 2.32 Data kejadian Gempabumi Mw > 5,7 di Palu dan sekitarnya Tahun 1907-2018

No	Waktu	Lintang	Bujur	Kedalaman (km)	Mw	Lokasi	Keterangan
1	30/7/1907- WITA	-1.330	120.030	33	6.8	2 km arah barat Tomado (Kab. Sigi)	Sigi VI-VII MMI, Palu V-VI MMI
2	18/3/1909- 6:53:10WITA	-1.510	120.010	33	7.1	8 km arah selatan Kulawi (Kab. Sigi)	Kulawi VII MMI, Palu V-VI MMI
3	1/12/1927- 12:37:27WITA	-0.608	119.751	33	6.0	5 km arah barat Toaya - Donggala	Palu VII MMI, Tsunami di Teluk Palu
4	20/5/1938- 1:8:21WITA	-0.700	120.300	13	7.6	19 km arah timurlaut Parigi - Parigi Moutong	Parigi VIII MMI, Palu VI MMI, Tsunami di Pantai Timur - Parigi Moutong
5	15/8/1968- 6:14:20WITA	0.570	119.802	22	7.3	22 km arah barat laut Tonggolobibi - Donggala	Donggala VII MMI, Palu IV-V MMI, Tsunami di Tambu dan terjadi Tanah Runtuh
6	21/5/1998- 13:34:26WITA	0.200	119.580	28	6.2	di laut, 31 Km arah Barat Sabang - Donggala	Donggala IV-V MMI, Palu IV-V MMI, Poso dan Toli-Toli III-IV MMI
7	10/10/1998- 24:32:19WITA	0.000	119.000	33	6.1	di laut, 77 km arah barat Malei (Kab. Donggala)	Donggala dan Palu III-IV MMI
8	24/1/2005- 4:10:12WITA	-1.190	119.930	11	6.3	di laut, 3 Km arah TimurLaut Bulubete - Sigi	Palu V MMI, Parigi III MMI
9	18/8/2012- 17:41:51WITA	-1.302	120.037	10	6.2	darat, 45 km arah selatan Parigi - Parigi Moutong	Lindu VI-VII MMI, Kulawi VI MMI, Palu IV-V MMI, Parigi IV MMI
10	29/5/2017- 22:35:22WITA	-1.330	120.410	10	6.6	di darat, 14 Km arah TimurLaut Wuasa - Poso	Torue dan Poso V MMI; Palu dan Sigi III-IV MMI; Toli-Toli, Pasang Kayu dan Tana Toraja III MMI; Palapo, Masamba, Balikpapan, Gorontalo, Bone Bolango dan Soroako II-III MMI
11	28/9/2018- 14:59:56WITA	-0.350	119.820	10	6.0	di laut, 11 Km arah BaratLaut Alindau - Donggala	Donggala IV MMI, Palu III MMI, Poso II-III MMI
12	28/9/2018- 18:2:43WITA	-0.190	119.830	10	7.4	di darat, 3 Km arah TimurLaut Tompe - Donggala	Donggala dan Palu VIII-IX MMI, Sigi VII-VIII MMI, Parigi, V-VII MMI, Poso V MMI, Morowali, Kendari, Kolaka, Toraja, Palopo, Makassar II-III MMI, Tsunami di Teluk Palu, Likuifaksi dan Tanah Longsor di Serenja, Kulawi dan Kebun

Sumber: Stasiun Geofisika Palu; 2022

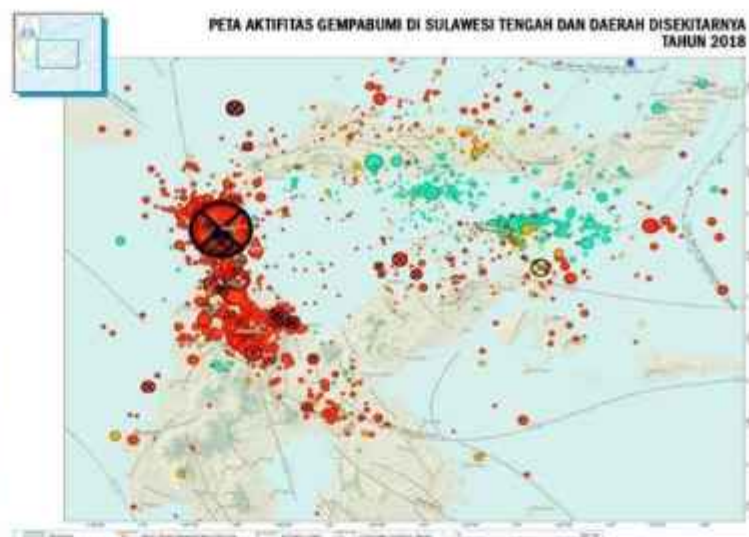
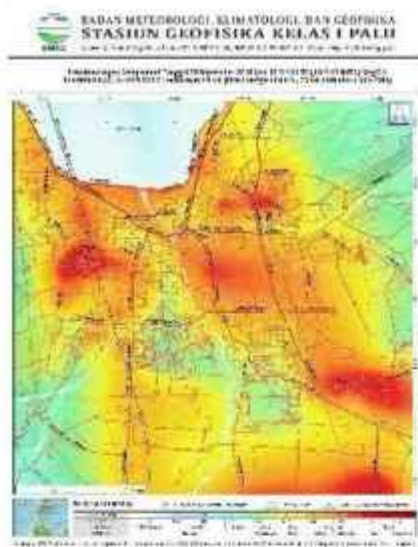
Sejarah Tanah Longsor dan Likuifaksi Tsunami di Kota Palu

Sejarah kejadian tanah longsor dan likuifaksi yang diakibatkan oleh faktor guncangan gempa bumi pernah terjadi pada gempa bumi 1968 di wilayah Pantai Barat – Donggala. Terdapat suatu kawasan yang dikenal sebagai Tanah Runtuhan sebab waktu guncangan gempa terjadi, Kawasan tersebut bergerak turun dan pada Kawasan pesisir pantai terdapat bukti tanahnya mengalami longsor sehingga memicu tsunami. Untuk gempa Mw7,4 tahun 2018, terdapat likuifaksi massif di kawasan Balaroa dan Petobo Kota Palu serta Kawasan Sibalaya dan Jono Oge Kabupaten Sigi. Likuifaksi skala kecil terjadi di beberapa lokasi baik di Palu maupun di Sigi, bahkan banyak jalur air bawah permukaan yang tiba-tiba muncul. Untuk kasus tanah longsor, terjadi di Sirenja, Kebun Kopi dan Kulawi serta kurang lebih beberapa lokasi kejadian longsor di sepanjang pesisir Teluk Palu yang memicu kejadian tsunami di Teluk Palu. Berdasarkan hasil survei tsunami BMKG, terdapat kasus tsunami dengan tinggi mencapai 10 meter di Kawasan Tondo dan inundasi/rayapan tsunami maksimum terjadi sejauh 460 meter di daerah Silae.

Hasil survei mikroseismik gempa bumi merusak Mw7,4 yang dilaksanakan oleh BMKG menemukan tingkat guncangan gempa di Palu sangat bervariasi dengan intensitas VI-IX MMI. Gempa Mw7,4 ini didahului oleh gempa pendahuluan sebanyak 26 gempa dengan magnitudo terbesar Mw6,0 pada pukul 14:59:56 WITA dan ternyata seminggu sebelumnya terdapat dua gempa berskala M4,8 yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 September 2018. Gempa ini dikategorikan tipe Mogi 1, yaitu gempa utama yang didahului oleh gempa pendahuluan/rintisan dan diikuti serangkaian gempa susulan. Lama energi yang terlepas hingga menuju ke keadaan normal berkisar 35 hari sejak gempa utama terjadi. Gempa ini dikenal sebagai Gempabumi Merusak Sulawesi Tengah Mw7,4 Tanggal 28 September 2018 dan masuk dalam kategori bencana level Provinsi. Dampak kerugian yang ditimbulkan menurut BNPB (2019) ialah korban jiwa termasuk yang hilang sebanyak 4.340 jiwa, 175.000-an orang mengungsi, dan 68.451 rumah rusak dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp. 2,9 Triliun dan dampak kerusakan mencapai Rp. 15,6 T.



Gambar 2.23 Peta-Peta hasil pengukuran tsunami (BMKG; 2018)
Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Gambar 2.24 Peta Hasil Survei Makroseismik Tingkat Kerusakan Gempa Mw7,4 tanggal 28 September 2018 di Kota Palu (kiri, Stageof Palu; 2018) dan Peta Sebaran Gempa Bumi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya Tahun 2018 (kanan, Stageof Palu; 2019)

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Risiko Bencana Kota Palu

Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Palu

Hasil analisis risiko bencana gempa bumi di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap gempa bumi terutama di wilayah zona-zona patahan sepanjang jalur Patahan Palu-Koro lebih cenderung memiliki risiko tinggi seperti di Palu Selatan, Palu Tengah dan Palu Utara, Mantikulore dan Ulujadi yang lebih memiliki kecenderungan ancaman tinggi dan risiko bencana terhadap gempabumi juga tinggi. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara geologi jauh dari zona patahan-patahan Utama. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi –

sedang berada di wilayah jalur patahan, memiliki morfologi sedang – curam, karena wilayah-wilayah ini adalah bagian dari proses struktural yang bekerja. Dari hasil analisis kajian risiko bencana gempa bumi di Kota Palu secara keseluruhan memiliki potensi ancaman bencana gempa bumi. Secara keseluruhan Kota Palu terpapar dengan ancaman bencana gempa bumi, dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 85% wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana gempa bumi terhadap bencana gempa bumi, secara luasan wilayah 50.459.991 M2 atau 5.046 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 123.814.976 M2 atau 12.381 hektar berada di zona risiko sedang dan 182.087.160 M2 atau 18.208,7 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.33 Luasan Wilayah yang memiliki Risiko Bencana Gempabumi di Kota Palu

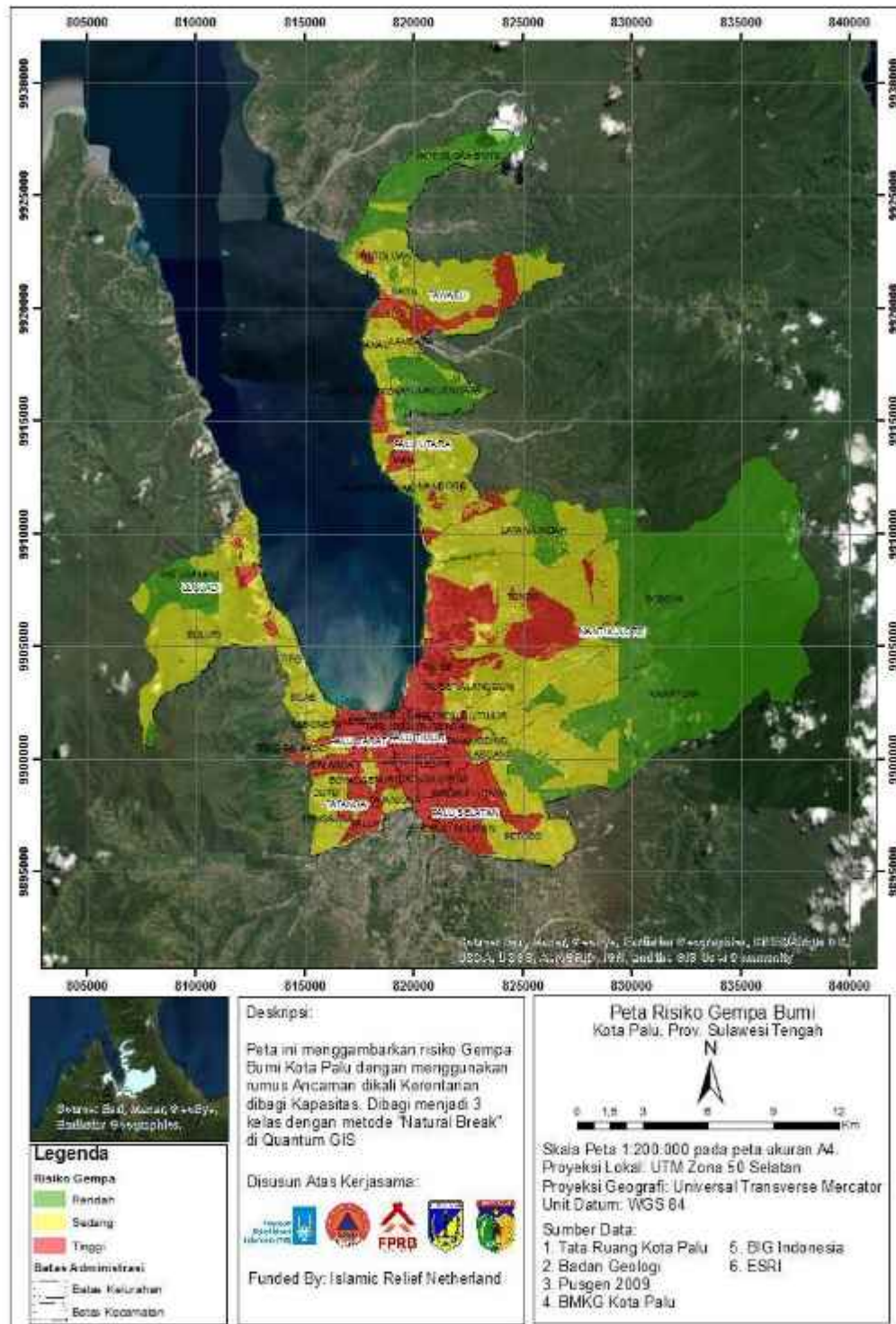
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI RENDAH (M ²)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI SEDANG (M ²)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI TINGGI (M ²)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI TINGGI (Ha)
Montikulore	134.737.195	13.473,7	43.349.323	4.335	18.515.000	1.851
Palu Barat	27.154	2,7	87.874	10	6.092.802	609
Palu Timur	4.245	0,4	46.736	5	6.223.065	622
Palu Selatan	2.396.601	239,7	4.895.620	490	13.211.745	1.321
Palu Utara	10.890.920	1.089,0	16.587.896	1.659	1.511.405	151
Tatanigga	546.795	54,7	10.681.706	1.068	1.476.437	148
Tawaeni	18.587.568	1.858,8	22.579.296	2.258	2.598.289	260
Ulujadi	15.397.379	1.539,7	25.627.025	2.563	603.230	60
TOTAL	182.087.160	18.208,7	123.814.976	12.381	50.459.991	5.046

Sumber: KRB Kota Palu, Tahun 2022-2027

Tabel 2.34 Nilai Indeks Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA GEMPABUMI	TINGKAT RISIKO
0 – 43	RENDAH
44 – 69	SEDANG
70 – 120	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Gambar 2.25 Peta Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu
Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Gempabumi Kota Palu

Valuasi risiko bencana gempabumi adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan. Dalam kajian risiko bencana gempa bumi aset yang memiliki keterpaparan tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi terutama gempa bumi di atas 6 – 7 SR yang berpotensi terjadi adalah jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang terpapar terhadap zona-zona ancaman gempa bumi yang berada di sepanjang jalur-jalur gempa dan patahan terutama yang berada di Zona Patahan Palu-Koro di sepanjang lembah Palu, Kota Palu.

Penduduk yang terpapar terhadap ancaman bencana sebagian hidup di jalur zona patahan, terutama yang berada di daerah berisiko tinggi dan risiko sedang terhadap ancaman bencana gempa bumi. Secara keseluruhan berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka, 2020 Kota Palu memiliki total jumlah penduduk 390,270 jiwa terdiri dari 196,578 jiwa penduduk laki-laki dan 194,778 jiwa penduduk perempuan jiwa, yang tersebar di 8 kecamatan, berdasarkan hasil

Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2020, Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana gempa bumi adalah 105.162 jiwa atau sekitar 27% dari total jumlah penduduk Kota Palu berada di zona risiko bencana gempa bumi diantaranya 78.207 jiwa memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 23.951 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 3.004 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk

Tabel 2.35 Luas Risiko dari sisi permukiman dan penduduk pada ancaman Gempabumi di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI TINGGI
Montikulore	3.050.745	1.019	4.788.607	1.599	6.774.333	2.262
Palu Barat	24	0	84.035	673	4.715.044	37.746
Palu Timur		-	31.533	111	5.999.427	21.141
Palu Selatan	105.182	158	801.287	1.201	9.210.325	13.806
Palu Utara	1.102.901	926	2.579.234	2.165	450.372	373
Tatangga	71.616	232	4.404.385	14.289	824.859	2.676
Tawaeli	379.598	185	2.896.487	1.412	65.630	32
Ulujadi	703.761	484	3.637.906	2.501	241.292	166
TOTAL	5.413.847	3.004	19.229.474	23.951	28.281.282	78.207

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Gempabumi Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap risiko bencana di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana gempa bumi Kota Palu.

Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana gempa bumi Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat

dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 6.368 bangunan dengan luasan 461.751 M2, total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 20.021 bangunan dengan luas 2.841.469, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 30.155 bangunan dengan luas 5.549.119

M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3.000.000/meter² maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah $5.549.119 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 16.647.357.000.000$ nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.36 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan yang memiliki Risiko Bencana Gempabumi di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI
Montikulore	2.781	5.040	6.299	289.025	659.897	1.074.925
Palu Barat		192	5.304		28.581	1.072.827
Palu Timur		86	7.057		12.902	1.487.923
Palu Selatan	319	1.160	9.293	38.407	169.824	1.608.946
Palu Utara	1.269	2.337	439	212.843	451.644	66.596
Tatangga	233	4.142	1.141	22.294	620.252	161.503
Tawacli	760	2.698	183	94.370	380.676	13.603
Ulujadi	1.006	4.366	439	93.837	517.693	62.796
TOTAL	6.368	20.021	30.155	461.751	2.841.469	5.549.119

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Risiko Bencana Likuefaksi Kota Palu

Hasil analisis risiko bencana likuefaksi di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap gempa bumi terutama di wilayah zona-zona patahan dan memiliki potensi likuefaksi. Ancaman bencana likuefaksi lebih cenderung memiliki risiko tinggi seperti di Palu Selatan, Palu Tengah dan Palu Utara, Mantikulore dan Ulujadi yang lebih memiliki kecenderungan adanya kejadian likuefaksi. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara geologi jauh dari zona patahan- patahan Utama dan zona yang tidak berada di wilayah permukiman dan tidak memiliki potensi likuefaksi. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah yang memiliki lapisan tanah atau batuan yang kecenderungan jenuh terhadap air, memiliki morfologi sedang – curam, karena wilayah-wilayah ini adalah bagian dari likuefaksi dapat terjadi. Dari hasil analisis kajian risiko bencana likuefaksi di Kota Palu secara keseluruhan memiliki potensi ancaman bencana likuefaksi. Secara keseluruhan Kota

Palu terpapar dengan ancaman bencana likuefaksi, dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022, 20 % wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana likuefaksi, dimana secara luasan wilayah 2.248.441 M2 atau 225 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 21.843.586 M2 atau 2.184 hektar berada di zona risiko sedang dan 35.745.999 M2 atau 3.575 hektar berada di zona risiko rendah.

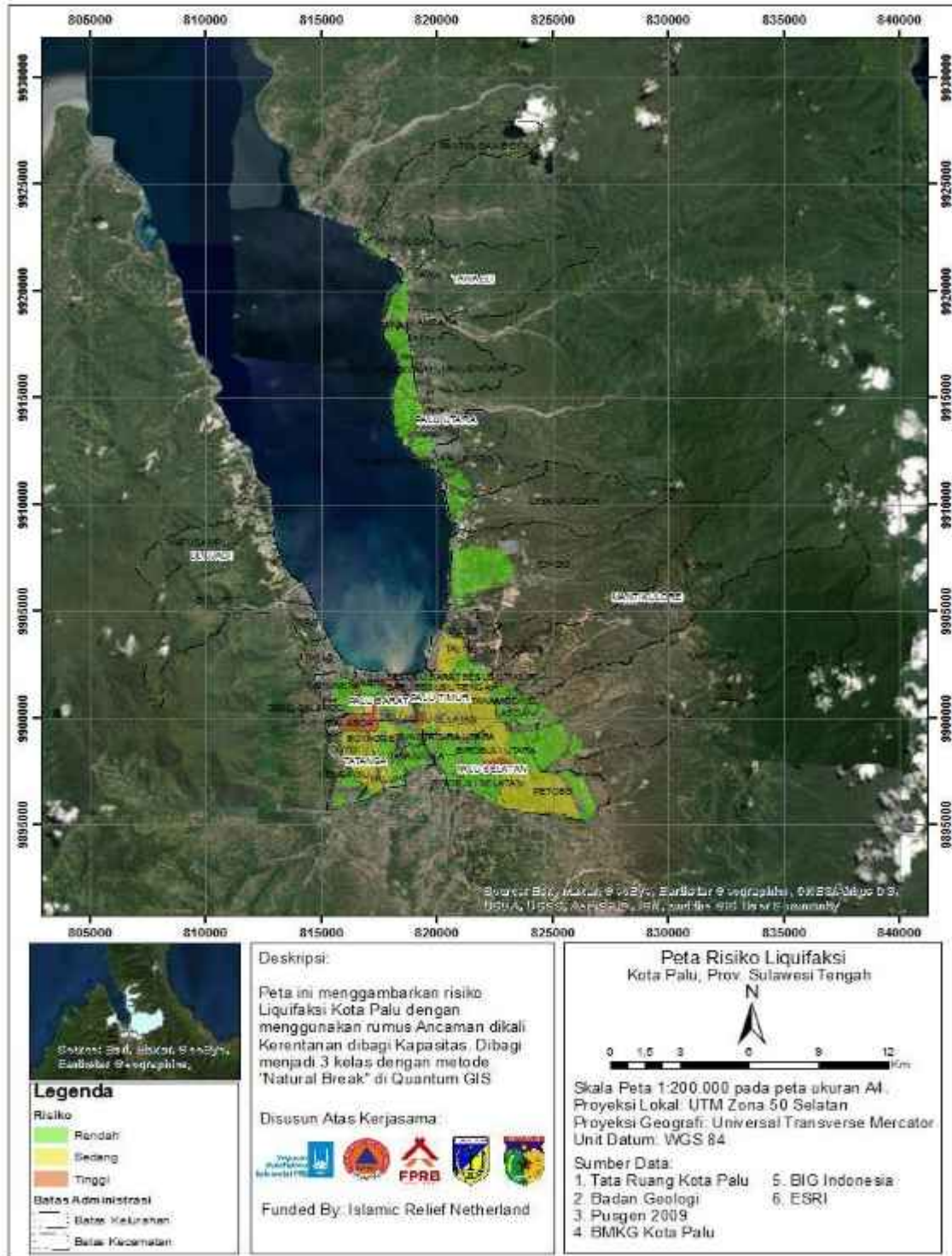
Tabel 2.37 Luasan Wilayah yang Memiliki Risiko Bencana Likuefaksi di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO LIKUEFAKSI RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO LIKUEFAKSI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LIKUEFAKSI SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO LIKUEFAKSI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LIKUEFAKSI TINGGI
Montikulore	12.192.967	1.219	9.612.413	961	-
Palu Barat	1.100.000	110	310.000	31	1.079.197
Palu Timur	700.100	71	8.000.310	800	100.710
Palu Selatan	2.400.000	240	2.613.967	261	990.000
Palu Utara	3.500.000	350	-	-	-
Tatangga	3.100.700	310	-	-	10.110
Tawacli	3.007.910	301	3.100.000	310	-
Ulujadi	1.971.000	197	570.000	57	-
TOTAL	22.749.999	2.279	21.843.586	2.184	2.248.441

Tabel 2.38 Nilai Indeks Risiko Bencana Likuefaksi Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	TINGKAT RISIKO
25 – 65	RENDAH
69 – 127	SEDANG
129 – 177	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Gambar 2.26 Peta Risiko Bencana Likuefaksi Kota Palu
Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Terpapar Bencana Likuefaksi Kota Palu

Valuasi risiko bencana Likuefaksi adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan. Dalam kajian risiko bencana Likuefaksi aset yang memiliki keterpaparan tinggi terhadap ancaman bencana Likuefaksi terutama Ketika terjadi gempa bumi di atas 6 – 7 SR yang berpotensi terjadi yang dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman Likuefaksi.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana Likuefaksi di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana Likuefaksi di Kota Palu adalah 71.659 jiwa diantaranya 9.577 memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 31.280 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 30.803 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.39 Luas Permukiman dan Penduduk di Zona Risiko Bencana Likuefaksi di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)	JUMLAH PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)	JUMLAH PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)	JUMLAH PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI
Manukabe	3.765.518	1.814	3.056.300	1.010		
Palu Barat	1.190.704	8.446	2.16.467	4.110	1.058.302	8.434
Palu Timur	100.000	2.487	3.346.241	10.014	171.000	888
Palu Selatan	4.202.118	1.319	3.023.090	3.304	940.220	111
Palu Utara	1.675.340	1.378				
Tanungg	3.000.001	8.318	3.000.000	8.497		-
Tawali	332.181	901		-		-
Uluwaki	300.000	819	300.000	108		
TOTAL	18.066.861	30.000	18.066.861	30.000	1.876.840	9.577

Sumber: RNN Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Likuefaksi Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana Likuefaksi di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana Likuefaksi Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana Likuefaksi Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 36.319 bangunan dengan luasan 36.319 M2, total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 29.952 bangunan dengan luas 4.910.021 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 5.317 bangunan dengan luas 731.443 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3.000.000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah $731.443 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 2.194.329.000.000$ nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.40 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan yang memiliki Risiko Bencana Likuefaksi di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA LIKUEFAKSI (METER KUADRAD)
Manukabe	3007	8000		3.001.000	987.000	
Palu Barat	1000	1000	1100	100.000	100000	100.000
Palu Timur	1000	1000	100	100.000	1.000.000	10.000
Palu Selatan	1000	1000	100	1.000.000	1.000.000	10.000
Palu Utara	1000	1000				
Tanungg	1000	1000				
Tawali	1000	1000				
Uluwaki	1000	1000				
TOTAL	10.000	10.000	1.000	1.000.000	1.000.000	10.000

Sumber: RNN Kota Palu Tahun 2022-2027

Risiko Bencana Tsunami Kota Palu

Hasil analisis risiko bencana tsunami di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap tsunami terutama di wilayah pesisir pantai dengan radius 100 – 400 meter. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara morfologi berada jauh dari pesisir pantai. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah yang berada di dataran rendah di sekitar pantai, memiliki morfologi datar – landai. Dari hasil analisis kajian risiko bencana Tsunami di Kota Palu secara keseluruhan Kota Palu di bagian pesisir utara, timur dan barat sepanjang Teluk Palu terpapar dengan ancaman bencana tsunami. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 dimana 10 % wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana tsunami, dimana secara luasan wilayah 2.248.441 M2 atau 225 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 21.843.586 M2

atau 2.184 hektar berada di zona risiko sedang dan 35.745.999 M2 atau 3.575 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.41 Luasan Wilayah yang memiliki Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (M2)	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (HA)	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (M2)	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (HA)	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (M2)	LUAS WILAYAH RIBUNO TERNAN (HA)
Mondulene	12.532.187	1.253	5.812.813	581	-	-
Palu Barat	1.338.819	134	118.386	12	1.374.137	137
Palu Timur	788.108	79	2.392.319	239	199.714	20
Palu Selatan	4.408.887	441	6.115.587	612	448.433	45
Palu Utara	2.206.508	221	-	-	-	-
Tamaga	4.340.700	434	-	-	15.118	2
Tonasa	2.587.812	259	8.109.082	811	-	-
Uluju	1.871.809	187	278.994	28	-	-
TOTAL	35.745.999	3.575	21.843.586	2.184	2.248.441	225

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.42 Nilai Indeks Risiko Bencana Tsunami Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI	TINGKAT RISIKO
01 – 57	RENDAH
58 – 114	SEDANG
115 – 271	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Gambar 2.27 Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Palu
Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Tsunami Kota Palu

Valuasi risiko bencana tsunami adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana tsunami dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman tsunami terutama di sepanjang pesisir utara, timur dan barat Teluk Palu.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana tsunami berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana tsunami adalah 13.619 jiwa, yang terdiri dari 3.676 jiwa memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 5.647 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 4.368 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.43 Luas Keterpaparan Permukiman dan Keterpaparan Penduduk di Zona Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (M2)	KEKETERPAPARAN PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (JUTA ORANG)	LUAS PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (M2)	KEKETERPAPARAN PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (JUTA ORANG)	LUAS PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (M2)	KEKETERPAPARAN PERKAWASAN RUMAH SAKIT BERBAHAYA (JUTA ORANG)
Manukuhutu	305.410	89	340.300	121	400.000	139
Palu Barat	400.000	5.377	205.000	0.005	320.000	2.800
Palu Timur	141.000	114	600.000	5.722	107.000	601
Palu Selatan	-	-	-	-	77.000	110
Palu Utara	66.000	14	600.000	0.01	-	-
Tinogge	-	-	-	-	-	-
Tonoli	8.000	2	100.000	71	8.000	8
Ulujuhi	171.000	118	610.000	410	-	-
TOTAL	1.220.410	4.368	4.075.300	5.647	3.090.000	3.676

Sumber: KTR Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Tsunami Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana tsunami di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 13.840 bangunan dengan luasan 373.614 M2 total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 15.968 bangunan dengan luas 674.630 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 8.622 bangunan dengan luas 3.340.957 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah $3.340.957 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp}10.022.871.000.000$ nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.44 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan yang memiliki Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN BERBAHAYA (RUMAH SAKIT BERBAHAYA)	LUAS BANGUNAN BERBAHAYA (M2)	JUMLAH BANGUNAN BERBAHAYA (RUMAH SAKIT BERBAHAYA)	LUAS BANGUNAN BERBAHAYA (M2)	JUMLAH BANGUNAN BERBAHAYA (RUMAH SAKIT BERBAHAYA)	LUAS BANGUNAN BERBAHAYA (M2)
Manukuhutu	1.024	0.139	1.000	60.124	27.000	344.700
Palu Barat	6.137	6.301	3.000	140.000	110.720	1.000.000
Palu Timur	6.201	4.027	5.140	74.503	221.000	257.400
Palu Selatan	-	-	-	-	-	11.000
Palu Utara	600	0.01	-	17.471	90.734	-
Tinogge	-	-	-	-	-	1.000.000
Tonoli	97	0.01	-	1.070	80.000	-
Ulujuhi	2.901	3.300	40	30.000	100.000	214.000
TOTAL	21.353	13.619	9.000	270.000	670.000	3.340.957

Sumber: KTR Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Longsor Kota Palu

Valuasi risiko bencana longsor adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana longsor dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman longsor terutama di sepanjang perbukitan di bagian timur dan barat Kota Palu.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana longsor berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu 4.706 jiwa yang terdiri dari 1.131 jiwa memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 2.491 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 901 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.47 Luas Permukiman dan Penduduk di Zona Risiko Bencana Longsor di Kota Palu

KECAMATAN	Luas Wilayah Berisiko (Hektar)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk Berisiko (%)	Jumlah Penduduk Berisiko (Jiwa)	Jumlah Penduduk Berisiko (Jiwa)	Jumlah Penduduk Berisiko (Jiwa)
Manukoro	81.332	9	891.822	220	220.000	220
Palu Barat	-	79.000	410	30.000	30.000	30.000
Palu Timur	-	120.479	580	580	580	580
Palu Selatan	-	-	-	-	-	-
Palu Utara	19	11.100	99	99	99	99
Tonasa	92.800	100	10.780	607	607	607
Tonawati	240.700	73	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000
Uluwatu	1.000.000	710	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000
Jumlah	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	1.000

Sumber: ARB Kota Palu Tahun 2022-2023

Valuasi Risiko Bencana Longsor Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana longsor di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana longsor Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 9.421 bangunan dengan luasan 657.239 M2, total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 6.478 bangunan dengan luas 2.719.965 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 3.579 bangunan dengan luas 306.773 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3.000.000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah $306.773 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 92.031.900.000$ nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.48 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan yang memiliki Risiko Bencana Longsor di Kota Palu

KECAMATAN	Jumlah Bangunan Berisiko	Luas Bangunan Berisiko (M2)	Jumlah Bangunan Berisiko	Luas Bangunan Berisiko (M2)	Jumlah Bangunan Berisiko	Luas Bangunan Berisiko (M2)
Manukoro	2.117	8.400	1.001	395.811	300.220	140.000
Palu Barat	400	400	-	-	-	17.174
Palu Timur	-	-	-	-	-	-
Palu Selatan	-	-	-	-	-	-
Palu Utara	34	34	34	1.170	33.000	3.107
Tonasa	77	88	7	7.000	100.000	107
Tonawati	100	100	177	40.100	170.000	18.000
Uluwatu	3.014	2.300	1.000	287.000	1.700.000	181.000
Jumlah	3.400	3.400	3.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Sumber: ARB Kota Palu Tahun 2022-2023

Valuasi Risiko Bencana Longsor terhadap Luas Wilayah Yang Memiliki Perkebunan dan Ladang di Kota Palu

Hasil kajian Tim Penyusun KRB Kota Palu, 2022 mengidentifikasi pada daerah zona kelerengan datar – sedang di kawasan perbukitan banyak digunakan sebagai ladang dan perkebunan yang tersebar di zona kawasan risiko longsor. Perkebunan dan ladang yang terpapar zona risiko bencana longsor di Kota Palu adalah 5.315 hektar.

Tabel 2.49 Luas Keterpaparan Perkebunan dan Ladang yang ada di Zona Risiko Bencana Longsor Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAKARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RENCAN LONGSOR RENDAH (Ha)	LUAS KETERPAKARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RENCAN LONGSOR SEDANG (Ha)	LUAS KETERPAKARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RENCAN LONGSOR TINGGI (Ha)
Montikulore	100	1.073	1.039
Palu Barat	-	8	87
Palu Timur	-	11	0
Palu Selatan	-	13	41
Palu Utara	100	90	90
Tatangga	11	89	90
Tawaeli	13	100	100
Ulujadi	90	210	1.000
TOTAL	610	2.000	2.000

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Risiko Bencana Banjir Kota Palu

Hasil analisis risiko bencana banjir di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, ancaman banjir sangat dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi daerah aliran sungai, dan cuaca extreme yang terjadi akibat La Nina yang tinggi. Adanya material rombakan yang bisa diakibatkan oleh adanya gempa bumi yang ada di sepanjang perbukitan dapat memicu terjadinya banjir bandang yang melewati lemah sungai di sepanjang alur

sungai yang memiliki kelerengan curam – sedang dan membawa material rombakan yang ada di bagian hulu di wilayah perbukitan bagian timur dan barat yang pada saat terjadi run off yang tinggi dapat membawa material-material besar seperti pasir, batu, pohon, lumpur dan melewati sepanjang alur sungai, namun pada kondisi hujan extreme yang tidak memicu terjadinya banjir bandang beberapa wilayah yang sudah dipetakan akan memiliki potensi risiko terhadap banjir genangan. Wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap ancaman banjir berada di wilayah sepanjang sungai Palu dan berbagai alur sungai yang melewati permukiman dan masuk ke Sungai Palu. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 risiko bencana banjir berada di 10 % wilayah Kota Palu yang berada di daerah aliran sungai, dengan luasan wilayah 6.154.081 M2 atau 615 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 14.586.519 M2 atau 1.459 hektar berada di zona risiko sedang dan 13.612.568 M2 atau 1.361 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.50 Luasan Wilayah yang memiliki Risiko Bencana Banjir di Kota Palu

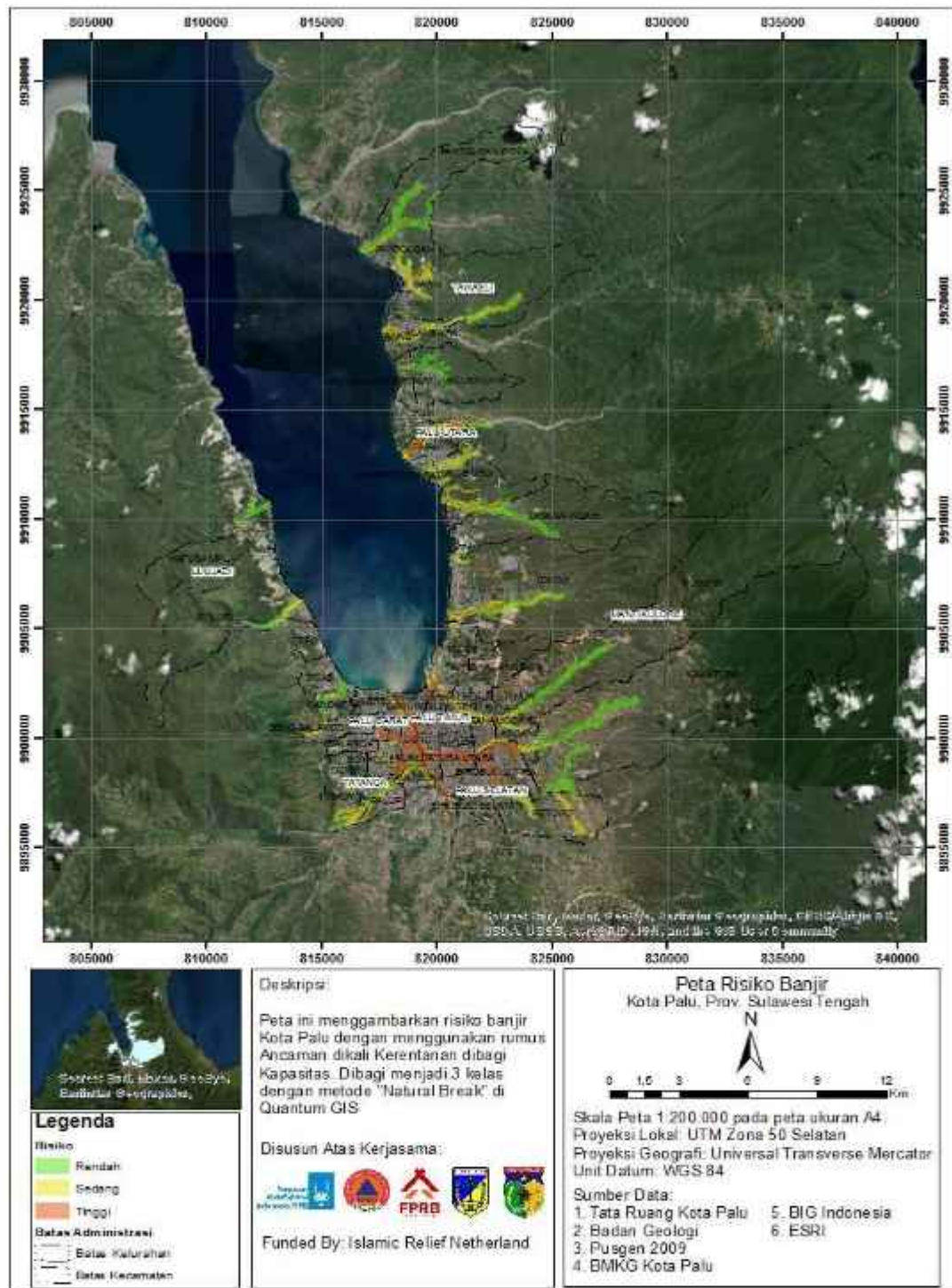
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI (Ha)
Montikulore	6.831.297	683	4.060.270	406	303.494	30
Palu Barat	-	-	212.321	21	815.682	82
Palu Timur	-	-	343.868	34	728.707	73
Palu Selatan	17.490	2	1.389.036	139	2.417.485	242
Palu Utara	1.326.653	133	2.900.900	290	763.748	76
Tatangga	539.972	54	1.891.896	189	987.020	99
Tawaeli	3.054.090	305	3.253.202	325	137.945	14
Ulujadi	1.843.068	184	535.028	54	-	-
TOTAL	13.612.568	1.361	14.586.519	1.459	6.154.081	615

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.51 Nilai Indeks Risiko Bencana Banjir Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR	TINGKAT RISIKO
16 – 62	RENDAH
63 – 102	SEDANG
103 – 185	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Gambar 2.29 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Palu
Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Banjir Kota Palu

Valuasi risiko bencana banjir adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana banjir dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di

seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman tsunami terutama di sepanjang daerah aliran sungai.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana banjir berada di 8 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko

Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana banjir adalah 20.087 jiwa yang terdiri dari 3.521 jiwa memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 16.351 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 215 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.52 Luas Permukiman dan Penduduk di Zona Risiko Bencana Banjir di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN (m ²)	KEPOPULASI	LUAS PERMUKIMAN (m ²)	KEPOPULASI	LUAS PERMUKIMAN (m ²)	KEPOPULASI
Mentawai	88.398	23	2.088.248	879	305.360	187
Pala Barat	874	3	797.088	3.983	140.018	1.121
Pala Timur	7.547	27	787.453	2.348	158.999	464
Pala Selatan	18.368	29	1.797.338	2.884	332.830	829
Pala Utara	4.889	3	818.778	314	108.482	87
Tutungan	4.507	19	1.087.332	3.480	173.811	389
Tuwali	71.248	88	714.724	349	108.889	59
Ujuali	110.428	70	408.082	277	-	-
TOTAL	295.364	213	8.888.217	16.835	1.561.389	2.224

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko

rendah 1.704 bangunan dengan luasan 64.210 M², total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 22.696 bangunan dengan luas 2.515.886 M², dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 5.857 bangunan dengan luas 564.535 M². Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3.000.000/meter² maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 564.535 x Rp 3.000.000 = Rp 1.693.605.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.53 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan yang memiliki Risiko Bencana Banjir di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m ²)	JUMLAH BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m ²)	JUMLAH BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m ²)
Mentawai	484	8.383	1.071	26.341	888.210	147.309
Pala Barat	13	2.350	483	408	843.348	35.861
Pala Timur	19	2.090	799	9.810	829.332	180.854
Pala Selatan	104	9.434	1.374	431	247.088	77.831
Pala Utara	44	1.738	335	1.751	174.838	21.079
Tutungan	81	2.202	629	1.294	816.338	68.888
Tuwali	458	1.738	314	10.243	114.388	64.081
Ujuali	313	1.281	2.331	100.051	-	-
TOTAL	1.704	28.888	5.857	46.819	2.515.886	564.535

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Sawah

Hasil kajian Tim Penyusun KRB Kota Palu, 2022 mengidentifikasi pada daerah zona kelerengan datar di sepanjang alur sungai di kawasan lembah yang digunakan untuk area persawahan. Sawah yang terpapar zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah 226 hektar.

Tabel 2.54 Luas Sawah di Zona Risiko Banjir di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN ZONA RENDAH (ha)	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN ZONA SEDANG (ha)	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN ZONA TINGGI (ha)
Mentawai	12	18	34
Pala Barat	-	-	-
Pala Timur	+	+	+
Pala Selatan	2	11	+
Pala Utara	2	38	81
Tutungan	11	19	18
Tuwali	8	11	-
Ujuali	8	+	+
TOTAL	36	118	98

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu

Hasil analisis risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, ancaman sangat dipengaruhi

Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu

Valuasi risiko bencana kebakaran permukiman adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana kebakaran permukiman dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memiliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman kebakaran terutama di sepanjang daerah aliran sungai.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana kebakaran permukiman berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana banjir adalah 136 jiwa memiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 463 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, kebakaran permukiman hanya dihitung berdasarkan wilayah yang memiliki risiko sedang dan tinggi, karena pembagian kelas menjadi tiga pada wilayah yang memiliki risiko rendah berada di area di luar permukiman.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.57 Luas Permukiman dan Penduduk di Zona Risiko Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	LOKASI PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	LOKASI PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI	LOKASI PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN RENDAH
Montikulene	98.000	18	-	-
Palu Barat	-	-	32.330	348
Palu Timur	-	-	37.868	188
Palu Selatan	10.748	18	88.194	38
Palu Utara	12.819	18	-	-
Tanangga	51.904	73	6.294	18
Tuwali	12.880	8	-	-
Uquah	18.779	18	-	-
TOTAL	128.930	136	116.586	494

Sumber: KRD Kota Palu Tahun 2022-2027

Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawasan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streetmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 831 bangunan dengan luasan 42.209 M2, total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 74.419 bangunan dengan luas 9.256.356 M2 dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 39.120 bangunan dengan luas 6.944.773 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3.000.000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah $6.944.773 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 20.834.319.000.000$ nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.58 Jumlah Bangunan dan Luas Bangunan di Zona Risiko Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI	JUMLAH BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN RENDAH	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI	LUAS BANGUNAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN RENDAH
Montikulene	480	90.114	-	98.198	5.692.894	-
Palu Barat	-	98	12.012	-	9.250	1.980.000
Palu Timur	-	-	18.868	-	9.449.520	1.980.000
Palu Selatan	-	1.008	18.194	-	1.008.972	1.980.000
Palu Utara	880	8.884	-	88.263	1.188.756	-
Tanangga	-	51.790	1.888	-	1.990.000	1.980.000
Tuwali	1	1.280	-	-	88.194	-
Uquah	0	18.779	18	-	1.170.712	-
TOTAL	1.360	136.000	39.120	128.930	116.586	494.000

Sumber: KRD Kota Palu Tahun 2022-2027

Indeks Resiko Bencana

Indeks resiko bencana Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Gambar 2.31 Indeks Resiko Bencana Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kota Palu 2024

Pada tahun 2020, indeks berada di angka 162,7, lalu sempat naik pada 2021 menjadi 168,25. Angka ini cukup tinggi dan mencerminkan bahwa risiko bencana di daerah (dalam hal ini bisa kita lihat sebagai Kota Palu) masih sangat besar, yang dapat disebabkan oleh kondisi geografis, kerentanan infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat yang belum optimal.

Pada 2022, indeks menurun cukup signifikan ke angka 151,48. Penurunan ini menandakan adanya langkah-langkah mitigasi yang mulai terasa, seperti perbaikan infrastruktur tahan gempa, pembangunan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, hingga pelibatan masyarakat dalam penanganan bencana.

Pada 2023, penurunan risiko berlanjut menjadi 132,03, dan mencapai angka terendah di 2024 dengan 116,55. Penurunan drastis ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, relawan, akademisi, komunitas lokal, dan seluruh warga yang bahu-membahu membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Menurunnya indeks risiko bencana tidak berarti Kota Palu terbebas sepenuhnya dari potensi bencana. Namun ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan, perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan, dan budaya sadar risiko di masyarakat benar-benar memberikan hasil nyata.

Tren penurunan ini terus dijaga. Karena di daerah rawan bencana seperti Palu, membangun kesadaran dan kemampuan bertahan adalah kunci keselamatan. Semoga upaya ini dapat menjadi warisan penting bagi

generasi mendatang agar mereka tumbuh di lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi tantangan alam.

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kota Palu 2024

Grafik ini memperlihatkan bagaimana tingkat ketahanan suatu daerah Kota Palu mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks ketahanan daerah tercatat di angka 0,52. Angka ini menggambarkan bahwa daerah masih berada di tahap awal dalam membangun kemampuan bertahan dan pulih dari berbagai risiko, baik bencana alam, sosial, maupun ekonomi.

Pada tahun 2023 indeks ini naik menjadi 0,67. Peningkatan ini adalah kabar baik, karena menunjukkan adanya perbaikan nyata pada aspek kesiapsiagaan masyarakat, penataan infrastruktur yang lebih tangguh, sistem peringatan dini, hingga koordinasi antar pihak dalam menghadapi risiko.

Pada 2024, di mana indeks melonjak menjadi 0,93. Ini menandakan bahwa Kota Palu makin mendekati tingkat ketahanan ideal. Artinya, daerah semakin siap menghadapi berbagai tantangan, memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, serta didukung oleh masyarakat yang sadar risiko dan siap bergotong royong menjaga keselamatan bersama.

Capaian ini tentunya tidak lepas dari kerja keras banyak pihak: pemerintah daerah yang menyusun kebijakan responsif, komunitas yang aktif mengedukasi, hingga warga yang semakin peduli dan tanggap menghadapi risiko. Tren positif ini bisa terus dijaga dan diperkuat. Karena pada akhirnya, ketahanan daerah bukan hanya soal infrastruktur yang kokoh, tetapi juga tentang

mental, budaya gotong royong, dan kepedulian kolektif untuk saling menjaga. Semoga dengan indeks ketahanan yang semakin tinggi, masyarakat Kota Palu bisa hidup lebih aman, nyaman, dan optimis menghadapi masa depan.

2.1.1.7 Demografi

Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2024 mencapai 389.959 jiwa. Penduduk Kota Palu Tahun 2024 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46 (empat puluh enam) Kelurahan.). Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu tertinggi pada Tahun 2024 mencapai 0,88%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran penduduk Kota Palu menurut kecamatan, serta tingkat kepadatan penduduk secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.59.

Tabel 2.59 Jumlah Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah/ Total		Laju Pertumbuhan (%)
	Penduduk (jiwa)	Kelurahan	
Palu Barat	47.007	6	-0,18
Taranga	22.116	6	0,24
Ulujuji	27.344	6	0,34
Palu selatan	75.497	7	0,62
Palu Timur	44.735	6	0,25
Manukuloec	62.766	7	0,66
Palu Utara	55.870	7	0,61
Towali	55.801	7	0,69
KotaPalu	SDG4	SDG4	0,88
	SDG5	SDG5	1,62
	SDG6	SDG6	1,87
	SDG1	SDG1	1,82
	SDG11	SDG11	1,06

Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 25,01 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 69,96 persen penduduk merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 5,04 persen penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar 2.33 dan Tabel 2.34.



Gambar 2.33 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.60 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	14.509	13.551	28.060
5 - 9	18.391	17.180	35.571
10 - 14	17.805	18.277	36.082
15 - 19	14.954	15.763	30.717
20 - 24	17.604	17.800	35.404
25 - 29	17.495	17.490	34.985
30 - 34	18.509	18.783	37.292
35 - 39	15.470	15.470	30.940
40 - 44	14.939	14.701	29.640
45 - 49	12.997	13.167	26.164
50 - 54	10.944	11.713	22.657
55 - 59	9.112	9.952	19.064
60 - 64	6.462	6.825	13.287
65-69	4.381	4.780	9.161
70-74	2.534	2.819	5.353
75+	2.111	3.040	5.151
TOTAL	195.416	194.543	389.959

Sumber Data : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

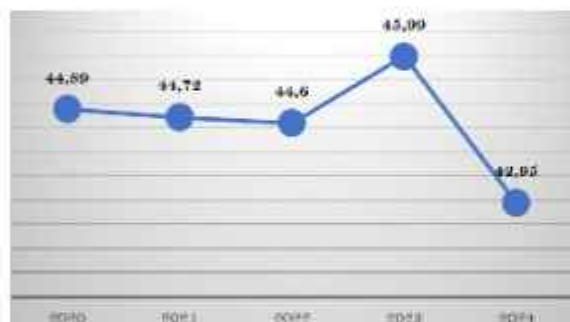
Tabel 2.60 memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu pada Tahun 2024 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 97.513 jiwa atau 25,01 persen, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 272.801 jiwa atau 69,96 persen, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 19.645 jiwa atau 5,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif yang signifikan.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 117.158 jiwa atau 30,4 persen dengan penduduk usia produktif sebanyak 117.158 jiwa atau 69,96 persen, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada Tahun 2024 yaitu sebesar 42,95 persen, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 43

orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir angka ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kota Palu masih berkisar 42 dan 43 penduduk usia non produktif ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar 44,89 sampai dengan 42,95 yang bermakna terdapat 45 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif, dan pada Tahun 2024 rasio ketergantungan ini naik menjadi 42,95 yang bermakna masih sekitar 43 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Palu Tahun 2020- 2024 tertera dalam Gambar 2.34 berikut:



Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu Tahun 2020– 2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025 diolah

Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pasca Gempa Bumi di Kota Palu Tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk Kota Palu turun hingga 940 jiwa/km² dari tahun sebelumnya sebesar 976 jiwa/km². Tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 987 jiwa/km².

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.803 jiwa/km², sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tawaeli dengan kepadatan sebesar 395 jiwa/km². Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah,

kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Palu Tahun 2020-2024 diuraikan dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Palu Barat	8,08	8.701	100,63
Totanga	11,58	3.857	100,31,00
Ulujuji	40,93	908	101,09
Palu selatan	27,48	2.848	99,11
Palu Timur	7,71	6.803	99,01
Mantikulore	208,9	408	100,99
Palu Utara	25,84	851	101,81
Tawaeli	30,72	395	114,93
Kota Palu	2024	987,00	100,44
	2023	980,00	101
	2022	980,00	100,29
	2021	980,00	100,0
	2020	940,00	100,9

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Trend Demografi

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2024 mencapai 389.959 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu tertinggi pada Tahun 2022 mencapai 1,27 %. Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2025-2029 berdasarkan data Proyeksi Penduduk Sulawesi Tengah dengan berdasarkan kategori umur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.62 Proyeksi Penduduk Kota Palu Tahun 2025–2029 Berdasarkan Kategori Umur (dalam Ribuan)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	33,74	33,80	33,91	33,18	32,63	31,46
5-9	37,00	37,20	38,88	38,34	38,09	37,72
10-14	33,27	34,11	34,38	33,46	32,90	31,30
15-19	35,12	36,23	36,79	35,23	34,81	33,16
20-24	36,89	39,00	39,14	38,71	37,63	36,18
25-29	34,38	33,86	32,89	31,25	30,22	29,28
30-34	33,07	33,38	33,33	33,87	33,81	33,70
35-39	32,43	33,17	33,58	34,34	34,77	35,10
40-44	27,97	28,48	29,36	30,31	31,21	32,41
45-49	23,17	23,27	23,28	23,22	22,61	22,47
50-54	19,17	19,08	19,91	19,73	19,25	18,79
55-59	18,58	18,50	19,39	19,07	18,00	17,50
60-64	13,19	13,00	13,28	12,23	11,92	11,81
65-69	10,31	11,12	11,89	12,26	12,25	12,97
70-74	6,41	6,50	7,40	7,39	6,40	6,03
75+	4,33	4,33	4,27	4,06	3,81	3,88
TOTAL	397,87	402,44	407,29	410,01	416,30	420,88

Sumber: Grand Design Pembangunan Berkelanjutan Kota Palu 2025-2030

Jumlah total penduduk mengalami peningkatan setiap tahun, dari 397.470 pada 2025 menjadi 416500 pada 2029. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 4,75 ribu jiwa.

Kelompok Usia Muda 0-4 tahun dan 5-9 tahun mengalami penurunan selama periode ini, menunjukkan angka kelahiran yang cenderung menurun. Kelompok usia 10-14 dan 15-19 mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir sebelum 2025 memasuki kategori usia lebih tinggi.

Kelompok usia produktif 20-24 dan 25-29 tahun mengalami penurunan, yang dapat mengindikasikan tingkat kelahiran yang menurun pada generasi sebelumnya atau adanya migrasi keluar. Kelompok usia 30-34, 35-39, dan 40-44 mengalami peningkatan, yang berarti populasi usia produktif menua. Kelompok usia 45-59 juga meningkat, yang menunjukkan bahwa kelompok ini tetap aktif dalam angkatan kerja dalam beberapa tahun ke depan. Penduduk lansia (60 tahun ke atas) diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan. Usia 70-74 dan 75+ juga terus meningkat, menunjukkan peningkatan angka harapan hidup.

Meskipun kelompok usia produktif masih mendominasi, tetapi tren menunjukkan peningkatan penduduk lanjut usia, yang dapat berdampak pada sistem kesehatan dan jaminan sosial. Diperlukan strategi untuk menangani populasi yang menua, seperti perencanaan kesehatan lansia dan sistem pensiun yang lebih kuat.

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Palu berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2024 adalah 50,15% Laki-Laki dan 49,85% perempuan atau dengan rasio 1,006. Hal ini menjelaskan bahwa komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, walaupun selisihnya tidak begitu signifikan. Apabila dengan melihat proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan selama 5 tahun atau Tahun 2025 hingga Tahun 2029, maka rata-rata komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Palu sebesar 50,09% laki-laki dan 49,91% perempuan atau dengan rasio 100,28 pada Tahun 2045. Berikut gambaran proyeksi penduduk Kota Palu berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dalam proyeksi 22 tahun dari Tahun 2023 hingga Tahun 2045

Tabel 2.63 Proyeksi Penduduk Kota Palu Tahun 2025–2029 Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam Ribuan)

Tahun	Jumlah			Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
2025	199,23	198,24	397,47	100,49
2026	201,68	200,73	402,41	100,17
2027	204,11	203,18	407,29	100,45
2028	206,43	205,34	411,99	100,44
2029	208,68	207,84	416,52	100,40

Sumber: *Grand Design Pembangunan Kepulauan Kota Palu 2020-2045*

Pertumbuhan penduduk laki-laki di Kota Palu selama kurun waktu 2025-2029 mengalami pertumbuhan positif, pada Tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki sebesar 199.230 jiwa dan pada Tahun 2045 diproyeksikan menjadi 208.680 jiwa. Penduduk Kota Palu berjenis kelamin perempuan juga menunjukkan pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada Tahun 2025 jumlah penduduk perempuan sebesar 198.240 jiwa dan pada Tahun 2029 diproyeksikan menjadi 207.840 jiwa. tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk laki-laki di Kota Palu.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi

kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (supply side), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (demand side). Pada sisi produksi, kontribusi tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2024 sebesar 17,13 persen, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 58,68 persen.

Dari sisi produksi (supply side) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir digambarkan melalui peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel 2.64 berikut ini:

Tabel 2.64 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen)

Komponen Usaha	2020	2021	2022	2023	2024 ¹⁰⁰
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	0,09	0,09	0,08	0,07	0,11
2. Pertambangan dan Penggalian (B)	0,03	0,07	0,07	0,03	0,10
3. Industri Pengolahan (C)	0,20	0,19	0,10	0,06	0,04
4. Pengolahan Listrik dan Gas (D)	0,13	0,10	0,12	0,13	0,14
5. Pengolahan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Konstruksi (F)	10,00	12,00	19,17	17,73	17,13
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	0,04	0,04	11,09	11,00	10,00
8. Transportasi dan Pengiriman (H)	0,03	0,17	7,00	0,10	0,10
9. Pengolahan Makanan dan Minuman (I)	0,07	0,00	0,00	1,00	1,01
10. Informasi dan Komunikasi (J)	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00
11. Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Real Estate (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jasa Perumahan (M,N)	1,04	1,10	1,11	1,11	1,10
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	14,71	14,10	14,11	13,13	13,40
15. Jasa Pendidikan (P)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
17. Jasa lainnya (R,S,T,U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Tabel di atas diantaranya memperlihatkan bahwa dominasi peran sektor terbesar Tahun 2024 tetap dan terus terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 17,13 persen, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,43 persen, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 11,40 persen.

Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (demand side). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui Tabel 2.65 berikut ini.

Tabel 2.65 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.240,74	15.100,65	14.327,24	18.113,00	19.317
2. Pengeluaran Konsumsi INPRT	730,00	100,00	991,21	1.100,00	1.230
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.212,01	0.000
4. Pembiayaan Modal Tetap Bruto	10.741,00	10.260,70	13.812,80	14.700,00	9.800
5. Perubahan Inventori	131,00	107,14	230,00	107,40	170
6. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa	-5.914,10	-8.330,75	-18.610,83	-7.310,20	-
Produk Domestik Regional Bruto	24.180,50	26.170,65	28.640,14	30.787,20	30.318,70

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2025

Tabel di atas menunjukkan nilai kenaikan PDRB Kota Palu ADHB khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 2.342,10 (juta rupiah) di Tahun 2022, dan naik lagi sebesar 2.131,50 (juta rupiah) di Tahun 2024.



Gambar 2.35 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2020-2024 (persen)

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2025

Pada sisi permintaan akhir, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 58,68 persen, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 45,1 persen, dan Konsumsi Pemerintah sebesar 14,05 persen seperti terlihat pada Gambar 2.25 di atas.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2020-2024, gambaran tentang nilai PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu terlihat pada Tabel 2.66 berikut:

Tabel 2.66 PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2024 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.321,07	8.140,28	9.020,24	9.910,94	10.018
2. Pengeluaran Konsumsi IKNBT	403,49	940,30	210,60	240,00	022
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.112,10	2.281,34	3.084,64	2.900,08	3.159
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.800,13	8.090,20	9.900,07	9.000,00	9.081
5. Perubahan Inventori	81,78	80,28	107,07	84,08	80
6. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa	8.325,02	-8.037,14	8.404,00	-8.480,12	-
Produk Domestik Bruto	10.462,91	10.985,98	17.092,59	17.991,40	18.788,78

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2025

Gambaran umum nilai PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 848,61 (juta rupiah) pada Tahun 2023, dan 827,35 (juta rupiah) pada Tahun 2024. Hal ini memberikan penjelasan bahwa terjadi kenaikan pada nilai pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun Tahun 2024 sebesar 4,61 persen.

Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Table 2.67 berikut:

Tabel 2.67 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp)	24.123,38	26.180,80	33.443,14	30.700,01	32.816,74
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	11.487,01	18.343,58	17.090,70	17.941,40	18.788,72
Laju Pertumbuhan Ekonomi-LPE (persen)	(4,45)	3,87	4,32	4,98	4,61
PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ADHB (miliarRp)	24.123,38	26.180,80	33.443,14	30.700,01	32.816,74

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.67 di atas memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2020-2024 membaik. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran rata-rata tumbuh sebesar 5,44 persen per tahun, sedangkan PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata tumbuh sebesar 3,08 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 turun sebesar 10,08 persen dari Tahun 2019 menjadi -4,43 persen, Tahun 2021 naik sebesar 10,40 persen dari Tahun 2020 menjadi 5,97 persen, Tahun 2022 turun sebesar 1,65 persen dari Tahun 2021 menjadi 4,32 persen, dan Tahun 2023 naik sebesar 0,64 persen dari Tahun 2022 menjadi 4,96 persen. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi menjadi 4,61 persen

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,08 persen per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 2,87 persen per tahun, Kabupaten Donggala 2,54 persen per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,1 persen per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata

LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 10,71 persen per tahun.

Tabel 2.68 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023.

Tabel 2.68 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Palu	Kab. Donggala	Kab. Parimo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah
2020	(4,48)	(4,08)	(5,83)	(1,20)	4,68
2021	5,97	4,84	4,87	5,64	11,70
2022	4,32	3,68	3,71	3,35	13,22
2023	4,95	4,88	3,50	3,97	11,81
2024	4,61	5,77	3,38	3,30	8,88

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2024

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu pada Tahun 2023 secara konstan berturut-turut: Pertambangan dan Penggalian (17,98 %); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,18 %); Transportasi dan Pergudangan (9,08 %); Real Estate (7,47 %); Pengadaan Listrik dan Gas (7,09%); Jasa lainnya (6,15 %); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,1 %); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,09 %); Informasi dan Komunikasi (5,82 %); dan Jasa Perusahaan (5,78 %).

Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.69 sampai dengan 2.72 berikut ini:

Tabel 2.69 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020 -2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	974,15	1.001,88	1.109,61	1.189,89	1.241,27
B	Pertambangan dan Penggalian	1.954,04	1.397,87	1.018,29	2.280,48	2.304,11
C	Industri Pengolahan	1.088,93	1.893,88	1.793,78	1.835,13	1.854,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	91,02	88,82	37,72	41,18	44,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70,88	77,89	80,40	84,40	84,40
F	Konstruksi	1.879,05	3.043,08	3.180,78	3.485,97	3.485,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.214,67	2.782,89	2.188,09	2.313,10	2.161,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.368,08	1.717,83	2.247,81	2.623,74	2.410,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	810,95	846,72	877,69	809,55	861,98
J	Informasi dan Komunikasi	2.405,56	2.394,29	2.728,53	2.584,51	2.124,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.350,01	1.559,08	1.844,16	1.783,58	1.667,00
L	Real Estate	576,99	810,30	678,06	776,82	952,95
M	Jasa Perusahaan	873,32	988,13	815,82	847,17	877,32
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.583,78	3.786,75	4.014,43	4.185,03	4.401,02
O	Jasa Pendidikan	1.008,81	1.878,29	2.052,20	2.179,32	2.249,12
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	692,90	937,30	1.010,27	1.111,85	1.148,98
Q	Jasa lainnya	830,81	948,83	889,30	884,77	999,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		24.125,69	26.138,93	28.448,14	30.785,21	32.918,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		24.125,69	26.138,93	28.448,14	30.785,21	32.918,74

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.70 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	609,80	663,26	683,94	699,74	717,18
B	Pertambangan dan Penggalian	923,84	990,92	1.030,94	1.239,91	1.318,07
C	Industri Pengolahan	1.151,20	1.169,38	1.207,26	1.229,13	1.256,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51,72	53,38	38,88	39,28	42,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,37	30,92	32,50	33,98	36,38
F	Konstruksi	2.653,14	2.780,93	2.839,83	2.887,98	2.909,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.198,62	1.873,51	1.928,39	1.939,53	2.001,38
H	Transportasi dan Pergudangan	910,37	990,92	1.141,11	1.217,28	1.313,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127,80	188,06	183,72	178,78	191,93
J	Informasi dan Komunikasi	1.900,37	2.018,34	2.109,97	2.232,65	2.338,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	989,55	1.054,36	1.059,30	1.081,01	1.000,93
L	Real Estate	388,79	408,68	433,47	465,86	481,96
M	Jasa Perusahaan	158,87	187,59	199,10	210,29	221,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.169,90	5.973,19	6.301,38	6.549,87	6.403,36
O	Jasa Pendidikan	1.174,43	1.196,08	1.207,94	1.295,26	1.308,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552,60	591,31	613,04	650,39	670,94
Q	Jasa lainnya	194,94	198,14	163,17	178,46	180,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.162,91	16.983,58	17.092,79	17.941,40	18.768,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		15.162,91	16.983,58	17.092,79	17.941,40	18.768,75

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2024

Tabel 2.71 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		HH	HK	HH	HK	HH	HK	HH	HK	HH	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,04	(1,04)	2,82	0,66	10,10	2,77	7,90	1,87	4,92	2,92
B	Pertambangan dan Penggalian	(19,65)	(20,83)	9,19	7,20	14,19	6,12	23,07	17,99	14,96	14,37
C	Industri Pengolahan	1,11	(1,02)	6,74	5,31	5,39	5,31	2,19	1,81	6,49	2,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,04	6,86	5,13	11,33	8,84	9,04	7,09	9,07	8,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,86	(0,90)	5,07	4,86	6,61	3,27	3,84	2,39	5,01	4,31
F	Konstruksi	1,03	(2,21)	7,92	4,72	2,47	2,12	5,72	1,02	5,19	0,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(4,46)	(6,31)	13,06	12,37	18,86	9,10	10,08	6,10	6,74	3,72
H	Transportasi dan Pergudangan	(33,37)	(23,91)	10,36	8,84	20,39	12,47	16,73	9,08	7,46	3,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(11,21)	(12,63)	17,92	15,66	11,51	10,56	11,24	9,19	14,06	7,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,09	8,24	7,44	6,11	3,58	4,69	3,72	3,82	9,53	4,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,07	7,24	11,03	9,56	7,16	(0,21)	4,77	2,79	12,23	11,03
L	Real Estate	1,44	0,21	6,54	3,37	10,11	7,65	14,55	7,47	9,51	3,46
M	Jasa Perusahaan	(1,41)	(2,07)	4,66	2,73	9,33	3,96	10,00	3,78	6,68	3,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	1,49	8,34	4,73	3,73	1,94	3,77	1,78	6,12	2,69
O	Jasa Pendidikan	(1,00)	(2,23)	3,60	1,64	3,72	0,59	6,06	4,62	3,29	3,14
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,92	7,41	12,33	7,08	7,80	3,64	10,04	6,09	3,29	3,05
Q	Jasa lainnya	(0,63)	(1,29)	3,04	3,11	8,39	5,64	8,57	6,15	5,17	4,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(3,62)	(4,43)	8,32	5,97	8,84	4,32	8,23	4,96	6,93	4,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		(3,62)	(4,43)	8,32	5,97	8,84	4,32	8,23	4,96	6,93	4,61

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

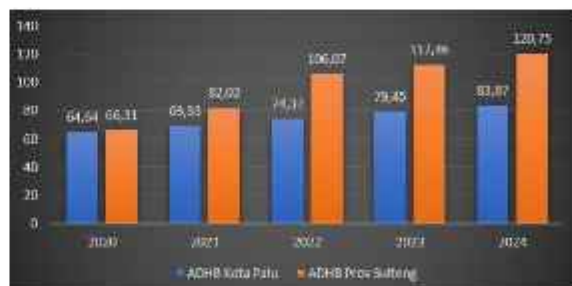
Tabel 2.72 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020 -2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		HH	HK	HH	HK	HH	HK	HH	HK	HH	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,04	4,97	3,53	4,08	3,85	4,00	3,57	3,39	3,77	3,82
B	Pertambangan dan Penggalian	6,05	5,97	6,07	6,04	6,37	6,15	7,25	6,91	7,79	7,36
C	Industri Pengolahan	6,59	7,32	6,49	7,15	6,31	7,06	3,96	8,33	3,94	6,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,21	0,13	0,20	0,13	0,21	0,13	0,22	0,14	0,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,31	0,3	0,31	0,29	0,31	0,28	0,30	0,25	0,30
F	Konstruksi	19,39	17,17	19,39	16,97	18,17	16,61	17,75	16,09	17,13	15,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54	8,63	10,45	10,23	11,23	10,70	11,42	10,51	11,40	10,93
H	Transportasi dan Pergudangan	6,46	5,89	6,37	6,05	7,90	6,69	8,52	8,96	8,46	7,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,89	0,53	0,90	0,58	0,96	1,00	1,00	1,07	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	9,27	10,29	9,59	12,31	9,59	12,34	9,37	12,43	9,58	12,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,77	6,22	5,94	6,44	5,85	6,16	3,66	6,03	3,93	6,40
L	Real Estate	2,39	2,31	2,38	2,46	2,39	2,34	2,52	2,60	2,39	2,37
M	Jasa Perusahaan	1,14	1,15	1,10	1,15	1,11	1,16	1,13	1,17	1,15	1,16
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,77	14,03	14,33	13,87	14,11	13,46	13,53	13,08	13,45	12,82
O	Jasa Pendidikan	7,92	7,60	7,37	7,30	7,21	7,07	7,07	6,83	6,83	6,96
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,46	3,37	3,59	3,61	3,53	3,59	3,61	3,63	3,49	3,57
Q	Jasa lainnya	0,56	1,00	0,93	0,97	0,92	0,95	0,93	0,99	0,91	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2020-2024 laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Transportasi serta beberapa sektor lainnya menurut kelompok pengeluaran.



Gambar 2.36 PDRB Per kapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Apabila dibandingkan PRDB per kapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Palu lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Sulawesi Tengah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur (unemployment) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Berikut gambaran pengangguran terbuka di Kota Palu Tahun 2020-2024.



Gambar 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Persen) Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Berdasarkan grafik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, meskipun masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020, TPT Kota Palu tercatat sebesar 8,38 persen, angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang hanya 3,77 persen. Seiring dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi pascabencana dan pandemi, angka TPT Kota Palu menurun menjadi 7,61 persen pada 2021 dan terus turun hingga mencapai 5,63 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis

Jika dibandingkan dengan Sulawesi Tengah, gap TPT antara Kota Palu dan provinsi masih terlihat cukup lebar. Selama periode 2020–2024, TPT Sulawesi Tengah relatif stabil di kisaran 3,0–3,77 persen, jauh lebih rendah dari Kota Palu yang berada di atas 5 persen pada tahun-tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun Kota Palu berhasil menurunkan tingkat penganggurannya, beban dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja masih lebih besar dibandingkan daerah lain di provinsi. Faktor urbanisasi, konsentrasi penduduk usia produktif di perkotaan, serta keterbatasan daya serap sektor formal diduga menjadi penyebab utama tingginya angka TPT di Kota Palu.

Ke depan, Pemerintah Kota Palu perlu memperkuat strategi pengurangan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja melalui sektor-sektor unggulan daerah seperti perdagangan, jasa, pariwisata, serta industri kreatif. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi kunci agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, meskipun saat ini TPT Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, tren penurunan yang konsisten memberikan optimisme bahwa kondisi ketenagakerjaan akan semakin membaik dalam periode pembangunan berikutnya

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi,

Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $<0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $>0,5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah:



Gambar 2.38 Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.38 di atas, Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,325 per tahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata pertumbuhan 0,313 per tahun.

Meskipun rata-rata pertumbuhan indeks gini Kota Palu Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, demikian rata-rata pertumbuhan indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu perlu dioptimalkan untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Palu mengalami pelambatan peningkatan disebabkan oleh penanganannya yang masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu. Hal ini berdampak pada pencapaian beberapa indikator kemiskinan yang masih terus membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat mewujudkan trend kinerja yang lebih positif dan berkualitas. Strategi yang disusun atau yang direncanakan untuk penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, melalui prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, dari Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel. 2.73 Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk miskin (persen)	20,890	20,600	20,710	21,291	21,270
2	Persentase orang miskin (%)	0,00	7,47	0,00	0,34	0,04
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) (%)	0,07	0,04	0,04	0,04	0,03
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)	0,02	0,04	0,02	0,10	0,00
5	Indeks penyesuaian pendapatan (persentase) (persen)	07,000	07,000	07,000	07,000	07,000
6	Indeks Kemiskinan Ekstrem (Rasio) (rata-rata)	11,9	0,00	0,07	0,00	
7	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	11,9	0,00	0,00	0,00	
8	Kapasitas pendapatan (kapasitas keluarga/bulan) (persen)	240,000	271,000	400,000	400,000	400,110
9	Persentase di bawah garis kemiskinan (persen)	20,890	20,600	20,710	21,291	
10	Batas untuk penduduk miskin	10,470	10,470	10,470	10,470	

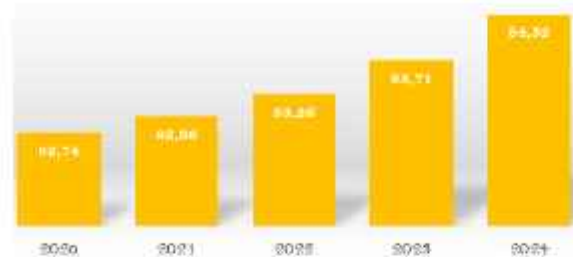
Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Table 2.73 di atas menunjukkan bahwa terjadi trend atau rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin setiap tahun dalam lima tahun terakhir sebesar -2,1 persen per tahun sedangkan trend pertumbuhan persentase penduduk miskin sebesar -3,1 persen per tahun. Untuk trend pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar -8,8 persen per tahun dan Indeks Keparahannya Kemiskinan juga sebesar -15,2 % per tahun.

Pertumbuhan penduduk miskin di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuasi secara jumlah, dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesenjangan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kota Palu yang kurang dibarengi dengan penanganan/penanggulangan kemiskinan secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia

Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Kualitas pembangunan manusia di Kota Palu berdasarkan grafik di atas terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat di angka 82,74. Angka ini sudah cukup baik, menunjukkan bahwa aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat berada pada jalur yang positif.

Tahun 2021, IPM sedikit naik ke 82,96, menandakan ada perbaikan, meski kenaikannya tipis. Ini bisa jadi menunjukkan tantangan besar pada masa itu, seperti dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pendapatan masyarakat.

Pada 2022, IPM naik menjadi 83,26, dan berlanjut meningkat ke 83,71 pada 2023. Peningkatan bertahap ini menunjukkan adanya pemulihan yang konsisten. Program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai membuahkan hasil. Masyarakat semakin sehat, akses pendidikan makin merata, dan kesejahteraan perlahan membaik.

Tahun 2024 menjadi puncaknya dengan IPM mencapai 84,32. Ini kabar baik yang mencerminkan bahwa investasi pada modal manusia mulai memberikan hasil nyata. Generasi muda makin terdidik, angka harapan hidup meningkat, dan kesempatan kerja yang lebih baik mulai terbuka. Secara keseluruhan, grafik ini menjadi bukti bahwa membangun manusia membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan konsistensi kebijakan. Angka yang terus naik ini diharapkan bukan hanya berhenti pada statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap warga: anak-anak yang

bisa sekolah dengan baik, keluarga yang sehat, dan masyarakat yang punya kesempatan berkembang tanpa tertinggal.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71,20 tahun.

Gambar 2.24 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik dan memadai dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran angka harapan hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 tertera pada Gambar 2.40 sebagai berikut:



Gambar 2.40 Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2025

Pravelensi Stunting

Pravelensi stunting berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) atau SKI (Studi Kasus Gizi Indonesia) di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.41 Prevelensi Stunting SSGI/SKI Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik SSGI/SKI dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan yang konsisten, mengindikasikan adanya perbaikan signifikan selama periode tersebut. Pada awal periode, yaitu dari tahun 2020 ke 2021, terjadi penurunan yang sangat tajam dari 14,05 menjadi 7,85. Penurunan drastis ini menunjukkan keberhasilan intervensi atau perubahan kondisi yang sangat efektif dalam satu tahun pertama. Namun, laju penurunan melambat pada tahun berikutnya, di mana angka hanya turun menjadi 6,19 pada tahun 2022. Menariknya, pada periode 2022-2023, data menunjukkan stabilisasi total dengan angka yang tidak berubah, yaitu tetap di 6,19. Stagnasi ini menandai adanya tantangan atau kondisi tertentu yang membuat penurunan terhenti sementara. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2024 dengan angka yang kembali menurun menjadi 5,42, menunjukkan bahwa upaya perbaikan kembali membuahkan hasil setelah periode stagnasi. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan upaya berkelanjutan dalam mengatasi isu yang diukur oleh SSGI/SKI, dengan hasil yang sangat baik dari 14,05 menjadi 5,42 dalam kurun waktu lima tahun.

2.1.2.3 Pendidikan Bekualitas dan Merata

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023 yaitu mencapai 100 persen, namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 99,64 persen. Angka Melek Huruf Kota Palu mencapai angka yang maksimal jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dan telah berhasil memenuhi harapan bahwa

tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

Gambaran AMH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional tertera pada Gambar 2.42 sebagai berikut:



Gambar 2.42 Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2025

Gambaran AMH Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.21. AMH tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 100 persen dan terendah terjadi pada Tahun 2024 sebesar 99,64 persen. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 98,28 persen dan terendah terjadi pada 2022 sebesar 98,05 persen. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2024 sebesar 96,68 persen dan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 96,00 persen.

Gambaran persentase AMH di atas menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah menunjukan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera pada Gambar 2.43



Gambar 2.43 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2020-2024

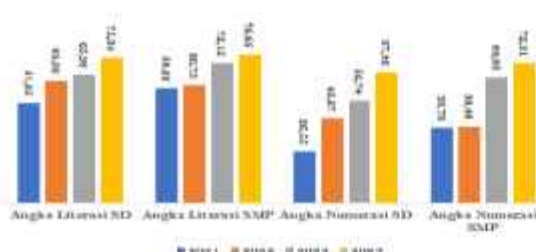
Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu. Tahun 2020 RLS mencapai 11,61 tahun, Tahun 2021 RLS naik menjadi 11,72 tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2024 yaitu 11,75 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu terus konsisten dalam memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 3 (tiga) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2024 HLS Kota Palu mencapai angka 16,52 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

Indeks Pembangunan Literasi



Gambar 2.44 Angka Literasi dan Angka Nimerasi Siswa SD dan SMP Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan grafik perkembangan indeks literasi dan angka numerasi di Kota Palu, terlihat adanya tren positif. Pada jenjang SD, angka literasi menunjukkan peningkatan dari 63,16 pada tahun 2021 menjadi 75,03 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran dasar, terutama dalam kemampuan membaca dan memahami bacaan, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan keterampilan siswa di jenjang berikutnya.

Angka literasi di tingkat SMP juga memperlihatkan pola yang cukup baik. Meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan ke angka 60,13, tren kembali menguat pada tahun 2023 dan meningkat signifikan hingga mencapai 71,14 pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat menjadi indikasi bahwa berbagai intervensi kebijakan pendidikan, seperti penguatan kurikulum literasi, peningkatan kapasitas guru, dan penyediaan sumber bacaan yang memadai, mulai memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa SMP di Kota Palu.

Dari sisi numerasi, capaian siswa SD menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Setelah berada pada angka yang relatif rendah yakni 57,76 pada tahun 2022, indeks numerasi meningkat pesat menjadi 67,79 pada tahun 2024. Kemajuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep angka, operasi matematika dasar, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari semakin baik, yang tentunya penting untuk mendukung daya saing generasi muda di masa depan.

Pada tingkat SMP, angka numerasi juga mencatat tren kenaikan yang konsisten. Jika pada tahun 2021 nilainya masih di angka 63,49, maka pada tahun 2024 meningkat menjadi 73,91. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran numerasi di tingkat menengah pertama di Kota Palu semakin efektif. Dengan peningkatan baik pada literasi maupun numerasi, Kota Palu menunjukkan langkah maju dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kota Palu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.45 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Palu (persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu, Kota Palu 2025

Pada tahun 2022, jumlah peserta tercatat sebanyak 39.514. Angka ini mencerminkan tingkat partisipasi yang cukup solid, menunjukkan kesadaran dan aksesibilitas program jaminan sosial di kalangan pekerja pada saat itu. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023, di mana jumlah peserta turun menjadi 37.872. Penurunan ini sebesar 4.15% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya tantangan di sektor ketenagakerjaan, seperti perlambatan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, atau kesulitan bagi pekerja untuk mempertahankan kepesertaan mereka. Kondisi ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut.

Pada tahun 2024 grafik menunjukkan lonjakan partisipasi yang sangat tajam. Jumlah peserta melonjak menjadi 42.828, yang merupakan peningkatan sebesar 13.09% dari tahun 2023. Lonjakan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan/atau keberhasilan program pemerintah dalam mendorong partisipasi. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, atau efektivitas kampanye sosialisasi program jaminan sosial kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja yang fluktuatif. Setelah mengalami penurunan partisipasi di tahun 2023, sektor ketenagakerjaan menunjukkan pemulihan yang kuat di tahun 2024, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam jumlah peserta program jaminan sosial.

Data ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan jaring pengaman sosial.

Sarana Sosial dan Bantuan Sosial

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2020-2024. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selama kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 43 pada Tahun 2021 unit m turun di Tahun 2022 menjadi 40 unit, kemudian pada Tahun 2023 kembali turun menjadi 36 unit. Berikut jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.74 di bawah ini:

Tabel 2.74 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Panti Asuhan	41	43	40	36	38
Rumah singgah	1	1	1	1	1
Jumlah	42	44	41	37	39

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial sebesar 66,9 persen pada Tahun 2020 naik menjadi 92,68 persen. Peningkatan persentase PKMS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun mencapai 104,62 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.75 di bawah ini:

Tabel 2.75 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PMKS Yang Seharusnya Mendapat Bantuan (jwa)	29.570	29.878	33.290	19.080	33.740
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jwa)	21.309	17.920	13.096	18.018	40.003
% PMKS yg memperoleh bantuan sosial	66,90	59,98	39,63	90,18	104,62

Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" di Kota Palu adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai agama yang bermanfaat dengan pengembangan budaya yang progresif. Ini berarti bahwa praktik keagamaan di Palu tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemajuan budaya.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keunikan sebagai kota yang plural, di mana masyarakatnya terdiri dari

berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Prinsip Beragama Maslahat menjadi landasan untuk menghadirkan kehidupan keagamaan yang tidak hanya mengutamakan kebebasan beribadah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta kolaborasi lintas iman dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga keberagamaan menjadi sumber kedamaian dan kemajuan.

Di sisi lain, visi Berkebudayaan Maju mendorong Kota Palu untuk terus mengembangkan dan melestarikan kekayaan budaya lokal seperti musik, tarian, kuliner, serta kearifan lokal yang diwariskan oleh berbagai komunitas etnis. Budaya tidak hanya dilihat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai modal sosial dan daya tarik pariwisata yang mampu memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Dukungan terhadap pelaku seni, penguatan event budaya, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemajuan kebudayaan.

Dengan sinergi antara Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Kota Palu diharapkan menjadi kota yang damai, inklusif, dan berdaya saing. Kehidupan keagamaan yang maslahat akan menumbuhkan solidaritas sosial, sedangkan kebudayaan yang maju akan memperkuat rasa bangga dan identitas warga. Keduanya menjadi pilar utama dalam membangun peradaban kota yang modern, berkeadilan, dan berkelanjutan, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis.

Peningkatan jumlah tempat ibadah menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan menjadi baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan cepat.

Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 605 unit, kemudian pada Tahun 2023 naik menjadi 607 unit. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan rasio tempat ibadah

per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2021–2023 terurai dalam Tabel 2.76 sebagai berikut:

Tabel 2.76 Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2021–2023

Bangunan Tempat Ibadah	Mosjid	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah	
2021	Jumlah	504	130	4	4	638
	Jumlah Pemeluk	328.140	38.000	4.000	1.700	369.840
	Rasio	1,53	0,34	0,1	0,02	1,99
2022	Jumlah	479	117	2	4	602
	Jumlah Pemeluk	328.140	38.000	4.000	1.800	370.940
	Rasio	1,46	0,3	0,05	0,02	1,83
2023	Jumlah	479	118	2	4	603
	Jumlah Pemeluk	321.371	38.700	4.000	1.800	365.871
	Rasio	1,49	0,30	0,05	0,02	1,86
2024	Jumlah	504	127	4	4	639
	Jumlah Pemeluk	319.391	39.400	4.700	1.800	365.291
	Rasio	1,58	0,32	0,08	0,02	1,98

Sumber: BPS, Dataografi Kota Palu Tahun 2023

Tabel 2.76 memperlihatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu. Pada Tahun 2022 rasionya naik 0,4 per 1.000 penduduk dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 rasio tempat ibadah di Kota Palu turun kembali menjadi 1,57 per 1.000 penduduk dan meningkat menjadi 1,59 per 1.000 penduduk.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks pembangunan kualitas keluarga di Kota palu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.46 Indeks Pembangunan Kualitas keluarga Kota Palu Tahun 2020–2024

Sumber: Bappeda Kota Palu 2024.

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga berada di angka 54,98. Angka ini mengindikasikan kondisi keluarga yang cukup baik, mencerminkan bahwa aspek-aspek penting seperti kesehatan keluarga, pendidikan, pengasuhan anak, kesejahteraan ekonomi, dan keharmonisan rumah tangga masih terjaga dengan baik.

Pada tahun 2023 indeks turun menjadi 52,5. Penurunan ini bisa menjadi sinyal adanya tantangan baru yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga, seperti tekanan ekonomi, pengaruh dampak sosial pasca pandemi, atau tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak.

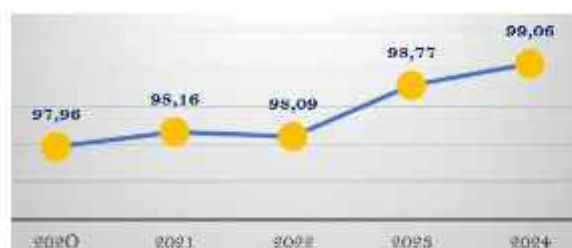
Pada tahun 2024, indeks mengalami sedikit peningkatan ke angka 52,6. Meskipun kenaikannya masih tipis, ini menunjukkan adanya upaya perbaikan melalui berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keluarga, serta penguatan peran posyandu dan lembaga keluarga lainnya.

Perubahan angka ini menjadi pengingat bahwa membangun kualitas keluarga bukanlah tugas yang mudah dan instan. Diperlukan dukungan lintas sektor: mulai dari kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, pendidikan parenting, hingga penanganan masalah sosial seperti KDRT dan perlindungan anak.

Harapannya, angka indeks ini terus naik di tahun-tahun mendatang agar setiap keluarga dapat tumbuh menjadi lingkungan pertama yang sehat, harmonis, dan mampu mendukung lahirnya generasi berkualitas. Karena pada akhirnya, keluarga adalah pondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Indeks Pembangunan Gender

Gambaran Indeks Pembangunan Gender dari tahun 2020 hingga 2024 di Kota Palu dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kota Palu 2024

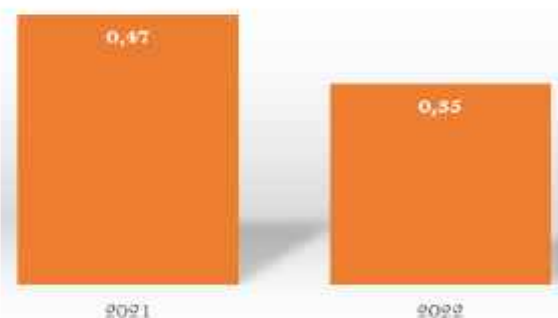
Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Gender (Indeks Pembangunan Gender) di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat jelas bahwa Kota Palu telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mencapai kesetaraan gender. Tren yang disajikan dalam grafik

menunjukkan peningkatan yang konsisten, menandakan perbaikan signifikan dalam status pembangunan gender di kota tersebut. Pada tahun 2020, indeks tercatat 97,96, dan angka ini terus meningkat secara bertahap, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 98,09 pada tahun 2022. Namun, setelah penurunan kecil tersebut, Kota Palu menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Peningkatan paling tajam terjadi antara tahun 2022 dan 2023, di mana indeks melonjak dari 98,09 menjadi 98,77.

Lonjakan ini mengindikasikan efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan menutup kesenjangan gender secara lebih cepat. Puncak dari keberhasilan ini terlihat pada tahun 2024, dengan indeks mencapai angka tertinggi 99,06. Angka yang hampir sempurna ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Palu, terutama dalam hal pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik, telah sangat berkurang. Secara keseluruhan, grafik ini adalah bukti nyata komitmen dan keberhasilan Kota Palu dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua warganya.

Indeks Ketimpangan Gender

Gambaran indeks ketimpangan gender di Kota Palu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.48 Indeks Ketimpangan Gender Kota Palu Tahun 2021-2024

Sumber: DP3A Kota Palu 2025

Grafik menunjukkan tren penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Palu selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai indeks berada pada angka 0,47, mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi ekonomi-politik antara laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan masih adanya hambatan yang signifikan bagi

perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Tahun 2022 mencatat perbaikan dengan penurunan indeks menjadi 0,35, menandakan adanya progres positif dalam pengurangan kesenjangan gender. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali ke angka 0,44, yang menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan kesetaraan belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, penurunan partisipasi perempuan di sektor publik, atau pengaruh faktor sosial dan budaya yang masih patriarkis.

Pada tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender kembali mengalami penurunan yang signifikan ke 0,30, menjadi angka terendah dalam empat tahun terakhir. Ini merupakan capaian positif yang menunjukkan arah pembangunan Kota Palu semakin inklusif dan responsif gender. Untuk menjaga tren positif ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong partisipasi aktif perempuan, memperkuat layanan dasar yang ramah gender, serta memastikan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender

Kualitas pemberdayaan gender dalam pembangunan dapat diukur melalui indeks pemberdayaan gender seperti di bawah ini



Gambar 2.49 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Palu Tahun 2021-2024

Sumber: DP3A Kota Palu 2025

Grafik menunjukkan tren pemberdayaan gender yang relatif stabil di awal, namun mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Pada tahun 2020, IDG berada di angka 65,76, yang kemudian sedikit menurun menjadi 65,07 di tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam pemberdayaan perempuan, terutama dalam hal partisipasi di sektor

ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik.

Pada tahun 2022 dan 2023, indeks mulai menunjukkan perbaikan meskipun sangat tipis, yakni 65,96 dan 65,99. Ini mencerminkan adanya upaya bertahap dalam meningkatkan kesetaraan peluang antara laki-laki dan perempuan, meskipun dampaknya belum terlalu signifikan. Pergerakan yang stagnan ini bisa saja disebabkan oleh keterbatasan kebijakan afirmatif atau minimnya dukungan struktural bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan indeks menjadi 67,84. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan perempuan dan mungkin juga dampak dari kebijakan yang lebih responsif gender di tingkat daerah. Hal ini dapat mencerminkan peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja formal, kewirausahaan, dan jabatan publik. Untuk menjaga momentum ini, penting bagi pemerintah Kota Palu untuk memperluas program-program pelatihan, akses ke modal usaha, dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategi

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2023 tertera dalam tabel 2.50 di bawah ini:

Tabel 2.50 Keterlibatan Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta Dan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	8.818	8.878	8.881
Pekerja perempuan di lembaga swasta	4.308*	3.884*	4.173
Jumlah pekerja perempuan	5.706	5.810	5.024
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	59,72	55	65,19
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40,75	47	31,61
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	4	4	4
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	33	33	33
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12,12	12,12	12,12

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2025

Tabel 2.50 memperlihatkan persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Kota Palu Tahun 2022 sebesar 67% dari total pekerja perempuan,

sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 33%. Pada Tahun 2023 persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 51,81 sedangkan, untuk lembaga pemerintah sebesar 48,19. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak yang bekerja pada lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Daya saing sumberdaya manusia, Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus dan tujuan dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang handal dicirikan dengan kemampuan dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, mampu memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Kota Palu. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2020-2023 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 14,77 persen. Pada Tahun 2023 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu tertinggi mencapai 19,57 persen.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam tabel 2.51 sebagai berikut:

Tabel 2.51 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2020-2024

Tahun	Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio (%)
2020	42.601	373.216	11,47
2021	44.491	377.030	11,80
2022	46.093	381.572	12,08
2023	75.532	387.493	19,57
2024	58.746	397.470	14,77

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2025 (diolah)

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun rasio ketergantungan di Kota Palu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52 Rasio Ketergantungan Kota Palu Tahun 2019-2023

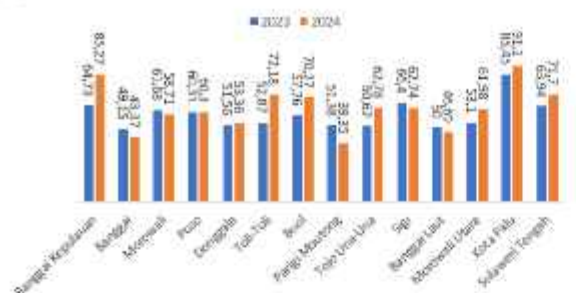
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	100.764	100.980	101.273	101.109	87.318
2	Jumlah Penduduk usia > 65 tahun	19.809	13.814	16.813	17.735	19.845
3	Jumlah Penduduk Usia Tdk Produktif (1) & (2)	112.603	116.304	117.886	113.846	117.153
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	737.290	760.590	803.598	809.540	813.303
5	Rasio ketergantungan (3) / (4) (%)	15,28	15,29	14,67	14,06	14,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palu 2024

Rasio ketergantungan Kota Palu selama Tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 45,99 persen menjadi 42,94 persen. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Palu menanggung sebanyak 43 orang belum bekerja atau tidak produktif.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu daerah secara menyeluruh. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan baca tulis, akses terhadap bahan bacaan, ketersediaan dan pemanfaatan sarana literasi seperti perpustakaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.



Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Sumber: BPS Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 dan 2024, Kota Palu menunjukkan pencapaian yang sangat positif dan konsisten tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023, IPLM Kota Palu tercatat sebesar 85,17, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 85,16 pada tahun 2024, menjadikannya daerah dengan skor tertinggi secara berturut-turut selama dua tahun.

Angka ini mencerminkan bahwa Kota Palu telah berhasil menciptakan ekosistem literasi masyarakat yang kuat. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung literasi seperti perpustakaan, taman baca, serta akses terhadap informasi digital, tetapi juga mengindikasikan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi semakin membaik.

Kinerja tinggi Kota Palu dalam IPLM juga dapat dikaitkan dengan berbagai program literasi yang berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota, dinas perpustakaan, komunitas literasi, hingga institusi pendidikan. Posisinya sebagai ibu kota provinsi dengan akses dan infrastruktur yang lebih maju turut menjadi faktor pendukung keberhasilan ini.

Dengan mempertahankan dan memperluas capaian ini, Kota Palu berpeluang menjadi pusat literasi di kawasan timur Indonesia, yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya baca, serta mempercepat transformasi digital berbasis masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society).

Dalam indeks pembangunan literasi salah satu indikatornya adalah ketersediaan dan kebermanfaatan sarana Perpustakaan daerah. Berikut data terkait urusan perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertara dalam Tabel 2.77 di bawah ini:

Tabel. 2.77 Data terkait Urusan Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019-2023

Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (a/b)	0,01%	0,004	0,006	0,006	0,006
a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	18	10	10	18	18
b. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1044	2281	2576	2.871	2.980
Rak buku yang tersedia di perpustakaan daerah (a/b)	8,254	1,144	1,097	0,909	0,945
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	4.112	3.818	2.278	3.806	4.613
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	890	3.182	3.182	7.876	8.765
Rasio perpustakaan per satu penduduk (a/b/*1000)	0,184	0,192	1,496	1,381	1,723
Jumlah perpustakaan	78	73	384	803	890
Jumlah penduduk	391.805	378.218	877.000	961.372	297.485
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	200	1.493	2.076	2.871	2.980
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.112	3.182	2.182	3.806	4.613
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (a/b/*100)	0	0	0	30	100
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	8	8
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	0	0	0	8	8

Sumber: Dinas Kearsifan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.77 memperlihatkan persentase kunjungan perpustakaan dengan populasi yang harus dilayani yang terus mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 0,01% hingga menjadi 0,004% di Tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,002% menjadi 0,006% di tahun 2021-2023. Untuk Rasio Perpustakaan per satuan penduduk memperlihatkan kenaikan terus menerus sejak Tahun 2019 hingga 2023. Rasio Perpustakaan di Tahun 2019 sebesar 0,184 naik menjadi 0,193 di Tahun 2020, dan seterusnya menjadi 1,496 di Tahun 2021, naik lagi menjadi 1,585 di Tahun 2022, dan 1,753 di Tahun 2023. Sedangkan untuk persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat mencapai 50% di Tahun 2022. Persentase ini kemudian di Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 100% disebabkan seluruh pustakawan telah memiliki sertifikat.

Tenaga Kerja

Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.78 di bawah ini:

Tabel 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Angkatan Kerja	202.497	201.093	202.818	197.368	203.852
1	a. Bekerja	185.507	188.777	190.331	186.221	192.383
	b. Pengangguran	16.990	12.308	12.482	11.147	11.469
2	Bukan Angkatan Kerja	202.188	207.869	110.767	87.319	82.255
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	394.677	399.016	313.580	293.905	295.107
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,46	65,07	69,60	62,55	70,50
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	69,11	68,71	68,09	68,88	71,1
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	8,38	7,01	6,13	5,63	5,63
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,77	5,73	3,00	3,00	2,94

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2025

Jumlah angkatan kerja di Kota Palu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2023 menjadi 197.368 jiwa, jumlah ini kembali naik di tahun 2024 menjadi 203.852 jiwa, tertinggi dalam periode ini. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 185.507 jiwa (2020) menjadi 192.383 jiwa (2024). Jumlah pengangguran terus menurun dari 16.960 jiwa (2020) menjadi 11.469 jiwa (2024), menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Terjadi penurunan signifikan pada jumlah bukan angkatan kerja dari 110.767 jiwa (2022) menjadi 85.285 jiwa (2024). Hal ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja.

TPAK Kota Palu meningkat dari 66,46% (2020) menjadi 70,50% (2024), menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 71,1% (2024), TPAK Kota Palu masih sedikit lebih rendah, namun menunjukkan tren yang mendekati angka provinsi. TPT Kota Palu mengalami penurunan konsisten dari 8,38% (2020) menjadi 5,63% (2024). Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan efektifitas program ketenagakerjaan. TPT Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi yang hanya 2,94% (2024), menandakan tantangan struktural yang masih perlu dibenahi di wilayah perkotaan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.79 di bawah ini:

Tabel 2.79 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Angkatan Kerja	202.497	201.093	202.818	197.368	203.852
1	a. Bekerja	185.507	188.777	190.331	186.221	192.383
	b. Pengangguran	16.990	12.308	12.482	11.147	11.469
2	Bukan Angkatan Kerja	202.188	207.869	110.767	87.319	82.255
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	394.677	399.016	313.580	293.905	295.107
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,46	65,07	69,60	62,55	70,50
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	69,11	68,71	68,09	68,88	71,1
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	8,38	7,01	6,13	5,63	5,63
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,77	5,73	3,00	3,00	2,94

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2025

Jumlah angkatan kerja di Kota Palu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2023 menjadi 197.368 jiwa, jumlah ini kembali naik di tahun 2024 menjadi 203.852 jiwa, tertinggi dalam periode ini. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 185.507 jiwa (2020) menjadi 192.383 jiwa (2024). Jumlah pengangguran terus menurun dari 16.960 jiwa (2020) menjadi 11.469 jiwa (2024), menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Terjadi penurunan signifikan pada jumlah bukan angkatan kerja dari 110.767 jiwa (2022) menjadi 85.285 jiwa (2024). Hal ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja.

TPAK Kota Palu meningkat dari 66,46% (2020) menjadi 70,50% (2024), menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 71,1% (2024), TPAK Kota Palu masih sedikit lebih rendah, namun menunjukkan tren yang mendekati angka provinsi. TPT Kota Palu mengalami penurunan konsisten dari 8,38% (2020) menjadi 5,63% (2024). Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan efektifitas program ketenagakerjaan. TPT Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi yang hanya 2,94% (2024), menandakan tantangan struktural yang masih perlu dibenahi di wilayah perkotaan.

Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah ada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat menyebabkan aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (multiflier effect) dan efek menjalar (contagious effect) bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Gambar 2.54 Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas masyarakat Kota Palu Tahun 2020 naik sebesar 2,83 persen di Tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 5,53 persen di Tahun 2022. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 11,56 persen di Tahun 2023, dan pada Tahun 2024 naik sebesar 3,5 persen. Kelompok non makanan juga menunjukkan kenaikan sebesar 4,00 persen di tahun 2021.

Kelompok ini mengalami penurunan sebesar 14,29 persen di Tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 1,15 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu sejak pasca gempa bumi Tahun 2019 kembali mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2024

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
< 1.500.000	0,00	0,00
1.500.000-199.999	0,00	0,00
200.000-299.999	0,00	0,10
300.000-399.999	0,00	3,27
500.000-749.999	12,76	19,18
750.000-999.999	19,86	23,76
1.000.000-1.499.999	26,81	28,91
1.500.000+	40,57	22,78

Sumber : BPS Kota Palu, dan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Persentase penduduk Kota Palu dalam rentang pengeluaran Rp 500.000 - Rp 749.999 adalah 12,76%, lebih rendah dibandingkan Sulawesi Tengah (19,18%). Pada golongan Rp 750.000 - Rp 999.999, Kota Palu juga memiliki persentase yang lebih kecil (19,86%) dibandingkan provinsi (23,76%). Untuk rentang Rp 1.000.000 - Rp 1.499.999, persentase penduduk Kota Palu (26,81%) sedikit lebih rendah dibandingkan Sulawesi Tengah (28,91%). Ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penduduk di Sulawesi Tengah berada dalam kategori pengeluaran menengah dibandingkan Kota Palu.

Kota Palu memiliki persentase penduduk dengan pengeluaran Rp 1.500.000+ sebesar 40,57%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Tengah yang hanya 22,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa standar ekonomi di Kota Palu lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Tengah, yang mungkin disebabkan oleh faktor urbanisasi, akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, serta tingkat konsumsi yang lebih besar. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2022-2024

Kelompok Bukan Makanan	Tahun		Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (%)
	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
Perumahan dan Fasilitas Rumah	470.726	508.232	18,0%
Aneka Barang dan Jasa	140.182	149.039	6,3%
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	43.497	45.038	3,8%
Barang Yang Tahan Lama	54.890	78.800	118,4%
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	95.224	118.837	24,5%
Keperluan Pesta dan Upacara	43.838	18.041	-24,2%
Jumlah	848.357	908.088	16,3%

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024 (dolah)

Berdasarkan data pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palu dalam kelompok bukan makanan, terdapat tren pertumbuhan yang cukup signifikan antara tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 16,3 persen. Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah meningkat cukup signifikan, mengindikasikan adanya kenaikan biaya tempat tinggal, pemeliharaan rumah, atau peningkatan akses terhadap fasilitas hunian yang lebih baik. Kenaikan 8,7 persen pengeluaran Aneka Barang dan Jasa menunjukkan adanya peningkatan konsumsi barang dan jasa, yang bisa mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat atau kenaikan harga barang dan jasa.

Kategori pengeluaran Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala mengalami pertumbuhan yang kecil 3,8 persen, mengindikasikan bahwa kebutuhan pakaian dan perlengkapannya cenderung stabil dan tidak mengalami lonjakan harga yang besar. Kategori pengeluaran Barang yang Tahan Lama ini mengalami lonjakan tertinggi yaitu 118,4 persen, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pembelian barang elektronik, kendaraan, atau barang lainnya yang memiliki umur pakai panjang, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi rumah tangga dalam barang berjangka panjang. Peningkatan yang cukup tinggi pada kategori pengeluaran asuransi sebesar 24,5 persen ini menunjukkan adanya kenaikan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pungutan, dan asuransi. Kategori Keperluan Pesta dan Upacara justru mengalami penurunan yang cukup drastis lebih dari 50 persen, yang bisa disebabkan oleh berkurangnya kegiatan adat, perayaan, atau penghematan masyarakat pada pengeluaran untuk upacara dan pesta.

Secara keseluruhan, peningkatan pengeluaran menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat Kota Palu, terutama dalam investasi pada barang tahan lama dan pembayaran pajak serta asuransi. Namun, ada indikasi perubahan prioritas pengeluaran, dengan pengurangan anggaran untuk keperluan pesta dan upacara.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi. Jika hal ini berlaku sebaliknya maka dengan melihat penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2023 sebesar 1.15 rupiah sebulan maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.15 rupiah sebulan.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Berdasarkan tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2023 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (17,98%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,18%); dan Transportasi dan Pergudangan (9,08%).

Tabel 2.82 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,09	(1,34)	2,82	0,88	10,10	2,71	7,90	1,87	4,52	2,94
B	Pertambangan dan Penggalian	(19,85)	(30,83)	9,16	7,90	14,18	6,18	23,07	17,88	14,96	14,37
C	Industri Pengolahan	1,11	(1,62)	6,74	3,41	3,89	3,41	5,19	1,51	0,45	2,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,18	1,04	6,66	6,13	11,33	9,84	9,04	7,09	9,07	8,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,94	(0,90)	9,07	4,40	6,01	3,27	3,94	2,59	8,01	4,30
F	Konstruksi	1,03	(2,21)	7,62	4,73	2,47	2,13	3,72	1,68	3,19	0,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(4,40)	(6,31)	13,06	12,37	16,86	9,10	10,06	6,10	6,74	3,73
H	Transportasi dan Pergudangan	(33,37)	(33,91)	10,30	8,94	30,39	15,47	16,73	9,08	7,46	3,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(11,21)	(13,53)	17,92	12,88	11,31	10,36	11,24	9,18	14,06	7,37
J	Informasi dan Komunikasi	2,09	8,34	7,44	6,11	5,35	4,68	5,70	3,88	9,33	4,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,67	7,34	11,63	9,38	7,18	(0,21)	4,77	2,79	12,23	11,03
L	Real Estate	1,44	0,91	6,84	5,37	10,11	7,62	14,38	7,47	9,31	3,46
M	Jasa Perumahan	(1,41)	(3,07)	4,60	2,73	0,33	3,98	10,00	3,78	8,65	3,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	1,49	6,34	4,73	5,73	1,24	3,77	1,76	6,12	0,69
O	Jasa Pendidikan	(1,00)	(2,25)	3,60	1,84	3,72	0,99	6,06	4,92	3,29	6,30
P	Jasa Kesehatan dan Regulasi Sosial	7,92	7,41	12,33	7,02	7,50	3,64	10,04	6,00	3,29	3,03
Q	Jasa lainnya	(0,63)	(1,29)	3,04	3,11	6,39	5,64	6,57	6,15	3,17	4,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(3,62)		(4,43)		8,32		8,94		8,23	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		(3,62)		(4,43)		8,32		8,94		8,23	

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.83 Kontribusi Tiap Sektor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,04	4,87	3,83	4,06	3,88	4,00	3,57	3,88	3,77	3,52
B	Pertambangan dan Penggalian	6,13	5,97	6,07	6,04	6,37	6,13	7,23	6,91	7,79	7,56
C	Industri Pengolahan	8,39	7,32	6,49	7,13	6,31	7,06	5,98	6,55	5,94	6,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,21	0,13	0,20	0,13	0,21	0,13	0,22	0,14	0,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,31	0,30	0,31	0,29	0,31	0,29	0,30	0,25	0,30
F	Konstruksi	19,39	17,17	19,30	18,97	18,17	18,81	17,73	18,09	17,13	15,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,51	9,63	10,13	10,25	11,29	10,70	11,32	10,81	11,40	10,93
H	Transportasi dan Pergudangan	6,13	5,80	6,37	6,03	7,00	6,59	6,52	6,86	8,36	7,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	0,83	0,93	0,90	0,98	0,98	1,00	1,00	1,07	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	9,97	12,29	9,89	12,31	9,59	12,34	9,37	12,43	9,58	12,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,77	6,82	3,94	6,44	3,53	6,16	3,66	6,03	3,93	6,40
L	Real Estate	2,39	2,51	2,36	2,46	2,39	2,54	2,52	2,60	2,59	2,57
M	Jasa Perumahan	1,14	1,18	1,10	1,13	1,11	1,16	1,13	1,17	1,13	1,18
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,77	14,03	14,33	13,87	14,11	13,46	13,53	13,06	13,43	12,82
O	Jasa Pendidikan	7,92	7,60	7,57	7,30	7,21	7,07	7,07	6,83	6,83	6,90
P	Jasa Kesehatan dan Regulasi Sosial	3,43	3,67	3,59	3,61	3,55	3,59	3,61	3,63	3,49	3,37
Q	Jasa lainnya	0,99	1,00	0,93	0,97	0,92	0,96	0,93	0,99	0,91	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

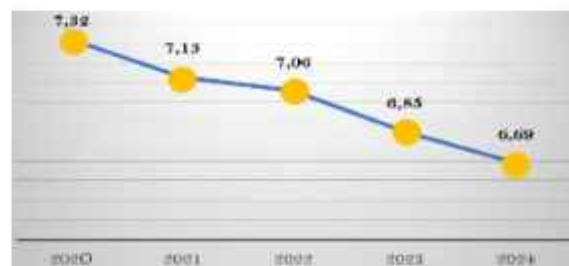
Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara total produktivitas total daerah Kota Palu mengalami masa fluktuatif selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020-2024 hal ini menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja dalam pengembangan lapangan usaha di Kota Palu berbeda dari tahun ke tahun.

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kota Palu mencerminkan seberapa besar peran sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Sektor ini menjadi indikator penting dalam menunjukkan tingkat industrialisasi dan kapasitas daerah dalam mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Di Kota Palu, industri pengolahan berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi yang berkaitan

erat dengan sektor perdagangan, tenaga kerja, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Perubahan dalam rasio ini dapat mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi, seperti perluasan kapasitas produksi, transformasi ekonomi, atau perubahan orientasi kebijakan pembangunan daerah



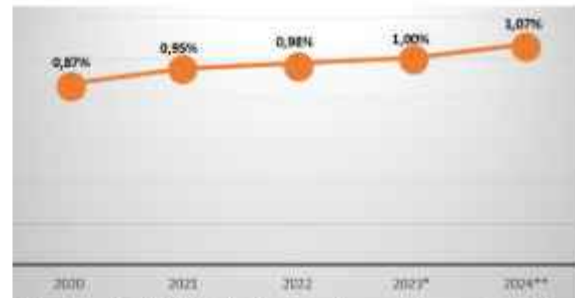
Gambar 2.55 Grafik Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 Kota Palu
Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan proporsi tertinggi sebesar 7,32%, kemudian turun menjadi 7,13% pada 2021 dan 7,06% pada 2022. Penurunan ini mencerminkan adanya perlambatan kinerja sektor industri pengolahan, yang sebelumnya menjadi salah satu motor utama penggerak daerah.

Penurunan paling tajam terlihat pada tahun 2024, ketika proporsi industri pengolahan turun signifikan ke angka 6,85%. Tahun berikutnya, pada 2024, kontribusi sektor ini kembali mengalami penurunan tipis menjadi 6,69%, menunjukkan kecenderungan stagnasi dan belum adanya tanda-tanda pemulihan yang kuat. Tren ini bisa mengindikasikan berbagai tantangan yang dihadapi sektor pengolahan industri, seperti keterbatasan bahan baku, rendahnya investasi, kurangnya inovasi teknologi, atau dampak lanjutan dari krisis global yang mempengaruhi permintaan dan rantai pasok industri.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum di Kota Palu mencerminkan kontribusi ekonomi dari layanan perhotelan, restoran, dan penyediaan makanan kepada struktur perekonomian daerah. Sektor ini menjadi barometer aktivitas pariwisata, konsumsi lokal, dan daya beli masyarakat, serta menunjukkan interaksi antara sektor jasa, usaha mikro, kecil, menengah dengan ekosistem pariwisata kota. Dinamika perubahan rasio ini mencerminkan pola permintaan masyarakat, keberhasilan promosi wisata, dan penguatan sektor UMKM terkait kuliner. Perubahan positif dalam rasio ini menunjukkan adanya peningkatan peluang ekonomi, sedangkan penurunan bisa mengindikasikan kebutuhan intervensi kebijakan, misalnya melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi produk kuliner, dan pengembangan destinasi wisata lokal.



Gambar 2.56 Grafik Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020-2024 di Kota Palu
Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Grafik menunjukkan perkembangan proporsi PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa sektor ini mengalami tren pertumbuhan yang stabil dan konsisten, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih tergolong kecil. Pada tahun 2020, proporsinya berada di angka 0,87%, kemudian naik bertahap menjadi 0,95% (2021), 0,98% (2022), dan 1,00% (2023). Peningkatannya terus berlanjut hingga mencapai 1,07% pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor investasi dan makanan-minuman mulai menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif, terutama pascapandemi. Sektor ini menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung oleh negosiasi sosial dan penurunan mobilitas, namun data ini menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata, konsumsi domestik, dan layanan kuliner mulai kembali pulih. Pertumbuhan yang konsisten mencerminkan membaiknya kepercayaan konsumen dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal.

Indeks Inovasi Daerah



Gambar 2.57 Indeks Inovasi Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik Indeks Inovasi Daerah Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat sebuah perjalanan yang dinamis namun menunjukkan tren positif dalam pengembangan

inovasi. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah berada di angka 23, yang kemudian melonjak drastis hingga mencapai 52,16 pada tahun 2021. Lonjakan signifikan ini mencerminkan adanya terobosan atau inisiatif kebijakan yang sangat efektif dalam mendorong ekosistem inovasi. Setelah lonjakan tersebut, laju pertumbuhan melambat pada tahun 2022, di mana indeks naik tipis menjadi 54,95, menunjukkan adanya upaya stabilisasi setelah terobosan besar.

Pada tahun 2023, di mana indeks mengalami penurunan menjadi 51,05, mengindikasikan adanya hambatan atau perlambatan dalam upaya inovasi. Meskipun demikian, daerah ini menunjukkan resiliensi yang kuat, terbukti dengan adanya pemulihan dan peningkatan kembali pada tahun 2024. Indeks Inovasi Daerah berhasil mencapai titik tertinggi dalam periode ini, yaitu 55,90, menandakan bahwa daerah tersebut berhasil mengatasi tantangan sebelumnya dan kembali fokus untuk mencapai level inovasi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun perjalanannya tidak selalu mulus, grafik ini menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap inovasi yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka panjang.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Bappenas untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Indeks ini mencakup tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan social. Inti dari Ekonomi Hijau adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian serta daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui peningkatan investasi ramah lingkungan, pengelolaan aset dan infrastruktur secara berkelanjutan, menjamin proses transisi yang adil dan dapat dijangkau oleh semua pihak, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Indeks Ekonomi Hijau juga berfungsi sebagai panduan dalam menjaga konsistensi pencapaian pembangunan jangka panjang dan mempercepat implementasi program Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim yang telah diintegrasikan ke

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Ekonomi hijau dan biru Kota Palu diimplementasikan sebagai upaya dalam strategi transformasi ekonomi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Palu mulai menunjukkan tanda-tanda awal penerapan konsep ekonomi hijau dan biru melalui praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya air dan energi lokal secara optimal, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan. Meski demikian, untuk memastikan keberlanjutan transformasi ekonomi tersebut, masih diperlukan peningkatan investasi di sektor energi terbarukan, digitalisasi UMKM berbasis lingkungan, serta penguatan regulasi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berikut adalah beberapa terkait penerapan ekonomi hijau di Kota Palu:

- Penggunaan energi terbarukan: Pemanfaatan energi surya, angin, atau biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- Pengelolaan sampah: Sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk daur ulang dan pengurangan sampah.
- Transportasi berkelanjutan: Penyediaan dan penggunaan transportasi publik (Bus Trans Palu) yang melayani masyarakat Palu
- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis lingkungan: Pemanfaatan potensi alam dan budaya lokal untuk menciptakan produk dan jasa yang ramah lingkungan.
- Pertanian berkelanjutan: Penerapan praktik pertanian organik dan ramah lingkungan.
- Pengelolaan sumber daya air: Penggunaan air yang bijaksana dan pencegahan pencemaran air.

Ekonomi Biru

Kota Palu sebagai wilayah pesisir yang berada di Teluk Palu memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Indeks Ekonomi Biru di Kota Palu dapat dipahami sebagai ukuran yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berkelanjutan, inovatif, serta memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi aktual, terdapat beberapa dimensi utama pembentuk Indeks Ekonomi Biru Kota Palu:

1. Dimensi Ekologi

Teluk Palu merupakan ekosistem pesisir yang unik, namun masih menghadapi tantangan berupa degradasi kualitas perairan akibat limbah dan aktivitas darat. Upaya rehabilitasi pesisir, pengendalian pencemaran, serta perlindungan kawasan mangrove menjadi indikator penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan laut.

2. Dimensi Ekonomi

Sektor perikanan tangkap dan budidaya laut memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal, meskipun sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Potensi pengembangan ekonomi biru juga muncul melalui ekowisata bahari, industri olahan hasil laut, dan jasa transportasi laut. Berdasarkan analisis PDRB, sektor perikanan dan perdagangan hasil laut meskipun belum dominan, memiliki prospek untuk diperkuat melalui program hilirisasi.

3. Dimensi Sosial

Sebagian masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada perikanan, namun tingkat kesejahteraan masih fluktuatif. Program pemberdayaan nelayan, peningkatan akses modal, serta pelatihan teknologi budidaya ramah lingkungan menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan indeks.

4. Dimensi Tata Kelola

Pemerintah Kota Palu mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam rencana pembangunan, meskipun koordinasi antar-sektor dan penegakan aturan masih perlu diperkuat. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta penting untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi biru.

5. Dimensi Inovasi dan Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok perikanan masih terbatas. Namun, peluang pengembangan smart fisheries, sistem informasi pasar hasil laut, serta teknologi energi terbarukan untuk usaha nelayan sangat potensial untuk didorong.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital di Kota Palu menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

Beberapa inisiatif transformasi digital di Kota Palu: Pemerintah Kota Palu berupaya mengembangkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

1. PELAYANAN SEKSI: "Dukcapil Kota Palu menerapkan rekomendasi infrastruktur pendukung bagi penyandang disabilitas, orang sakit, dan lansia"
2. KALEDO GRATIS 'Keliling Layanan Sekolah Gratis' "Dukcapil Kota Palu juga menyediakan layanan keliling ke sekolah menengah atas untuk penerbitan KTP biometrik. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah signifikan warga Palu yang belum mendaftar e-KTP biometrik. Kondisi"
3. (SIMALEO BERGERAK) 'Sistem Mobile Pelayanan Dokumen Kependudukan Yang Bersih, Gratis Dan Praktis' "Dukcapil Kota Palu menyediakan layanan penjemputan bola ke desa-desa, memfasilitasi penyerahan langsung akta kematian dan kartu keluarga untuk perubahan status ke rumah duka, dan melakukan pencatatan nikah di tempat ibadah bagi non-Muslim"
4. PELANGI DI KECAMATAN 'Pelayanan Di Kecamatan Dan Mal Pelayanan Publik' "Untuk mengurus pencatatan kependudukan, tidak perlu lagi pergi ke Dukcapil; Anda tinggal mengunjungi Kantor Kecamatan setempat atau mal Pelayanan Umum untuk menangani hal tersebut" Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Palu telah mengembangkan aplikasi peta penanaman modal dan promosi bernama PIPRO.
5. e-SIGA adalah platform online untuk pendaftaran permohonan izin yang tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mencari izin di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. e-SIGA diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik dan lebih cepat kepada individu ke layanan terintegrasi. Dengan satu akun, Anda dapat mengajukan permohonan untuk semua kategori hak.
6. Pemerintah Kota Palu melalui DP2KB resmi meluncurkan aplikasi 'Halo KB'.
7. KASIKU BERGERAK 'Kelurahan Sadar Miliki Dokumen Kependudukan Berinovasi
8. Gratis dan Praktis"Kelurahan Juga Sudah Bisa Memenuhi Kebutuhan Dokumen Kependudukan Anda"
9. ALPUKAT 'Anak Lahir Pulang Bawa Akta' "Layanan Ini Bekerja Sama Dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Yang Telah Menjalinkan Perjanjian Kerja Sama"
10. LOKET CERIA 'Loket Pelayanan 1 Operator Semua Dokumen' "Cukup Dengan Ke 1 (Satu) Operator Dokumen Kependudukan Anda Bisa Diselesaikan Semua"

11. LAMAR AKU "Layanan Mobile Pernikahan antara Dukcapil dan KUA Se-Kota Palu untuk penerbitan KK, KTP-EI baru bagi calon pengantin, serta KK baru bagi orang tua pengantin saat pernikahan".
12. SIRATU BOT "Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Chat Bot Siratu, layanan online fast response untuk mengetahui persyaratan pengurusan dokumen kependudukan tanpa perlu datang langsung."
13. PAKAI MASKERLAJ Layanan keliling komunitas RUTAN dan LAPAS, bekerja sama dengan kepala lapas Dukcapil Petobo Palu, Lapas anak Petobo Palu, Lapas perempuan Palu, dan Lapas Maesa Palu, merupakan inovasi yang dikenal dengan Maskerla. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap narapidana yang bertempat tinggal di Palu dapat segera menerima dokumen kependudukan untuk mengakses bantuan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan dan partisipasi dalam proses demokrasi.
14. BOS KEREN 'Both Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik' Dukcapil Kota Palu Buka Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Tempat – Tempat Pelayanan Publik

Capaian tranformasi teknologi digital Kota Palu dapat dilihat dari indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, gambaran capaian indeks tersebut dalam kurun 2020-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.58 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Palu Tahun 2020-2023

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kota Palu, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, indeks berada di angka 5,27. Angka ini kemudian terus mengalami kenaikan menjadi 5,52 pada tahun 2021, 5,6 pada tahun 2022, dan mencapai

puncaknya di 5,76 pada tahun 2023. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam sektor TIK di Kota Palu.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan IP-TIK tidak selalu terjadi dengan laju yang sama. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2020 dan 2021, di mana indeks melonjak sebesar 0,25 poin, diikuti oleh peningkatan yang lebih landai sebesar 0,08 poin dari tahun 2021 ke 2022. Namun, laju peningkatan kembali mengalami percepatan dari tahun 2022 ke 2023 dengan kenaikan sebesar 0,16 poin. Fluktuasi laju peningkatan ini bisa mencerminkan berbagai faktor, seperti implementasi kebijakan, investasi infrastruktur, atau program literasi digital yang berbeda setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran positif mengenai perkembangan TIK di Kota Palu. Peningkatan indeks yang terus-menerus menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dan pihak terkait dalam membangun ekosistem digital mulai membuahkan hasil. Pencapaian IP-TIK sebesar 5,76 pada tahun 2023 menjadi bukti nyata dari komitmen Kota Palu dalam mendorong transformasi digital, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Aktivitas investasi dalam perekonomian Kota Palu memiliki peranan yang cukup signifikan. Hal ini dapat diamati dari peranan komponen PMTB dalam perekonomian Kota Palu. Komponen ini memiliki kontribusi kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun

2023 proporsi pengeluaran PMTB terhadap PDRB Kota Palu mencapai 47,77 persen.

Data pada Gambar 2.59 menjelaskan secara keseluruhan per- tumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023.



Gambar 2.59 Pembentukan Modat Tetap Bruto Kota Palu (Milyar) Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024, baik dalam harga konstan (ADHK) maupun harga berlaku (ADHB), menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju kenaikannya cenderung melambat pada tahun-tahun terakhir.

Dari sisi ADHK (harga konstan), PMTB meningkat secara konsisten dari Rp10.781,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp14.846,73 miliar pada tahun 2024. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2020 ke 2021 (sekitar 16,8%), yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pada tahun-tahun berikutnya, kenaikan terus terjadi meskipun dengan persentase yang menurun, yaitu sekitar 8,1% (2021–2022), 8% (2022–2023), dan hanya 0,95% pada 2023–2024. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi fisik masih terjadi, tetapi mulai melambat pada tahun terakhir.

Sementara itu, dari sisi ADHB (harga berlaku), angka PMTB juga meningkat dari Rp7.605,77 miliar di tahun 2020 menjadi Rp8.697,00 miliar di tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi juga terjadi antara tahun 2020 dan 2021 (sekitar 6,4%), namun selanjutnya kenaikannya lebih moderat: 4,2% (2021–2022), 2,8% (2022–2023), dan hanya 0,3% pada 2023–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai investasi secara nominal juga meningkat, namun pertumbuhan riil (yang diperlihatkan oleh ADHK) lebih signifikan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa investasi pada aset tetap di Kota Palu tumbuh stabil, mencerminkan adanya perbaikan dalam iklim investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, perlambatan pertumbuhan di tahun terakhir menjadi sinyal perlunya dorongan kebijakan baru atau stimulus investasi agar tren positif ini tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut lapangan usaha dengan total PDRB menurut Pengeluaran. Keterse- diaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode cross hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor

dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

Tabel 2.84 Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHE	-3.002,37	-3.019,22	-6.398,70	-6.946,63	-7.318,39
ADHE 2010	2.305,82	2.306,22	2.927,74	2.103,88	2.102,12
Proporsi terhadap PDRB (% ADHE)	-10,31	-11,41	-28,93	-29,00	-29,41

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Pada tahun 2023 nilai nominal net ekspor atas dasar harga berlaku Kota Palu bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kota Palu mengalami defisit atau nilai ekspor Kota Palu lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2023, nilai net ekspor Kota Palu adalah negatif 7,52 triliun rupiah. Bila dihitung berdasarkan harga harga konstan 2010 nilai net ekspor Kota Palu tahun 2023 adalah negatif 3,49 triliun rupiah. Sedangkan proporsinya terhadap PDRB Kota Palu mencapai negatif 24,41 persen

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Sarana Jalan

Tabel berikut menyajikan data terkait kondisi jaringan jalan, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk, kualitas jalan kota, serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di Kota Palu selama periode lima tahun terakhir. Informasi ini mencakup indikator seperti proporsi jalan dalam kondisi baik, persentase ruas jalan mantap, ketersediaan trotoar dan drainase, hingga capaian pembangunan jalan dan drainase.

Tabel 2.85 Pembangunan Sarana Jalan Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Sarana Jalan	Unit	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	%	90,89	91,88	93,12	92,30	92,79
2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk		0,02	0,23	0,23	0,23	0,22
3	Persentase jalan aspal dalam kondisi baik (>= 40 KM/jam)	%	90,89	91,00	94,44	94,20	93,78
4	Perbaikan Panjang Ruas Jalan Kondisi Mantap	%	18,82	30,09	63,00	73,03	74,00
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase, dalam pembangunan str. (miliar, Rp.)	%	0,00	1,89	2,89	4,80	5,78
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						
a	Pembangunan Jalan Beton	Rp.	199.900	275.594	690.012	774.092	280.12
b	Pembangunan Jalan Aspal	Rp.	696.839	214.998	690.012	774.092	190.12
c	Pemeliharaan Ruas Jalan Aspal	Rp.	0	0	13.10	25,79	2.828
d	Pembangunan Jalan Makadam	Rp.	0	148.182	409.140	635.49	144.96
e	Pembangunan Drainase	Rp.	20.040	5.212	12.181	19.03	12.971

Sumber: Pelaporan Umum dan Perencanaan Rahm, Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan data, kondisi jaringan jalan di Kota Palu menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Proporsi

panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat dari 40,83% pada tahun awal menjadi 63,79% pada tahun akhir, sejalan dengan peningkatan persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) yang juga mencapai angka yang sama. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan dan pemeliharaan jalan, terutama di periode 2022–2024 yang mencatat lonjakan kondisi baik lebih dari 20 poin persentase. Kenaikan ini juga diikuti oleh persentase panjang ruas jalan kondisi mantap yang konsisten membaik dari 59,92% menjadi 74,05%.

Meski begitu, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk relatif stagnan, berkisar di angka 0,22–0,25. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan panjang jalan belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk secara signifikan. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti trotoar dan drainase masih tergolong minim meski ada tren kenaikan, dari hanya 0,95% di tahun awal menjadi 8,78% di tahun akhir. Walaupun persentase ini meningkat hampir sembilan kali lipat, angka tersebut masih cukup rendah untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki.

Dari sisi pembangunan prasarana jalan, terlihat investasi besar pada pembangunan jalan hotmix dan aspal yang jumlahnya identik setiap tahun, meningkat dari sekitar 630 km menjadi 780 km. Pemeliharaan rutin jalan aspal baru dimulai tahun 2022 dan melonjak drastis di 2024 mencapai 2.929 km, yang bisa menjadi faktor pendukung perbaikan kualitas jalan secara signifikan. Pembangunan jalan makadam juga cukup fluktuatif, tertinggi pada 2023 dengan 235,89 km sebelum menurun menjadi 188,82 km di tahun akhir.

Pembangunan drainase mengalami penurunan yang cukup tajam pada beberapa tahun, dari 20,642 km di tahun awal menjadi hanya 5,573 km di 2021, kemudian naik lagi di 2022–2023, namun kembali turun ke 12,971 km di 2024. Mengingat pentingnya drainase dalam menjaga kualitas jalan dan mengurangi kerusakan akibat genangan air, aspek ini memerlukan perhatian lebih. Secara keseluruhan, Kota Palu berhasil meningkatkan kualitas jaringan jalan secara signifikan, namun perlu memperkuat pembangunan fasilitas pendukung dan mempertahankan pemeliharaan agar perbaikan ini berkelanjutan.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Kota Palu, yang dijuluki sebagai kota lima dimensi, telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama pascabencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Salah satu aspek krusial dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali kota adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap hunian yang layak. Hunian tidak hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga fondasi bagi pemulihan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga



Gambar 2.60 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat sebuah tren yang dinamis dan fluktuatif di Kota Palu. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada pada angka tertinggi, yaitu 99,27%. Angka yang hampir sempurna ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, di mana sebagian besar warga Palu telah kembali mendapatkan tempat tinggal yang aman dan memadai.

Pada tahun 2021, persentase turun menjadi 91,74%, dan terus menurun tajam hingga mencapai titik terendah 83,72% pada tahun 2022. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan tantangan baru yang dihadapi Kota Palu, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, keterbatasan ketersediaan lahan, atau isu-isu ekonomi yang membuat masyarakat sulit untuk mengakses hunian layak.

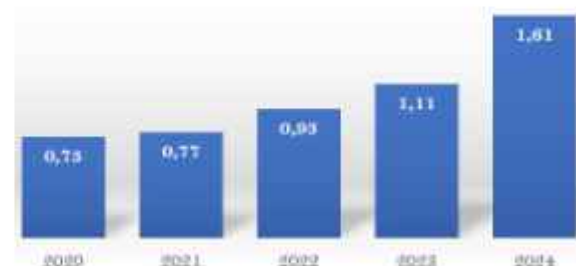
Meskipun demikian, ada tanda-tanda positif dari upaya pemulihan. Pada tahun 2023, persentase kembali meningkat menjadi 87,54%, dan tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana persentase kembali naik menjadi 89,49%. Kenaikan selama

dua tahun terakhir menunjukkan adanya keberhasilan program-program pemerintah Kota Palu, baik dalam pembangunan hunian baru, perbaikan permukiman, atau bantuan perumahan bagi warga. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat Palu untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, meskipun belum kembali ke level ideal seperti tahun 2020. Secara keseluruhan, grafik ini menceritakan kisah resiliensi Kota Palu, dari pencapaian gemilang pascabencana, menghadapi tantangan baru, hingga bangkit kembali dengan semangat untuk menyediakan hunian yang layak bagi setiap warganya.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Nilainya dihitung sebagai persentase dari pendapatan pajak terhadap skala perekonomian yang diukur dengan PDRB harga berlaku. Dengan kata lain, rasio pajak mencerminkan seberapa besar pendapatan regional daerah yang beralih ke pundi-pundi penerimaan pajak. Setiap satu persen rasio pajak menandakan bahwa satu persen pendapatan masyarakat masuk ke kas negara. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin besar kemampuan suatu negara menyediakan barang dan layanan publik tanpa bergantung pada utang. Artinya, peningkatan rasio pajak patut diupayakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



Gambar 2.61 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Rasio pajak terhadap PDRB Kota Palu dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten. Pada awal periode, yakni tahun 2020 dan 2021, rasio pajak masih berada pada level rendah, masing-masing sebesar 0,73% dan 0,77%. Kondisi ini tidak

terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menekan kinerja ekonomi daerah serta melemahkan daya pungut pajak. Aktivitas usaha masyarakat yang terbatas menyebabkan kontribusi pajak terhadap PDRB belum optimal.

Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan naiknya rasio pajak menjadi 0,93%. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, terutama dengan kembali berputarnya sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi. Selain itu, langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pemungutan pajak turut memberikan efek positif terhadap pertumbuhan rasio pajak. Hal ini menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi Kota Palu mulai bangkit dan mampu memberikan kontribusi fiskal yang lebih baik.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio pajak mencapai 1,11%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pajak semakin berperan dalam mendorong kapasitas fiskal daerah. Selain ditopang oleh sektor perdagangan dan konstruksi, kontribusi dari sektor unggulan seperti perikanan dan industri pengolahan juga mulai terlihat. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak oleh pemerintah daerah semakin efektif, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak pada penerimaan.

Puncaknya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan dengan rasio pajak terhadap PDRB mencapai 1,61%. Capaian ini mencerminkan penguatan kinerja fiskal daerah sekaligus potensi ekonomi yang semakin terbuka luas. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya, rasio ini masih relatif rendah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi lebih inovatif dalam mengoptimalkan pajak daerah, termasuk integrasi sektor informal dan peningkatan literasi pajak masyarakat, agar kontribusi pajak terhadap pembangunan di Kota Palu semakin besar.

Inflasi

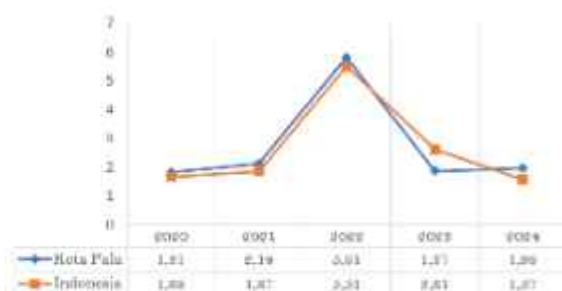
Inflasi Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 5,81 persen dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 1,81 persen. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,79 persen lebih kecil 0,14 persen dari rata-rata inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,93 persen. Rata-rata Inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 2.86 di bawah ini:

Tabel 2.86 Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Inflasi	Tahun					Rata-rata Inflasi
	2020	2021	2022	2023	2024**	
Kota Palu	1,81	2,19	5,81	1,87	1,98	2,72
Indonesia	1,69	1,87	5,81	2,61	1,87	2,65

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Secara grafik Inflasi diperlihatkan dalam gambar inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2019-2023 berikut ini :



Gambar 2.62 Inflasi Kota Palu Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Secara umum, inflasi di Kota Palu pada Desember 2024 terutama didorong oleh kenaikan harga di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,94%. Sementara itu, beberapa sektor seperti Transportasi dan Perlengkapan Rumah Tangga mengalami deflasi, menunjukkan adanya penurunan harga di beberapa aspek ekonomi. Perubahan harga ini mencerminkan dinamika ekonomi di Kota Palu yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kebijakan harga, serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran di berbagai sektor.

Tabel 2.87 Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

No.	Kelompok Pengeluaran	Desember 2024
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,94
2.	Pakaian dan Alat Rias	0,00
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00
4.	Perlengkapan, Perawatan, dan Perawatan Rumah Tangga	-0,04
5.	Kesehatan	0,51
6.	Transportasi	0,51
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,1
8.	Hiburan, Olahraga, dan Budaya	-0,00
9.	Pendidikan	-
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	0,18
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,19
12.	Lain-lain	0,49

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palu Mantap Berkelanjutan, Akseleratif, Inovatif dan Kolaboratif, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan zaman. Regulasi dan tata kelola yang adaptif merupakan fondasi utama dalam mendukung efektivitas kebijakan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Palu berkomitmen membangun sistem regulasi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum yang baik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Proses penyusunan kebijakan diarahkan agar partisipatif, transparan, dan berbasis data, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu mendorong efisiensi birokrasi, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif. Harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional dan tantangan lokal juga menjadi prioritas, khususnya dalam menghadapi isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan penguatan daya saing daerah.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang berintegritas menekankan pada penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi dalam setiap lini pelayanan publik. Melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kota Palu terus berupaya memastikan bahwa setiap program dan anggaran dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

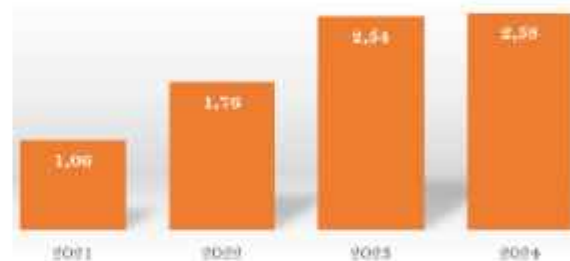
Kota Palu juga mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk mempercepat pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Implementasi sistem satu data daerah, digitalisasi layanan perizinan, serta integrasi layanan lintas OPD menjadi bagian dari strategi memperkuat birokrasi yang adaptif dan kolaboratif.

Dengan regulasi yang dinamis dan tata kelola yang kuat, Kota Palu diarahkan menjadi kota yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu

memanfaatkan peluang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien. Di era digital ini, SPBE bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempermudah akses informasi, serta mengoptimalkan kinerja birokrasi. Dengan mengukur Indeks SPBE dari waktu ke waktu, kita dapat melihat sejauh mana sebuah daerah telah berhasil dalam upaya transformasi digitalnya, mengidentifikasi capaian, dan menemukan area yang masih perlu ditingkatkan. Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks SPBE di Kota Palu dari tahun 2021 hingga 2024.



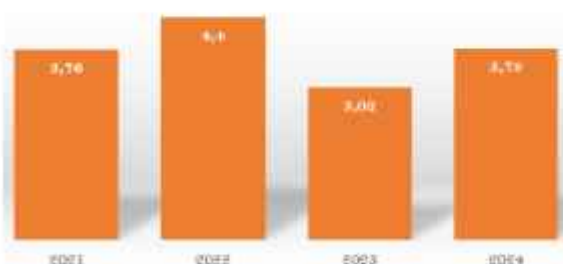
Gambar 2.63 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palu Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan yang sangat konsisten dan positif dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palu. Pada tahun 2021, indeks SPBE berada di angka 1,06, yang mengindikasikan bahwa implementasi sistem ini masih berada pada tahap awal. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 1,76, yang menunjukkan adanya inisiasi dan investasi serius dari pemerintah daerah dalam membangun fondasi digital. Lompatan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana indeks melonjak hingga 2,54. Kenaikan drastis ini adalah bukti nyata dari percepatan program digitalisasi, yang mungkin didorong oleh kebijakan strategis, alokasi anggaran yang lebih besar, atau kerja sama dengan pihak terkait untuk mempercepat integrasi teknologi dalam pelayanan publik.

Pada tahun 2024, indeks SPBE terus meningkat, meskipun dengan laju yang lebih moderat, menjadi 2,58. Angka ini mencerminkan bahwa setelah mencapai puncaknya, pemerintah Kota Palu kini berfokus pada tahap optimalisasi dan pemeliharaan sistem. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, grafik ini adalah cerminan dari keberhasilan Kota Palu dalam bertransformasi menuju pemerintahan yang lebih modern. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga berdampak langsung pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan daya saing daerah.

Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik tidak hanya menciptakan kepuasan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Indeks Pelayanan Publik menjadi salah satu tolok ukur penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan telah berjalan efektif, efisien, dan responsif. Dengan memantau indeks ini secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan mereka, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat. Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Kota Palu dari tahun 2021 hingga 2024.



Gambar 2.64 Indeks Pelayanan Publik Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

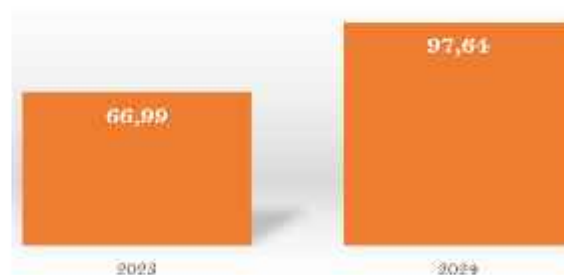
Grafik menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam Indeks Pelayanan Publik selama periode empat tahun. Pada tahun 2021, indeks berada di

angka 3,76, yang sudah menunjukkan kualitas pelayanan yang cukup baik. Angka ini kemudian melonjak tajam menjadi 4,40 pada tahun 2022, mencerminkan adanya perbaikan besar atau inisiatif yang berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang drastis, di mana indeks anjlok hingga 3,02. Penurunan ini bisa menjadi indikasi adanya masalah serius dalam sistem pelayanan, seperti kendala operasional, perubahan kebijakan yang kurang efektif, atau penurunan kualitas sumber daya. Penurunan ini jelas menunjukkan adanya tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Meskipun mengalami penurunan yang tajam di tahun 2023, grafik menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif pada tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik berhasil kembali naik menjadi 3,78. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi di tahun sebelumnya. Meskipun belum kembali ke level tertinggi pada tahun 2022, tren kenaikan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, grafik ini merefleksikan dinamika dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan resiliensi dan responsivitas pemerintah Kota Palu dalam menanggapi masalah yang ada demi kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Indeks Reformasi Hukum

Data indeks reformasi hukum Kota Palu dalam dua tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.65 Indeks Reformasi Hukum Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber : Pappeda Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan grafik Indeks Reformasi Hukum Kota Palu, dapat dianalisis bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Palu tercatat

sebesar 66,99. Angka ini mencerminkan kondisi awal di mana reformasi hukum sedang berjalan, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Meskipun demikian, angka tersebut sudah menunjukkan adanya upaya serius yang dilakukan pemerintah daerah dalam menata ulang sistem hukum dan regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan komitmen kuat dan kerja keras Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik dan efektif. Kenaikan indeks yang sangat tinggi dalam satu tahun membuktikan bahwa reformasi hukum bukan sekadar wacana, melainkan telah diwujudkan dalam tindakan nyata yang menghasilkan dampak positif. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Palu.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pemerintah Kota Palu menempatkan pembangunan hukum, keamanan, dan demokrasi sebagai bagian fundamental dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan partisipatif. Prinsip keadilan hukum menjadi pijakan utama untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara, mendorong kepastian hukum, serta menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Penguatan akses terhadap bantuan hukum gratis, edukasi hukum berbasis komunitas, serta penguatan lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa secara restoratif akan terus dikembangkan dalam lima tahun ke depan.

Dalam aspek keamanan, Kota Palu sebagai kawasan yang memiliki sejarah sosial dan geografis yang kompleks membutuhkan sistem keamanan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adaptif dan kolaboratif. Penguatan ketahanan sosial melalui partisipasi masyarakat, forum kewaspadaan dini, revitalisasi nilai-nilai lokal seperti kearifan adat dan budaya damai, serta integrasi pendekatan keamanan berbasis komunitas menjadi strategi untuk menjaga stabilitas wilayah. Pemerintah Kota Palu akan terus menjalin sinergi dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan kota

yang aman dan bebas dari potensi konflik horizontal, radikalisme, serta ancaman sosial lainnya.

Sementara itu, penguatan demokrasi tidak hanya dilakukan secara prosedural melalui pemilihan umum, tetapi diarahkan pada substansi demokrasi yang menjamin hak partisipasi aktif warga dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk memperkuat forum-forum musyawarah warga, memperluas ruang konsultasi publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Demokrasi substansial juga berarti memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, memiliki akses dan suara dalam pembangunan.

Melalui pembangunan hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang tangguh, dan demokrasi yang substansial, Kota Palu diarahkan menjadi kota yang inklusif, harmonis, dan beradab. Ketiga aspek ini menjadi landasan penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik yang mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Persentase Penegakkan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif adalah fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencerminkan disiplin, konsistensi, dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Persentase penegakan Perda menjadi indikator penting yang menunjukkan seberapa berhasilnya Satpol PP dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Grafik berikut menyajikan data persentase penegakan Perda di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2.66 Persentase Penegakkan Perda Kota Palu Tahun 2020-2024.

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Grafik menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten dalam persentase penegakan Perda di Kota Palu. Dimulai dari angka 85% pada tahun 2020, persentase ini terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angka tersebut meningkat menjadi 90%, dan berlanjut ke 95% pada tahun 2022. Kenaikan yang bertahap ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum di kota tersebut.

Pencapaian luar biasa terjadi pada tahun 2023, di mana persentase penegakan Perda mencapai angka sempurna 100%. Angka ini adalah bukti keberhasilan total dalam memastikan semua Perda yang berlaku dapat ditegakkan tanpa pengecualian. Hal ini mungkin didukung oleh kebijakan yang lebih tegas, kesadaran masyarakat yang meningkat, atau koordinasi yang sangat efektif antar-instansi. Angka 100% ini berhasil dipertahankan hingga tahun 2024, menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya insidental, melainkan telah menjadi standar operasional yang konsisten. Secara keseluruhan, grafik ini adalah cerminan dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang sangat baik.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam kerangka memperkuat posisi strategis Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus simpul utama aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di kawasan tengah Indonesia, Pemerintah Kota Palu mendorong penguatan kapasitas pertahanan kawasan dan diplomasi lokal yang adaptif, kolaboratif, dan proaktif. Konsep pertahanan berdaya gentar kawasan dalam konteks pemerintah daerah diwujudkan melalui kemampuan kota membangun sistem ketahanan wilayah yang kokoh terhadap berbagai ancaman, baik sosial, ekonomi, lingkungan, hingga ancaman non-tradisional seperti bencana dan disinformasi.

Pertahanan daerah dalam konteks perkotaan diarahkan pada penguatan ketahanan sipil berbasis masyarakat. Kota Palu terus mendorong pelibatan masyarakat, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga

pendidikan dan pemuda dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap terhadap potensi konflik atau gangguan stabilitas. Sistem deteksi dini, edukasi kebencanaan, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan ruang publik yang resilien menjadi bagian dari strategi menjaga ketangguhan wilayah.

Di sisi lain, diplomasi daerah dikembangkan melalui penguatan hubungan dan kerja sama antarpemerintah, antarwilayah, serta kemitraan internasional yang relevan. Kota Palu aktif membangun jejaring kerja sama dengan kota-kota lain di kawasan Sulawesi, termasuk dalam kerangka kerja sama segitiga pertumbuhan (growth triangle), pengembangan smart city, dan mitigasi bencana berbasis wilayah. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas diplomasi pemerintah daerah melalui pengelolaan informasi publik yang terbuka, penyampaian narasi pembangunan yang positif, serta pelibatan stakeholder lokal dalam forum nasional dan internasional.

Dengan membangun ketangguhan kawasan melalui pendekatan pertahanan sipil yang inklusif dan diplomasi daerah yang komunikatif, Kota Palu diarahkan menjadi kota yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga dihormati dan diperhitungkan di lingkup regional. Keberadaan kota yang aman, stabil, dan kooperatif merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tengah Indonesia.

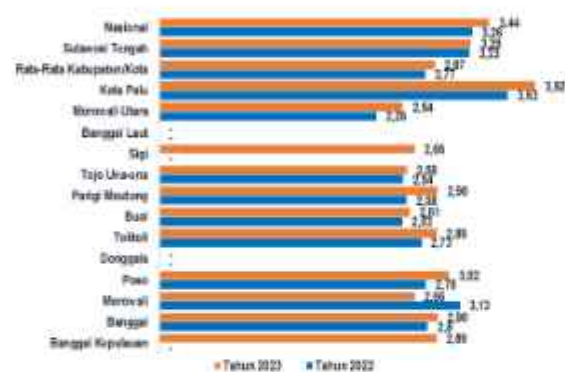
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Palu di Tahun 2023 sebesar 3,93 meningkat dari Tahun 2022 sebesar 3,63. Tahun 2023 IDSD Kota Palu menjadi yang tertinggi di kawasan timur Indonesia dan peringkat 11 nasional. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Seperti IDSD 2022, pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang tersusun dari 12 pilar. Hasil pengukuran IDSD Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun
2023

Variable (2002-2003)	LOW INFLATION PERIOD (2002-2004)				HIGH INFLATION PERIOD (2004-2006)				TRANSITION FROM LOW TO HIGH INFLATION PERIOD (2006-2008)				Sector Growth	
	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD	Min	Max		
INDUSTRIAL PRODUCTION	0.40	0.13	0.00	0.66	0.35	0.07	0.04	0.65	0.03	0.00	0.00	0.65	0.65	3.40
EXPORTS, MANUFACTURES	0.30	0.04	0.00	0.45	0.20	0.03	0.00	0.38	0.01	0.00	0.00	0.40	0.40	3.20
REAL GDP PER PERSON (CPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL GDP PER PERSON (PPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOVERNMENT EXPENDITURE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT REVENUE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEBT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT BALANCE	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT DEFICIT	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50	0.50	2.50
GOVERNMENT SURPLUS	0.40	0.03	0.00	0.50	0.30	0.03	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.50		

Hasil pengukuran IDSD Tahun 2022-2023 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan dalam Gambar 2.79.



Gambar 2.67 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintah daerah

Layanan Urusan Wajib Dasar

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Palu. Sebagai kota yang terus berkembang, peningkatan kualitas pendidikan menjadi landasan penting untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global. Pemerintah Kota Palu berkomitmen menyediakan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas melalui peningkatan akses, mutu, serta tata kelola pendidikan. Upaya ini diwujudkan dengan memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan lokal.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2020-2024 secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SNP/MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SNP/MTs	SMA/MA/SMK
2020	109,81	84,82	111,50	82,50	78,81	74,81
2021	103,12	88,79	112,88	82,49	78,85	77,66
2022	108,25	86,90	109,77	n/a	n/a	n/a
2023	101,08	112,20	102,30	102,68	82,08	88,88
2024	106,47	88,81	108,31	103,18	88,88	88,38

Sumber: BPS Kota Palu, dan BPS Sulawesi Tengah Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak Tahun 20 hingga 2022.

Kota Palu secara konsisten memiliki APK yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di semua jenjang pendidikan. Perbedaan paling mencolok terlihat pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di mana Kota Palu memiliki angka yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa akses pendidikan di wilayah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di provinsi. Meskipun begitu, tren di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di jenjang SD/MI.

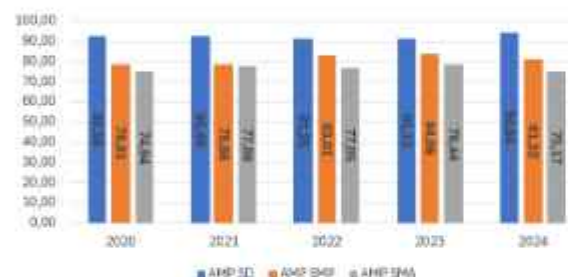
Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.68 berikut ini:



Gambar 2.68 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.68 menunjukkan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2020 ke Tahun 2024. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2020 sebesar 92,50 persen mengalami penurunan menjadi 92,49 persen pada Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 91,25 pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata tumbuh APM SD/MI adalah 0,58 persen. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 78,81persen mengalami penurunan menjadi 78,68 persen pada Tahun 2021 dan kembali naik menjadi 83,21persen pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 0,81 persen. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2020 sebesar 74,94 persen mengalami kenaikan menjadi 77,86 persen pada Tahun 2021 dan kembali turun menjadi 77,05 persen pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMA/SMK/MA adalah 0,121 persen. Meskipun

terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA namun secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik.

Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terurai dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	98,26	70,60	68,16
2	Banggai	91,85	70,00	60,32
3	Morowali	93,69	74,23	78,39
4	Poso	93,96	78,06	75,26
5	Donggala	93,21	78,75	57,06
6	Toi Toi	90,36	67,53	67,19
7	Buol	97,48	77,91	68,19
8	Parigi Moutong	n/a	n/a	n/a
9	Tojo Una-Una	97,12	76,98	58,29
10	Sigi	94,09	73,70	53,29
11	Banggai Laut	96,45	71,60	63,29
12	Morowali Utara	93,46	76,70	72,60
13	Kota Palu	91,13	84,06	78,44
Sulawesi Tengah		93,31	76,86	68,18

Sumber: BPS (Kabupaten/ Kota dan Provinsi) Dalam Angka Tahun 2024

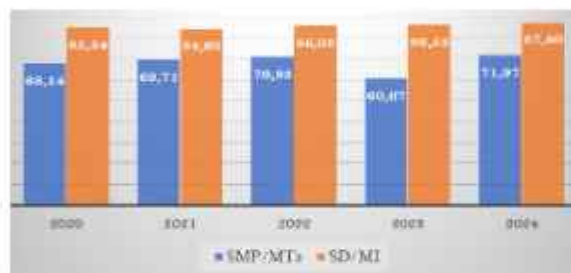
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2024 relatif rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi. Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang memiliki APM SD/MI lebih tinggi dibanding Kota Palu Tahun 2023 yaitu; Kabupaten Banggai Kepulauan (98,26%), Kabupaten Banggai (91,85%), Kabupaten Morowali (93,69%), Kabupaten Poso (93,96%), Kabupaten Donggala (93,21%), Kabupaten Buol (97,48%), Kabupaten Tojo Una-Una (97,12%), Kabupaten Sigi (94,09%), Kabupaten Banggai Laut (96,45%), dan Kabupaten Morowali Utara (93,46%). Sementara APM SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 93,31%.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu Tahun 2023 masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 84,06%. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 78,44%. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya.

Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.69 berikut ini:



Gambar 2.69 Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu, dan Dinas Pendidikan Kota Palu 2025

Terlihat bahwa APS untuk SD/MI secara konsisten berada di atas angka 85% dan terus meningkat tiap tahunnya. Kenaikan APS di jenjang SD/MI menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Palu sudah baik dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar, serta dukungan fasilitas pendidikan tingkat dasar yang semakin merata.

APS di jenjang MI, SMP/MTs juga menunjukkan tren naik meskipun angkanya lebih rendah dibanding SD/MI. Meskipun terjadi peningkatan secara umum, angka partisipasi untuk jenjang SMP/MTs masih cukup rendah dibandingkan SD/MI. APS SMP/MTs juga mengalami kenaikan dari 68,14% (2020) menjadi 71,97% (2024), meskipun sempat turun sedikit di tahun 2023. Kenaikannya relatif lambat dibanding SD/MI.

Terdapat gap yang cukup signifikan antara APS SD/MI dan SMP/MTs, yaitu sekitar 15% hingga 20% setiap tahun. Artinya, transisi dari SD/MI ke SMP/MTs masih menjadi tantangan, baik dari sisi aksesibilitas, kesiapan ekonomi keluarga, maupun faktor sosial budaya.

Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kota Palu Tahun 2020-2024 terurai dalam Tabel 2.91 berikut ini:

Tabel 2.91 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2020-2024

No	Jenjang pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	100	100	101	101	100
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	33.991	33.769	34.209	33.231	30.936
	Rasio Palu	62,49	62,09	66,27	61,39	59,06
4.	SMP/MTs					
4.1	Jumlah Sekolah	72	72	72	72	72
4.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-18 tahun	12.610	na	14.175	12.281	14.627
	Rasio Palu	37,49	-	31,49	29,39	29,49

Sumber: DataHub Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Pada periode 2022-2024 rasionya menurun dari 56,27 menjadi 55,35 dan kemudian menjadi 54,06 per 10.000 penduduk.

Sementara itu, Rasio Ketersediaan Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dalam lima tahun terakhir sangat berfruktatif. Pada Tahun 2020 sebesar 56,27 per 10.000 penduduk kemudian menurun hingga mencapai 51,49 per 10.000 penduduk pada Tahun 2022. Meskipun Tahun 2021 naik, namun pada Tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 59,39 dan menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 52,64 per 10.000 penduduk.

Rasio Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid

jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, pada Tahun 2020-2024 terurai dalam Tabel 2.92 di bawah ini:

Tabel 2.92 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
1.1 Jumlah Guru	2.008	1.960	2.100	2.814	2.724
1.2 Jumlah Murid	33.548	33.917	34.907	33.906	41.090
1.3 Jumlah Kelas	1.093	1.237	1.404	1.614	1.794
Rasio Guru/Murid	59,82	58,35	60,15	73,88	66,29
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	48,78	47,51	41,58	45,09	36,88
SMP/MTs					
2.1 Jumlah Guru	1.174	1.098	1.079	1.273	1.613
2.2 Jumlah Murid	16.097	13.761	13.781	13.888	20.760
2.3 Jumlah Kelas	793	817	806	863	808
Rasio Guru/Murid	73,23	69,80	68,06	80,58	77,70
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	69,19	61,27	64,44	92,33	96,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu 2024

Rasio Guru/Murid SD/MI di Kota Palu menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 (56,52) hingga 2023 (72,68), lalu mengalami sedikit menurun di 2024 (66,29). Kenaikan signifikan antara 2022 ke 2023 (dari 60,73 ke 72,68) menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru dibandingkan murid, atau penurunan jumlah murid per guru. Tahun 2024 menurun, namun masih lebih tinggi dibanding 2020–2022. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI di Kota Palu terlihat fluktuatif selama lima tahun terakhir, namun cenderung menurun di tahun 2024. Penurunan di 2024 bisa menunjukkan adanya efisiensi jumlah guru per kelas, atau peningkatan jumlah kelas.

Rasio Guru/Murid SMP/MTs di Kota Palu juga menunjukkan fruktuatif, rasio ini turun dari 73,25 (2020) menjadi 68,06 (2022), namun melonjak menjadi 80,38 (2023) dan sedikit turun menjadi 77,70 (2024). Kenaikan tajam 2022–2023 menunjukkan penambahan guru atau penurunan murid secara signifikan. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs di Kota Palu Relatif tinggi dan stabil, menunjukkan beban guru per kelas cukup besar, dari 92,14 (2020) naik menjadi 96,40 (2024). Angka yang tinggi ini mengindikasikan banyak guru dalam satu kelas, bisa juga karena penggabungan kelas, atau jumlah murid per kelas relatif besar yang memerlukan banyak guru.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam tabel Tabel 2.93.

Tabel 2.93 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf (Persen)	99,84	100,00	100,00	100,00	99,80

Sumber: BPS Kota Palu 2024

Penduduk Kota Palu yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di atas angka 99 persen. AMH Tahun Tahun 2020 sebesar 99,84 persen. Pada tahun 2021 hingga 2023 Angka Melek Huruf Kota Palu telah mencapai dan konsisten di angka 100 persen. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Palu untuk mencapai Angka Melek Huruf sebesar 100 persen di Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun Pada Tahun 2024 AMH menurun menjadi 99,80 persen.

Kondisi Bangunan Sekolah

Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah. Salah satu penilaian kondisi bangunan sekolah yang disyaratkan adalah kondisi sekolah dalam kondisi baik.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada Tahun 2018 menyebabkan kerusakan beberapa sekolah di Kota Palu. Rehabilitasi dan pembangunan terus diupayakan sejak saat itu dari kondisi bangunan baik sejumlah 143 sekolah dari 189 sekolah atau 75,66% di Tahun 2019 sampai dengan 179

sekolah dari 197 sekolah atau 90,86% di Tahun 2023 seperti tertera dalam Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Jumlah Kondisi Baik Bangunan Sekolah (Ruang Kelas) Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	193	193	190	193	179
Jumlah Sekolah	199	190	190	194	197
Kondisi bangunan baik	75,66%	76,89%	76,84%	76,99%	80,84%

Sumber: Kota Palu dalam Angka Tahun 2024

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2019 sejumlah 46 unit dari 72 unit sekolah atau 63,89%. Tahun 2023 bangunan sekolah dengan kondisi baik meningkat hingga mencapai 68,42% atau 52 unit dari 76 unit sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Palu. Hal ini tercermin dalam Tabel 2.95 yang menunjukkan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya

Tabel 2.95 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	36	36	36	39	42
Jumlah Sekolah	36	36	36	39	42
Kondisi bangunan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Kota Palu dalam Angka Tahun 2024

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4 – 6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembangan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2019-2023 terurai dalam Tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96 Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Murid TK/RA/Pendidikan Anak	0,601	7,058	7,480	0,089	0,355
2	Jumlah Penduduk Usia 4 – 6 Tahun	19,313	19,477	20,021	21,337	21,959
3	Persentase PAUD	34,19	37,28	37,90	42,15	42,80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tahun 2019–2021 persentase PAUD mengalami peningkatan dari 34,49% hingga menjadi 37,90%. Tahun 2022–2023 juga mengalami peningkatan dari 42,15% hingga 42,80%. Capaian persentase Tahun 2023 tersebut masih tergolong sangat rendah karena masih ada sekitar 12.500 anak usia dini 4 – 6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2020-2024 adalah sebesar 100%.

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.97 sebagai berikut:

Tabel 2.97 Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.98 memperlihatkan angka kelulusan SD dan SMP sejak Tahun 2019 sampai dengan 2024 telah mencapai angka kelulusan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh murid SD dan SMP di Kota Palu telah mampu mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik pada SD dan SMP masing-masing di Kota Palu.

Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut.

Angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2024 berdasarkan data menunjukkan angka 100 persen lulusan SD melanjutkan SMP. Demikian pula pada jenjang SMP ke SMA angka melanjutkan pendidikan yang terus mengalami kenaikan yang signifikan pada dua tahun terakhir di Tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan Tahun 2019 yang besarnya adalah 136,2% menjadi 141,62% di Tahun 2020 dan 177,74% di Tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 67,72%, namun pada Tahun 2024 menunjukkan angka 100 persen

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera dalam Tabel 2.98 sebagai berikut:

Tabel 2.98 Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD	6.108	6.100	6.608	6.608	6.551
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP	2.858	2.827	2.877	2.878	6.851
Angka Melanjut SD ke SMP	82,02%	88,10%	89,69%	82,70%	100%
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP	3.872	3.347	3.228	3.228	3.378
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK	8.037	9.304	7.117	n/a	6.376
Angka Melanjut SMP ke SMA/SMK	141,04%	177,14%	87,72%	n/a	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Perkembangan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu pada Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan seiring dengan menurunnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2019-2023 terlihat dalam tabel Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SD/MI SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA/MA/SMK)	4.335	4.104	3.808	3.040	4.839
Jumlah Guru SD/MI SMP/MTs (belum termasuk SMA/MA/SMK)	5.094	5.209	5.670	5.204	6.000
Rasio	76,88	66,18	75,17	61,44%	79,14%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Pada Tahun 2019 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 76,88% dan mengalami penurunan 10,7% hingga menjadi 66,18% pada Tahun 2020. Tahun 2021, naik hingga mencapai 79,17% dan terus naik lagi menjadi 95,46% di Tahun 2022. Namun kembali mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 76,74%. Rasio ini dipengaruhi oleh perbandingan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SD/MI, SMP/MTs sebesar 4.608 guru terhadap jumlah guru secara keseluruhan sebesar 6.005 guru di Tahun 2023.

Peningkatan jumlah guru di Tahun 2022 secara total telah dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sehingga rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu 95,46% dan telah tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja.

Kesehatan

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Palu. Upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing dilakukan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperkuat layanan kesehatan dasar, menurunkan angka stunting, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta memperluas jangkauan fasilitas kesehatan yang merata hingga ke tingkat kelurahan. Selain itu, perhatian juga difokuskan pada peningkatan ketahanan sistem kesehatan daerah, penguatan sumber daya tenaga medis, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular sebagai bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.100.

Tabel 2.100 AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKI) per 1000 kelahiran hidup	4,01	1,30	1,50	4,91	4,10
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

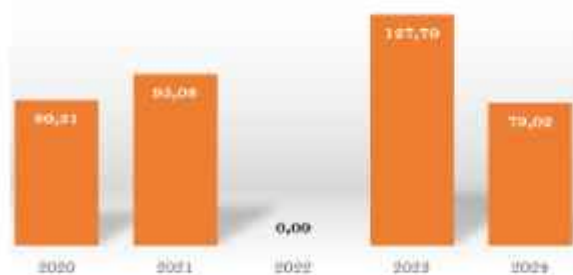
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Pada tahun 2020 hingga 2022, AKB di Kota Palu relatif rendah dan cenderung menurun, mencapai titik terendah pada 2022 (1,35). Namun terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, di mana AKB meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi indikator yang mengkhawatirkan terhadap kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap fasilitas kesehatan, atau faktor sosial-ekonomi lainnya.

AKHB mengalami peningkatan stabil dari 2020 ke 2022, sejalan dengan rendahnya AKB pada periode tersebut. Sejak 2023, AKB menurun secara nyata, mencerminkan peningkatan angka kematian bayi. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem kesehatan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bayi mengalami kemunduran dalam dua tahun terakhir.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran hidup di Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.70 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran hidup Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Grafik menunjukkan fluktuasi signifikan dalam angka kematian ibu (AKI) selama lima tahun terakhir di Kota Palu. Pada tahun 2020, AKI berada pada angka 80,31 per 100.000 kelahiran hidup, lalu meningkat pada tahun 2021 menjadi 95,08, menandakan adanya tantangan dalam layanan kesehatan maternal seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas tenaga

medis, atau keterlambatan dalam penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan.

Hal yang mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana AKI tercatat 0,00. Meskipun angka ini terlihat ideal, kemungkinan besar hal tersebut bukan karena tidak adanya kasus, tetapi lebih kepada tidak adanya pelaporan atau pencatatan yang valid, atau adanya kelambatan dalam input data.

Tahun 2023 mencatat lonjakan drastis menjadi 127,70, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan kondisi darurat yang patut menjadi perhatian serius, baik dari sisi pelayanan kesehatan ibu maupun sistem rujukan yang mungkin belum optimal. Pada tahun 2024, AKI menurun menjadi 79,02, yang merupakan perkembangan positif, namun tetap memerlukan evaluasi menyeluruh agar angka ini terus ditekan menuju target ideal nasional (di bawah 70). Penguatan sistem kesehatan ibu, termasuk edukasi, pemantauan kehamilan, serta jaminan akses terhadap layanan bersalin yang aman dan berkualitas, menjadi langkah krusial ke depan.

Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil



Gambar 2.71 Prevalensi anemia pada ibu hamil Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

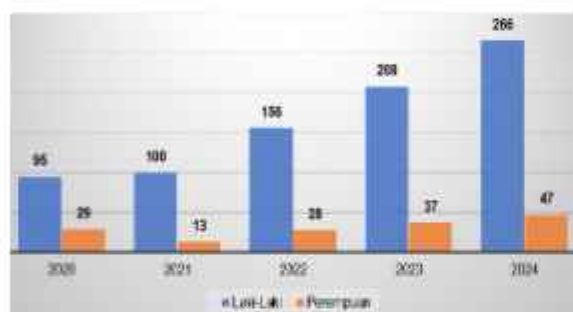
Grafik menunjukkan penurunan yang konsisten dan signifikan dalam prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Palu. Pada tahun 2020, prevalensi anemia berada pada tingkat yang cukup tinggi yaitu 25,66%, menandakan bahwa satu dari empat ibu hamil mengalami anemia, suatu kondisi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

Penurunan tajam terjadi pada tahun 2021, yakni menjadi 16,66%, kemudian stabil di angka 16,74% pada 2022. Ini mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi anemia, seperti peningkatan edukasi gizi, distribusi tablet tambah darah, dan pemantauan kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2023 dan 2024, prevalensi terus menurun menjadi 11,21% dan akhirnya 10,23%. Ini menunjukkan progres yang sangat baik menuju target nasional untuk menurunkan angka anemia pada ibu hamil. Meski demikian, angka 10% masih tergolong tinggi dan membutuhkan perhatian lanjutan. Penguatan intervensi di tingkat keluarga, pemantauan gizi, serta keterlibatan lintas sektor tetap penting untuk mencapai prevalensi di bawah 5% sebagaimana yang ditetapkan dalam target kesehatan ibu secara global.

Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Kasus HIV menurut jenis kelamin di Kota Palu dalam kurun lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.72 Grafik Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus HIV di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024, dengan perbandingan berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2020, tercatat 95 kasus HIV pada laki-laki dan 29 kasus pada perempuan. Angka ini terus meningkat setiap tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 266 kasus laki-laki dan 47 kasus perempuan. Pola ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV di Kota Palu cenderung naik dari tahun ke tahun, khususnya pada kelompok laki-laki.

Jumlah kasus HIV pada laki-laki secara konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya, pada tahun 2021 hanya terdapat 13 kasus perempuan dibandingkan dengan 100 kasus laki-laki. Hal ini dapat mencerminkan adanya perbedaan tingkat risiko atau perilaku berisiko antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2022 ke 2024, di mana kasus pada laki-laki meningkat drastis dari 156 menjadi 266 hanya dalam dua tahun, sementara kasus pada

perempuan juga naik namun dalam jumlah yang lebih kecil.

Melihat tren yang terus meningkat, terutama pada laki-laki, perlu ada langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV di Kota Palu. Intervensi dapat difokuskan pada edukasi publik, layanan tes HIV gratis, serta kampanye pencegahan yang sensitif gender dan usia. Pendekatan yang lebih menasar laki-laki dengan perilaku berisiko tinggi perlu dilakukan secara masif, tanpa mengesampingkan kelompok perempuan yang juga mengalami peningkatan. Data ini menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka kasus HIV di Kota Palu.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 1 unit posyandu bagi 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197). Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.

Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.101 berikut ini:

Tabel 2.101 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita	Balita	89.010	88.901	81.000	80.000	74.000
Jumlah Posyandu	Unit	220	227	228	227	228
Rasio Posyandu Per 1.000 Balita	Per 1.000 balita	2,46	2,52	2,82	2,82	3,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2025

Rasio posyand persatuan balita menunjukkan tren Kenaikan pada Tahun 2020–2022, hal ini menunjukkan peningkatan akses balita terhadap layanan kesehatan dasar melalui Posyandu. Kenaikan lebih disebabkan oleh penurunan jumlah balita, bukan penambahan signifikan jumlah Posyandu.

Penurunan Rasio terjadi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, penurunan ini terjadi karena jumlah balita bertambah, sedangkan jumlah Posyandu tetap. Ini bisa menandakan potensi peningkatan beban layanan Posyandu, sehingga kualitas layanan bisa terdampak jika tidak diimbangi dengan penambahan tenaga dan fasilitas.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit puskesmas dapat melayani 120.000 penduduk, poliklinik melayani 5.000 penduduk, dan pustu 30.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2020–2024 tertera dalam Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	13
Jumlah Poliklinik	17	16	28	28	15
Jumlah Pustu	23	23	28	28	27
Jumlah Penduduk	373.518	377.090	381.572	387.493	388.998
Rasio Puskesmas	3,75	3,71	3,67	3,61	3,33
Rasio Poliklinik	4,55	4,24	7,34	7,25	3,85
Rasio Pustu	6,10	6,10	7,34	7,25	6,92

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Puskesmas di Kota Palu Tahun 2024 sebesar 3,33 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit puskesmas melayani 29.997 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya memenuhi rasio puskesmas yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaan tidak perlu lagi membangun puskesmas tapi bagaimana meningkatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Poliklinik sebesar 3,85 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2023 menunjukkan perbandingan yaitu 1 unit poliklinik melayani 25.998 penduduk yang berarti kondisi ini masih kurang ideal atau belum memadai dari sisi ketersediaan poliklinik sehingga masih dibutuhkan penyediaan poliklinik yang mampu melayani jumlah masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Pustu sebesar 6,92 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2023 menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1 unit poliklinik melayani 14.443 penduduk yang berarti kondisi ini telah jauh memenuhi kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya

tidak dibutuhkan lagi penyediaan pustu yang baru namun bagaimana menciptakan pelayanan pustu yang mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih baik.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit rumah sakit dapat melayani 240.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam dalam Tabel 2.103 berikut:

Tabel 2.103 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Di Kota Palu Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2021	2022	2023	2024
Provinsi	2	2	2	2	2
Kota Palu	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
RS Bersalin / RS Ibu Anak	1	1	1	1	1
RS Umum (Mata)	0	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/PLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	12	14	14	14	14
Jumlah Penduduk	278.218	377.090	381.572	387.493	388.998
Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	4,30	3,71	3,67	3,61	3,59

Sumber: Dinas Kota Palu Tahun 2023, dan BPS Kota Palu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Rumah Sakit yang berada di Kota Palu Tahun 2024 sebesar 3,59 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit rumah sakit melayani 27.854 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio rumah sakit yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya sesungguhnya tidak perlu lagi membangun rumah sakit tapi bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat secara teratur dan optimal.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 1.000 penduduk. Untuk kondisi ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa 1 orang dokter dapat melayani 2.500 penduduk sedangkan menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik

Indonesia bahwa 1 orang dokter dapat melayani 3.000 penduduk.

Perkembangan jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.104.

Tabel 2.104 Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	162	161	196	196	212
Jumlah Penduduk	372.215	377.000	391.072	387.260	368.808
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,35	1,39	1,49	1,49	1,31

Sumber: Dinas Kota Palu 2020 dan BPJS Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Dokter Kota Palu Tahun 2024 sebesar 1,31 per 1.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang dokter melayani 762 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio dokter yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal baik menurut organisasi kesehatan dunia WHO maupun BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 1.000 penduduk.

Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.105 berikut:

Tabel 2.105 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Kesehatan	3.187	3.029	3.170	3.279	3.350
Jumlah Penduduk	818.918	817.000	841.072	840.468	808.808
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	0,39	0,36	0,39	0,39	0,43

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Tenaga Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 sebesar 0,43 per 1.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang tenaga medis melayani 233 penduduk Kota Palu.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Dengan perekonomian masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu secara signifikan.

Proporsi Jaringan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Namun pada Tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan. Perkembangan proporsi jalan dalam kondisi baik di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.106 berikut ini:

Tabel 2.106 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Kondisi Baik (km)	292,89	305,96	310,33	600,03	612,43
Jalan Kondisi Baik Sedang (km)	182,37	170,38	170,71	101,44	38,34
Jalan Kondisi Buruk (km)	508,18	507,81	148,98	27,19	28,15
Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	140,00	105,42	110,11	201,91	140,12
Panjang jalan (km)	921,20	921,20	921,20	800,11	799,92
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	31,80	33,21	33,68	75,00	76,56

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Pada Tahun 2020 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 30,88% pada Tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu kembali meningkat sepanjang 263,96 km. Panjang jalan dengan kondisi baik pada Tahun 2022 meningkat menjadi 310,33 km dan terus meningkat di Tahun 2023 menjadi 600,03 km dan pada Tahun 2024 menjadi 612,43km.

Kenaikan tajam pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya intervensi besar dalam pembangunan atau perbaikan jalan, kemungkinan besar merupakan program

peningkatan infrastruktur jalan yang masif. Peningkatan ini juga sejalan dengan penurunan signifikan panjang jalan yang rusak dan rusak berat. Meskipun jalan rusak ringan menurun drastis dari 2020 ke 2024, jalan rusak berat meningkat pada 2023, kemungkinan akibat transisi atau pekerjaan infrastruktur yang masih berjalan. Namun total panjang jalan rusak menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan.

Kota Palu menunjukkan kinerja positif dalam meningkatkan kondisi jalan, terutama sejak 2023. Proporsi jalan dalam kondisi baik telah meningkat hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir, menjadi 63,80% pada 2024, mendekati target standar nasional (minimal 65%). Upaya kedepan dapat difokuskan pada penurunan proporsi jalan rusak berat dan pemeliharaan jalan yang sudah baik agar tetap berfungsi optimal.

Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedangkan drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Berikut perkembangan panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun 2020-2024 terurai dalam Tabel 2.107 di bawah ini:

Tabel 2.107 Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2020-2024

No	Ruas Jalan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan (Km)	831,08	831,08	831,08	890,11	890,11
2.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	8,19	11,45	14,81	44,19	64,21
3.	% Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1%)	0,98	1,38	1,78	4,96	7,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2022

Tabel 2.107 menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang terus meningkat dari 0,85 persen di Tahun 2020

hingga mencapai 8,75 persen di Tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Palu setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2024 sebesar 940,19 km dari tahun sebelumnya dengan panjang jalan bertrotoar dan berdrainase sepanjang 44,12 km di Tahun 2023 menjadi 84,31 km di Tahun 2024.

Persentase dan Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Perkembangan jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2021 – 2023 tertera dalam Tabel 2.108 berikut ini:

Tabel 2.108 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Saluran Irigasi	Panjang Saluran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (km ²)	3,545	3,772	3,772	6,387	5,513
Luas Irigasi (km ²)	10,01	10,01	10,01	8,58	8,58
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	34,49	37,80	37,80	74,44	64,28
Panjang Saluran Irigasi (km)	66,844	66,844	66,844	73,56	73,56
Luas Lahan Budidaya Pertanian (km ²)	21,21	20,76	20,76	20,69	20,69
Rasio Jaringan Irigasi	3,14	3,22	3,22	3,54	3,54

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2023

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Luas irigasi yang berada dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, dari 3,542 km² pada tahun 2020 menjadi 5,513 km² pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang cukup intensif, terutama mulai tahun 2023. Secara total luas irigasi mengalami sedikit penurunan, dari 10,01 km² pada tahun 2020 hingga menjadi 8,58 km² pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh pengklasifikasian ulang atau perubahan fungsi lahan.

Persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat tajam dari 34,49% pada tahun 2020 menjadi 64,28% pada tahun 2024. Ini menandakan peningkatan kualitas jaringan irigasi yang cukup signifikan, meskipun total luas irigasi tidak bertambah. Panjang saluran irigasi juga mengalami peningkatan, dari 66,844 km pada tahun 2020 menjadi 73,56 km pada tahun 2024. Peningkatan panjang saluran ini turut

mendukung peningkatan luasan irigasi dalam kondisi baik.

Luas lahan budidaya pertanian relatif stabil, berada di kisaran 20,69 km² hingga 21,27 km² sepanjang lima tahun terakhir. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pengembangan irigasi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas jaringan untuk mendukung lahan pertanian yang sudah ada, bukan ekspansi lahan. Rasio jaringan irigasi pun mengalami kenaikan dari 3,14 pada tahun 2020 menjadi 3,56 pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan efisiensi dan cakupan saluran irigasi terhadap lahan budidaya pertanian yang semakin membaik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kualitas dan kinerja infrastruktur irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian.

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Peningkatan jumlah tempat ibadah menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan menjadi baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan cepat.

Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 605 unit, kemudian pada Tahun 2023 naik menjadi 607 unit. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan rasio tempat ibadah

per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2021–2024 terurai dalam Tabel 2.109 sebagai berikut:

Tabel 2.109 Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2021-2023

Bangunan Tempat Ibadah	Mesjid	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah	
2021	Jumlah	304	110	9	4	428
	Jumlah Persegi	829.140	89.002	4.006	1.703	899.851
	Rasio	1,58	0,58	1	0,38	1,58
2022	Jumlah	478	117	3	4	602
	Jumlah Persegi	894.058	88.738	4.334	1.407	978.537
	Rasio	1,5	2	1,18	0,5	1,88
2023	Jumlah	478	119	4	4	607
	Jumlah Persegi	841.381	89.104	4.441	1.499	936.425
	Rasio	1,3	0,58	1,13	0,37	1,37
2024	Jumlah	482	117	8	4	611
	Jumlah Persegi	842.208	88.498	4.718	1.888	937.312
	Rasio	1,44	0,58	1,37	0,37	1,38

Sumber: BPS, Dataografi Kota Palu Tahun 2023

Tabel 2.109 memperlihatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu. Pada Tahun 2022 rasionya naik 0,4 per 1.000 penduduk dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 rasio tempat ibadah di Kota Palu turun kembali menjadi 1,57 per 1.000 penduduk dan meningkat menjadi 1,59 per 1.000 penduduk...

Rasio Daya Tampung Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal, termasuk ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum.

Perkembangan rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2019–2022 tertera dalam tabel 2.110 berikut ini:

Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Daya Tampung Tempat Pemakaman per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	530.000	5.256	530.000	5.256	530.000	5.256	530.000	5.256	530.000	5.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350
Jumlah	907.500	24.132	907.500	24.132	907.500	24.132	907.500	24.132	907.500	24.132
Jumlah penduduk (jiwa)	373.218	373.218	377.030	377.030	381.372	381.372	387.493	387.493	389.959	389.959
Rasio		64,66		64,01		63,24		62,28		61,58

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2023

Tabel 2.110 memperlihatkan perkembangan rasio daya tampung tempat pemakaman per 1000 penduduk dari Tahun 2020–2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 64,66 per penduduk, turun menjadi 64,01 per penduduk di Tahun 2021. Pada Tahun 2022 rasio daya tampung tempat pemakaman turun menjadi 63,24 per penduduk dan terus turun di Tahun 2024 hingga menjadi 61,88 per penduduk. Menurunnya rasio ini akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat.

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Palu Tahun 2020–2024 tertera pada Gambar 2.73 berikut ini:



Gambar 2.73 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palu Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2024

Persentase jumlah sampah yang tertangani dari Tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 persentasenya sebesar 80,85 persen meningkat menjadi 86,59 pada Tahun 2021, namun turun di Tahun 2022 menjadi 84,39 persen, dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 90,97 persen, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 72,88 persen. Penurunan pada tahun 2024 menjadi indikasi penting bahwa diperlukan evaluasi mendalam dan tindakan strategis untuk mengembalikan efektivitas penanganan sampah, agar target pelayanan publik tetap tercapai dan dampak lingkungan dapat diminimalkan.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Keberadaan lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 diketahui bahwa persentase luas lingkungan perumahan kumuh yang tertangani di Kota Palu sebesar 34,74% atau seluas 58,64

ha dari luas permukiman kumuh sebesar 248,47 ha.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Berikut persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2020–2024 yang tertera dalam Gambar 2.74 di bawah ini:



Gambar 2.74 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2025

Data di atas memperlihatkan terjadi penurunan dari 87,47% (2020) menjadi 81,83% (2021), menunjukkan adanya gangguan sementara dalam akses air bersih. Pada Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan peningkatan menjadi 84,70%, demikian pula Tahun 2023 mencapai 93,69%, menandakan keberhasilan program peningkatan layanan air bersih. Tahun 2024 sedikit menurun ke 93,58%, namun tetap menunjukkan cakupan yang sangat baik.

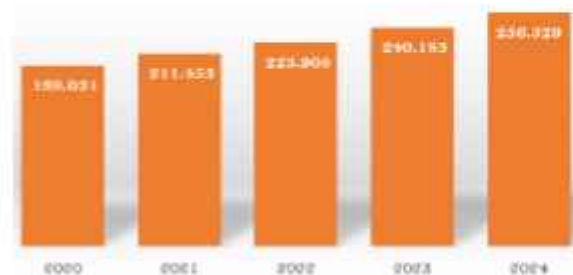
Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Palu mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama sejak 2022. Capaian di atas 93% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas layanan air bersih dan menjaga kualitasnya.

Persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2020–2024 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2024

mencapai 256.329 pelanggan, Tahun 2023 sebesar 240.189 pelanggan naik 16,28% dari tahun sebelumnya sebesar 223.908 pelanggan. Persentase ini diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik terhadap total jumlah rumah tangga yang tersedia di Kota Palu. Besarnya jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik mengakibatkan nilai persentase menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 (satu) meteran listrik untuk 1 rumah tangga. Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah ketersediaan rumah sewa atau kost. Untuk 1 orang pemilik atau 1 rumah tangga yang memiliki rumah sewa/kost dapat menggunakan beberapa meteran listrik sesuai dengan jumlah petak rumah sewa/kost yang disediakan.

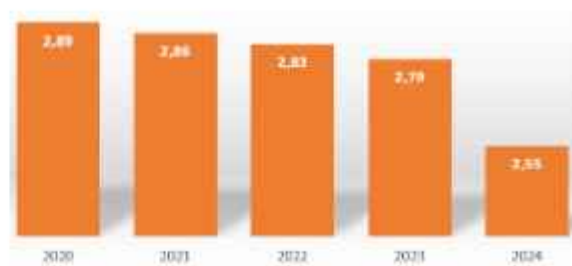
Adapun persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.75 berikut ini:



Gambar 2.75 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 rasio linmas sebesar 2,76 naik menjadi 2,89 di Tahun 2020, dan kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 2,86 di Tahun 2021. Pada dua tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,83 di Tahun 2022 dan 2,83 di Tahun 2023, dan kemudian kembali turun pada Tahun 2023 menjadi 2,79%. Dengan jumlah penduduk yang fluktuatif dan menurun dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio linmas mengikuti kecenderungan jumlah penduduk:



Gambar 2.76 Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2024

Rasio Polisi Pamong Praja

Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk Kota Palu Tahun 2020-2024 mengalami trend penurunan tiap tahunnya. Berikut gambaran rasio polisi pamong praja di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.77 Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2025

Rasio pamong praja mengalami penurunan dari 10,07 pada tahun 2020 menjadi 8,48 pada Tahun 2024, penurunan terjadi secara konsisten setiap tahun, meskipun relatif melambat di tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terlihat antara tahun 2022 (9,25) ke 2023 (8,54), menunjukkan pengurangan jumlah pamong praja atau peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penambahan pamong praja. Pada tahun 2024, angka sedikit turun dari 8,54 menjadi 8,48, menunjukkan bahwa rasio mulai stabil setelah beberapa tahun penurunan. Rasio pamong praja di Kota Palu mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, yang dapat mengindikasikan beban kerja pamong praja yang semakin besar per populasi. Penurunan ini perlu menjadi perhatian agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pamong atau optimalisasi peran dan teknologi dalam pelayanan masyarakat.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertinggal adalah 84,04 persen sejak Tahun 2021 dengan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 300 m². Sedangkan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 15 menit berdasarkan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani.

Berikut gambaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran, dan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.111 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (m ²)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Luas wilayah Kota (Km ²)	893,06	893,06	836,89	836,89	836,89
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota (%)	73,94	73,94	84,04	84,04	84,04

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Kesiapsiagaan Tahun 2023

Tabel 2.112 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	48	49	37	106	824
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	45	30	36	81	811
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Kesiapsiagaan Tahun 2023

Sosial

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2020-2024. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selama kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 43 pada Tahun 2021 unit m turun di Tahun 2022 menjadi 40 unit, kemudian pada Tahun 2023 kembali turun menjadi 36 unit. Berikut jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.113 di bawah ini:

Tabel 2.113 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Panti Asuhan	41	43	40	36	44
Rumah singgah	1	1	1	1	1
Jumlah	42	44	41	37	45

Sumber: RPJ Kota Palu Tahun 2024

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial sebesar 66,9 persen pada Tahun 2020 naik menjadi 92,68 persen. Peningkatan persentase PKMS yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun mencapai 104,62 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.114 di bawah ini:

Tabel 2.114 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PMKS Yang Seharusnya Mendapat Bantuan (jiwa)	81.379	39.418	39.418	14.030	83.748
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	54.324	43.030	43.030	14.014	83.020
% PMKS yg memperoleh bantuan sosial	66,90	82,55	82,02	99,18	104,62

Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2023

2.1.4.5 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2.115 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	202.467	201.263	202.813	197.368	203.852
	a. Bekerja	183.301	188.777	190.331	186.021	192.363
	b. Pengangguran	16.960	12.309	12.482	11.197	11.469
2	Bukan Angkatan Kerja	102.186	101.263	110.761	87.819	85.283
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	304.653	302.526	313.574	285.187	289.135
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,46	68,01	64,48	69,29	70,40
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	68,84	68,78	66,56	69,90	71,1
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	8,56	7,61	6,12	5,83	5,63
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	8,77	8,79	8,00	7,00	7,39

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2023

Jumlah angkatan kerja di Kota Palu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2023 menjadi 197.368 jiwa, jumlah ini kembali naik di tahun 2024 menjadi 203.852 jiwa, tertinggi dalam periode ini. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 185.507 jiwa (2020) menjadi 192.383 jiwa (2024). Jumlah pengangguran terus menurun dari 16.960 jiwa (2020) menjadi 11.469 jiwa (2024), menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Terjadi penurunan signifikan pada jumlah bukan angkatan kerja dari 110.767 jiwa (2022) menjadi 85.285 jiwa (2024). Hal ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja.

TPAK Kota Palu meningkat dari 66,46% (2020) menjadi 70,50% (2024), menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat usia kerja

dalam kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 71,1% (2024), TPAK Kota Palu masih sedikit lebih rendah, namun menunjukkan tren yang mendekati angka provinsi. TPT Kota Palu mengalami penurunan konsisten dari 8,38% (2020) menjadi 5,63% (2024). Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja dan efektifitas program ketenagakerjaan. TPT Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi yang hanya 2,94% (2024), menandakan tantangan struktural yang masih perlu dibenahi di wilayah perkotaan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks.

Gambaran umum Rasio KDRT di Kota Palu Tahun 2020-2024 serta cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Pemerintah Kota Palu tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.116 Rasio KDRT dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KDRT	61	39	28	72	72
Jumlah rumah tangga	113.696	127.311	124.104	127.373	128.907
Rasio KDRT	0,005	0,003	0,002	0,006	0,006
Jumlah laporan/pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak yang masuk ke unit pelayanan terpadu	124	901	106	177	169
Jumlah pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	124	901	106	177	169
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100

Sumber: DP3A Kota Palu Tahun 2024

Jumlah KDRT sempat menurun drastis pada 2022 menjadi 39 kasus, namun kembali meningkat tajam pada 2023 dan tetap stabil di angka 72 kasus pada 2024. Rasio KDRT terhadap jumlah rumah tangga juga menunjukkan fluktuasi. Meskipun total jumlah rumah tangga meningkat setiap tahun, rasio KDRT tertinggi terjadi pada 2021 (0,005) dan

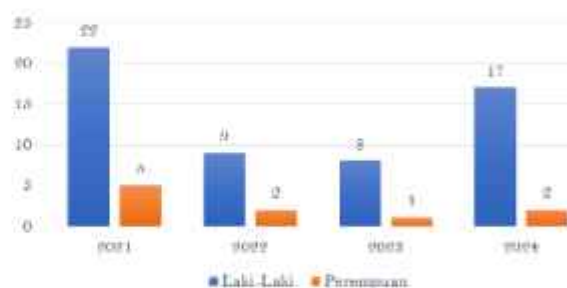
menurun hingga 0,030 pada 2024, menunjukkan adanya perbaikan relatif terhadap jumlah rumah tangga.

Jumlah laporan/pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai puncaknya pada 2021 (201 laporan) dan terus mengalami penurunan hingga 145 laporan pada 2024. Penurunan ini dapat diartikan dua hal yaitu adanya peningkatan kesadaran dan pencegahan kekerasan atau kemungkinan korban semakin sedikit yang melapor karena berbagai faktor (malu, takut, akses informasi terbatas, dll).

Seluruh laporan/pengaduan ditindaklanjuti 100% setiap tahun, menandakan sistem respons cepat dan kesiapan petugas dalam menangani kasus. Cakupan penanganan oleh petugas terlatih juga selalu 100%, menunjukkan bahwa semua korban yang melapor mendapatkan layanan dari tenaga profesional, suatu indikator penting dalam perlindungan perempuan dan anak.

Kekerasan Terhadap Anak

Angka kekerasan terhadap anak dibawah umur 18 Tahun berdasarkan jenis kelamin di Kota Palu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.78 Kekerasan Terhadap Anak di Bawah 18 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palu Tahun 2021-2024

Sumber: DP3A Kota Palu 2025

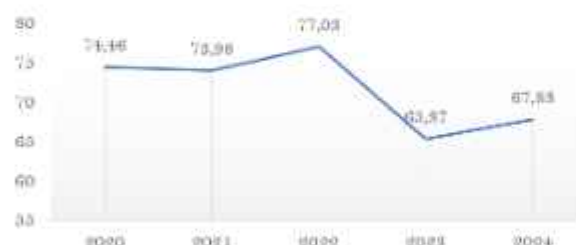
Grafik menunjukkan bahwa anak laki-laki menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan dibandingkan anak perempuan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 22 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki dan 5 kasus terhadap anak perempuan. Meskipun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 (menjadi 9 kasus untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan), jumlah ini masih menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap perlindungan anak laki-laki.

Tahun 2023 memperlihatkan tren penurunan lebih lanjut dengan 8 kasus kekerasan terhadap laki-laki dan hanya 1 terhadap perempuan. Penurunan ini bisa menjadi indikasi mulai efektifnya program perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, atau peningkatan akses terhadap pelaporan dan penanganan kasus. Namun demikian, tren ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2024 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki kembali meningkat menjadi 17 kasus, sedangkan terhadap perempuan sedikit naik menjadi 2 kasus.

Kenaikan di tahun 2024 mengindikasikan bahwa sistem perlindungan anak di Kota Palu masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak laki-laki. Pemerintah perlu memperkuat langkah preventif melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Di samping itu, perbaikan mekanisme pelaporan dan perlindungan psikososial anak korban kekerasan juga harus menjadi prioritas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan komprehensif.

Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak di Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.79 Indeks Perlindungan Anak Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: DP3A Kota Palu 2025

Indeks Perlindungan Anak Kota Palu menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tiga tahun pertama, indeks berada pada angka yang cukup tinggi dan stabil, yakni 74,46, 73,98, dan mencapai puncaknya di 77,03. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dari segi kebijakan, pelayanan sosial, maupun penegakan hukum.

Pada tahun keempat terjadi penurunan yang cukup tajam hingga menyentuh angka 65,37. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya

gangguan serius terhadap sistem perlindungan anak, yang mungkin disebabkan oleh minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, atau terhambatnya program-program perlindungan akibat bencana atau krisis lainnya. Penurunan ini patut menjadi perhatian serius karena menyiratkan bahwa hak-hak anak berada dalam situasi yang lebih rentan.

Meskipun demikian, pada tahun terakhir terlihat adanya sedikit perbaikan dengan naiknya indeks menjadi 67,83. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan kebijakan atau program yang mulai membuahkan hasil. Namun, angka ini masih jauh dari capaian terbaik sebelumnya, sehingga Pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan efektivitas intervensi melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Keterlibatan Pekerja Perempuan

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2023 tertera dalam tabel 2.117 di bawah ini:

Tabel 2.117 Keterlibatan Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta Dan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021–2023

Uraian	2021	2022	2023
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.818	3.876	3.881
Pekerja perempuan di lembaga swasta	4.804*	3.004*	4.179
Jumlah pekerja perempuan	8.706	6.880	8.059
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,74	33	46,10
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	56,25	67	51,81
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	+	+	+
Jumlah total kursi di lembaga DPRD	30	30	30
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	11,43	11,43	11,43

Sumber: BPSDMD Kota Palu Tahun 2025

Tabel 2.117 memperlihatkan persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Kota Palu Tahun 2022 sebesar 67% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 33%. Pada Tahun 2023 persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 51,81 sedangkan, untuk lembaga pemerintah sebesar

48,19. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak yang bekerja pada lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

Pangan

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Gambaran umum terkait ketahanan pangan di antaranya dapat dilihat dari gambaran konsumsi energi dan konsumsi protein masyarakat Kota Palu dalam Tabel 2.118 berikut ini:

Tabel 2.118 Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Urutan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.067,80	2.093,70	2.041,30	1.860,80	2.002,00
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	60,30	66,80	62,40	54,80	61,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan daerah Tahun 2024

Data konsumsi energi dan protein masyarakat Kota Palu dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan gambaran tentang dinamika kesejahteraan dan pola hidup warga. Secara umum, konsumsi energi masih berada pada kisaran 1.800–2.000 kkal per kapita per hari, sementara konsumsi protein berkisar antara 58–66 gram per kapita per hari. Angka ini memang terlihat cukup memadai, namun fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas gizi masyarakat, terutama setelah berbagai peristiwa sosial-ekonomi yang memengaruhi kehidupan warga.

Pada tahun 2019–2020, konsumsi energi masyarakat relatif baik, bahkan sempat meningkat hingga 2.093,70 kkal/kapita/hari. Namun memasuki tahun 2021 dan 2022, terlihat penurunan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2022 yang hanya mencapai 1.860,80 kkal. Hal ini bisa menjadi refleksi dari dampak pandemi COVID-19 yang tidak hanya menekan aktivitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi daya beli dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ketika ekonomi terganggu, pola konsumsi masyarakat pun ikut berubah, dan sering kali asupan energi serta protein menjadi berkurang.

Meski demikian, tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan. Konsumsi energi naik kembali ke angka 2.022,00 kkal, dan konsumsi protein juga meningkat menjadi 61 gram per kapita per hari. Angka ini memberi sinyal positif bahwa masyarakat mulai bangkit, dengan daya beli dan pola konsumsi gizi yang perlahan membaik. Namun tetap perlu dicatat bahwa konsumsi protein masih lebih rendah dibanding tahun 2019, yang berarti kualitas asupan gizi terutama dari sumber pangan berprotein—seperti ikan, daging, dan kacang-kacangan—masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi Kota Palu.

Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat, dan penyelesaian kasus tanah negara di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.119 berikut ini:

Tabel 2.119 Persentase Luas Lahan Bersertifikat, dan Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palu Tahun 2020-2024

Urutan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase aset Pemda yang bersertifikat (a/b) *100	30,40	68,37	71,06	71,06	71,06
a. Jumlah Aset Pemda yang bersertifikat (Ha)	852.514	940.023	963.114	963.114	963.114
b. Jumlah Aset Pemda yang seharusnya bersertifikat (Ta)	1.304.104	1.304.104	1.304.104	1.304.104	1.304.104
Penyelesaian kasus tanah negara (a/b) *100	63,33	68,30	100	100	100
a. Jumlah kasus yang diselesaikan	2	4	2	10	7
b. Jumlah kasus yang terdaftar	3	11	9	10	7

Sumber: Badan Pertanahan Negara Kota Palu Tahun 2021, 2022, 2023, 2024
Dinas Pertanahan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2024, 2025

Sertifikasi Aset Pemda terjadi peningkatan signifikan hingga tahun 2022 (71,06%), namun stagnan pada 2023–2024. Sekitar 29% aset masih belum bersertifikat sehingga perlu percepatan sertifikasi. Luas aset yang bersertifikat meningkat dari 852,514 Ha (2020) menjadi 963,114 Ha (2022), lalu tidak bertambah lagi hingga 2024, menandakan perlunya upaya lanjutan. Penyelesaian kasus meningkat drastis pada 2023–2024, mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas penanganan sengketa tanah dalam dua tahun terakhir. Perlu percepatan sertifikasi aset dan pelestarian kinerja baik dalam penyelesaian kasus tanah negara melalui koordinasi dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil suatu daerah menerbitkan beberapa dokumen atau surat/akta untuk masing-masing penduduk yang melakukan pengurusan administrasi pencatatan sipil di

antaranya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, dan kartu keluarga (KK).

Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK

Gambaran jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.80 berikut ini:



Gambar 2.80 Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2019-2023

Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.80 memperlihatkan fluktuasi dan kenaikan-kenaikan jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu tiap tahunnya periode 2020-2024. Penduduk yang tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan berfluktuasi yaitu pada katagori ber KTP, ber akta kematian, dan ber Kartu Keluarga. Sedangkan yang mengalami peningkatan atau kenaikan-kenaikan yaitu katagoori ber akta kelahiran, ber akta nikah, dan ber akta cerai.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP terus mengalami peningkatan dari 258.624 (2020) menjadi 261.676 (2024). Ini mencerminkan peningkatan kesadaran atau efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Penduduk berakta kelahiran juga meningkat stabil dari 168.835 (2020) menjadi 195.607 (2024). Peningkatan ini menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan pencatatan sipil, khususnya untuk akta kelahiran. Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian meningkat signifikan dari 2.979 (2020) menjadi 5.650 (2024). Meskipun masih kecil dibandingkan jumlah penduduk, trennya positif yang berarti pencatatan kematian makin tertib.

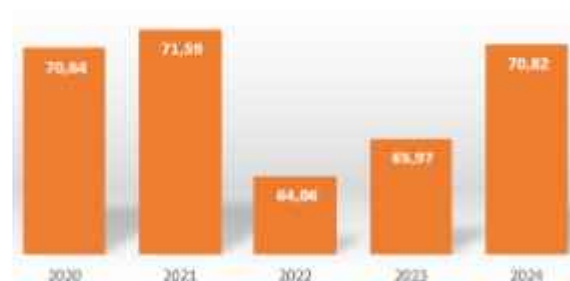
Jumlah pemilik KK meningkat dari 110.306 (2020) menjadi 138.988 (2024). Ini menunjukkan

perluasan layanan kependudukan dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melengkapi dokumen keluarga. Jumlah penduduk yang memiliki akta nikah juga meningkat cukup signifikan dari 90.611 (2020) menjadi 138.408 (2024). Hal ini menandakan peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum perkawinan serta efisiensi layanan pencatatan nikah. Penduduk berakta cerai meski jumlahnya lebih kecil, data menunjukkan kenaikan dari 597 (2020) menjadi 4.787 (2024). Ini bisa mencerminkan baik peningkatan kasus perceraian maupun meningkatnya kesadaran untuk mencatatkan peristiwa cerai secara legal.

Secara umum, semua indikator administrasi kependudukan menunjukkan tren positif selama 2020-2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan layanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan yang makin baik dan inklusif. Ke depan, diperlukan peningkatan layanan berbasis digital serta sosialisasi berkelanjutan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Rasio Penduduk be KTP

Berikut rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.81 di bawah ini:



Gambar 2.81 Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2020 – 2024

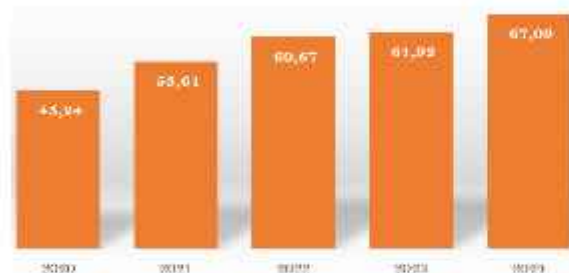
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024

Pada Tahun 2020-2021 terjadi kenaikan rasio dari 70,64% menjadi 71,59%. Hal ini mencerminkan upaya yang efektif dalam memperluas cakupan perekaman dan penerbitan KTP. Tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke 64,06%. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perpindahan penduduk, data belum diperbarui, atau kendala pelayanan pasca pandemi. Pada Tahun 2023-2024: rasio kembali meningkat, menandakan adanya pemulihan dan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Tahun 2024 bahkan sedikit melebihi capaian 2020.

Meskipun sempat menurun pada 2022, secara keseluruhan rasio penduduk ber-KTP di Kota Palu kembali menunjukkan tren positif dan membaik. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta pelayanan publik yang lebih mudah dan merata sangat berkontribusi dalam tren ini. Diperlukan strategi kesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di atas 70% secara stabil.

Rasio Kepemilikan Akte Lahir

Pengukuran selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran. Rasio penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.82 Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2025

Gambar 2.82 memperlihatkan rasio kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun pada tahun 2023 untuk periode 2020-2024. Pada Tahun 2024 rasionya naik sebesar 21.85 persen dari Tahun 2020 yang sebesar 42,24 persen hingga menjadi 67,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mencapai rasio di atas separuh penduduk yang seharusnya memiliki akta kelahiran, sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak.

Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1

Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015 sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah kelurahan menjadi 46 Kelurahan pada Tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat dengan total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga saat ini Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

Pembangunan wilayah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat juga sangat didukung oleh keberadaan PKK yang aktif di tiap-tiap kelurahan di Kota Palu. Adanya PKK aktif dalam meningkatkan swadaya masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Palu yang diukur melalui tingkat keterlibatan PKK dan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi.

Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

Berikut cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kelurahan yang baik, dan persentase PKK aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.120 di bawah ini:

Tabel 2.120 Cakupan Sarpras Kantor Kelurahan, dan Persentase PKK Aktif di Kota Palu Tahun 2020-2024

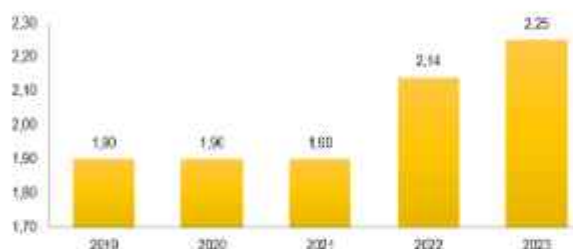
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan sarana penanaman perkarantina pemerintah desa yang baik (a/b) *100	84,03	84,23	84,22	84,23	84,23
a. Jumlah kamar pemerintah Kota yang baik	43	43	44	44	44
b. Jumlah seluruh pemerintah Kota	51	51	52	52	52
Persentase LPM Berprestasi (a/b) *100	0	0	0	0	0
a. Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
b. Jumlah LPM	44	44	44	44	44
Persentase PKK aktif (a/b) *100	100	100	100	100	100
a. Jumlah PKK aktif	44	44	44	44	44
b. Jumlah PKK	44	44	44	44	44

Sumber: Dinas Pengendalian dan Perencanaan Kota Palu Tahun 2024

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata-rata Anak Per Keluarga

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan kesehatan reproduksi ibu dan anak. Berikut gambaran rata-rata anak per keluarga di Kota Palu Tahun 2019– 2023 terlihat dalam gambar 2.83 di bawah ini:



Gambar 2.83 Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2019-2023

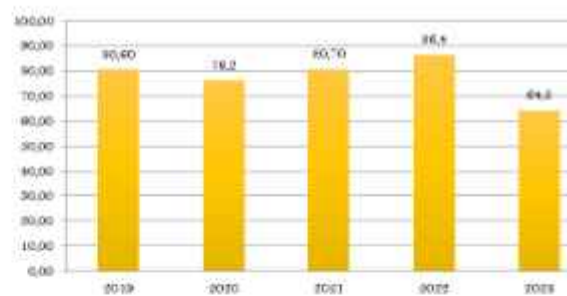
Sumber: DPPKB Kota Palu Tahun 2024

Rata-rata jumlah anak di Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019 rata-rata jumlah anak sebesar 1,90 sampai di Tahun 2021. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,24 hingga menjadi 2,14. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11 hingga menjadi 2,25. Kondisi ini menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah keluarga yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palu hingga Tahun 2023 adalah 2 orang per keluarga.

Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Pada Tahun 2020 rasio akseptor ini turun sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya hingga menjadi 76,2%. Tahun 2021 dan 2022 kembali naik dan terus naik masing-masing sebesar 4,5% dan 5,7% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 turun sebesar 22,2% dari tahun sebelumnya hingga menjadi 64,2%. Berikut Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota

Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.59 di bawah ini:



Gambar 2.84 Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2024

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di Kota Palu Tahun 2019–2023 menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 80,57% turun menjadi 76,20% di Tahun 2020. Tahun 2021 naik menjadi 80,67% dan kembali naik menjadi 86,40% di Tahun 2022. Tahun 2023 cakupan ini turun sebesar 29,87% hingga menjadi 56,53 %. Berikut Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera dalam Tabel 2.121 di bawah ini:

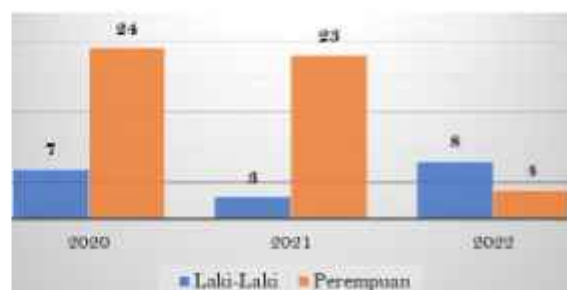
Tabel 2.121 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (a/b) *100	80,57	76,20	80,67	86,40	56,53
a. Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	48162	43990	48746	60292	29660
b. Jumlah pasangan usia subur	59786	57858	60307	69787	52301

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2024

Jumlah Perkawinan anak dibawah 18 Tahun

Angka perkawinan anak di bawah 18 tahun di Kota Palu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 2.85 Jumlah Perkawinan Anak di bawah 18 Tahun di Kota Palu Tahun 2020-2023

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik menunjukkan jumlah kasus yang dialami oleh laki-laki dan perempuan di Kota Palu selama empat tahun terakhir. Secara konsisten, jumlah kasus pada perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kasus yang menimpa perempuan mencapai 24, sementara laki-laki hanya 7. Tren ini berlanjut di tahun 2021 dengan perempuan 23 kasus dan laki-laki 3 kasus.

Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis jumlah kasus pada perempuan menjadi hanya 4 kasus, sementara kasus pada laki-laki sedikit meningkat menjadi 8. Ini merupakan satu-satunya tahun di mana kasus pada laki-laki melebihi kasus pada perempuan, menunjukkan kemungkinan adanya perubahan pola pelaporan atau fokus perlindungan.

Pada tahun 2023, kasus pada perempuan kembali melonjak drastis ke angka 24, sedangkan kasus pada laki-laki naik menjadi 13. Kenaikan signifikan ini patut menjadi perhatian, karena menunjukkan masih tingginya kerentanan perempuan terhadap kekerasan atau pelanggaran hak. Pemerintah Kota Palu perlu memperkuat sistem deteksi dini, layanan aduan, dan edukasi publik untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang berulang dan mengakar.

Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus penumpang dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2020 arus penumpang sebesar 800.148 meningkat hingga menjadi 865.045 penumpang di Tahun 2021, dan kembali meningkat mencapai 976.670 penumpang di Tahun 2022. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 1.015.551 penumpang, namun pada Tahun 2024 terjadi penurunan hingga mencapai 992.898 penumpang.

Berikut jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera pada Tabel 2.122 di bawah ini:

Tabel 2.122 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat melalui terminal	214.071	418.029	302.888	330.777	178.822
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	9.349	9.480	30.249	22.883	13.280
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	876.858	437.537	633.533	758.883	800.796
	Total Jumlah Penumpang	899.278	865.045	976.670	1.015.551	992.898

Sumber: BPS Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

Rasio ijin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi selama Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019 rasionya mencapai 0,0000156 turun menjadi 0,0000153 di Tahun 2020 dan naik kembali menjadi 0,0000161 di Tahun 2021. Tahun 2022 turun menjadi 0,0000157 dan terus mengalami penurunan di Tahun 2023 hingga menjadi 0,0000155. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu. Rasio ijin trayek di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada Tabel 2.123 berikut ini:

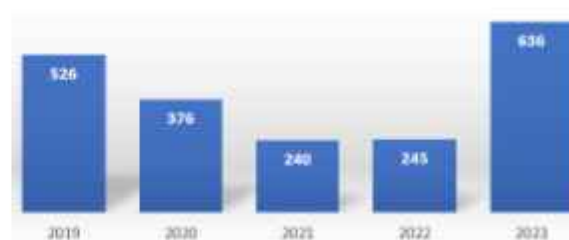
Tabel 2.123 Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Izin Trayek	0	0	0	0	0
2	Jumlah Penduduk	281.888	273.018	271.030	281.612	281.803
	Rasio Izin Trayek	0,0000156	0,0000153	0,0000161	0,0000157	0,0000155

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2024

Jumlah uji Kir di Kota Palu Tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Jumlah uji Kir mencapai 526 kali di Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 240 kali pada Tahun 2021 dengan rata-rata penurunan sebesar 143 kali tiap tahunnya. Tahun 2022 naik menjadi 245 kali dan naik signifikan hingga mencapai 636 kali di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan mengalami fluktuasi di lima tahun terakhir, namun di dua tahun terakhir yaitu Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan jumlah uji kir angkutan umum.

Jumlah uji kir angkutan umum di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.86 berikut ini:



Gambar 2.86 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2019–2023

Sumber: Dinas Perhubungan 2024

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2020-2024 tidak mengalami peningkatan dengan total sebanyak 7 unit. Ketersediaan pelabuhan laut sejumlah 2 pelabuhan, Bandar udara sejumlah 1 bandar udara, dan terminal bis sejumlah 4 terminal

tersebut masih mampu melayani kebutuhan arus keberangkatan dan kedatangan jumlah penumpang di Kota Palu yang terus berfluktuasi sejak Tahun 2020-2024. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 2.124 berikut ini:

Tabel 2.124 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	1	1	1	1	1
Jumlah		3	3	3	3	3

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2023

Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu ujung tombak dalam membangun literasi informasi, memperkuat partisipasi warga, sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat pada tingkat kecamatan di Kota Palu dalam periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.125 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KIM	27	0	1	0	0
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota	8	8	8	8	8
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		33,3	0	12,5	0	0

Sumber: Data Komunikasi dan Informatika Kota Palu 2024

Data perkembangan KIM di Kota Palu dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2019, jumlah KIM tercatat sebanyak 27 kelompok. Namun, tahun berikutnya terjadi penurunan drastis hingga nol, seolah aktivitas dan keberadaan KIM sempat terhenti. Hal ini dapat dikaitkan dengan situasi pascabencana gempa dan tsunami 2018 serta dampak pandemi COVID-19, yang mungkin membuat perhatian masyarakat dan pemerintah lebih banyak terfokus pada pemulihan ekonomi, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Meski sempat terhenti, semangat pengembangan KIM tidak benar-benar padam. Tahun 2021 tercatat mulai ada kembali satu KIM

yang aktif, kemudian meningkat menjadi dua kelompok pada 2022, dan bertambah lagi menjadi tiga kelompok pada 2023. Walaupun pertumbuhan ini belum kembali seperti kondisi 2019, tren kenaikan menunjukkan adanya upaya serius untuk menghidupkan kembali peran KIM. Hal yang menarik, cakupan pengembangan KIM di tingkat kecamatan juga ikut bergerak naik: dari 12,5% pada 2021, meningkat dua kali lipat pada 2022, dan menjadi 37,5% pada 2023. Artinya, meskipun jumlah kelompok belum banyak, kualitas penyebaran dan jangkauannya mulai terasa di lebih banyak wilayah.

Dari sisi sosial, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Palu perlahan mulai kembali menata ruang komunikasi publik. KIM hadir tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat solidaritas, menyebarkan literasi digital, hingga membangun kesadaran kritis warga. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperluas keberadaan KIM di delapan kecamatan agar cakupan pemberdayaan semakin merata, sekaligus memastikan keberlanjutan aktivitasnya tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mampu menjadi pusat informasi yang inklusif, partisipatif, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Jaringan Komunikasi

Pada indikator jaringan komunikasi dan informatika, dalam periode 2020-2024 di Kota Palu terdapat 4 jaringan telepon genggam, namun tidak tersedia jaringan stasioner.

Tabel 2.126 Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
3	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Data jaringan komunikasi di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan. Jumlah jaringan telepon genggam tetap berada di angka empat, sementara jaringan telepon stasioner tidak ada sama sekali. Dengan demikian, total jaringan komunikasi selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah empat. Sekilas, angka ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memberikan gambaran penting tentang bagaimana pola komunikasi masyarakat Kota Palu telah bergeser secara drastis ke arah digital berbasis telepon seluler.

Ketiadaan jaringan telepon stasioner mencerminkan bahwa masyarakat tidak lagi bergantung pada telepon rumah atau kabel konvensional. Perubahan ini selaras dengan tren global di mana telepon seluler menjadi alat komunikasi utama, tidak hanya untuk percakapan, tetapi juga untuk mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Bagi masyarakat Kota Palu, keberadaan jaringan telepon genggam ini memiliki arti yang sangat vital, terutama pascabencana 2018 dan pandemi COVID-19. Telepon seluler bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga ruang sosial baru yang membantu warga tetap terhubung, saling mendukung, serta mengakses layanan digital pemerintah maupun swasta.

Namun, stagnasi jumlah jaringan juga memberi sinyal bahwa pengembangan infrastruktur komunikasi di Kota Palu masih terbatas. Padahal, dengan jumlah kecamatan sebanyak delapan dan kebutuhan komunikasi yang terus meningkat, empat jaringan tampak belum cukup merepresentasikan luasnya kebutuhan warga. Apalagi, komunikasi digital kini tidak hanya berbicara soal ketersediaan jaringan, tetapi juga kualitas layanan seperti kecepatan internet, stabilitas sinyal, dan keterjangkauan biaya. Oleh karena itu, meski data menunjukkan keberadaan jaringan telepon genggam yang stabil, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa akses komunikasi benar-benar merata, inklusif, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif di Kota Palu.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), jumlah jenis surat kabar di Kota Palu menunjukkan angka yang sama, dari total 18 surat kabar yang beredar 72% (13 dari 18) merupakan terbitan lokal dan 28% (5 dari 18) adalah terbitan nasional. Ini mencerminkan bahwa media lokal masih mendominasi ruang informasi cetak di Kota Palu, yang kemungkinan besar berkaitan erat dengan kebutuhan informasi lokal masyarakat serta peran media lokal dalam mendukung pembangunan daerah. Stabilitas jumlah jenis surat kabar menunjukkan bahwa industri media cetak masih bertahan, meski di tengah tren digitalisasi. Namun, stagnansi ini juga bisa menjadi sinyal bahwa inovasi dan ekspansi media cetak belum berkembang secara signifikan.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Data menunjukkan jumlah surat kabar yang beredar di Kota Palu, baik nasional maupun lokal, cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Selama lima tahun terakhir, terdapat lima surat kabar nasional dan 13 surat kabar lokal, sehingga total jenis surat kabar yang beredar sebanyak 18. Stabilitas ini menggambarkan adanya konsistensi dalam ketersediaan sumber informasi cetak, baik yang berskala luas maupun yang lebih dekat dengan dinamika lokal.

Tabel 2.127 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	13	13	13	13	13
3	Total jenis surat kabar	18	18	18	18	18

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Kehadiran surat kabar lokal yang jumlahnya lebih banyak daripada surat kabar nasional menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu masih membutuhkan media yang mampu menyuarakan isu-isu kedaerahan, mendokumentasikan peristiwa lokal, serta menjadi ruang ekspresi bagi komunitas setempat. Namun, di tengah gempuran era digital, tantangan yang muncul adalah bagaimana media cetak ini tetap relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin beralih ke platform daring. Dengan demikian, stabilitas angka ini bukan sekadar soal kuantitas, melainkan juga bagaimana media cetak mampu beradaptasi agar tetap menjadi rujukan terpercaya bagi publik.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kota Palu, karena tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian ekonomi lokal. Melalui data berikut, dapat terlihat perkembangan jumlah koperasi dan koperasi aktif di Kota Palu dalam kurun waktu 2020–2024, yang sekaligus mencerminkan dinamika peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.128 Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif	30	36	50	90	94
2	Jumlah koperasi	114	114	106	119	119
Persentase		10,96	14,65	10,95	11,10	79

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Data koperasi di Kota Palu menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Dari tahun 2020

hingga 2023, jumlah koperasi secara keseluruhan relatif stabil di kisaran 205–219 unit. Namun, jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi, sempat naik dari 93 koperasi pada 2020 menjadi 96 koperasi pada 2021, kemudian menurun tajam ke 83 koperasi di 2022, dan kembali naik ke 90 koperasi pada 2023. Kondisi ini tercermin dalam persentase koperasi aktif yang cenderung menurun, dari 44,65% pada 2021 menjadi 41,10% pada 2023.

Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun secara kuantitas koperasi tetap banyak, tidak semuanya benar-benar berfungsi sebagai wadah ekonomi produktif bagi anggotanya. Fluktuasi koperasi aktif bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kapasitas manajemen, dukungan permodalan, daya saing usaha, hingga adaptasi terhadap era digital. Kehadiran koperasi aktif sejatinya penting sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Kota Palu, terutama dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, tantangan yang muncul bukan hanya menambah jumlah koperasi, tetapi memastikan kualitas kelembagaan, keberlanjutan usaha, serta relevansinya dengan kebutuhan ekonomi lokal agar koperasi tetap menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal

Jumlah Investor PMDN/PMA

Investasi, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), menjadi salah satu indikator penting dalam melihat geliat pembangunan ekonomi di Kota Palu. Jumlah investor yang masuk tidak hanya mencerminkan daya tarik daerah bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan gambaran mengenai stabilitas ekonomi, iklim usaha, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Data berikut menunjukkan perkembangan jumlah investor di Kota Palu selama periode 2019 hingga 2023:

Tabel 2.129 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023

Tahun	Urutan	PMDN	PMA	Total
2019	Jumlah Investor	8	0	8
2020	Jumlah Investor	8	1	10
2021	Jumlah Investor	9	0	9
2022	Jumlah Investor	29	10	39
2023	Jumlah Investor	29	2	31

Sumber: Badan Administrasi KEK Tahun 2024

Jika dilihat dari tren, jumlah investor di Kota Palu mengalami fluktuasi cukup tajam. Tahun 2019 jumlah investor masih sangat terbatas, hanya lima dan semuanya berasal dari dalam negeri.

Tahun 2020 menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 15 investor, dengan tujuh di antaranya berasal dari PMA. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2021 jumlah investor kembali merosot menjadi hanya dua, tanpa adanya investor asing. Fluktuasi ini bisa dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi global maupun nasional, sehingga kepercayaan investor sempat menurun.

Situasi berbalik pada tahun 2022, ketika jumlah investor melonjak tajam menjadi 35, dengan kontribusi cukup besar dari PMA sebanyak 10 investor. Meski pada 2023 jumlahnya sedikit menurun menjadi 31 investor, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal. Artinya, Kota Palu mulai menunjukkan daya tarik baru bagi investor, baik lokal maupun asing. Lonjakan ini dapat mencerminkan adanya pemulihan ekonomi, peningkatan kepercayaan terhadap potensi daerah, serta perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga stabilitas pertumbuhan investasi ini agar lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan kemudahan berusaha, keamanan berinvestasi, dan kepastian regulasi yang berpihak pada investor sekaligus masyarakat lokal.

Jumlah Investasi PMDN dan PMA

Berikut jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.130 di bawah ini:

Tabel 2.130 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2019	2	114.376.074,280
2020	1	22.196.184,791
2021	2	12.602.706,072
2022	2	74.417.383,361
2023	131	682.978.363,525

Sumber: Badan Administrasi KEK Tahun 2024

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama Tahun 2019-2023 di Kota Palu mengalami banyak perubahan dari segi jumlah proyek dan juga menunjukkan banyak perubahan dari sisi nilai yang diinvestasikan terutama di tahun 2023.

Jumlah proyek investasi berskala nasional di Kota Palu selama periode 2018-2022 berkisar di antara 1 hingga 2 proyek setiap tahunnya, namun ditahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 131 proyek. Sementara itu, jumlah nilai investasi yang ditanamkan untuk

proyek-proyek tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Nilai investasi tertinggi terjadi pada Tahun 2023 hingga mencapai 682,9 Miliar rupiah sedangkan Tahun 2021 merupakan nilai investasi terendah yaitu sebesar 12,6 Miliar rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan penanaman modal khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu sangat perlu ditingkatkan strategi penanganan/pengelolaan dan pembangunannya secara menyeluruh dan lebih baik sehingga benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih luas dan lebih baik kepada para investor PMDN dan PMA untuk dapat berinvestasi di Kota Palu.

Kepemudaan dan Olahraga

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Peran organisasi kepemudaan di Kota Palu sangat penting sebagai ruang pembinaan generasi muda, pengembangan kreativitas, serta wadah partisipasi sosial. Data berikut memperlihatkan perkembangan jumlah organisasi pemuda, baik yang terdaftar maupun yang benar-benar aktif, dari tahun 2019 hingga 2023. Angka ini tidak hanya menggambarkan seberapa banyak organisasi yang ada, tetapi juga sejauh mana organisasi tersebut benar-benar berfungsi dalam menggerakkan aktivitas pemuda di masyarakat. Gambaran mengenai jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu pada periode 2019–2023 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.131 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palu Tahun 2019 s/d 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	312	312	316	310	328
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	363	365	348	338	336
Persentase		85,95%	85,48%	90,80%	91,72%	97,62%

Sumber: Data dari Laporan Pertanggungjawaban Daerah 2024

Dari sisi jumlah, organisasi pemuda aktif mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023. Jika pada 2019–2022 angkanya relatif stabil di kisaran 210–216 organisasi, maka pada 2023 melonjak drastis menjadi 328 organisasi aktif. Sebaliknya, jumlah keseluruhan organisasi pemuda justru menurun dari 386 di tahun 2021–2022 menjadi 336 pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya penyaringan atau restrukturisasi, di mana meskipun jumlah total berkurang, tingkat keaktifan organisasi justru meningkat tajam.

Kondisi ini tercermin jelas dalam persentase organisasi aktif terhadap total organisasi pemuda. Pada periode 2019–2022, persentase

keaktifan hanya berada di kisaran 55%, namun pada 2023 melonjak hingga 89,90%. Peningkatan tajam ini mengindikasikan adanya kebangkitan semangat pemuda di Kota Palu untuk kembali aktif berorganisasi, mungkin didorong oleh pulihnya aktivitas sosial pascapandemi, meningkatnya dukungan pemerintah, maupun kesadaran kolektif pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan semangat ini dengan pendampingan, pelatihan kepemimpinan, serta ruang kolaborasi yang mampu menyalurkan energi pemuda ke arah yang produktif dan inovatif.

Jumlah Organisasi Olahraga

Data jumlah tertentu (misalnya lembaga/organisasi/entitas) di delapan kecamatan di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Dari total keseluruhan, jumlahnya berkisar antara 205 hingga 207, dengan sedikit peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 dan kemudian bertahan hingga 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa aktivitas kelembagaan atau organisasi di tingkat kecamatan cenderung terjaga dan tidak mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Gambaran mengenai jumlah organisasi olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.132 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2020 s/d 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecamatan Pala Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Pala Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Pala Timur	54	56	56	56	56
4	Kecamatan Pala Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Marikudore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatunga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujuhi	14	14	14	14	14
Jumlah		201	205	207	207	207

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Jika diperhatikan lebih rinci, Kecamatan Pala Timur tercatat memiliki jumlah terbanyak, mencapai 54 hingga 56, dan konsisten berada di atas kecamatan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pala Timur menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, baik karena faktor kepadatan penduduk maupun geliat kegiatan sosial dan ekonomi. Sementara itu, Kecamatan Tawaeli memiliki jumlah paling sedikit, yakni 10, yang kemungkinan dipengaruhi oleh luas wilayah atau jumlah penduduk yang lebih kecil. Pola ini menunjukkan adanya disparitas jumlah antar kecamatan, namun

secara umum keberadaannya relatif stabil, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang strategi pemerataan pembinaan dan pemberdayaan di seluruh wilayah Kota Palu.

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga

Total jumlah kegiatan kepemudaan selama periode 2019-2023 sebanyak 28 kegiatan dengan jumlah 5 kegiatan di tahun 2019-2022 dan 8 kegiatan di tahun 2023. Sedangkan kegiatan olahraga selama Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari segi jumlah event yang diadakan. Pada Tahun 2019 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 27 kegiatan, kemudian di Tahun 2020-2023 meningkat menjadi 28 kegiatan di masing-masing tahun.

Berikut jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.133 Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	8
2	Jumlah kegiatan olahraga	27	28	28	28	28

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Statistik

Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan (berkaitan) dengan suatu masalah tertentu. umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, statistik dibutuhkan sebagai sarana penunjang untuk mengetahui kondisi suatu masalah dan perkembangannya dengan memperkirakan dan memproyeksikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan perencanaan dapat terintegrasi secara menyeluruh sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun-tahun rencana yang akan datang.

Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku kabupaten/kota dalam angka, dan buku PDRB dari tahun ke tahun pada suatu daerah merupakan indikator yang harus dipenuhi sebagai acuan atau bahan akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota.

Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan ketiga komponen indikator tersebut sebagai kebutuhan informasi yang tersusun dan tersaji dengan berbagai jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, serta ekonomi dan keuangan. Buku Kota Palu Dalam Angka dan buku PDRB Kota Palu selama periode 2020-2024 telah tersedia dengan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu sejak Tahun 2015.

Perpustakaan

Perpustakaan adalah gudang ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat menguatkan sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapapun, usia berapapun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Perpustakaan ada di mana mana dan dapat dijumpai perpustakaan walupun dengan jenis, luas, dan kualitas yang berbeda-beda

Berikut data terkait urusan perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.134 di bawah ini:

Tabel. 2.134 Data terkait Urusan Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (a/b)	0,014	0,004	0,006	0,006	0,006
a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	15	10	15	15	18
b. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1084	2287	2576	2.471	2.930
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (a/b)	8,224	1,145	1,087	0,509	0,565
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	4.112	3.619	5.578	3.806	4.953
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	500	3.162	5.132	7.476	8.765
Rasio perpustakaan persatuan penduduk (a/b)*1000)	0,1840	0,1929	1,4959	1,585	1,753
Jumlah perpustakaan	72	72	564	605	680
Jumlah penduduk	391.303	373.218	377.030	381.572	387.493
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	500	1.658	2576	2.471	2.930
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.112	3.162	5132	3.806	4.953
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (a/b)*100)	0	0	0	50	100
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	2	2
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	0	0	0	4	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.134 memperlihatkan persentase kunjungan perpustakaan dengan populasi yang harus dilayani yang terus mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 0,01% hingga menjadi 0,004% di Tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,002% menjadi 0,006% di tahun 2021-2023. Untuk Rasio Perpustakaan per satuan penduduk memperlihatkan kenaikan terus menerus sejak Tahun 2019 hingga 2023. Rasio Perpustakaan di Tahun 2019 sebesar 0,184 naik menjadi 0,193 di Tahun 2020, dan seterusnya menjadi 1,496 di Tahun 2021, naik lagi menjadi 1,585 di Tahun 2022, dan 1,753 di Tahun 2023. Sedangkan untuk persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat mencapai 50% di Tahun 2022. Persentase ini kemudian di Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 100% disebabkan seluruh pustakawan telah memiliki sertifikat.

2.1.4.6 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Jumlah Hotel di Kota Palu

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu diperlukan ketersediaan hotel yang memadai. Dari gambaran umum Kota Palu khususnya penyediaan fasilitas perhotelan, mengalami fluktuasi setiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Berikut jumlah hotel di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Tabel 2.135 di bawah ini.

Tabel 2.135 Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel berbintang	7	11	7	8	10
2	Hotel non berbintang	109	41	115	107	na
Total		116	52	122	115	10

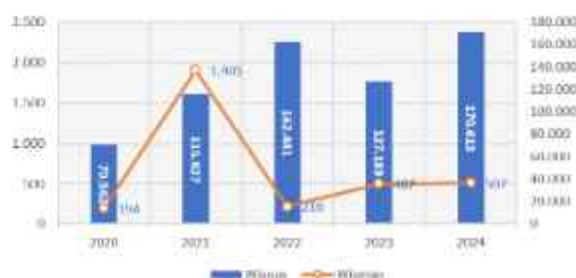
Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Data mengenai jumlah hotel di Kota Palu dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah hotel tercatat sebanyak 116, terdiri atas 7 hotel berbintang dan 109 hotel non-berbintang. Namun pada 2021, angka ini menurun drastis menjadi hanya 52 hotel, dengan penurunan tajam pada kategori non-berbintang. Kondisi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak usaha perhotelan menghentikan operasionalnya.

Memasuki tahun 2022, jumlah hotel kembali meningkat signifikan menjadi 122, bahkan melampaui jumlah sebelum pandemi. Lonjakan ini menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Palu, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan dukungan pemulihan ekonomi. Meskipun pada 2023 jumlah hotel sedikit menurun menjadi 115, sektor ini masih menunjukkan ketahanan. Data tahun 2024 belum lengkap, karena hanya mencatat 10 hotel berbintang tanpa informasi jumlah hotel non-berbintang. Meski begitu, tren yang terlihat mengindikasikan bahwa sektor perhotelan di Kota Palu tetap memiliki prospek cerah, terutama jika didukung dengan promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan, serta integrasi dengan potensi wisata lokal.

Jumlah Kunjungan wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan sektor pariwisata suatu daerah. Data kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) di Kota Palu menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi sosial-ekonomi, pandemi, maupun upaya promosi pariwisata daerah. Berikut disajikan data perbandingan jumlah wisnus dan wisman yang berkunjung ke Kota Palu pada periode 2020–2024. Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.87 di bawah ini:



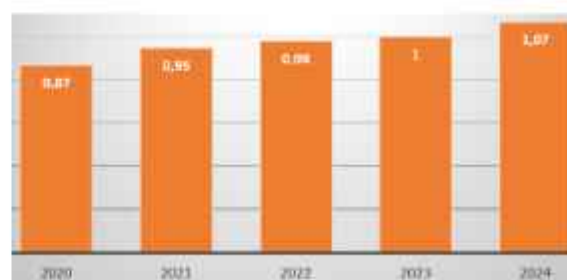
Gambar 2.87 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palu Tahun 2025

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Palu Tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sejumlah 70.562 orang dan pada tahun tersebut merupakan penurunan terendah. Lain halnya dengan kunjungan wisatawan mancanegara, pada Tahun 2020 jumlah kunjungan ini sempat mengalami penurunan sebesar 916 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 1.110 orang menjadi 194 orang namun tahun selanjutnya yaitu pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.711 orang hingga menjadi 1.905 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 194 orang. Pada Tahun 2024 kunjungan wisatawan ke Palu mencapai 171.120 merupakan jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir.

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi dan makan minum. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 0,08 % hingga menjadi 0,87 persen pada Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04 % per tahun. Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.88 di bawah ini:



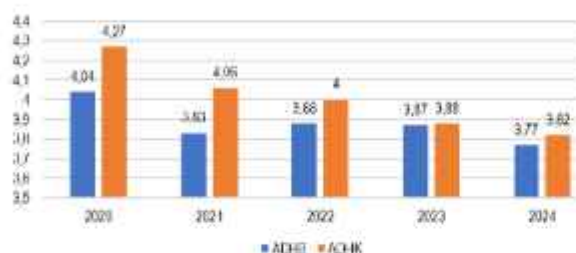
Gambar 2.88 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Pertanian

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan ADHB dan ADHK di Kota Palu tiga tahun terakhir kontribusi sektor pertanian di Kota Palu cenderung mengalami penurunan kontribusi

Berikut gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan di Kota palu yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak Tahun 2020 hingga 2024 tertera dalam Gambar 2.89 di bawah ini:



Gambar 2.89 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu Tahun 2023 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ADHB di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.90 di bawah ini:



Gambar 2.90 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Gambar 2.90 memperlihatkan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun, meningkat dari 6,03% pada tahun 2020 menjadi 7,79% pada tahun 2024. Ini

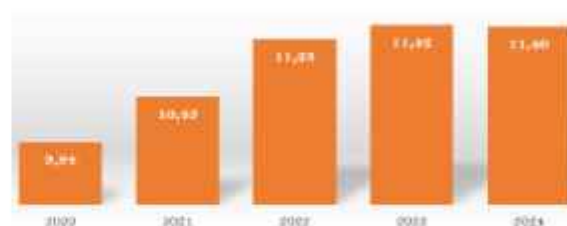
menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian semakin menjadi kontributor penting terhadap PDRB Kota Palu.

Lompatan terbesar terjadi antara tahun 2022 ke 2023, dari 6,37% menjadi 7,25% (naik 0,88 poin persentase), yang bisa disebabkan oleh peningkatan aktivitas tambang atau kebijakan yang mendorong eksplorasi sumber daya alam secara lebih optimal. Dengan meningkatnya kontribusi sektor ini, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Palu tidak hanya bertumpu pada sektor perdagangan atau jasa, tetapi mulai mengalami diversifikasi ke sektor primer, khususnya ekstraktif.

Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi ketiga setelah sektor konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kontribusi. Tiga tahun terakhir yakni Tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,57 persen per tahun. Pada Tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Palu menurun walaupun tidak cukup signifikan menjadi 11,40 persen atau menurun 0,18 persen.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2019-2023 di bawah ini:



Gambar 2.91 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Palu mengalami penurunan terus-menerus sejak tahun 2020 hingga 2024, dari 6,59% ke 5,94%. Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengembangan sektor ini dalam lima tahun terakhir. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Perkembangan industri di Kota Palu yang fluktuatif disebabkan oleh banyaknya industri berkembang masih berskala

rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah yang dikelola secara formal maupun informal. Penurunan Terbesar Terjadi pada 2022–202, dari 6,31% menjadi 5,96% (penurunan 0,35 poin persentase). Penurunan berhenti di 2024, namun angka kontribusinya tetap rendah (5,94%). Ini bisa menandakan bahwa sektor ini mulai stabil, meski pada level kontribusi yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.



Gambar 2.92 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2025

Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2024 mencapai 2210,21 ton, meningkat dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 2.013 ton. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 2.078,5 ton, dan perikanan budidaya sebesar 131.71 ton.

Berikut produksi perikanan di Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam Gambar 2.58 di bawah ini:



Gambar 2.93 Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2025

2.1.4.7 Fokus Layanan Penunjang Urusan

Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Palu Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang disertai dengan tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perkada).

Ketersediaan dokumen perencanaan ini juga telah ditunjang dengan ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda, serta penjabaran konsistensi dari program-program seperti program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD ke dalam APBD.

Tingkat Konsistensi Program dalam dokumen P-RKPD Kota Palu Triwulan IV Tahun 2023 terhadap RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 terdapat 185 program P-RKPD yang konsisten terhadap 229 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 80.79% (Konsistensi tinggi), terdapat 185 Program APBD yang konsisten terhadap 185 Program P-RKPD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 100.00% (Konsistensi sangat tinggi) dan terdapat 185 Program APBD yang konsisten terhadap 229 Program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 80.79% (Konsistensi tinggi).

Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kota Palu Tahun 2020-2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 28,35% tiap tahunnya. Berikut Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2020-2024 tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.136 Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Tahun	Silpa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tahun 2019-2023	28,35%	28,35%	28,35%	28,35%	28,35%
2	Tahun 2020-2024	28,35%	28,35%	28,35%	28,35%	28,35%

Kinerja keuangan Kota Palu dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren positif, khususnya dari sisi pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pada tahun 2020, SILPA

masih sangat tinggi mencapai Rp602,36 miliar atau sekitar 48,02% dari APBD, yang menandakan adanya anggaran besar tidak terserap optimal. Namun, dalam lima tahun terakhir SILPA terus mengalami penurunan signifikan hingga mencapai Rp132,84 miliar atau 10,25% dari APBD pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dari sisi APBD, Kota Palu mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tersebut. Tahun 2020, APBD tercatat Rp1,23 triliun dan naik signifikan pada 2021 menjadi Rp1,90 triliun. Selanjutnya, pada 2022 terjadi penurunan ke Rp1,52 triliun, lalu kembali meningkat menjadi Rp1,69 triliun pada 2023. Dinamika ini mencerminkan kondisi fiskal yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pusat, transfer ke daerah, dan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Rasio SILPA terhadap APBD juga menggambarkan perbaikan kinerja fiskal Kota Palu. Jika pada 2020–2021 rasio SILPA masih sangat tinggi di kisaran 48%, maka sejak 2022 hingga 2024 angka ini turun drastis menjadi 21,01%, 13,57%, hingga 10,25%. Tren penurunan ini menunjukkan semakin baiknya kualitas belanja pemerintah daerah, di mana anggaran lebih mampu terserap untuk mendukung program pembangunan. Dengan capaian tersebut, Kota Palu bergerak menuju pengelolaan APBD yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis

pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Palu secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari Tahun 2025 s.d 2029) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

Pendapatan Daerah

Berikut merupakan data realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2020-2024 serta target sampai dengan Tahun 2024 secara rinci disajikan pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi
1	2020	1.304.323.670.760
2	2021	1.331.890.902.470
3	2022	1.381.205.117.673
4	2023	1.469.806.277.706
5	2024	1.651.716.533.334

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2025

Rincian realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2020 sampai tahun 2023 serta target Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Di Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
PAD	260.179.132.643	337.212.632.338	297.243.708.755	352.767.942.672	493.680.808.034
Pendapatan Transfer	886.421.012.129	987.164.953.521	1.038.000.328.881	1.086.337.279.670	1.138.314.313.827
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	157.723.505.988	27.513.296.411	48.938.910.037	50.203.055.364	19.721.413.493

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2025

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Palu untuk Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.139 berikut:

Tabel 2.139 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan	1.304.323.670.760	1.331.890.902.470	1.381.205.117.673	1.469.806.277.706	1.651.716.533.334	6,13
1.1	Pendapatan Asli Daerah	260.179.132.643	337.212.632.338	297.243.708.755	352.767.942.672	493.680.808.034	10,00
1.1.1	Pajak Daerah	110.880.155.243	120.722.968.882	139.781.032.300	188.502.300.339	301.400.000.000	28,81
1.1.2	Retribusi Daerah	2.301.334.324	3.348.506.358	13.244.940.377	80.393.336.614	47.487.303.034	47,48
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.048.303.784	9.613.386.311	8.713.487.059	3.813.937.938	3.900.000.000	15,88
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	135.945.695.000	600.063.970.793	119.374.448.393	165.904.347.747	140.388.300.000	6,17
1.2	Dana Perimbangan	886.421.012.129					
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.467.090.369					
1.2.2	Dana Alokasi Umum	618.403.383.000					
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	190.550.926.150					
1.3	Pendapatan Transfer		987.164.953.521	1.038.000.328.881	1.086.337.279.670	1.138.314.313.827	4,86
1.3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		901.361.371.746	932.271.277.832	933.747.036.313	1.041.333.386.000	3,39
1.3.1.1	Dana Alokasi Umum				667.077.389.391	716.078.695.000	
1.3.1.2	Dana Alokasi Khusus Fisik				212.492.330.192	68.840.340.000	
1.3.1.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik				-	170.504.188.000	
1.3.1.4	Insentif Fisikal				3.874.928.000	6.667.470.000	
1.3.1.5	Dana Bagi Hasil				63.503.803.090	68.761.388.000	
1.3.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		80.800.581.778	109.749.031.049	112.590.231.137	96.761.087.887	3,22
1.3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya		-	-	-	-	
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	157.723.505.988	27.513.296.411	48.938.910.037	50.203.055.364	19.721.413.493	6,59
1.4.1	Pendapatan Hibah	48.108.393.318	-	-	304.108.615	1.266.000.000	
1.4.2	Dana Darurat			300.000.000			
1.4.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.790.189.372					
1.4.4	Dana Penyesuaian dan Otomatis Khusus Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31.231.395.000					
1.4.5[3]		5.300.080.000	27.513.296.411	48.938.910.037	48.888.245.749	17.533.413.493	4,97

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2025

Bencana alam yang terjadi pada September 2018 masih berdampak pada kondisi APBD Kota Palu terutama disisi pendapatan daerah, meski begitu Kota Palu mencoba kembali untuk merangkak dalam kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana namun hadangan bencana non alam yakni pandemi Covid-19 harus dihadapi dengan dampak ekonomi yang sangat besar pada Tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun tersebut sebesar Rp 260.179.152.643, dengan rincian realisasi pajak daerah sebesar Rp 112.880.185.945, retribusi sebesar Rp 9.901.834.854, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Rp 2.048.503.784 serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 135.348.628.060 didominasi oleh pendapatan BLUD RSU. Anutapura sebesar Rp 96.578.863.655. Dana perimbangan sebesar Rp 886.421.012.129 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 67,96% serta realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 157.723.505.988 dengan kontribusi 12,09% terhadap pendapatan daerah.

Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 337.212.652.538 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,94%, peningkatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah khususnya pendapatan BLUD dimana terdapat penerimaan dari pemerintah pusat atas jasa pelayanan Covid-19 sehingga penerimaan BLUD menjadi sekitar Rp. 160 Milyar. Dana transfer Tahun 2021 berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 73,02% dengan realisasi sebesar Rp 987.164.953.521, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2021 sebesar Rp 27.513.296.411 berkontribusi 2,04%.

Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 269.724.388.611 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 20,40%. Atas target tersebut, realisasi PAD mencapai 110% atau sebesar Rp 297.245.708.755 dimana pelampauan realisasi pajak daerah sebesar Rp 30 Milyar dan pendapatan BLUD sebesar Rp 20 Milyar, namun realisasi retribusi daerah belum mencapai target dengan deviasi sekitar Rp 13 Milyar. Pencapaian pajak daerah tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh seperti relaksasi denda pajak daerah guna menstimulasi penerimaan dari masyarakat. Realisasi pendapatan transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 1.038.000.528.881 dengan kontribusi 74,99%. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 50.741.400.000

dengan pencapaian realisasi sebesar 96,49% atau Rp 48.958.910.037.

Proyeksi PAD Tahun 2023 sebesar Rp 402.579.311.439, dengan realisasi atas target tersebut berjumlah Rp 352.767.942.672. Target PAD berkontribusi 26,33% terhadap pendapatan daerah. Target pajak daerah dan retribusi daerah meningkat masing-masing sekitar Rp 70 Milyar dan Rp 15 Milyar peningkatan tersebut didasari oleh analisis potensi yang dilakukan OPD pengampuh PAD tersebut, lain-lain PAD yang sah berkontribusi 3,21% atau sebesar Rp 136.786.332.240. Peningkatan pendapatan transfer skitar Rp 50 Milyar bersumber dari DAK Fisik bidang jalan untuk mendukung kawasan sentral produksi daerah, dengan total pendapatan transfer Rp 1.076.415.440.441 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 70,39%, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 50.203.055.364 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 3,42 %.

Target pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp 1.651.716.535.354 terdiri dari target PAD Rp 493.680.808.034 dengan rincian target pajak daerah diproyeksi sebesar Rp 301.400.000.000, retribusi daerah sebesar Rp 47.487.308.034, dan lain-lain PAD yang sah meningkat Rp 4 Milyar dari target tahun sebelumnya, Target pendapatan transfer sebesar Rp 1.138.314.313.827 dengan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 68,92%. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah telah disesuaikan dengan pedoman penyusunan APBD Tahun 2024, sehingga target berjumlah Rp 19.721.413.493, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 56,4 Milyar pindah ke rekening pendapatan transfer khususnya DAK Non Fisik.

Berdasarkan data selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Palu dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Palu selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan di seluruh komponen pendapatan daerah.

Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi

penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Perkembangan penerimaan

pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.140 di bawah ini :

Tabel 2.140 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan	1.504.523.670.790	1.351.890.902.470	1.384.203.147.673	1.468.308.277.706	1.631.716.353.334	6,13
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1.033.071.024.850	602.363.096.948	383.034.982.213	173.615.555.692	132.841.947.917	(39,07)
3.1.1	SILPA	1.033.071.024.850	602.363.096.948	383.034.982.213	173.615.555.692	132.841.947.917	(39,07)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Undang-Undang	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan Daerah	2.337.594.695.640	1.954.253.999.418	1.767.238.129.887	1.641.923.833.398	1.764.558.301.251	(6,09)

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2025

Silpa Tahun 2020 berjumlah Rp 1.033.071.024.850 dimana Rp 820 Milyar merupakan penyaluran tahap 2 dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam yang diberikan oleh pemerintah pusat pada akhir Tahun 2019 yang penyalurannya dilanjutkan Tahun 2020 sekitar Rp 400 Milyar dan sisanya menjadi Silpa Tahun 2021 dengan jumlah realisasi Silpa Rp 602.363.096.948 masih terdapat dana stimulan yang akan disalurkan sekitar Rp 420 Milyar dan selisihnya merupakan penghematan belanja. Tahun 2022 Silpa sebesar Rp 383.034.982.213 dengan Silpa dana stimulant sekitar Rp 150 Milyar. Tahun 2023 Silpa sebesar Rp 173.615.555.692 merupakan penghematan belanja. Tahun 2024 dialokasikan Silpa sebesar Rp 132 Milyar yang terdiri dari penghematan belanja serta DBH pusat yang belum belanjakan yang disalurkan di akhir Tahun 2023.

2.2.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan.

Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA). SiLPA akan masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Palu selama 5 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang akan disajikan dalam sub babasan yang berbeda.

Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah Kota Palu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021 dari tahun 2020.

Tabel 2.141 Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Target Tahun 2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja Daerah	1.733.027.796.279	1.367.638.461.028	1.593.824.574.193	1.613.499.280.883	1.783.558.483.271	9,48
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.030.796.412.188					
2.1.1	Belanja Pegawai	532.038.713.079					
2.1.2	Belanja Bangun	-					
2.1.3	Belanja Subsidi	-					
2.1.4	Belanja Hibah	69.734.345.780					
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	409.963.000.000					
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	829.187.400					
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	18.837.883.847					
2.2	Belanja Langsung	692.231.376.088					
2.2.1	Belanja Pegawai	68.969.943.071					
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	469.859.034.730					
2.2.3	Belanja Modal	187.308.388.283					
2.3	Belanja Operasi		1.304.752.905.071	1.218.513.125.022	1.263.763.807.569	1.433.474.248.521	8,57
2.3.1	Belanja Pegawai		563.847.891.561	280.694.272.607	379.098.387.138	701.487.061.413	8,30
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa		480.325.329.843	552.143.388.165	836.837.817.074	944.300.996.329	11,17
2.3.3	Belanja Bangun		-	-	-	-	-
2.3.4	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
2.3.5	Belanja Hibah		9.066.785.887	79.230.484.202	17.777.379.359	84.009.890.774	234,22
2.3.6	Belanja Bantuan Sosial		231.313.000.000	9.473.000.000	10.231.824.000	3.082.500.000	(36,92)
2.4	Belanja Modal		237.839.366.892	289.914.401.250	345.215.809.464	347.084.234.750	10,68
2.4.1	Belanja Modal Tanah		14.301.353.920	19.797.188.747	18.868.111.923	9.000.000.000	(6,38)
2.4.2	Belanja Peralatan dan Mesin		79.009.063.792	38.476.870.322	87.069.001.893	65.464.388.613	12,03
2.4.3	Belanja Gedung dan Bangunan		82.383.373.581	38.830.537.977	87.107.096.999	123.147.951.707	63,23
2.4.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		121.883.745.970	152.308.918.874	171.059.130.387	143.804.541.436	7,07
2.4.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		211.807.929	401.063.830	283.733.280	3.000.566.000	339,24
2.4.6	Belanja Aset Lainnya		-	-	798.793.000	698.907.000	(18,38)
2.5	Belanja Tidak Terduga		5.025.990.065	84.897.047.923	4.511.672.800	3.000.000.000	30,00
2.5.1	Belanja Tidak Terduga		5.025.990.065	84.897.047.923	4.511.672.800	3.000.000.000	346,96
2.6	Belanja Transfer		-	300.000.000	-	-	-
2.6.1	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-	-
2.6.2	Belanja Bantuan Keuangan		-	300.000.000	-	-	(100,00)

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2022

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan pemberlakuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp 60 Milyar disamping itu, lanjutan penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam sebesar Rp 400 Milyar melalui rekening belanja bantuan sosial sehingga total belanja tidak langsung sebesar Rp 1.050.796.412.188.

Tahun 2021 realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah, realisasi belanja modal Rp 320.284.928.589 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya, dan belanja modal lainnya. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 5.025.990.065 yang salah satu penggunaannya ialah untuk penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Realisasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp

1.218.513.125.022, realisasi belanja modal sebesar Rp 289.914.401.250, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 84.897.047.923 yang mana sekitar Rp 76 Milyar merupakan pengembalian dana stimulan perbaikan rumah korban bencana alam yang tidak tersalurkan kepada pemerintah pusat.

Tahun 2023 realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.263.765.807.569, belanja modal sebesar Rp 345.215.809.464 dengan proporsi terbesar yaitu belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 55,8% atau Rp 171.059.130.387, realisasi belanja tidak terduga Rp 4.511.672.800. Alokasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp 1.783.558.483.271 dengan rincian belanja operasi Rp 1.433.474.248.521, belanja modal Rp 347.084.234.75, belanja tidak terduga Rp 3 Milyar.

Pengeluaran Pembiayaan

Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan

Pemerintah Kota Palu selama 5 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 2.142 Rata-Rata Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pembiayaan (Rp)
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	-
3.1.1	Pengeluaran Pembiayaan Pihak Ketiga yang Bersifat Tanpa	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Pengeluaran Modal	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.000.000.000	-
3.1.3	Pengeluaran Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya yang Bersifat Pembiayaan Pemertanggung Jaminan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kota Palu, 2023

Tabel 2.142 di atas, Tahun 2020 Pemerintah Kota Palu memberikan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah sebesar Rp 2 Milyar. Penyertaan modal kembali diberikan kepada PT. BPD Sulawesi Tengah sebesar Rp 3 Milyar, PDAM Avo Rp 2 Milyar, Perusahaan Daerah sebesar Rp 3. Tahun 2024 dialokasikan penyertaan modal sebesar Rp 1 Milyar yang diperuntukkan pada PT. BPD Sulawesi Tengah.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian

dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Palu selama 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 2.143 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	620.322.658.150	563.347.591.561	580.664.272.607	579.099.587.136	701.487.061.418
2	Total Pengeluaran	1.735.027.788.274	1.567.638.464.028	1.593.624.574.193	1.621.493.289.833	1.784.558.483.271
a	Total Realisasi Belanja	1.733.027.788.274	1.567.638.464.028	1.593.624.574.193	1.613.493.289.833	1.783.558.483.271
b	Total Realisasi Pengeluaran Daerah	2.000.000.000	-	-	5.000.000.000	1.000.000.000
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran	35,75%	35,94%	36,44%	35,71%	39,31%

Sumber: Diolah, 2023

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren meningkat. Pada tahun 2020, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 35,75% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya terus naik hingga pada nilai 39,31%

pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang turut memperhatikan pemenuhan kebutuhan aparatur bersama dengan upaya membiayai program pembangunan daerah.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kota Palu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kota Palu adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan

pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Penggunaan SiLPA relatif mengalami penurunan. Penurunan terhadap Penggunaan SiLPA ini tentu dipengaruhi oleh SiLPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi fiskal distress (tekanan anggaran). Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Palu melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMD sebagaimana lazimnya Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 2.144 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kota Palu Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.304.323.870.760	1.351.890.902.470	1.384.203.147.873	1.469.308.277.708	1.631.718.333.334
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.733.027.788.274	1.587.838.464.028	1.393.824.074.193	1.613.493.289.833	1.783.558.483.271
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	-	-	8.000.000.000	1.000.000.000
a	Surplus (Defisit) Riil	(428.704.117.514)	(915.747.561.558)	(909.620.926.321)	(152.185.012.125)	(151.841.949.917)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	Penggunaan SiLPA	1.033.071.093.830	602.563.096.948	383.034.982.213	173.615.355.692	132.841.947.917
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
b	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	1.033.071.093.830	602.563.096.948	383.034.982.213	173.615.355.692	132.841.947.917
a + b	SILPA	604.366.977.316	366.615.535.390	173.615.555.892	21.430.343.563	-

Sumber: Ditolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2020 hingga 2024. Meskipun terjadi defisit riil selama 5 tahun terakhir, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya.

2.2.2.3 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kemampuan fiskal dan arah kebijakan keuangan jangka menengah hingga jangka panjang. Bagi Kota Palu, neraca daerah menjadi dasar penting dalam menyusun rencana pembangunan daerah secara lebih

terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas dana memungkinkan perencanaan daerah untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, termasuk kapasitas pendanaan dan ruang fiskal yang tersedia.

Neraca daerah berperan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan terkait investasi dan pembiayaan pemerintah daerah. Informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi alokasi sumber daya, memaksimalkan penggunaan aset yang tersedia, serta mengelola kewajiban dengan lebih cermat. Kondisi neraca yang baik

mencerminkan adanya keseimbangan antara aset dan kewajiban, sekaligus menunjukkan kemampuan fiskal daerah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan neraca daerah sangat penting untuk menjadikannya alat yang efektif dalam mendukung tata kelola keuangan yang berkelanjutan dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Berikut gambaran Neraca Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024.

Tabel 2.145 Neraca Daerah Kota Palu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
1. Aset Lancar	684.049.582.112	402.273.751.747	272.172.367.253	158.503.327.873	176.103.543.562
2. Investasi Jangka Panjang	134.087.327.810	133.636.385.771	130.435.679.126	130.443.443.167	155.872.681.602
3. Aset Tetap	2.119.140.803.335	2.245.091.687.630	2.449.588.670.907	2.236.987.762.976	2.332.468.610.540
4. Aset Lainnya	211.587.135.936	210.568.685.345	221.527.904.302	225.241.353.007	241.175.701.639
JUMLAH ASET	3.149.164.649.242	3.051.590.510.493	3.074.324.621.588	2.854.475.887.022	2.905.420.537.342
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	43.378.745.494	52.418.468.089	97.569.017.953	80.981.483.686	111.688.524.931
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	43.378.745.494	52.418.468.089	97.569.017.953	80.981.483.686	111.688.524.931
EKUITAS DANA	3.103.785.903.748	2.999.472.042.402	2.976.455.603.636	2.773.494.403.335	2.793.732.012.410
JUMLAH EKUITAS					
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.149.164.649.242	3.051.590.510.493	3.074.324.621.588	2.854.475.887.022	2.905.420.537.342

Aset

Secara umum, total aset Kota Palu mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, sebelum kembali naik di tahun 2024. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp3,15 triliun, menurun menjadi Rp2,85 triliun pada 2023, dan kembali naik menjadi Rp2,91 triliun di 2024. Penurunan terbesar terlihat pada aset lancar, yang turun tajam dari Rp684 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp158 miliar di 2023, meskipun ada sedikit rebound ke Rp176 miliar pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan penurunan likuiditas jangka pendek pemerintah daerah. Sebaliknya, aset tetap menunjukkan tren yang relatif stabil dan tetap menjadi komponen terbesar dari total aset, mencapai Rp2,33 triliun di 2024, mencerminkan investasi yang besar pada infrastruktur atau barang milik daerah.

Kewajiban

Total kewajiban Pemerintah Kota Palu mengalami peningkatan signifikan dalam kurun

waktu lima tahun terakhir, dari Rp43,3 miliar di 2020 menjadi Rp111,7 miliar di 2024. Seluruh kewajiban ini merupakan kewajiban jangka pendek, karena tidak terdapat pencatatan kewajiban jangka panjang selama periode ini. Kenaikan ini dapat menunjukkan peningkatan beban utang jangka pendek atau peningkatan aktivitas belanja yang belum dilunasi. Rasio kewajiban terhadap total aset juga meningkat, yang perlu dicermati karena dapat berdampak pada kemampuan fiskal jangka pendek pemerintah daerah.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana mengalami penurunan dari Rp3,10 triliun pada 2020 menjadi Rp2,77 triliun pada 2023, namun mengalami sedikit pemulihan menjadi Rp2,79 triliun pada 2024. Penurunan ekuitas ini umumnya selaras dengan turunnya total aset dan meningkatnya kewajiban, yang menunjukkan adanya pelemahan posisi keuangan secara neto. Meskipun demikian, proporsi ekuitas terhadap total aset masih

sangat tinggi (sekitar 96% pada 2024), menunjukkan bahwa struktur modal daerah masih sangat bergantung pada dana sendiri, bukan pembiayaan utang.

Dalam konteks perencanaan, tren penurunan aset lancar selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan pentingnya strategi penguatan likuiditas daerah. Aset lancar yang rendah dapat berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai program-program prioritas yang membutuhkan fleksibilitas anggaran. Oleh karena itu, penguatan manajemen kas dan optimalisasi penerimaan daerah perlu menjadi bagian dari strategi perencanaan fiskal agar program pembangunan tidak terhambat karena keterbatasan likuiditas.

Selain itu, peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang signifikan perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan. Kewajiban tersebut mencerminkan beban utang yang harus segera diselesaikan dan dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif jika tidak dikelola dengan hati-hati. Perencanaan daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara belanja pembangunan dan kemampuan pembayaran utang dalam jangka pendek, serta mulai merancang strategi pengendalian belanja agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

Ekuitas dana yang masih mendominasi struktur neraca menunjukkan bahwa Kota Palu masih memiliki kekuatan fiskal yang cukup, namun tren penurunannya perlu diwaspadai. Perencanaan ke depan perlu diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset tetap dan aset lainnya secara produktif, misalnya melalui skema kerja sama pemanfaatan aset daerah atau inovasi pembiayaan pembangunan berbasis aset.

Dengan begitu, neraca daerah tidak hanya menjadi laporan keuangan statis, tetapi juga menjadi alat strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

2.2.3.1 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 2.153 dan 2.154 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif.

Untuk proyeksi tahun 2025-2030 menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pada setiap komponen APBD. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah disajikan dalam Tabel 2.146 sebagai berikut.

Tabel 2.146 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2025-2030

No	Uraian	Bare Line 2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Pendapatan	5.855.714.554,225	5.827.480.729,886	5.855.515.280,283	5.888.706.515,513	5.920.646.877,395	5.953.977.170,361	5.987.373.411,021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	484.080.406,039	632.390.505,699	686.101.257,427	732.127.545,271	783.313.875,840	837.514.079,126	890.180.180,824
1.1.1	Pajak Daerah	301.400.000.000	400.158.400.500	432.245.338.336	465.585.505.533	499.742.304.317	534.605.530.784	569.050.184.030
1.1.2	Retribusi Daerah	47.447.308,034	55.732.333,580	63.380.445,964	71.741.190,969	80.584.333,331	89.805.173,203	99.448.175,735
1.1.3	Hasil Pengalokasian Belanja Daerah yang Digunakan	3.600.000.000	4.000.000.000	4.300.000.000	4.600.000.000	4.900.000.000	5.200.000.000	5.500.000.000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	140.000.000.000	156.350.765,598	186.375.468,019	215.119.540,847	251.389.177,819	290.010.455,244	331.441.000.190
1.2	Pendapatan Transfer	1.136.514.113,627	1.189.916.868,397	1.242.002.111,855	1.293.418.207,370	1.345.551.056,103	1.400.203.124,890	1.457.416.680,746
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.081.543.584,000	1.097.947.354,858	1.117.384.300,640	1.139.400.505,185	1.163.405.256,024	1.189.327.210,150	1.217.133.838,845
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.751.027,627	127.859.304,108	32.517.811,029	55.827.802,820	82.145.819,770	95.145.208,560	100.013.016,035
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.721.418,495	5.244.325,000	4.813.181,330	5.100.940,919	5.419.897,528	5.699.956,593	5.974.465,529
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.864.000.000	205.900.000					
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.616.418,495	5.038.425,000	4.813.181,330	5.100.940,919	5.419.897,528	5.699.956,593	5.974.465,529
2	Belanja Daerah	4.733.218.492,271	4.627.581.186,770	4.532.815.180,343	4.438.708.815,413	4.355.888.317,380	4.283.947.170,281	4.212.373.111,011
2.1	Belanja Operasi	1.533.814.216,221	1.482.783.682,079	1.431.115.103,187	1.379.406.182,278	1.327.847.728,191	1.280.335.389,294	1.237.902.082,236
2.1.1	Belanja Pegawai	704.487.061,418	712.853.404,882	688.382.173,771	645.831.401,850	606.381.309,832	5.007.333.783,668	1.181.306.410.800
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	694.800.096,228	760.005.880,208	885.882.328,233	713.407.882,167	735.330.007,216	799.165.120,900	847.888.054,736
2.1.3	Belanja Hibah	84.000.850,774	34.515.502,245	32.905.590,431	37.761.698,349	39.753.876,833	41.803.444,548	44.230.880,787
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.082.500.000	3.114.002.800	3.220.328,707	3.498.305,202	3.820.460,990	3.842.239,342	4.014.704,936
2.2	Belanja Modal	347.094.234,730	333.448.336,301	312.367.308,888	289.078.833,930	264.313.940,369	236.278.107,463	205.844.378.600
2.2.1	Belanja Modal Tanah	8.000.000.000	7.438.242,121	6.043.257,073	5.371.470,130	4.197.000,556	3.777.212,315	3.197.720,342
2.2.2	Belanja Perbaikan dan Modal	33.464.288,613	39.433.171,934	61.353.418,870	39.538.776,401	34.749.181,847	48.968.237,284	48.033.883,468
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	123.187.361,707	109.007.232,819	107.687.502,048	117.207.800,042	123.180.373,824	130.290.160,160	135.738.138,861
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.804.241,930	69.330.445,300	104.253.282,387	140.385.947,143	138.522.248,243	174.878.815,333	191.710.142,000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.000.000.000	439.365,000	337.730,610	396.828,740	721.947,812	878.747,774	1.009.904,940
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	686.507,000	390.318,000	309.323,712	350.373,644	336.213,812	385.177,300	393.274,735
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.434.396,795	3.313.944,328	3.402.381,837	3.606.252,934	3.834.343,744	4.075.003,688
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.434.396,795	3.313.944,328	3.402.381,837	3.606.252,934	3.834.343,744	4.075.003,688
	SURPLUS/DEFISI	-1.877.503.937,946	-806.100.456,884	-677.300.898,060	-550.002.300,900	-435.241.441,985	-330.000.000,000	-235.000.000,000
3	Pembayaran	10.100.387,004	-	-	-	-	-	-
3.1	Pemeriksaan Pembiayaan	10.100.387,004	-	-	-	-	-	-
3.1.1	SILPA	10.100.387,004	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.1.3	Pengeluaran Modal	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	SILPA	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Palu, 2024

Penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2025 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai tahun dasar. Untuk menentukan proyeksi belanja tahun 2025, tidak dengan mengalikan anggaran belanja tahun 2024 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara menggunakan data proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD Kota Palu Tahun 2025.

Upaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah selain dari tranfer pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen yang dapat diupayakan secara optimal untuk mendongkrak pencapaian pendapatan daerah Kota Palu. Upaya menggali dan meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi menjadi bagian penting untuk diupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang sedang tumbuh yaitu sektor pariwisata berperan penting sebagai salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Palu yang diposisikan sebagai Kota Taman Bumi atau Palu Geopark City, mengharuskan pembangunan wisata berorientasi pada konsep tersebut. Pembangunan destinasi wisata diharapkan dapat menjadi trigger bagi pertumbuhan pendapatan yang signifikan melalui pungutan pajak hotel, pajak restoran atau rumah makan, serta pajak dan retribusi transportasi.

Pajak hotel dan restoran menjadi dua jenis pajak daerah yang setiap tahun memberikan kontribusi signifikan bagi PAD Kota Palu, meskipun secara persentase masih berada di bawah pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pada sektor transportasi, penerimaan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi parkir, retribusi terminal, dan retribusi jasa transportasi lainnya. Sayangnya, potensi sektor transportasi ini juga sering bocor karena masih maraknya parkir liar, dan pengelolaan yang belum

terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan peluang peningkatan PAD dari sektor transportasi menjadi belum optimal mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Palu perlu melakukan langkah strategis melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui pendataan ulang semua objek pajak hotel, rumah makan, area parkir, hingga terminal. Pendataan berbasis digital dengan integrasi aplikasi pembayaran pajak secara online diharapkan mampu meminimalisir kebocoran penerimaan pajak. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat, dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar. Pelibatan asosiasi pengusaha hotel dan restoran juga menjadi kunci penting dalam mendukung tertib administrasi dan pelaporan transaksi secara transparan.

Selain itu, diversifikasi sumber penerimaan pajak dan retribusi di sektor transportasi juga harus diupayakan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan retribusi jasa transportasi wisata seperti layanan shuttle bus menuju destinasi wisata, pengelolaan parkir digital di kawasan wisata, serta kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan lahan parkir terpadu. Langkah ini bukan hanya untuk menambah sumber pendapatan, tetapi juga mendukung ketertiban dan kenyamanan wisatawan.

Dalam kerangka inovasi fiskal Kota Palu pada tahun 2025 hingga 2030, transformasi digital akan menjadi tulang punggung utama. Penerapan sistem perpajakan daerah berbasis teknologi seperti aplikasi smart tax system, integrasi mesin POS (Point of Sales) pada hotel dan restoran dengan server pajak daerah untuk pemantauan transaksi secara real-time, serta pembayaran nontunai akan memperkuat transparansi penerimaan pajak. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak bagi hotel dan restoran yang berkomitmen pada standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, sektor pajak hotel, rumah makan, dan transportasi di Kota Palu diproyeksikan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar

terhadap PAD, dengan pertumbuhan rata-rata 15 hingga 20 persen per tahun. Optimalisasi penerimaan pajak ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata, penataan kawasan pesisir Teluk Palu, serta penyediaan transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, upaya ini akan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan Kota Palu yang tangguh, maju, dan berdaya saing di masa mendatang.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal.

Proyeksi APBD Tahun 2026–2030 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi acuan dalam menghitung kapasitas riil daerah, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Perhitungan kapasitas riil ini mencakup dua komponen utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer, serta sumber lain yang sah, ditambah penerimaan pembiayaan seperti pencairan dana cadangan dan estimasi awal SiLPA. Di sisi lain, pengeluaran daerah mencakup belanja daerah serta pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung tiga prioritas utama. Gambaran mengenai kapasitas riil keuangan Pemerintah Kota Palu dalam membiayai pembangunan tahun 2026–2030

tersaji dalam proyeksi kerangka pendanaan yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.147 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2026-2030

Tahun	2026	2028	2029	2030	2031	2032
Pendapatan (Rp)	1.007.883.76 9.000	1.009.613.30 9.000	1.009.796 9.000	1.009.698 9.000	1.009.698 9.000	1.009.698 9.000
Pembinaan Pembangunan (Rp)	10.000.000.000 0	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban Meningkat (Rp)	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0	10.000.000.000 0
Kapasitas Riil (Rp)	1.007.883.76 9.000	1.009.613.30 9.000	1.009.796 9.000	1.009.698 9.000	1.009.698 9.000	1.009.698 9.000

2.3 Permasalahan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Palu dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan metode Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan bawah ini.

2.3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Urusan

Berdasarkan gambaran umum serta permasalahan pembangunan Kota Palu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, terkait tata kelola pemerintahan nampaknya perlu dibenahi beberapa aspeknya, antara lain adalah Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (Smart government), Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (Smart Governance), penataan dan peningkatan kompetensi ASN dan akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. berikut merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Palu :

Pendidikan dan Kebudayaan

- Peningkatan SDM Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Belum terpenuhinya standar SPM Pendidikan;
- Peningkatan kualitas SDM Tenaga pendidik satuan pendidikan Non Formal;
- Terbatasnya Anggaran untuk mendukung operasional sekolah negeri dan sekolah swasta sesuai kewenangan;
- Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar operasional pendidikan;

- Belum optimalnya peningkatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah sesuai kewenangan;
- Pengelolaan komunitas budaya belum optimal;
- Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya.

Kesehatan

- Belum optimalnya jaminan kesehatan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Palu dalam pelayanan kesehatan;
- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, kematian ibu dan anak serta stunting;
- Kasus penyebaran penyakit menular di Kota Palu masih tinggi;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih adanya bangunan yang belum memiliki Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) atau bangunan yang tidak sesuai dengan PBG. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan;
- Masih terjadinya genangan di beberapa titik di kota Palu karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal;
- Penyediaan layanan air bersih yang belum maksimal;

Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
- Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni;
- Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi;
- Meningkatnya potensi bencana/bahaya kebakaran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta aktifitas pada kawasan permukiman dan perdagangan;

- Masih terdapat kawasan yang belum sesuai dengan standar kualitas lingkungan pemukiman terutama pada kawasan sempadan pinggir sungai, dan kawasan-kawasan yang kepemilikan lahannya terbelengkalai. Sehingga diperlukan koordinasi intens untuk bersama meningkatkan kualitas permukiman di kawasan tersebut.

Sosial

- Perlunya update pendataan masyarakat berpenghasilan rendah secara berkala melalui sistem yang terintegrasi serta update pendataan masyarakat miskin, agar bantuan sosial tepat sasaran;
- Masih ditemukannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bukan penduduk Kota Palu;
- Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya program penanganan PMKS;
- Penyalahgunaan narkoba;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan sosial.
- Dukungan fasilitas terhadap program Sekolah Rakyat masih terbatas.

Penanaman Modal

- Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi kota Palu yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Palu;
- Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK, yang terintegrasi;
- Belum Optimalnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Kota Palu.

Kepemudaan dan Olahraga

- Belum Optimalnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang berstandar Nasional dan Internasional.

Perpustakaan dan Kearsipan

- Belum optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat;
- Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan.

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM dalam segi keterampilan usaha, kualitas produk, jaminan kesehatan dan keamanan produk, pemasaran serta lokasi usaha;
- Diperlukan peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional;
- Belum optimalnya pembinaan Koperasi yang sehat dan mandiri dalam mendukung terwujudnya Koperasi Merah Putih.

Lingkungan Hidup

- Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau;
- Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan;
- Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
- Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, serta tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- Menurunnya kualitas air bersih PDAM;
- Aktivitas pertambangan di wilayah Kota Palu yang merusak lingkungan.

Pariwisata

- Kurangnya Objek Wisata Kota Palu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata;
- Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
- Intensitas event budaya yang diselenggarakan belum sesuai dengan

standar dan pegelarangnya masih bersifat lokal;

- Sinergi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Komunitas Belum Optimal;
- Infrastruktur dan sarana penunjang pariwisata masih terbatas;

Kebencanaan

- Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana mitigasi bencana yang tersedia;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana;
- Belum optimalnya penyiapan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- Terbatasnya sumberdaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pasca bencana.

Perindustrian dan Perdagangan

- Belum optimalnya pembinaan terhadap IKM dalam segi keterampilan usaha, kualitas produk, jaminan kesehatan dan keamanan produk, pemasaran serta lokasi usaha;
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan sarana perdagangan;
- Belum optimalnya pengelolaan manajemen pasar yang berstandar sehat dan modern;
- Belum optimalnya dukungan sumberdaya terhadap distribusi perdagangan untuk tujuan ekspor.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih terjadi Kasus kekerasan Perempuan dan Anak;
- Banyaknya Kasus pernikahan anak dibawah umur;
- Rendahnya partisipasi perempuan dalam Sektor formal maupun non formal;
- Belum optimalnya upaya dalam peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya sarana dan prasarana perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya dukungan sumberdaya dalam upaya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

- Terbatasnya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Belum optimalnya pelaksanaan manajemen penanganan ketentraman dan ketertiban umum.

Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- erbatasnya sumberdaya dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur;
- Belum tersedianya dokumen perencanaan pembinaan karir sistem merit;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja aparatur.

Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

- Dinamisasi Alih fungsi lahan yang sangat tinggi;
- Rendahnya keterampilan serta sarana pendukung dalam menunjang nelayan, Petani dan Peternak;
- Terbatasnya sarana dan prasarana Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan;
- Belum optimalnya standarisasi produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan untuk pemasaran secara global.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kurangnya pengawasan administrasi migrasi penduduk;
- Belum terintegrasinya database kependudukan;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Perhubungan

- Belum optimalnya manajemen dan operasional moda transportasi di Kota Palu;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan transportasi;
- Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang;
- Beberapa ruas jalan yang belum terjangkau PJU.
- 5. Belum optimalnya dukungan sumberdaya dalam menunjang pelayanan transportasi.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Belum tersedianya dokumen perencanaan peta jalan kependudukan;

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB mandiri;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana terhadap pelayanan KB.

Komunikasi dan Informatika, Persandian serta statistik

- Belum optimalnya pencapaian Smart City Kota Palu;
- Kurangnya Sumberdaya Manusia dibidang persandian dan statistik;
- Kurangnya keamanan informasi, kesenjangan digital dan disinformasi;
- Masih rendahnya pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Kota Palu

Permasalahan pembangunan Kota Palu secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai daerah terbuka, Kota Palu menghadapi Tekanan Ekonomi Global, Kemiskinan Alamiah dan Pengangguran Terbuka;
- 2) Kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
- 3) Pertumbuhan ekonomi belum inklusif;
- 4) Kualitas Sumberdaya Daya Manusia dan Daya Saing Daerah belum Optimal;
- 5) Reformasi Birokrasi (RB) dan Tata Kelola Pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai peta jalan dan prinsip-prinsip Good Governance, serta layanan administrasi pemerintahan terdigital;
- 6) Infrastruktur dasar dan digital belum memadai secara spasial;
- 7) Upaya Pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Risiko Bencana belum dilakukan secara kontinyu, tematik dan spasial dalam paradigma integratif dan melembaga;
- 8) Kerawanan bencana dan kemampuan mitigasi bencana;
- 9) Kesiapan untuk menjadi wilayah penunjang ekonomi dan penyangga IKN;
- 10) Kemampuan mengembangkan layanan jasa perkotaan

2.3.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kota Palu dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Palu tahun 2025-2029.

2.3.2.1 Penyelarasan Isu dan Permasalahan Dokumen KLHS RPJMD Kota Palu

Identifikasi Isu Strategis Lingkungan Hidup

Sintesa isu strategis lingkungan hidup didasari oleh analisis 6 muatan KLHS, indeks kualitas lingkungan hidup, dan penjangkauan isu partisipatif diperoleh Isu Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
- Pengelolaan sampah.
- Pengelolaan jasa lingkungan penyedia air dan tempat tinggal dan ruang hidup (sense of place).

Identifikasi Isu Strategis dari Capaian TPB

Evaluasi Capaian TPB/SDGs Kota Palu Secara keseluruhan Kota Palu memiliki sebanyak 222 indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 16 tujuan, kecuali tujuan 14 (ekosistem lautan yang menjadi kewenangan provinsi). Hasil analisis indikator TPB di Kota Palu terlihat pada tabel 2.140 dibawah ini.

Tabel 2.148 Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Palu

Tujuan	SS	SB	BB	N/A	BB	Jumlah Indikator
1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	18	3	0	1	0	22
2 Menghentikan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	8	1	0	1	0	11
3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	27	3	0	2	0	32
4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Keterampilan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	11	2	0	0	0	13
5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	12	2	0	0	0	14
6 Menjamin Ketahanan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	11	3	0	1	1	16
7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	0	0	0	2	2
8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Menciptakan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Perekonomian yang Layak untuk Semua	8	1	0	0	0	10
9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	6	2	2	3	0	13
10 Mengurangi Ketimpangan Intra- dan Antarwilayah	3	1	0	0	0	4

Tujuan	SS	SB	BB	N/A	BK	Jumlah Indikator
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	12	2	2	1	2	20
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	0	2	0	0	2	2
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	0	0	2
15. Melindungi, Memrestorasi dan Meningkatkan Pemertanian Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Pengrusakan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	1	2	0	1	2
16. Mengusung Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	10	2	1	2	0	21
17. Mengusung Sistem Pelaksanaan dan Inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan	11	1	2	1	0	15
Total	150	22	9	21	9	222
Persentase	67,57	14,86	4,05	9,46	4,05	100

Sumber: Data SDG Kota Palu Setelah Ditilik, 2020

Keterangan:

- SS = Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional
- SB = Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
- BB = Belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
- N/A = Tidak memiliki data
- BK = Bukan Kewenangan

Secara keseluruhan, terdapat 222 indikator yang tersebar di 16 tujuan SDGs. Mayoritas indikator berada pada status (SS) yakni indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sesuai peraturan presiden No. 59 Tahun 2017, mendominasi sebanyak 150 indikator (67,57%). Sebanyak 33 indikator (14,86%) berada dalam status (SB), yaitu indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional. Namun, terdapat 9 indikator (4,05%) yang masuk dalam status (BB) karena belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Selain itu, 21 indikator (9,46%) tidak memiliki data (NA), dan 9 indikator lainnya (4,05%) berada dalam kategori bukan kewenangan (BK) karena bukan kewenangan.

Penentuan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penentuan isu prioritas Pembangunan Berkelanjutan (PB) bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kota Palu yang dianggap paling strategis untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Wilayah Kota Palu memiliki berbagai potensi kerawanan bencana yang mencakup kerawanan

bencana gempa, kerawanan bencana tsunami, kerawanan bencana sedimen (longsor), kerawanan bencana banjir, kerawanan bencana likuefaksi (Kementerian ATR/BPN, 2018). Kondisi ini tidak terlepas dari karakter fisik alam yang dilewati oleh sesar aktif dan juga karakter batuan yang berupa batuan endapan yang mengandung pasir dengan ikatan yang lemah serta muka air tanah dangkal. Selain itu, karakter morfologi kawasan yang berupa perbukitan dengan lereng curam dan pendek memiliki potensi besar menyebabkan bencana banjir dan longsor (sedimen). Faktor pemicu isu banjir di sekitar bantaran sungai Palu adalah curah hujan yang tinggi baik di hilir (Kota Palu) maupun di hulu (Kabupaten Sigi), posisi geografis Kota Palu yang berada di wilayah hilir (Teluk Palu), serta keberadaan sungai Palu. Sungai Palu terdapat ditengah-tengah Kota membagi Kota Palu menjadi dua bagian dan bermuara tepat di perairan Teluk Palu. Sungai Palu berhulu di Kabupaten Sigi. Wilayah rendah Lembah Palu merupakan tempat bertemunya 50 sungai yang wilayah pengalirannya disebut DAS Palu, dengan sungai Palu sebagai sungai utama dan bermuara di Teluk Palu

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu diketahui terdapat sembilan jenis bahaya di Kota Palu, enam di antaranya dengan tingkat bahaya tinggi. Jenis bahaya gempa bumi dan likuefaksi serta kekeringan dengan luasan terbesar yaitu 38.786 ha, bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dengan luasan terkecil, yaitu 764 ha, tersaji berikut ini.

Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Pengangguran mengacu pada individu yang masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, meskipun aktif mencari pekerjaan. Pengangguran sering kali menjadi indikator sosial ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Palu. Pengangguran di Kota Palu disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, peralihan individu antar pekerjaan atau saat menunggu pekerjaan baru, dan perubahan siklus ekonomi yang mengakibatkan penurunan lapangan pekerjaan, serta dampak bencana alam yang memperburuk kondisi ekonomi.

Meskipun demikian, Kota Palu memiliki potensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja

melalui sektor pariwisata, konstruksi, serta UMKM. Upaya pemerintah dan swasta, seperti program pelatihan keterampilan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, menjadi langkah penting dalam menanggulangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan tingkat pengangguran dapat dikurangi secara signifikan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kota Palu menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dari segi kerusakan ekosistem maupun pencemaran. Secara geografis, Kota Palu berada di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, yang telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada sumber daya alam dan infrastruktur. Kerusakan lingkungan juga diperparah oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Selain kerusakan fisik, pencemaran lingkungan menjadi isu utama di Kota Palu. Limbah domestik, limbah industri, dan sampah plastik menjadi sumber pencemaran utama bagi sungai dan laut. Pencemaran udara dari aktivitas transportasi dan pembakaran terbuka juga memberikan kontribusi negatif terhadap kualitas udara kota. Masalah sanitasi yang belum optimal, seperti praktik pembuangan limbah cair rumah tangga secara langsung ke saluran air, memperburuk kualitas lingkungan.

Peningkatan usaha/kegiatan di Kota Palu namun tidak diikuti dengan kesadaran dan upaya pengelolaan lingkungan yang optimal oleh pelaku usaha, serta belum optimalnya pengawasan dan penataan lingkungan. Beberapa usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Kota Palu meliputi :

- Limbah cair dari Rumah Makan
- Kebisingan dari suara music di café
- Buangan limbah cucian (darah) pembedahan unggas
- Pembakaran limbah hasil pengolahan getah pinus
- Galian tambang batuan
- Pembakaran limbah B3 oleh Rumah sakit
- Timbulan sampah yang berasal dari rumah tangga dan non rumah tangga

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi lingkungan, penerapan teknologi pengelolaan limbah, edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Palu di antaranya adalah:

Pelestarian Sumber Daya Alam

- Melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan yang rusak untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.
- Mempertahankan eksistensi TAHURA (Taman Hutan Raya) Paneki-Poboya, wilayah TAHURA berbatasan langsung dengan WIUP pertambangan emas Poboya.

Pengelolaan Limbah

- Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk daur ulang dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Meningkatkan jumlah pengolahan sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
- Mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap industri maupun pengelolaan limbah tanggung jawab yang dibuang ke sungai. Berdasarkan laporan pemantauan kualitas air sungai Kota Palu 2021, Sungai Palu, Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, Sungai Sombealawe, Sungai Lembaga telah cemar sedang.

Perlindungan Lingkungan

- Menjaga ekosistem alam, seperti sungai dan hutan, untuk melindungi keberlanjutan ekosistem dan fungsi ekologisnya.
- Melakukan berbagai konservasi air dan tanah guna melindungi sumber daya tersebut.

Energi Terbarukan

Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan sehingga tidak bergantung pada energi fosil. Kota Palu memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari dan tenaga angin.

Pendidikan dan Keasadaran Masyarakat

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan.
- Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek keberlanjutan dan kampanye kesadaran lingkungan.

Kebijakan dan Regulasi

- Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan praktik-praktik keberlanjutan. Sebagai salah satu contoh, penegakan peraturan melalui Perwali Kota Palu No. 40 Tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam menyebabkan volume sampah plastik yang masuk ke TPA menurun. Penegakan perwali ini melibatkan pemerintah dengan pedagang, toko, dan swalayan.
- Mengembangkan kemitraan dengan akademisi, komunitas, dan LSM dalam proyek-proyek lingkungan yang dapat meningkatkan keberlanjutan Kota Palu.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi lingkungan yang rutin terhadap aktivitas pertambangan yang ada di Kota Palu.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap gas buang kendaraan bermotor.
- Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau (RTH).

Peningkatan SDM Inklusif

Kota Palu menghadapi tantangan besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang inklusif untuk memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan. SDM inklusif berarti melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin, dalam berbagai sektor pembangunan



Gambar 2.94 Profil Pendidikan dan Pengangguran Kota Palu Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pendidikan di Kota Palu belum merata yang ditunjukkan oleh penduduk Tidak Sekolah sebanyak 20.82 persen atau sebanyak 70,440 orang yang didominasi oleh balita dan putus sekolah. Sementara dari segi pekerjaan, masih terdapat sebanyak 11,147 orang yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak bekerja umumnya didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Upaya untuk meningkatkan SDM inklusif, Kota Palu dapat menerapkan strategi-strategi berikut:

- 1) Pendidikan Inklusif: Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat melalui pembangunan fasilitas ramah disabilitas, penyediaan beasiswa bagi kelompok rentan, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan kerja.
- 2) Kesempatan Kerja Setara: Mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang adil, melibatkan kelompok rentan dalam program pelatihan kerja, serta mendukung UMKM lokal sebagai salah satu pendorong inklusi ekonomi.
- 3) Pelayanan Kesehatan yang Merata: Menyediakan layanan kesehatan berkualitas dengan fokus pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
- 4) Pemberdayaan Perempuan: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan.
- 5) Penguatan Kapasitas Komunitas Lokal: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif, khususnya dari kelompok minoritas dan marjinal, untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi

Tatakelola Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam upaya Pemerintah Kota Palu untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas, yang semuanya bertujuan untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang responsif dan berdaya guna.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu 2025-2029, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik harus dipadukan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kota Palu tidak hanya mencapai target jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan global yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang

Capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Transparansi merupakan landasan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Kota Palu, pemerintahan yang transparan memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan, anggaran, serta capaian pemerintah. Akuntabilitas menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan pengelolaan anggaran yang tepat. Penyusunan RPJMD harus mencakup mekanisme yang memudahkan masyarakat mengakses data ini.

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien mencakup kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dengan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam KLHS RPJMD, analisis efektivitas pelayanan publik penting untuk memastikan bahwa target-target pembangunan bisa tercapai dengan sumber daya yang ada.

Konsep Palu as city for all butuh komitmen besar dalam implementasinya dan relatif belum bisa diukur implementasinya. Tata kelola menjadi kunci dasar dalam pengaturan multi dimensi termasuk menciptakan sense of place yang aman dan nyaman di Kota Palu.

Tantangan yang dihadapi adalah kemampuan untuk melaksanakan inisiatif data terbuka dan akses publik terhadap informasi, memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, memerangi korupsi dan mendorong perilaku etis dalam lembaga-lembaga pemerintahan, menumbuhkan kolaborasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah yang berbeda, merampingkan dan menyederhanakan peraturan untuk mengurangi birokrasi dan memudahkan kegiatan bisnis, memastikan penegakan hukum dan peraturan yang adil dan merata, dan mempromosikan literasi hukum dan

akses terhadap keadilan bagi semua warga negara

2.3.2.2 Isu Strategis Internasional

Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;

- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat, bumi menghadapi triple planet challenges yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Kenaikan suhu global telah menyebabkan panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah termasuk Indonesia. Bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Climate Ambition Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ambisi Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York pada Bulan September 2023 sebagai bagian dari pertemuan

Majelis Umum PBB ke-78 menyatakan bahwa "humanity has opened the gates of hell", kemanusiaan telah membuka gerbang menuju neraka. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi masalah yang sangat genting dan perlu menjadi perhatian serius semua negara.

Kebijakan prioritas dalam menurunkan emisi dan intensitas emisi GRK (Gas Rumah Kaca) hingga 2024 di Indonesia adalah penerapan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (RPJMN 2020-2024) yang diwujudkan melalui strategi:

- 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan, melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
- 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- 3) Pengelolaan Limbah melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- 4) Pengembangan Industri Hijau melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Efisiensi sumberdaya melalui Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
- 5) Rendah Karbon Pesisir dan Laut melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Kebijakan prioritas pasca 2024 adalah melanjutkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui strategi:

- 1) Peningkatan efisiensi energi.
- 2) Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang terus meningkat hingga hampir mencapai 70% di tahun 2045.
- 3) Peningkatan penggunaan biofuel sebagai alternatif dalam penggunaan BBM.
- 4) Peningkatan investasi teknologi hijau.
- 5) Pengurangan subsidi di bidang energi
- 6) Transisi ke kendaraan listrik dan berbahan bakar hidrogen.
- 7) Pelaksanaan restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi melalui penanaman kembali lahan hutan yang telah rusak.

- 8) Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan, primer, dan penerapan RTRW.
- 9) Peningkatan produktivitas pertanian terutama melalui peningkatan intensifikasi padi dan penambahan sawah irigasi.
- 10) Penanganan sampah dan limbah industri melalui pola manajemen limbah yang lebih terstruktur.

Strategi pelengkap untuk mewujudkan skenario intervensi penurunan emisi GRK hingga 2030 (Dit. LH Bappenas, 2023) dilakukan melalui:

- 1) Moratorium hutan dan reforestasi yang diproyeksikan mulai berjalan dan aktif sebelum tahun 2030, sehingga luas tutupan hutan dapat terjaga di 48,56% pada tahun 2030.
- 2) Menjaga luas mangrove dan melaksanakan replanting mangrove, termasuk pada lahan tambak yang menerapkan AMA (associated mangrove aquaculture) untuk meningkatkan produktivitasnya. Melaksanakan intensifikasi tambak untuk meningkatkan produktivitas menjadi 31,17 ton per hektar/tahun di tahun 2030.
- 3) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian menjadi 8,73 ton/ha/tahun di tahun 2030 melalui pertanian organik, pengaturan air irigasi, dan penggunaan benih unggul. Meningkatkan produktivitas CPO menjadi 5,22 ton/ha/tahun di tahun 2030 melalui intensifikasi menggunakan bibit sawit unggul.
- 4) Meningkatkan kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) diiringi dengan penerapan ekonomi sirkular sehingga mengurangi timbulan sampah, meningkatkan sampah terkelola, dan mengurangi jumlah sampah ke TPA yang selaras dengan skenario NZE.
- 5) Menyusun baseline, target dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di tingkat nasional yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga kenaikan suhu global sesuai Persetujuan Paris (Paris Agreement) telah dituangkan dalam Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) yaitu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

pada tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan visi dan formulasi jangka panjang melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050), termasuk rencana Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung rencana pencapaian NZE 2060 atau lebih cepat, sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) dan energi menjadi tulang punggung pengurangan emisi GRK Indonesia. Untuk memastikan kontribusi dari sektor FOLU, maka Indonesia telah menyusun Rencana Operasional FOLU Net-Sink 2030.

Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)

Intervensi kebijakan dalam mengurangi ketimpangan bisa dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Tujuannya adalah mempengaruhi direct market outcome atau distribusi pendapatan pre-redistribusi dengan target kelompok masyarakat bawah (atau miskin). Contoh kebijakan ini adalah pengembangan infrastruktur pertanian, dukungan UMKM, revitalisasi pasar-pasar tradisional, atau pemerataan kesempatan seperti beasiswa untuk orang miskin. Bisa juga kebijakan industri (industrial policy) untuk menyokong industri tertentu seperti insentif fiskal untuk industri padat karya dan lain-lain.
- 2) Tujuannya adalah juga mempengaruhi direct market outcome tetapi targetnya adalah kelompok masyarakat atas (kaya). Contoh kebijakan ini adalah kebijakan yang membatasi berkembangnya sektor-sektor padat modal misalnya melalui industrial zoning, atau disinsentif fiskal, atau negative list dari investasi di sector tertentu. Kebijakan perdagangan, regulasi perizinan yang sifatnya men- discourage sektor-sektor yang cenderung meningkatkan ketimpangan kelompok kaya juga masuk dalam kategori ini.
- 3) Tujuannya adalah untuk melakukan redistribusi dari pendapatan. Kelompok intervensi ini memungut pajak kepada kelompok atas untuk didistribusikan kepada kelompok miskin misalnya kebijakan pajak (langsung) pendapatan progresif. Pajak tidak langsung untuk barang-barang mewah juga bisa masuk ke dalam kategori

ini, demikian pula pajak kekayaan atau pajak warisan.

- 4) Tujuannya juga adalah untuk melakukan redistribusi pendapatan tapi berupa transfer atau subsidi kepada masyarakat bawah. Beberapa kebijakan seperti perlindungan sosial atau jaminan sosial, masuk dalam kategori ini.

Setidaknya ada tiga unsur penting yang harus dipenuhi dalam berbagai kebijakan pencapaian target pengurangan kemiskinan termasuk tingkat kemiskinan ekstrim: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan broad-based, kedua investasi di pembangunan manusia, dan ketiga memberikan perlindungan kepada orang miskin agar mereka tidak rentan terhadap berbagai resiko. Selain ketiga hal tersebut, dalam konteks tantangan mil terakhir (last mile) yang cukup umum dihadapi dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, perhatian perlu difokuskan pada kelompok tertinggal atau yang termarginalisasi (the left behind).

Tren Teknologi baru (AI dan Industri 5.0, Digitalization dan Future of Work)

Tantangan terhadap pencapaian SDGs di tahun 2030 juga akan sangat terkait dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang dan juga ke depan. Industry 5.0 merupakan jawaban atas kebutuhan untuk terus menjalankan mesin pertumbuhan dan kesejahteraan. Melalui transisi digital dan pertumbuhan hijau, pendekatan Industry 5.0 mendorong visi industri untuk lebih produktif dan efisien, mendorong peran dan kontribusi pada masyarakat, menempatkan pekerja sebagai pusat dari proses produksi dan menggunakan teknologi baru, serta memperhatikan limit produksi dari planet. Industry 5.0 merupakan pelengkap dari konsep Industry 4.0, dengan menempatkan riset dan inovasi untuk transisi menuju industri yang berkelanjutan, human centric dan resilient. Perkembangan teknologi ke arah digitalisasi dan juga Artificial Intelligence (AI) juga akan merubah pola konstelasi pekerjaan di masa yang akan datang. Akan ada beberapa pekerjaan yang hilang digantikan dengan teknologi. Di sisi lain akan berkembang jenis-jenis pekerjaan baru dari berkembangnya kesempatan kerja pada sektor-sektor yang baru berkembang. Dunia kerja akan berubah, dan krisis pandemi mempercepat tren perubahan tersebut, sehingga kita perlu mengevaluasi kembali banyak aspek pekerjaan.

Konflik Regional: Sengketa Wilayah di Laut China Selatan

Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di Kawasan tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah; Brunei Darussalam, Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi sejak Maret 2016 Indonesia mulai terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakuinya zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia oleh Cina dan berkembang ke arah konflik terhadap kepulauan Natuna Utara. Cina menganggap wilayah kepulauan Natuna utara bukan wilayah Indonesia dan oleh karena itu menganggap setiap upaya petugas keamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan Cina tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya Indonesia menganggap setiap upaya nelayan dan kapal penangkap ikan Cina memasuki wilayah kepulauan Natuna adalah pelanggaran batas wilayah dan oleh karenanya harus diproses secara hukum Indonesia.

Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan adalah menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pada era Presiden Joko Widodo, strategi Indonesia terhadap persengketaan Laut Cina Selatan tetap menekankan pada pendekatan aktor diplomasi aktif yang mencari penyelesaian damai untuk menghindari persengketaan yang lebih luas. Hal ini demi melindungi kepentingan-kepentingannya di sekitar Kepulauan Natuna. Tidak hanya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga integritas hukum laut Internasional yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Secara ekonomi Laut Cina Selatan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian regional dan dunia. Sepertiga dari perdagangan maritim dunia melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya dengan nilai US \$ 3,37 Triliun. Bagi Cina peran laut ini sangat penting karena sekitar 80% impor energi Cina melewati wilayah laut ini. Selain itu 39,5 persen dari total perdagangan Tiongkok melewati Laut Cina selatan (UNCTAD, 2018). Selain sebagai jalur pelayaran yang sangat strategis dan penting, potensi sumber daya alam di wilayah Laut Cina Selatan juga sangat besar. Selain potensi ikan laut yang sangat besar, wilayah ini juga teridentifikasi memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Kementerian Sumber Daya Geologi dan Pertambangan

Republik Rakyat Cina memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan berpotensi mengandung 17,7 miliar ton minyak mentah. Terkait perselisihan wilayah ini, Pemerintah Indonesia secara aktif, baik melalui jalur diplomasi maupun keamanan, berusaha mempertahankan aplikasi zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Hal ini dipertegas dengan kunjungan kepulauan Natuna oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan kapal perang untuk menunjukkan otoritas Indonesia. Beliau memimpin delegasi tingkat tinggi, termasuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menteri negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan "pesan yang jelas" bahwa Indonesia "sangat serius dalam upayanya untuk melindungi kedaulatannya".

Terkait dengan keseriusan Pemerintah Indonesia melindungi kedaulatannya, saat ini Indonesia mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal patroli, dan untuk memperkuat pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut. Sejak awal tahun 2020 disiagakan 600 pasukan marinir dan delapan kapal perang angkatan laut dari TNI AL termasuk fregat kelas Ahmad Yani, korvet kelas Bung Tomo, dan korvet ASW kelas Kapitan Pattimura dikirim ke daerah tersebut dengan dukungan TNI AL. Naval Aviation CN-235 MPA, TNI AU juga mengirimkan empat buah F-16 dan satu Boeing 737-2x9 Surveillance, serta memasang pesawat BAE Hawk. Perkembangan kondisi di wilayah laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kedepan. Hal ini karena sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Selain itu Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, dan bahkan juga terlibat konflik teritori dengan Cina di wilayah kepulauan Natuna bagian utara. Oleh karena itu perkembangan kondisi di wilayah tersebut perlu dicermati dengan serius karena terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan juga terkait secara langsung dari sisi pertahanan keamanan karena keterlibatan langsung pemerintah Indonesia pada konflik teritori di wilayah kepulauan Natuna bagian utara.

Perang Dagang Antara China Dengan Amerika

Perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat di mulai sejak Maret 2018. Pada tahun

tersebut Amerika Serikat mulai menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk-produk dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa Cina melakukan "praktik perdagangan yang tidak adil". Amerika menuduh Cina melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke Cina. Sebagai akibat dari praktik perdagangan yang tidak adil bagi Amerika Serikat adalah meningkatnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.

Hubungan dagang antara AS dan negara Cina semakin menjadi perhatian internasional, perang dagang yang terjadi dari kedua belah pihak negara mengakibatkan perdagangan global ikut merasakan dampak sejak awal Tahun 2019 (Jiang et al., 2023). Kedua negara tersebut adalah negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia sehingga jika terjadi masalah di dalamnya maka negara lain di dunia akan ikut merasakan dampak yang cukup besar. Hal ini berawal dari kebijakan presiden Trump yang kesal melihat neraca perdagangannya selalu mengalami defisit, sehingga Trump mengambil langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangannya. Namun, kebijakan Trump sangat merugikan Cina dikarenakan beberapa produknya dikenakan tarif impor yang cukup besar seperti yang terjadi pada industri baja yang dinaikkan menjadi 25% (Wambrauw & Menufandu, 2022). Pada tahun 2018 sampai 2020 konstalasi politik internasional didominasi oleh pengaruh perang dagang yang dilakukan oleh dua negara besar di dunia yaitu Cina dan Amerika Serikat. Kasus perang dagang telah membuat beberapa negara di dunia khawatir terkait perdagangan internasional mereka dikarenakan kebijakan tarif yang kian memanas dari kedua belah negara (Jiang et al., 2023). Perang dagang dapat mempengaruhi system perdagangan internasional dikarenakan kedua negara tersebut memiliki volume ekonomi yang besar, yang sebelumnya telah berjalan kurang lebih 20 tahun di bawah naungan hokum World Trade Organization (WTO). Perang dagang AS-Cina dipicu oleh kebijakan era administrasi Donald Trump yang berinisiatif untuk meningkatkan tarif impor atas ribuan produk dari Cina pada bulan Maret 2018. Alasan kenaikan ini tidak lain karena Cina dituding telah melakukan pencurian dalam kekayaan intelektual dari AS dengan nilai yang sangat besar dan melakukan praktik perdagangan yang tidak fair (Aslam, 2019). Selain itu, kenaikan tarif impor atas produk Cina juga bertujuan untuk

melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan perusahaan Cina dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tindakan AS tersebut kemudian direspon oleh pemerintah Cina dengan melakukan retaliasi. Cina pada akhirnya merencanakan kenaikan tarif impor terhadap ratusan produk dari AS. Dalam fase inilah perang dagang kedua negara bermula yang meskipun dalam praktiknya implementasi kenaikan tarif impor mulai berlangsung pada bulan Juli 2018. Setidaknya tercatat sebanyak tiga ronde timeline perang dagang AS China yang berlangsung dari bulan Juli 2018 hingga September 2019 dengan persentase kenaikan tarif impor berkisar 10%-25% dan dengan nilai kenaikan tarif impor dari US\$34 miliar hingga US\$300 miliar (Bown, 2021). Dalam hal penyelesaian perang dagang, China telah mengajukan pengaduan ke WTO untuk meminta konsultasi namun tindakan tersebut tidak mendapatkan hasil apapun. AS juga kurang kooperatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui WTO karena kepentingan industri domestik. Perwakilan kedua negara juga telah bertemu lebih dari 10 kali dalam skema Talks tetapi negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu karena kedua pihak sulit menegosiasikan dan memoderasi kepentingan mereka masing-masing. Dalam merespon kebijakan AS, Cina merasa dirugikan oleh kebijakan Trump sehingga dalam rentang waktu yang cepat sebaiknya mengambil langkah responsif dan reaktif terhadap permasalahan tersebut, Cina mengambil tindakan yang sama yaitu dengan menaikkan tarif barang-barang ekspor AS, dengan konsep pembalasan atau Retaliasi (Fetzer & Schwarz, 2021).

Belajar dari pengalaman sejarah, ketegangan antar dua negara adidaya ini sangat perlu tetap diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis Indonesia di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa baik Amerika Serikat maupun Cina adalah dua partner dagang Indonesia yang selama ini cukup penting. Baik Ekspor dan Impor Indonesia dari kedua negara tersebut selama ini cukup besar, oleh karena itu apapun yang terjadi di kedua negara tersebut, khususnya secara ekonomi, akan berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia.

2.3.2.3 Isu Strategis Nasional

- 1) Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat

- 2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
- 3) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
- 4) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- 7) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2022 masih relatif tertinggal
- 8) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
- 9) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;
- 10) Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata diseluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
- 11) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
- 12) Teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
- 13) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestic sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas
- 14) Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial
- 15) Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
- 16) Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan
- 17) Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi
- 18) Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya
- 19) Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal
- 20) Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor public pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas

2.3.2.4 Isu Strategis Regional Sulawesi

Isu Strategi Regional Sulawesi merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Menuju Indonesia Emas Periode 2025-2045 meliputi:

- 1) Kontribusi Ekonomi Wilayah Sulawesi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih rendah mencapai 7,11 persen;
- 2) (2) Sulawesi masih diperhadapkan pada isu Pembangunan Sosial terutama Sumberdaya Manusia terkait relatif rendahnya Usia Harapan Hidup, Stunting masih tinggi utamanya di Sulawesi Darat, masih adanya schistosomiasis (infeksi cacing parasit) di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tinggi, serta, Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja formal masih rendah;
- 3) (3) Kondisi Infrastruktur di Wilayah Sulawesi, baik Infrastruktur Dasar maupun Konektivitas, masih belum optimal;
- 4) (4) Produksi Tenaga Listrik masih didominasi oleh Energi Fosil maupun bauran, Pembangkit Listrik Terbarukan di Sulawesi menjadi satu dari beberapa yang terbesar secara nasional;
- 5) (5) Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Sulawesi saat ini masih belum optimal;
- 6) (6) Penegakan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Sulawesi, khusus pada Kawasan Perbatasan Laut masih kurang optimal;
- 7) (7) Ketimpangan Gender, Perkawinan Anak, dan Pembangunan Kebudayaan masih menjadi isu dalam pembangunan Ketahanan Sosial Budaya;
- 8) (8) Deforestasi, Ketersediaan Air, Ketahanan Pesisir, dan Bencana masih menjadi isu dalam Pembangunan Ketahanan Ekologi di Wilayah Sulawesi;
- 9) (9) Wilayah Sulawesi Memiliki Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Geologi antara lain Gempa Bumi Tsunami, Letusan Gunung Api, Kekeringan, Banjir, Longsor, dan Likuefaksi

2.3.2.5 Isu Strategis Sulawesi Tengah

- 1) Sulawesi Tengah sebagai penunjang super hub ekonomi nusantara dan pintu gerbang KTI.

- 2) Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata Masih Rendah.
- 3) Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Masih Perlu ditingkatkan.
- 4) Masih Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing.
- 5) Kondisi Infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun konektivitas masih belum optimal.
- 6) Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.
- 7) Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan dalam pembangunan sosial.
- 8) Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup.
- 9) Inovasi pembiayaan pembangunan dalam mendukung kesinambungan pembangunan masih terbatas.

2.3.2.6 Isu Strategis Pembangunan Kota Palu

- 1) Kuantitas dan kualitas pelayanan dasar
- 2) Laju pertumbuhan ekonomi dan ekonomi inklusif
- 3) Kesenjangan antar wilayah
- 4) Keamanan dan ketertiban wilayah
- 5) Peningkatan produktivitas sektor unggulan
- 6) Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
- 7) Peningkatan literasi digital
- 8) Produktivitas dan kualitas serta daya saing SDM
- 9) Optimalisasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
- 10) Kerawanan bencana dan kesiapan masyarakat untuk mitigasi bencana
- 11) Potensi sebagai kota yang sarat pengetahuan ilmu kebumih dan kebencanaan
- 12) Nilai tambah sektor pariwisata
- 13) Produktivitas UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat belum optimal untuk mendukung capaian global city
- 14) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
- 15) Peningkatan konektivitas antar wilayah
- 16) Pengelolaan lingkungan hidup
- 17) Produktivitas KEK yang mendukung industri global
- 18) Posisi strategis secara geografis dekat dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur
- 19) Penguatan citra kota sebagai green city, resilient city, livable city, dan geopark city.

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)



Bab. 3

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi Kota Palu 2025-2030 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang (clarity of direction). Visi Kota Palu 2025-2030 merupakan

tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2025-2045.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka Visi Kota Palu Tahun 2025-2030 adalah:

”Terwujudnya
Kota Palu Mantap Berkelanjutan
yang **Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif**”

- Kota Palu**
Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- Mantap Berkelanjutan**
Pembangunan yang diarahkan untuk menjadi kota yang maju, aman, nyaman, dan tangguh yang dikelola secara profesional dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Akseleratif**
Pembangunan dilakukan dengan lebih cepat pada setiap sektor pembangunan kota.
- Inovatif**
Pembangunan diarahkan dengan menghadirkan inovasi pada setiap sektor, khususnya pada tata kelola pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Kolaboratif**
Pembangunan yang diarahkan dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemberian layanan bagi masyarakat.

Visi pembangunan Kota Palu Tahun 2025–2030 memberikan arah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kota yang mandiri, aman dan nyaman, serta tangguh yang dikelola secara profesional melalui pendekatan akseleratif. Visi ini dirumuskan tidak hanya sebagai pernyataan tujuan jangka

menengah, tapi juga sebagai pijakan dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi daerah, serta mendorong penguatan pondasi transformasi menuju visi jangka panjang Kota Palu tahun 2045.

Visi Pembangunan Kota Palu
RPJPD Kota Palu 2025-2045

**Palu sebagai Global City
yang Tangguh, Maju,
dan Berkelanjutan**

Visi pembangunan Kota Palu tahun 2025-2030 sejalan dengan visi Kota Palu tahun 2045 sebagai Global City yang Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan yang tertuang dalam RPJPD Kota

Visi Pembangunan Kota Palu
RPJMD Kota Palu 2025-2045

**Terwujudnya Kota Palu Mantap
Berkelanjutan yang Akseleratif,
Inovatif, dan Kolaboratif**

Palu 2025-2045. Visi besar Kota Palu 2045 mengamanatkan sasaran visi pembangunan yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Dalam kerangka RPJPD Kota Palu Tahun 2025–2045, periode RPJMD Tahun 2025–2030 ditempatkan sebagai tahap Penguatan Fondasi Transformasi. Untuk memastikan penguatan tersebut berlangsung secara lebih cepat, efektif, dan terarah, pendekatan akselerasi dipilih dalam visi dan misi kepala daerah. Pendekatan ini menjadi penting mengingat tantangan pasca bencana dan pandemi yang tidak memungkinkan pembangunan dilakukan secara linier atau bertahap semata, sehingga diperlukan lompatan strategis di berbagai sektor. Pilihan ini juga didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya (2021–2025), dimana berbagai inisiatif pembangunan telah dilakukan namun belum sepenuhnya memberikan dampak optimal. Oleh karena itu, dalam RPJMD Kota Palu 2025–2030, kepala daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, mendorong reformasi birokrasi, serta melakukan terobosan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan layanan dasar secara terukur dan berorientasi hasil, guna memperkuat fondasi transformasi menuju Kota Palu yang lebih tangguh, maju, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan visi tersebut, maka ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran-sasaran ini menjadi landasan utama dalam penyusunan misi, tujuan, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan dijalankan selama tahun 2025–2030.

Tabel 3.1 Sasaran Visi Pembangunan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2030

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi RPJMD Kota Palu 2025-2030	Target Indikator Sasaran Visi RPJMD 2025-2030	
		Baseline 2025	Target 2030
Penguatan Fondasi Transformasi	PDRB per kapita (Rp/jam)	35.000.000,00	37.000.000,00
	Indeks Ekonomi Baru Inklusif (indeks)	10,00	12,00
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,90-7,30	6,12
Kemudahan Minuman dan Ketersediaan Berkurang	Time to Service (%)	2,04	5,00
	Basic Gini (indeks)	0,100-0,100	0,100
	Kontribusi PDRB Kota (%)	0,0	10,00
Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tingkat Partisipasi Ekonomi (%)	100,00	88,88
	Indeks Literasi Dasar (%)	99,91	100,00
	Indeks Daya Saing Dunia (gini)	0,00	0,75-0,80
Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Referensi Berbasis (%)	78,18	88,00-90,00
	Indeks Pembangunan Manusia (perse)	88,71	88,80-89,00
Penerapan Energi GRN menuju Net Zero Emission	Pemenuhan Intensi Energi GRN (Kota Tero CO ₂ e)	179.788,04	947.881,53
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	79,23	88,00-90,00
	Indeks Risiko Bencana (point)	11,50	10,00-12,00

Untuk mewujudkan Visi Kota Palu Tahun 2025–2030, dirumuskan empat Misi Pembangunan yang masing-masing merepresentasikan keterpaduan dari tiap pilar pembangunan, sekaligus menjaga kesinambungan arah transformasi menuju Visi Kota Palu 2045. Misi-misi tersebut disusun untuk menjabarkan langkah-langkah strategis yang operasional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah, serta memperkuat pencapaian sasaran visi yang telah ditetapkan. Setiap misi menjadi kerangka dasar dalam perumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, agar pembangunan Kota Palu berjalan selaras, terukur, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Adapun Misi Kota Palu tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Misi 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan secara akseleratif untuk menjadi ekonomi yang

mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan bisnis yang akseleratif dan produktif.

Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan lestari kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, kota harus ditata secara akseleratif dan komprehensif sehingga menjadi kota yang layak huni.

Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan sesuai dengan pilar sosial. SDM Kota Palu didorong secara akseleratif melalui transformasi sosial menjadi SDM yang untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi dan kondisi.

Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional

Tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh dengan memantapkan inovasi dan kolaborasi. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan inovasi pemerintah daerah.

Keempat misi tersebut saling memperkuat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Prinsip "Mantap Berkelanjutan" menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan lintas sektor dan lintas generasi, sedangkan "Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif" menjadi pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan yang cepat, cerdas, dan sinergis. Dengan demikian, misi-misi dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030

merupakan terjemahan nyata dari visi yang berakar kuat pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sesuai dengan SDGs) dan selaras dengan agenda pembangunan nasional (sesuai RPJMN 2025–2029) dan provinsi (sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2030).

Tabel 3.2 Keselarasan Misi Pembangunan Kota Palu 2025–2030 dengan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2030 dan Nasional 2025–2030

Misi RPJMD Kota Palu 2025–2030	Misi RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2025–2030	Misi RPJMN Nasional 2025–2030	Misi RPJMD Kota Palu 2025–2030
Misi 1 Memperkuat struktur pemerintahan sebagai pusat koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing	Misi 1 Memperkuat struktur pemerintahan sebagai pusat koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing	Misi 1 Memperkuat struktur pemerintahan sebagai pusat koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing	Misi 1 Memperkuat struktur pemerintahan sebagai pusat koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing
Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni
Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas	Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas	Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas	Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas
Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2025–2030 meliputi:



Palu Bergerak Bersama merupakan perwujudan dari visi Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif yang dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dijalankan dengan penerapan konsep pengembangan kota hijau, kota tangguh, kota layak huni, kota inklusif, kota cerdas, dan kota taman bumi.

1) Kota hijau (green city)

Kota hijau (green city) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

2) Kota tangguh (resilience city)

Kota tangguh (resilience city) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

3) Kota layak huni (livable city)

Kota layak huni (livable city) merupakan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya) (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 2017).

4) Kota cerdas (smart city)

Kota cerdas (smart city) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan

dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, smart city merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

5) Kota inklusif (inclusive city)

Kota inklusi (inclusive city) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015).

6) Kota taman bumi (geopark city)

Kota taman bumi (geopark city) merupakan bentuk penguatan identitas kota melalui pengelolaan kawasan berbasis geowisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif dan melibatkan aktif masyarakat (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia).

Konsep pembangunan Kota Palu 2025-2030 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah dianalisis sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

menengah. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Palu, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Palu hingga Tahun 2030. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu dapat mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Palu Tahun 2025-2045.

Misi 1 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing

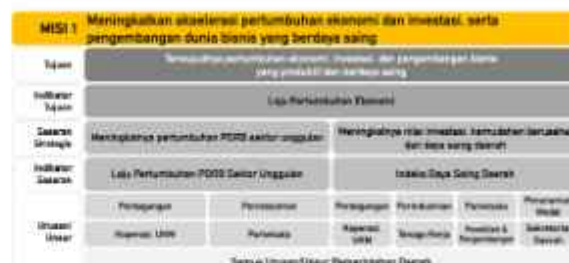
Misi pertama RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing sebagai landasan utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pendekatan akseleratif dalam misi ini ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi Kota Palu yang berdaya saing, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu, kerangka pikir Misi 1 dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang menggambarkan indikator kinerja yang ingin diraih hingga akhir tahun perencanaan pada tahun 2030.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Perencanaan Terintegrasi Misi 1

Tujuan Misi 1, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing, digambarkan melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE merupakan

indikator yang mencerminkan tingkat percepatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Dalam konteks tujuan pembangunan Kota Palu, LPE menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan dunia usaha yang berdaya saing.



Gambar 3.2 Kerangka Pikir Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni

Misi kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 menekankan pentingnya akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni sebagai landasan utama untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pendekatan akseleratif dalam misi ini ditujukan untuk mendorong pengembangan Kota Palu yang semakin layak huni dan semakin berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu, kerangka pikir Misi 2 dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang menggambarkan indikator kinerja yang ingin diraih hingga akhir tahun perencanaan pada tahun 2030.

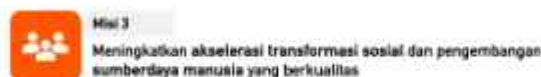
Tujuan Misi 2, pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni, digambarkan melalui Indeks Kota Layak Huni. Indeks Kota Layak Huni merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hunian suatu kota berdasarkan aspek lingkungan, infrastruktur, aksesibilitas, ketangguhan, ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup warganya. Dalam konteks pembangunan Kota Palu, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana upaya akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota telah menciptakan ruang hidup yang tertata, aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.3 Kerangka Pikir Perencanaan Terintegrasi pada Misi 2



Gambar 3.4 Kerangka Pikir Tujuan dan Sasaran Misi 2



Misi ketiga RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 menekankan pentingnya akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan akseleratif dalam misi ini ditujukan untuk mendorong transformasi sosial dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, yang menekankan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kemandirian sosial-ekonomi, serta penguatan karakter, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.



Gambar 3.5 Kerangka Pikir Perencanaan Terintegrasi pada Misi 3

Tujuan Misi 3, transformasi sosial dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia. Dalam konteks pembangunan Kota Palu, IPM menjadi alat ukur utama untuk menilai

keberhasilan transformasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 3.6 Kerangka Pikir Tujuan dan Sasaran Misi 3



Misi keempat RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah. Pendekatan inovatif dan kolaboratif dalam misi ini ditujukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palu menjadi lebih profesional dalam melayani masyarakat. Untuk itu, kerangka pikir Misi 4 dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang menggambarkan indikator kinerja yang ingin diraih hingga akhir tahun perencanaan pada tahun 2030.



Gambar 3.7 Kerangka Pikir Perencanaan Terintegrasi pada Misi 4

Tujuan Misi 4, tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional, digambarkan melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB merupakan indikator yang mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan Kota Palu, IRB menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana tata kelola

pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional.



Gambar 3.8 Kerangka Pikir Tujuan dan Sasaran Misi 4

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (4 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2026-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2026	2027	2028	2029	2030		
Visi: Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif										
 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing	T.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-5,12	5,00-5,30	5,25-6,01	6,01-6,34	6,34-6,63		
			S.1.1 Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50		
			S.1.2 Meningkatkan nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah	4,50-4,65	4,65-4,75	4,75-4,85	4,85-4,95			
 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	T.2	Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Indeks Kota Layak Huni (%)	60,00	65,00-70,00	70,00-75,00	75,00-80,00	80,00-85,00		
			S.2.1 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup kota	79,69	79,00-77,00	77,00-75,00	75,00-73,00	73,00-71,00		
			S.2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penataan ruang kota	30,68	30,00-38,00	35,00-41,00	41,00-47,00	47,00-53,00		
			S.2.3 Meningkatkan ketanggungan daerah dan pengurangan risiko bencana	116,53	110,00-100,00	100,00-90,00	90,00-80,00	80,00-70,00		
			S.2.4 Meningkatkan ketenteraman, ketertuban, dan kewaspadaan daerah	75,35	75,00-77,30	77,30-79,60	79,60-81,90	81,90-84,20		
 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas	T.3	Terwujudnya transformasi sosial dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas	Indeks Kepuasan Nasional (Persen)	84,12	84,00-84,80	84,80-85,60	85,60-86,40	86,40-87,20		
			S.3.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan daerah	0,60	0,70-0,71	0,71-0,72	0,72-0,73	0,73-0,74		
			S.3.2 Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial	6,35	7,00-7,10	7,10-7,20	7,20-7,30	7,30-7,40		
			S.3.3 Meningkatkan pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	85,90	84,00-85,90	85,90-87,00	87,00-88,00	88,00-89,00		
 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	T.4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (%)	71,18	73,00-78,00	78,00-82,00	82,00-86,00	86,00-90,00		
			S.4.1 Memantapkan mutu dan sistem manajemen ASN	0,85	0,85-0,86	0,86-0,87	0,87-0,88	0,88-0,89		
			S.4.2 Memantapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	10,28	10,00-10,00	10,00-10,00	10,00-10,00	10,00-10,00		
			S.4.3 Meningkatkan kapasitas dan efektivitas inovasi daerah	35,91	40,00-45,00	45,00-50,00	50,00-55,00	55,00-60,00		
			S.4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	3,54	3,60-4,00	4,00-4,40	4,40-4,80	4,80-5,20		

*Sumber: Uraian berdasarkan PDRB

- Indeks Pertumbuhan
- Investasi
- Pendanaan Riset dan Pengembangan (R&D) dan Transfer Teknologi
- Pendanaan Riset dan Pengembangan
- Pendanaan Riset dan Pengembangan
- Pendanaan Riset dan Pengembangan

- Real Estate
- Jasa Perumahan
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Layanan Sosial
- Jasa Lainnya

Tujuan pembangunan PALU BERGERAK BERSAMA dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 disusun dengan prinsip harmonisasi dan integrasi terhadap kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan tujuan ini memperhatikan secara cermat dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti RPJMN 2025–2029 serta visi, misi, dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Di tingkat regional, RPJMD Kota Palu juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta 9 Program Prioritas BERANI yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Tabel 3.4 Keterkaitan Tujuan Pembangunan Kota Palu Tahun 2025-2030 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Misi PALU BERGERAK BERSAMA RPJMD Kota Palu 2025-2030	Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia RPJMN 2024-2029	Nawa Cita Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2024-2030
Mini 1 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pembangunan dunia bisnis yang berdaya saing	Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. BERANI Makmur
	Cita 5 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur	4. BERANI Lancar 6. BERANI Makmur 8. BERANI Harmoni
	Cita 6 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	8. BERANI Harmoni
Mini 2 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan pariwisata kota yang layak huni	Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur	4. BERANI Lancar 6. BERANI Makmur 8. BERANI Harmoni
	Cita 4 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemakmuran	1. BERANI Menyala
	Cita 5 Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6. BERANI Lancar 6. BERANI Makmur 8. BERANI Harmoni
Mini 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas	Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. BERANI Cerdas
	Cita 3 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keasetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. BERANI Cerdas 2. BERANI Sehat
	Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemakmuran	3. BERANI Sejahtera 8. BERANI Harmoni
	Cita 5 Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. BERANI Berkah
Mini 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	3. BERANI Berintegritas
	Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat transparansi dan pemberantasan korupsi dan narkoba	3. BERANI Harmoni 8. BERANI Berintegritas

Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antara sasaran pembangunan daerah dengan tujuan strategis nasional dan regional, serta untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kota Palu akan berada dalam jalur yang searah dengan skala prioritas pembangunan nasional,

seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis hilirisasi, transformasi digital, serta pembangunan berketahanan iklim.

Selain itu, pendekatan harmonisasi juga bertujuan memperkuat efektivitas kebijakan lintas wilayah; mendorong pembagian peran yang sinergis antar level pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional dan provinsi untuk mendukung pembangunan kota. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggariskan pentingnya keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagai satu sistem yang terkoordinasi.

Pemerintah Kota Palu optimis bahwa tujuan pembangunan yang dirancang dalam RPJMD ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tapi juga turut serta dalam pencapaian agenda-agenda besar pembangunan nasional dan regional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam upaya menyelesaikan permasalahan daerah, menghadapi lingkungan dinamis, dan memaksimalkan potensi daerah, untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, namun juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi pembangunan daerah Kota Palu tahun 2025-2030 dibingkai dalam tiga pilar utama, yakni Penahapan Pembangunan Daerah, Fokus Wilayah, dan Program Prioritas Pembangunan, sebagai dasar bagi penyusunan arah kebijakan dan penganggaran yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penahapan Pembangunan Daerah

Penahapan Pembangunan Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan Kota Palu, memperkuat daya saing daerah, dan mempersiapkan transformasi menuju Kota Palu Mantap Berkelanjutan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan diarahkan secara bertahap, terstruktur, dan sistematis dalam lima tahapan strategis yang saling berkelanjutan. Setiap tahap mencerminkan prioritas pembangunan sesuai tantangan aktual, kapasitas fiskal, serta kebutuhan masyarakat dan daerah.



Gambar 3.9 Penahapan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025-2030

Penahapan ini merupakan instrumen operasionalisasi visi pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta RPJPD Kota Palu 2025–2045.

Tahap I Tahun 2026 Reformasi Birokrasi yang Mantap melalui Tata Kelola Pemerintahan Inovatif dan Kolaboratif

Tahapan ini menekankan konsolidasi kelembagaan dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penguatan kapasitas ASN, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta inovasi pelayanan publik menjadi agenda utama. Kebijakan fiskal diarahkan untuk belanja reformasi birokrasi dan teknologi informasi, termasuk penguatan sistem satu data, satu peta, peningkatan interoperabilitas layanan publik, serta pembiayaan inovasi dan kolaborasi daerah.

Tahap II Tahun 2027 Transformasi Sosial melalui Pengembangan SDM yang Berkualitas dan Berkarakter

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, serta penguatan karakter generasi muda melalui pendidikan nilai, budaya, dan kewirausahaan. Penanganan stunting, kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah menjadi prioritas. Dalam penganggaran, APBD akan difokuskan pada belanja sosial dan peningkatan prasarana, sarana, serta digitalisasi pendidikan serta kesehatan, termasuk integrasi

program lintas sektor dalam rangka perlindungan sosial adaptif.

Tahap III Tahun 2028 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan untuk Kemandirian Daerah

Fokus utama tahap ini adalah meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sektor unggulan seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan perdagangan berbasis digital. Penataan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti pasar, kawasan industri kecil, dan peningkatan akses, menjadi prioritas pembiayaan. Pada tahap ini, kebijakan penganggaran diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif, memperluas program padat karya, dan memperkuat kemitraan guna mempercepat investasi.

Tahap IV Tahun 2029 Eskalasi Kualitas Lingkungan Kota sebagai Kota Layak Huni dan Kota Berketahanan

Kota Palu sebagai kota yang rentan terhadap bencana membutuhkan investasi serius pada aspek mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan hidup. Program prioritas meliputi penataan kawasan rawan bencana, pemulihan ekosistem kawasan pesisir maupun daerah aliran sungai, penguatan sistem drainase, serta peningkatan kualitas udara, air, dan pengelolaan sampah. Alokasi anggaran difokuskan pada infrastruktur hijau, penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan, serta

dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan.

Tahap V Tahun 2030 Stabilisasi Pengembangan Kota Berkelanjutan untuk Kota Layak Huni dan Berdaya Saing

Sebagai penutup siklus RPJMD, pembangunan difokuskan pada konsolidasi seluruh capaian dan penataan ulang agenda strategis menuju RPJMD selanjutnya. Fokus pembangunan terletak pada stabilisasi indikator kesejahteraan, penguatan daya saing kota berbasis inovasi dan kualitas hidup, serta finalisasi agenda pengembangan kota cerdas (smart city). Penganggaran diarahkan pada penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, keberlanjutan program prioritas, serta alokasi stimulus pada sektor-sektor unggulan yang terbukti mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pola penahapan ini, Kota Palu diharapkan tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga membentuk fondasi sosial dan tata kelola yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini memastikan kesinambungan pembangunan antartahun serta menjaga efisiensi fiskal melalui penganggaran berbasis kinerja dan prioritas.

Rangkaian tahapan ini kemudian diterjemahkan ke dalam tahapan implementasi pembangunan yang selaras dengan misi pembangunan Kota Palu, dan disusun untuk menjadi panduan strategis lima tahun ke depan. Tabel berikut memuat rincian tahapan yang ingin diwujudkan pada setiap tahap yang telah disebutkan di atas

Tabel 3.5 Penahapan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025-2030

Misi	Tahap I 2025	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing	T.1 Tervujudnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing				
	S.1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan				
	- Konsolidasi data sektor unggulan - Revitalisasi pasar tradisional - Peningkatan promosi intensif produk lokal - Fasilitasi akses pembiayaan UMKM	- Pengembangan sentra UMKM berbasis teknologi - Pelatihan manajemen usaha - Ekopasari distribusi produk lokal antarwilayah	- Modernisasi kawasan industri kecil - Peningkatan kemitraan UMKM dengan sektor swasta besar - Peningkatan Pemasaran digital	- Hilirisasi produk unggulan - Integrasi rantai pasok industri lokal - Branding destinasi wisata tematik	- Stabilisasi pasar ekspor UMKM - Sertifikasi mutu dan kekayaan intelektual produk kreatif - Integrasi promosi investasi pariwisata dan industri
 Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	S.1.2 Meningkatnya nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah				
	- Penyederhanaan perizinan berbasis OSS - Penyusunan peta peluang investasi kota - Promosi penanaman modal - Peningkatan daya saing daerah	- Penetapan kawasan prioritas investasi - Pembentukan forum investor - Penguatan data pavor kerja sektor prioritas - Peningkatan daya saing daerah	- Fasilitasi joint venture sektor pariwisata dan industri kreatif - Peningkatan infrastruktur penunjang investasi - Peningkatan daya saing daerah	- Diversifikasi portofolio investasi - Kemitraan internasional - Promosi terintegrasi investasi – pariwisata - Peningkatan daya saing daerah	- Optimalisasi insentif investasi berkelanjutan - Evaluasi efektivitas kebijakan investasi - Penyempurnaan ekosistem bisnis - Peningkatan daya saing daerah
	T.2 Tervujudnya pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni				
	S.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup kota				
	- Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah - Rehabilitasi ruang terbuka hijau - Peningkatan gerakan pengelolaan lingkungan - Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	- Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah - Rehabilitasi ruang terbuka hijau - Peningkatan gerakan pengelolaan lingkungan - Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	- Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah - Rehabilitasi ruang terbuka hijau - Peningkatan gerakan pengelolaan lingkungan - Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	- Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah - Rehabilitasi ruang terbuka hijau - Peningkatan gerakan pengelolaan lingkungan - Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	- Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah - Rehabilitasi ruang terbuka hijau - Peningkatan gerakan pengelolaan lingkungan - Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
	S.2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penataan ruang kota				
	- Peningkatan kualitas infrastruktur kota - Peningkatan sistem transportasi kota - Peningkatan penataan kota dan pemanfaatan ruang kota - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	- Peningkatan kualitas infrastruktur kota - Integrasi sistem transportasi kota - Integrasi sistem penataan kota - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	- Pengembangan infrastruktur hijau - Integrasi sistem transportasi kota - Integrasi sistem penataan kota - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	- Pengembangan infrastruktur hijau - Integrasi sistem transportasi kota - Integrasi sistem penataan kota - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	- Pengembangan infrastruktur hijau - Integrasi sistem transportasi kota - Integrasi sistem penataan kota - Peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Misi	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	S.2.3 Meningkatnya ketangguhan daerah dan pengurangan risiko bencana				
	- Penyempurnaan peta kebencanaan - Peningkatan kesiapsiagaan - Penguatan prasarana dan sarana evakuasi - Inovasi pada penguatan ketahanan daerah	- Peningkatan resiliensi daerah - Penyempurnaan peta kebencanaan - Peningkatan kesiapsiagaan - Penguatan prasarana dan sarana evakuasi - Inovasi pada penguatan ketahanan daerah	- Peningkatan resiliensi daerah - Penyempurnaan peta kebencanaan - Peningkatan kesiapsiagaan - Penguatan prasarana dan sarana evakuasi - Inovasi pada penguatan ketahanan daerah	- Peningkatan resiliensi daerah - Penyempurnaan peta kebencanaan - Peningkatan kesiapsiagaan - Penguatan prasarana dan sarana evakuasi - Inovasi pada penguatan ketahanan daerah	- Pada resiliensi - Penyempurnaan peta kebencanaan - Peningkatan kesiapsiagaan - Penguatan prasarana dan sarana evakuasi - Inovasi pada penguatan ketahanan daerah
	S.2.4 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban, dan kewaspadaan daerah				
	- Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum - Inovasi pada penguatan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan daerah	- Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum - Inovasi pada penguatan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan daerah	- Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum - Inovasi pada penguatan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan daerah	- Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum - Inovasi pada penguatan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan daerah	- Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum - Inovasi pada penguatan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan daerah
 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas	T.3 Terwujudnya transformasi sosial dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas				
	S.3.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan daerah				
	- Peningkatan pemberian beasiswa unggul dan ekonomi lemah - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik - Peningkatan pengelolaan sekolah - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan penanganan dan pencegahan stunting - Penguatan keahlian dan keterampilan kerja - Inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan	- Peningkatan pemberian beasiswa unggul dan ekonomi lemah - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik - Peningkatan pengelolaan sekolah - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan penanganan dan pencegahan stunting - Penguatan keahlian dan keterampilan kerja - Inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan	- Peningkatan pemberian beasiswa unggul dan ekonomi lemah - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik - Peningkatan pengelolaan sekolah - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan penanganan dan pencegahan stunting - Penguatan keahlian dan keterampilan kerja - Inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan	- Peningkatan pemberian beasiswa unggul dan ekonomi lemah - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik - Peningkatan pengelolaan sekolah - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan penanganan dan pencegahan stunting - Penguatan keahlian dan keterampilan kerja - Inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan	- Peningkatan pemberian beasiswa unggul dan ekonomi lemah - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik - Peningkatan pengelolaan sekolah - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan penanganan dan pencegahan stunting - Penguatan keahlian dan keterampilan kerja - Inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan
	S.3.2 Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial				
	- Restrukturisasi data terpadu sosial - Pengembangan pusat layanan sosial - Pelatihan dan pendampingan pengembangan keluarga - Penguatan jaminan sosial - Kolaborasi transformasi sosial	- Penguatan data terpadu sosial - Inovasi pusat layanan sosial - Pelatihan dan pendampingan pengembangan keluarga - Penguatan jaminan sosial - Pengembangan usaha berbasis rumah tangga - Kolaborasi transformasi sosial	- Penguatan data terpadu sosial - Inovasi pusat layanan sosial - Pelatihan dan pendampingan pengembangan keluarga - Penguatan jaminan sosial - Pengembangan usaha berbasis rumah tangga - Kolaborasi transformasi sosial	- Penguatan data terpadu sosial - Inovasi pusat layanan sosial - Pelatihan dan pendampingan pengembangan keluarga - Penguatan jaminan sosial - Pengembangan usaha berbasis rumah tangga - Kolaborasi transformasi sosial	- Penguatan data terpadu sosial - Inovasi pusat layanan sosial - Pelatihan dan pendampingan pengembangan keluarga - Penguatan jaminan sosial - Pengembangan usaha berbasis rumah tangga - Kolaborasi transformasi sosial
	S.3.3 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan				
	- Pengembangan kurikulum pendidikan karakter - Pengembangan festival budaya daerah - Penguatan rumah ibadah sebagai pusat karakter - Inovasi dalam penguatan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	- Pengembangan kurikulum pendidikan karakter - Pengembangan festival budaya daerah - Penguatan rumah ibadah sebagai pusat karakter - Inovasi dalam penguatan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	- Penyempurnaan kurikulum pendidikan karakter - Penyempurnaan festival budaya daerah - Integrasi budaya lokal dalam pariwisata - Inovasi dalam penguatan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	- Penyempurnaan kurikulum pendidikan karakter - Penyempurnaan festival budaya daerah - Pengembangan pusat kebudayaan berbasis digital - Inovasi dalam penguatan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	- Penyempurnaan kurikulum pendidikan karakter - Penyempurnaan festival budaya daerah - Pengembangan pusat kebudayaan berbasis digital - Inovasi dalam penguatan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan

Misi	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional	T.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional				
	S.4.1 Memantapkan mutu dan sistem manajemen ASN				
	- Percepatan implementasi SPBE - Percepatan implementasi sistem merit dan manajemen talenta - Peningkatan penguatan profesionalisme ASN - Inovasi dan kolaborasi layanan ASN	- Peningkatan kualitas SPBE - Peningkatan kualitas sistem merit dan manajemen talenta - Peningkatan penguatan profesionalisme ASN - Serifikasi profesi ASN - Inovasi dan kolaborasi layanan ASN	- Penyempurnaan SPBE - Peningkatan kualitas sistem merit dan manajemen talenta - Peningkatan penguatan profesionalisme ASN - Inovasi dan kolaborasi layanan ASN	- Penyempurnaan SPBE - Peningkatan kualitas sistem merit dan manajemen talenta - Peningkatan penguatan profesionalisme ASN - Inovasi dan kolaborasi layanan ASN	- Penyempurnaan SPBE - Peningkatan kualitas sistem merit dan manajemen talenta - Peningkatan penguatan profesionalisme ASN - Inovasi dan kolaborasi layanan ASN
	S.4.2 Memantapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah				
	- Pengembangan sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah - Transparansi anggaran publik - Pengembangan sistem digital PAD - Peningkatan PAD inovatif	- Integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah - Pengembangan sistem e-audit - Penyempurnaan sistem digital PAD - Peningkatan PAD inovatif	- Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah - Manajemen risiko keuangan - Penyempurnaan sistem digital PAD - Peningkatan PAD inovatif	- Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah - Peningkatan pembiayaan pembangunan non-APBD - Penyempurnaan sistem digital PAD - Peningkatan PAD inovatif	- Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah - Peningkatan pembiayaan pembangunan non-APBD - Penyempurnaan sistem digital PAD - Peningkatan PAD inovatif
	S.4.3 Meningkatkan kapasitas dan efektivitas inovasi daerah				
	- Peningkatan inovasi pada pengelolaan pemerintahan - Penguatan pada unit kerja yang mengurus inovasi	- Peningkatan inovasi pada pengelolaan pemerintahan - Pengembangan inovasi dan lintas OPD	- Peningkatan inovasi pada pengelolaan pemerintahan - Peningkatan inovasi dan kolaborasi pembangunan daerah	- Peningkatan inovasi pada pengelolaan pemerintahan - Peningkatan inovasi dan kolaborasi pembangunan daerah	- Peningkatan inovasi pada pengelolaan pemerintahan - Peningkatan inovasi dan kolaborasi pembangunan daerah
	S.4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat				
	- Peningkatan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi layanan publik	- Peningkatan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi layanan publik	- Peningkatan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi layanan publik	- Peningkatan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi layanan publik	- Peningkatan inovasi pelayanan publik - Digitalisasi layanan publik

Fokus Kewilayahan

Sebagai kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, arah pembangunan Kota Palu juga menekankan indikasi intervensi pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu sebagaimana sejalan dengan RPJMN 2025–2029 sehingga pengembangan wilayah dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berketahanan



Pembangunan Kota Palu diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan daya saing wilayah secara menyeluruh, sekaligus mengurangi kesenjangan antar kawasan melalui pendekatan kewilayahan yang berbasis pada

karakteristik, potensi, dan fungsi ruang. Pendekatan ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan infrastruktur secara spasial, adaptif terhadap risiko bencana, serta mendorong pertumbuhan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.

Kota Palu terbagi ke dalam empat Wilayah Pengembangan (WP) dengan peran dan fungsi strategis masing-masing. Fokus pembangunan pada tiap WP diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mengintegrasikan program prioritas yang disesuaikan dengan arah kebijakan penataan ruang dan kebutuhan riil masyarakat di tiap kawasan.

WP I – Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat diarahkan sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan.

WP II – Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan diarahkan sebagai pintu gerbang

Provinsi Sulawesi Tengah serta pusat perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan.

WP III – Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur diarahkan sebagai pusat pelayanan kota baru berbasis perdagangan dan jasa, perkantoran,

pendidikan, dan pariwisata yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan.

WP IV – Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara diarahkan sebagai pusat pengembangan industri dan simpul pergerakan yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan.



Gambar 3.10 Fokus Kewilayahan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025-2030

Integrasi lintas WP akan difasilitasi melalui penguatan sistem jaringan jalan, transportasi publik, jaringan utilitas kota, dan kebijakan tata ruang yang mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas sosial. Fokus kewilayahan ini juga akan menjadi dasar perumusan kebijakan penganggaran berbasis wilayah, di mana alokasi APBD dan dukungan program dari Pemerintah Pusat akan diarahkan berdasarkan kebutuhan spesifik dan daya ungkit masing-masing WP. Dengan pendekatan kewilayahan ini, Pemerintah Kota Palu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, tapi juga kontekstual dan berbasis ruang, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah kota.

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan dan akselerasi pencapaian visi Kota Palu Mantap Berkelanjutan, dirumuskan 6 Agenda Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2025–2030. Keenam agenda ini menjadi pedoman strategis untuk mengarahkan pelaksanaan program pembangunan yang terintegrasi, sistematis, dan berorientasi hasil (outcome) serta manfaat nyata bagi masyarakat. Agenda prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program 35 (Program Unggulan), yaitu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang merupakan kelanjutan, penyempurnaan, dan pelengkap dari Program 53 yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya (2021-2025). Program 35 disusun berdasarkan hasil evaluasi atas capaian pembangunan sebelumnya, dinamika sosial-ekonomi, serta tantangan baru dalam proses transformasi daerah.



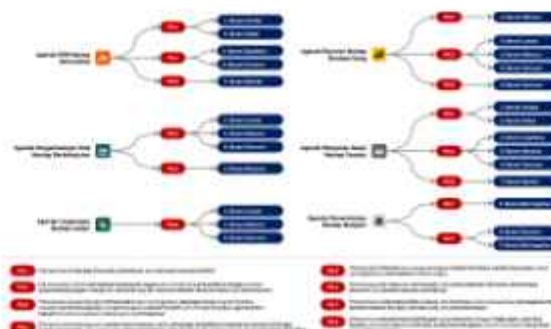
Gambar 3.11 Kerangka Pikir Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025-2030



Dalam merumuskan Agenda Prioritas Pembangunan Kota Palu 2025-203, Pemerintah Kota Palu secara aktif melakukan harmonisasi dengan arah kebijakan Astacita Pembangunan Nasional, serta kebijakan yang mengacu pada Nawa Cita Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sinergi ini diwujudkan melalui integrasi Agenda Prioritas dan Program Unggulan Kota Palu yang selaras dengan agenda nasional seperti penguatan ketahanan sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, transformasi layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan lingkungan hidup dan ketahanan iklim.

Harmonisasi kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung pencapaian target Pembangunan

Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menyelaraskan prioritas pembangunan Kota Palu terhadap skala nasional dan regional, maka efektivitas program daerah diharapkan semakin meningkat, serta menciptakan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah yang memperkuat daya ungkit pembangunan di tingkat lokal secara berkelanjutan.



Gambar 3.12 Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2025-2030 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka menjaga keselarasan antara pembangunan Daerah dan Nasional, program prioritas daerah pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2030 juga mendukung sejumlah program prioritas nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029, diantaranya:

Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program makan bergizi gratis. Peran ini mencakup penyediaan infrastruktur, pembinaan rantai pasok, dan penyaluran program kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung program ini, serta melibatkan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan.

Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat bertujuan memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Sosial dan difokuskan pada keluarga yang tergolong desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sekolah Rakyat didesain sebagai *boarding school* atau sekolah berasrama, yang menyediakan fasilitas lengkap termasuk makanan dan kebutuhan dasar lainnya tanpa dipungut biaya. Pemerintah Daerah memiliki peran penting melalui penyediaan lahan dan fasilitas, bantuan operasional, pelatihan guru relawan, dan integrasi program Sekolah Rakyat dalam rencana pembangunan daerah.

Program Koperasi Merah Putih

Dukungan Pemerintah Kota Palu dalam mendukung program Koperasi Merah Putih dalam hal pendirian, legalitas, dan pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendorong pembentukan serta pengembangan Koperasi Merah Putih.

Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi *backlog* perumahan dan menyediakan rumah layak huni, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hunian yang lebih baik. Pemerintah Daerah berperan dalam penyediaan lahan, kemudahan perizinan, pembebasan BPHTB dan PBG, penyusunan regulasi, hingga peningkatan kualitas hunian.

Sebagai turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Program Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2025–2030 dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat terwujudnya outcome pembangunan yang konkret. Program ini menjadi instrumen strategis dalam pengalokasian sumber daya dan penganggaran berbasis kinerja, dengan fokus pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan berbasis hasil dan capaian langsung terhadap indikator kinerja utama daerah, program prioritas ini diharapkan dapat memperkuat transformasi Kota Palu menuju kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Tabel 3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2025-2030

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Unsur
Misi 1	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing			
T.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
S.1.1	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan		
O.1.1.1	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegritas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
O.1.1.2	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan
O.1.1.3	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
O.1.1.4	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
O.1.1.5	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Koperasi, UMKM
O.1.1.6	Meningkatnya daya saing UMKM	Cakupan Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Koperasi, UMKM
O.1.1.7	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
O.1.1.8	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	Pemasaran pariwisata	Pariwisata
O.1.1.9	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pariwisata
S.1.2	Meningkatnya nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah		
O.1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
O.1.2.2	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Cakupan pembinaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pengembangan ekspor	Perdagangan
O.1.2.3	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan
O.1.2.4	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
O.1.2.5	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian
O.1.2.6	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Koperasi, UMKM
O.1.2.7	Meningkatnya daya saing UMKM	Cakupan Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Koperasi, UMKM
O.1.2.8	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
O.1.2.9	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	Pemasaran pariwisata	Pariwisata
O.1.2.10	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pariwisata
O.1.2.11	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	Pariwisata
O.1.2.12	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	Penanaman Modal
O.1.2.13	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Promosi penanaman modal	Penanaman Modal
O.1.2.14	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja
O.1.2.15	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Riset dan inovasi daerah	Penelitian & Pengembangan
O.1.2.16	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Perekonomian pembangunan dan	Sekretariat Daerah
Misi 2	Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni			
T.2	Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Indeks Kota Layak Huni		

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umur
S.2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
O.2.1.1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
O.2.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Lingkungan Hidup
O.2.1.3	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan beracun dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan beracun dan beracun (limbah B3)	Lingkungan Hidup
O.2.1.4	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkelola	Pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup
O.2.1.5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat yang terlayani pengelolaan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.1.6	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.1.7	Meningkatnya bagunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Penataan bangunan dan lingkungan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.1.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
S.2.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penataan ruang kota	Indeks Infrastruktur Daerah		
O.2.2.1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Tidak terjadi genangan > 5 kali setahun Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	Pengelolaan sumber daya air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat yang terlayani pengelolaan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.4	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara yang andal	Penataan bangunan gedung	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.6	Meningkatnya bagunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Penataan bangunan dan lingkungan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.7	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan aman	Penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.2.9	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Pengembangan perumahan	Perumahan & Kawasan Permukiman
O.2.2.10	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Kawasan Permukiman	Perumahan & Kawasan Permukiman

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umur
O.2.2.11	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perumahan & Kawasan Permukiman
O.2.2.12	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum)	Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Perumahan & Kawasan Permukiman
O.2.2.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Lingkungan Hidup
O.2.2.14	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Pertanahan
O.2.2.15	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Perhubungan
S.2.3	Meningkatnya ketangguhan daerah dan pengurangan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		
O.2.3.1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana	Ketentraman, Tibum, & Linmas
O.2.3.2	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran	Ketentraman, Tibum, & Linmas
O.2.3.3	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
O.2.3.4	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Penanganan bencana	Sosial
O.2.3.5	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Pengelolaan sumber daya air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.3.6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara yang andal	Penataan bangunan gedung	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.3.7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
O.2.3.8	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Pengembangan perumahan	Perumahan & Kawasan Permukiman
O.2.3.9	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Kesehatan
O.2.3.10	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Fasilitas Kesehatan		
O.2.3.11	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kesehatan
S.2.4	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban, dan kewaspadaan daerah	Indeks Kewaspadaan Nasional		
O.2.4.1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman, Tibum, & Linmas

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
O.2.4.2	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesatuan Bangsa & Politik
O.2.4.3	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
O.2.4.4	Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase penurunan kejadian ATHG di Kota Palu		
O.2.4.5	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
O.2.4.6	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Indeks Kebutuhan Dasar	Perlindungan dan jaminan sosial	Sosial
O.2.4.7	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pangan
O.2.4.8	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Pengawasan keamanan pangan	Pangan
O.2.4.9	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
Misi 3 Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas				
T.3	Terwujudnya transformasi sosial dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia		
S.3.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan daerah	Indeks Kualitas Manusia		
O.3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan Kesehatan
O.3.1.2	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Fasilitas Kesehatan		Kesehatan
O.3.1.3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pengelolaan pendidikan	Pendidikan

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
O.3.1.4	Meningkatnya kualitas Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada layanan pendidikan	Persentase PTK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
O.3.1.5	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Kota Layak Anak	Pemenuhan hak anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
O.3.1.6	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total Total Fertility Rate/ TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
O.3.1.7	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kepemudaan & Olahraga
O.3.1.8	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabor Berprestasi	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kepemudaan & Olahraga
O.3.1.9	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai kegembiraan membaca masyarakat	Pembinaan perpustakaan	Perpustakaan
S.3.2	Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial	Indeks Pembangunan Inklusif		
O.3.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan Kesehatan
O.3.1.2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-19 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pengelolaan pendidikan	Pendidikan
O.3.2.3	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Pekerja Sosial	Pemberdayaan sosial	Sosial
O.3.2.4	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi sosial	Sosial

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
O.3.2.5	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Indeks Kebutuhan Dasar	Perlindungan dan jaminan sosial	Sosial
O.3.2.6	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Penempatan tenaga kerja	Tenaga Kerja
O.3.2.7	Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Pengawasan ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
O.3.2.8	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
O.3.2.9	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga yang berpersepektif gender dan hak anak sesuai standar	Peningkatan kualitas keluarga	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
O.3.2.10	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Kota Layak Anak	Pemenuhan hak anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
O.3.2.11	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan yang aktif melaksanakan kegiatan	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
O.3.2.12	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pangan
O.3.2.13	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
O.3.2.14	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
O.3.2.15	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pertanian
O.3.2.16	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan & Perikanan
O.3.2.17	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan & Perikanan
O.3.2.18	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan & Perikanan
S.3.3	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila		
O.3.3.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kesatuan Bangsa & Politik

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
	Pancasila dan karakter kebangsaan			
O.3.3.2	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Kesatuan Bangsa & Politik
O.3.3.3	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Pengembangan kurikulum	Pendidikan
O.3.3.4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
O.3.3.5	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga yang berpersepektif gender dan hak anak sesuai standar	Peningkatan kualitas keluarga	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
O.3.3.6	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan yang aktif melaksanakan kegiatan	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Misi 4 Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional				
T.4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi		
S.4.1	Memantapkan mutu dan sistem manajemen ASN	Indeks Sistem Merit		
O.4.1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	Kepegawaian daerah	Kepegawaian
O.4.1.2	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik dan sangat baik		Kepegawaian
O.4.1.3	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan & Pelatihan
O.4.1.4	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		Pendidikan & Pelatihan
O.4.1.5	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan, tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		Pendidikan & Pelatihan
O.4.1.6	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Pendidikan & Pelatihan
O.4.1.7	Meningkatnya tata kelola organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi		Sekretariat Daerah
S.4.2	Memantapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
O.4.2.1	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Pengelolaan keuangan daerah	Keuangan
		Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		Keuangan
O.4.2.2	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase penurunan SILPA		Keuangan
O.4.2.3	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		Keuangan
O.4.2.4	Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan barang milik daerah	Keuangan

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
O.4.2.5	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengelolaan pendapatan daerah	Keuangan
O.4.2.6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan
O.4.2.7	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Penyelenggaraan pengawasan	Pengawasan
O.4.2.8	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan SPIP	Perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Pengawasan
		Kapabilitas APIP		Pengawasan
O.4.2.9	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
		Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
S.4.3	Meningkatkan kapasitas dan efektivitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah		
O.4.3.1	Meningkatnya Kajian Hasil Riset dan Inovasi Daerah yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian berbasis Bukti Hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Riset dan inovasi daerah	Penelitian & Pengembangan
O.4.3.2	Meningkatnya Kajian Hasil Riset dan Inovasi Daerah yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian berbasis Bukti Hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Penelitian & Pengembangan
O.4.3.3	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah		Penelitian & Pengembangan
O.4.3.4	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi di Daerah		Penelitian & Pengembangan
O.4.3.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi & Informatika
O.4.3.6	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyelenggaraan sandi untuk pengamanan informasi	Persandian
O.4.3.7	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral	Statistik
O.4.3.8	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	Pengelolaan arsip	Kearsipan
O.4.3.9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Perizinan penggunaan arsip	Kearsipan
S.4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik		
O.4.4.1	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	Pendaftaran penduduk	Adm. Dukcapil
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		Adm. Dukcapil

MISI	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Program Prioritas	Bidang Urusan/ Umrur
O.4.4.2	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Pencatatan sipil	Adm. Dukcapil
		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Adm. Dukcapil
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Adm. Dukcapil
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Adm. Dukcapil
O.4.4.3	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Pelayanan penanaman modal	Penanaman Modal
O.4.4.4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Komunikasi & Informatika
O.4.4.5	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat	Net Death Rate (NDR)	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kesehatan
O.4.4.6	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa	Perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah
O.4.4.7	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kewilayahan
O.4.4.8	Meningkatnya kapasitas masyarakat kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kewilayahan

Keterkaitan antara Program Prioritas Kota Palu dengan Program 35 menjadi bagian penting dalam menjamin kesesuaian arah pembangunan lokal dengan kerangka kerja strategis yang lebih luas. Program 35 dirancang untuk memiliki daya ungkit terhadap indikator kinerja utama daerah, dengan pendekatan

berbasis hasil dan terukur melalui capaian langsung terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas tata kelola Kota Palu yang mantap berkelanjutan.

+35 PROGRAM UNGGULAN



Agenda SDM Mantap Berkualitas

1. Pusat Layanan Sosial
2. Community Hub & Youth Fellowship Program
3. Sekolah Khusus Keluarga
4. Festival Seni dan Budaya
5. Beasiswa Pelatihan Keahlian dan Keterampilan
6. Pengembangan Minat & Bakat Olahraga



Agenda Lingkungan Mantap Lestari

1. Urban Acupuncture
2. Gerakan Bebas Sampah
3. Eco-living
4. 1.000 Biopori per Kelurahan
5. Palu Resilient



Agenda Pengembangan Kota Mantap Berkelanjutan

1. Pengembangan Pusat Kota Baru
2. Penataan Kawasan Tematik
3. Penataan Kawasan Kumuh/ Urban Renewal
4. Penataan Jaringan Drainase Kota
5. Smart Transportation
6. Pembangunan Stadion Olahraga
7. Pembangunan Masjid Agung Kota Palu



Agenda Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Akselerator Bisnis
2. Urban Farming & Living Fresh Market
3. Palu Creative Hub & Co-working Space
4. Palu Market Place
5. Transformasi BUMD
6. Palu Investment Forum



Agenda Pemerintahan Mantap Melayani

1. Open & Responsive Government
2. Pusat Layanan Digital
3. PNS Magang Internasional
4. City Branding



Agenda Pelayanan Dasar Mantap Terpadu

1. Smart Education
2. Smart Health Care
3. Pendidik Magang Internasional
4. Taman Literasi per Kelurahan
5. National & International Student Exchange
6. Pelayanan Kesehatan Mental
7. PAUD Berkualitas dan Gratis

53 PROGRAM UNGGULAN



Agenda Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Model Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM
4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layang dan Perkebun
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif



Agenda Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Terlib
5. CSR Forum
6. Satgas Cegah Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar



Agenda SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Badah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Dilahi
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



Agenda Pemerintahan Mantap Melayani

1. Audit APBD oleh Auditor Independen
2. E-Government
3. Penerapan GSI (Quick Service Licensasi)
4. One Touch Info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorar
7. ASN Mapping Nasional
8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan



Agenda Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu

* Agenda Infrastruktur pada Program 52 terdistribusi ke dalam
Agenda Pengembangan Kota di dalam Program 35



Agenda Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Badah
6. 1.000 Bessiswa Keluarga Tidak Mampu
7. Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
8. Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
9. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan
10. Update Berkala Kompetensi Guru/Pengajar
11. Bus Gratis untuk Siswa Sekolah
12. Kepala Sekolah Mengajar Nasional

Kehadiran Program 35 ini bertujuan untuk memperluas dan melengkapi ruang yang telah ataupun yang belum terjangkau oleh Program 53 (Program Unggulan pada RPJMD 2021-2025), yakni:

- mengakselerasi pencapaian outcome pembangunan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pengembangan SDM, lingkungan, dan digitalisasi pelayanan publik
- meningkatkan pengembangan kawasan sesuai dengan fokus pengembangan wilayah kota; dan
- mendukung pencapaian target nasional, termasuk tujuan SDGs dan Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029).

Program 35 akan dijalankan secara selaras dengan Program 53. Dengan demikian, total 88 Program Prioritas (Program 35 + Program 53) yang akan dijalankan selama periode RPJMD 2025–2030, sebagai satu kesatuan strategi pembangunan yang progresif, terintegrasi, dan kolaboratif. Program Prioritas menjadi manifestasi nyata dari komitmen Pemerintah Kota Palu untuk membangun kota mantap berkelanjutan.

Tabel 3.7 Program Unggulan Pembangunan Daerah Kota Palu 2025-2030

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/Unsur
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing	Prog.1 Pali Market Place	• Etalase online yang disediakan untuk memfasilitasi pelaku UMKM Palu menjual produknya • Pengembangan dari fitur Produk Lokal di Sangapala saat ini							• 1 fitur market place di dalam aplikasi Sangapala • Bertumbuhnya tenant UMKM & IKM lokal dalam market place	• Koperasi, UKM • Perdagangan • Perindustrian
	Prog.10 Kawasan Ekonomi Kreatif & Wisata Religi	• Kawasan/koridor ekonomi kreatif • Kawasan/koridor wisata religi							• 5 kawasan ekonomi kreatif • 1 kawasan religi	• Pariwisata • Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.27 Kawasan Agrowisata Layang & Perkebun	• Kawasan agrowisata berbasis peternakan di Layang • Kawasan agrowisata berbasis tanaman pangan dan hortikultura di Perkebun							• 2 kawasan agrowisata	• Pertanian • Pariwisata • Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.28 Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi	• Pengembangan pasar khusus, seperti pasar kurung, pasar buah dan sebagainya • Target revitalisasi pasar skitring							• Seluruh pasar tradisional di Kota Palu	• Perdagangan
	Prog.29 Wisata Pasar Ikan	• Pasar ikan yang akan berintegrasi dengan tempat penyajian makanan seafood							• 1 kawasan	• Kelautan & Perikanan • Pariwisata
	Prog.31 Akselerator Bisnis	• Pengembangan tingkat lanjut dari Inkubator Bisnis (Inbis) • Inbis menjadi BUMD • Satu pintu submission bantuan usaha dari masyarakat ke Pemerintah melalui Inbis							• 1 akselerator bisnis • Satu pintu masuk pengelolaan bantuan usaha	• Perindustrian • Koperasi, UKM

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/ Unsur
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	Prog.3 Pulu Creative Hub & Co-working Space	- Hub bagi seluruh pelaku dan usaha kreatif untuk berkolaborasi - Penyediaan program pengembangan usaha kreatif yang terhubung dengan Akselerator Bisnis (saat ini labia) - Penyediaan fasilitas ruang kerja bersama di New Baruga dan di Kecamatan-kecamatan							1 bangunan/ ruang creative hub - Terbentuk ruang-ruang co-working di beberapa kecamatan	- Pariwisata - Keperluan & Olahraga - Perindustrian - Kewilayahan
	Prog.4 Transformasi BUMD	- Transformasi BUMD menjadi lebih profesional - Fokus: transformasi pada Pertamina, BPST, dan PDAM - Pengembangan unit-unit kerja Pemkot menjadi BUMD							- BUMD bertransformasi menjadi lebih profesional - Terbentuk BUMD baru	Sekretariat Daerah
	Prog.5 Pulu Investment Forum	- Forum pengelola investasi bagi pengembangan Kota Pulu - Akan terintegrasi dengan CSR Forum yang sudah terbentuk							- Terbentuk forum investasi - Terlaksananya kegiatan forum investasi	Perencanaan Modal
	Prog.60 Inklusi Berbasis Digital	Membantu inisiatif bisnis untuk berkembang dan mengembangkan usaha sampingan							Terlaksananya program inkubasi	- Perindustrian - Koperasi, UKM
	Prog.61 Pengantar UMKM	- Dukung pertumbuhan/ jumlah usaha - Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan - Peningkatan jaringan pasar dan branding							Berlaku usaha bagi UMKM	Koperasi, UKM
	Prog.62 Kerjasama antar Pemerintah Daerah	- Kerjasama kemitraan - Kerjasama ekonomi dan perdagangan - Dapat dilibatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, swasta, NGO, hingga pemerintah daerah dari negara lain dan organisasi lainnya							100% Kerjasama menjadi PKS 100% PKS terwujud	Sekretariat Daerah
 Meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni	Prog.6 Gerakan Bebas Sampah	- Gerakan untuk Pulu dari sampah (terutama sampah plastik) yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat dimulai dari pengurangan produksi sampah di rumah tangga dan aktivitas luar ruangan - Memastikan adanya gerakan zero waste event pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Kota Pulu							Pengurangan timbulan sampah di TPA	Lingkungan Hidup
	Prog.7 Eco-living	- Penerapan gaya hidup peduli lingkungan pada lingkungan perumahan, perkantoran, fasilitas publik dan sekolah-sekolah - Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai - Membiasakan menggunakan bus transpul dibanding kendaraan pribadi - Mengupayakan penghematan energi dengan pemanfaatan energi berkelanjutan - Menghadrkan kawasan bebas sampah plastik - Menghadrkan sarana composting - Terintegrasi dengan Program Urban Farming & Living Fresh Market							Persepsi konsep eco-living di seluruh aspek	- Lingkungan Hidup - Perumahan - Pangan
	Prog.8 1.000 Biopori per Kelurahan	- Menyediakan biopori di masing-masing kelurahan dimulai dari rumah-rumah masyarakat dan fasilitas publik - Mengurangi air limpasan hujan meluap ke badan jalan							1.000 biopori/ kelurahan	- Lingkungan Hidup - Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Prog.88 Pulu Adipura	- Pengsahan sampah terpadu - Penerapan 3R di kelurahan dan RT/RW - Pengamanan TPA sampah - Penghargaan Adipura tahun 2023							Pencapaian Adipura	Lingkungan Hidup
	Prog.89 Pulu Hijau	- Kualitas lingkungan meningkat - Pengembangan kota hijau - Peningkatan kawasan ruang terbuka hijau - Perencanaan dan pemeliharaan pohon							Persentase kawasan RTH	Lingkungan Hidup
	Prog.9 Urutan Acupuncture	- Menata ruang-ruang kota menjadi lebih indah dan produktif untuk aktivitas rekreasi dan "healing" masyarakat - Mengidentifikasi permasalahan kota dari berbagai sektor, khususnya lingkungan kota dan permukiman							100% titik lokasi yang teridentifikasi bermasalah ditangani	- Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Lingkungan Hidup - Perumahan & Kawasan Permukiman - Pariwisata - Koperasi, UKM - Perdagangan
	Prog.10 Pengembangan Pusat Kota Baru	- Pengembangan pusat Kota Pulu dengan fungsi pemerintahan dan sentral bisnis yang smart, green, inclusive, and resilient - Pengembangan pasar dan kawasan perdagangan - Pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas							Kawasan kota baru yang dikembangkan	- Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Lingkungan Hidup - Perumahan & Kawasan Permukiman

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/Unsur
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	Prog.11 Penataan Kawasan Tematik	- Penataan kawasan dengan berbagai tema untuk mendorong produktivitas kawasan, seperti kawasan kuliner, kawasan kota tua, dll - Pengembangan Kelurahan tematik							Kawasan tematik yang dikembangkan	- Pelayanan Umum & Penataan Ruang - Lingkungan Hidup - Perumahan & Kawasan Permukiman - Koperasi, UKM - Pariwisata
	Prog.12 Penataan Kawasan Rumah/Urban Renewal	- Penataan kawasan padat penduduk untuk meningkatkan kualitas hunian - Menghadirkan ruang produktif bagi penghuni kawasan yang dikembangkan - Menghadirkan ruang bagi aktivitas anak di dalam kawasan yang ditata							3 kawasan hunian yang ditingkatkan kualitasnya	- Perumahan & Kawasan Permukiman - Pelayanan Umum & Penataan Ruang - Lingkungan Hidup
	Prog.15 Penataan Jaringan Drainase Kota	- Menata kembali seluruh jaringan drainase kota melalui redesign jaringan drainase dan integrasi jaringan drainase kota dengan provinsi dan nasional - Integrasi jaringan drainase teroris, sekunder, dan primer serta dengan alur alam - Perlu adanya penetapan pemanfaatan ruang di sekitar alur alam - Ditungkinkan relokasi hunian yang berada pada zona rawan banjir akibat alur alam							- Dokumen masterplan drainase yang disusun kembali - Integrasi jaringan drainase - Pengurangan genangan air pasca hujan	- Pelayanan Umum & Penataan Ruang - Perumahan & Kawasan Permukiman - Ketertarikan, Ketertarikan Umum, & Perlindungan Masyarakat
	Prog.14 Smart Transportation	- Menghadirkan angkutan feeder dengan skema buy the services (BTS) - Integrasi moda transportasi Transpalu dengan angkutan feeder - Tersedia layanan dengan basis aplikasi pada fitur Transpalu di Sangapala							1 sistem terintegrasi	Perhubungan
	Prog.15 Pembangunan Stadion Olahraga	- Pembangunan stadion olahraga multigabang, baik stadion besar maupun stadion mini (gelanggang olahraga) - Membangun kembali Stadion Petobo - Masyarakat dapat menyaksikan penggunaan stadion maupun gelanggang olahraga nantinya melalui fitur dalam Sangapala							Stadion olahraga yang dibangun	- Kepemudaan & Olahraga - Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.16 Pembangunan Masjid Agung Kota Palu	Pembangunan Masjid Agung Kota Palu							1 masjid	Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.30 + Milir Bedah Rumah + Model Usaha	- Perbaikan/ bangun kembali rumah masyarakat berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku - Penerima bedah rumah dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan modal usaha							- Unit rumah tidak layak huni yang direvitalisasi - Unit keluarga yang diberikan bantuan modal usaha	- Perumahan & Kawasan Permukiman - Sosial
	Prog.36 Revitalisasi Perparkiran	- Penataan lokasi parkir tepi jalan dan lokasi khusus - Pengembangan sistem e-parking - Pengembangan parkir berpagar - Pemasangan jera parkir							Titik parkir yang direvitalisasi sistem pengelolaannya	Perhubungan
	Prog.37 Reklamasi dan Revitalisasi Moda Transportasi	- Pengembangan moda angkutan umum - Meningkatkan berkembangnya moda transportasi alternatif							Proyeksi transportasi publik	Perhubungan
	Prog.38 Palu Terang	- Meningkatkan cakupan penerangan jalan hingga 100% - Sebuah jalan di Kota Palu mendapatkan PJL							PJU yang direvitalisasi	Perumahan & Kawasan Permukiman
	Prog.40 Keamanan Maritim 2 Milir	- Award bagi kelurahan terbaik dari sisi pelayanan dan ketertarikan lingkungan - Total 2 miliar/ tahun, Terbaik 1 1 miliar, terbaik 2 400 juta, terbaik 3 300 juta							3 Kelurahan Mantri/ tahun	- Sekretariat Daerah - Ketertarikan
	Prog.41 Waterfront Park (Minuman Terasa)	Pengembangan waterfront sisi timur dan sisi barat Teluk Palu							1 kawasan	Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.51 Pembangunan Kawasan Olahraga	- Kawasan olahraga terpadu 10 lapangan bola direvitalisasi untuk mendukung event olahraga tahun 2028							10 kawasan olahraga	- Kepemudaan & Olahraga - Pelayanan Umum & Penataan Ruang
	Prog.56 RTM Publik per Kecamatan	1 RTM 1 kecamatan							8 RTM	- Lingkungan Hidup - Pelayanan Umum & Penataan Ruang - Ketertarikan
	Prog.17 Palu Resilient	- Meningkatkan ketahanan Kota Palu terhadap bencana, baik bencana alam maupun non alam - Kota Palu menjadi bagian dalam Making Cities Resilient (MCR) 2030 dari United							Palu Resilient 2030	Ketertarikan, Ketertarikan Umum, & Perlindungan Masyarakat

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/ Unsur
			2023	2026	2027	2028	2029	2030		
 Meningkatkan shelterness transformasi sosial dan pengembangan manajemen manajemen yang berkualitas		- Nation Disaster Risk Reduction (UNDRR) PBB - Menghadirkan bangunan dan ruang edukasi yang multifungsi - Terintegrasi dengan fitur di dalam Sangapala								- Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Sosial - Kesehatan - Pendidikan - Pangan
	Prog.18 Pulu Rami, Arteri, & Terik	- Lingkungan kota terik - Belas pengemis, anak jalanan, gempeng, dsb - Belas hewan ternak berhidang - Tertib pembayaran pajak daerah dan retensi daerah								- Kemertanian, Ketertanian, & Perlindungan Masyarakat - Kesehatan Rangsang & Politik
	Prog.19 Bangun Pulu Tahun Gempeng	- Bencana tata ruang berbasis mitigasi bencana - Peta standar lingkungan tahun gempeng - Pengembangan kota dengan konsep mitigasi bencana - Edifikasi mitigasi bencana								- Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Kemertanian, Ketertanian, & Perlindungan Masyarakat
	Prog.20 Pem- butangan Gelang Logistik Bencana	1 point gudang logistik dan 1 gudang yang tersebar di setiap TEA - Kepuasan dengan BUKM dan swasta								- Kemertanian, Ketertanian, & Perlindungan Masyarakat - Sosial - Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Prog.18 Smart Education	- Basis pendidikan berbasis digital bagi seluruh peserta didik, orang tua peserta didik, pendidik, dan manajemen sekolah - Layanan pendaftaran sekolah, rapor peserta didik, pemantauan peserta didik, fasilitas sekolah, informasi pelajaran/ kurikulum, pembelajaran interaktif, data view, dsb - Layanan khusus pemantauan sekolah dari Pemkot, terkait pengelolaan sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengelolaan aset sekolah, dll - Akan terintegrasi dalam fitur di Sangapala - Membangun satu sekolah berbasis internasional								1 sistem terintegrasi antar manajemen pendidikan dan logistik pendidikan - Pendidikan
	Prog.19 Smart Health Care	- Layanan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang akan mengintegrasikan seluruh data kesehatan puskesmas dari rumah sakit, layanan BPJS, layanan rujukan, layanan pemeriksaan kesehatan on call, dll - Pengembangan infrastruktur kesehatan yang berbasis digital - Peningkatan fitur Pulu Sehat di Sangapala								1 sistem terintegrasi - Kesehatan
	Prog.20 Pendidik Magang Internasional	Memberikan kesempatan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik melalui kegiatan magang di luar negeri								- Jumlah guru/ tenaga pendidik yang magang - Pendidikan - Kepengawasan
	Prog.21 Taman Literasi per Kelurahan	- Menyediakan taman literasi yang terintegrasi dengan taman kelurahan dalam bentuk <i>superlibrary</i> - Kerjasama dengan taman baca masyarakat - Akan hadir pada fitur di dalam Sangapala								50 titik taman/ ruang literasi - Perpustakaan - Kewilayahan - Sekretariat Daerah
	Prog.22 National & International Student Exchange	- Memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan dengan kegiatan pertukaran pelajar di dalam dan luar negeri - Menghadirkan kerjasama sister school dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia maupun mancanegara								- Jumlah siswa/ pemuda yang mengikuti program - Kepemudaan & Olahraga - Pendidikan
	Prog.23 Pelayanan Kesehatan Mental	- Layanan kesehatan mental gratis bagi masyarakat yang hadir di Puskesmas, mobile, maupun melalui telekonsultasi - Kerjasama dengan asosiasi psikolog - Akan menjadi bagian pada fitur Pulu Sehat di dalam Sangapala								- Layanan kesehatan mental di puskesmas - Layanan kesehatan mental mobile 1 sistem yang tersedia online - Kesehatan
	Prog.24 PAUD Berkualitas dan Gratis	- Peningkatan kualitas tenaga pendidik, prasarana dan sarana, serta pengelolaan PAUD - Menghadirkan PAUD gratis berjenjang bagi masyarakat - Mendorong wajib belajar 1-9 tahun dalam kewenangan Pemkot								- Jumlah PAUD yang ditingkatkan kualitasnya - Jumlah PAUD yang digratiskan - Pendidikan
	Prog.25 Community Hub & Youth Fellowship Program	- Pembentukan hub bagi komunitas anak muda untuk peningkatan kapasitas dan kolaborasi - Focus peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan - Menyusun peta jalan pengembangan pemuda Kota Palu								1 community hub yang terbentuk - Registasi fellowship - Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan community hub & fellowship - Kepemudaan & Olahraga

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/ Unsur	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		- Program pengembangan bagi pemuda profesional, fresh graduate, dan under graduate - Kerjasama magang yang difasilitasi Pemerintah ke R/L, BUMN, multi-national company, NGO, swasta, dll									
	Prog.26 Pengembangan Minat & Bakat Olahraga	- Pengembangan minat dan bakat olahraga dan seni berdasarkan prestasi dan yang hanya sekedar untuk "fun" saja - Pemetaan potensi olahraga dan seni berdasarkan prestasi dan yang paling dominan untuk difasilitasi melalui pembinaan untuk peningkatan prestasi dan pembinaan - Beasiswa pengembangan minat dan bakat olahraga dan seni serta kegiatan kreatif								Kegiatan pengembangan minat & bakat	- Kepemudaan & Olahraga - Pendidikan - Pariwisata
	Prog.26 Forum Komunitas Kreatif	1 forum komunitas kreatif - Fasilitasi kegiatan forum kreatif								1 forum komunitas kreatif - Tertarikannya kegiatan forum komunitas kreatif	Pariwisata
	Prog.27 Event Olahraga Tahunan	- Event 11 cabang olahraga rutin setiap tahun - Kerjasama dengan pemerintah/swasta/olahraga - Komisi pekan olahraga dan sport tourism								Event olahraga yang rutin dilakukan	Kepemudaan & Olahraga
	Prog.28 Event Komunitas Anak Muda	- Event komunitas anak muda rutin setiap tahun - Kerjasama dengan seluruh komunitas anak muda dari berbagai ilmu pengetahuan - Komisi anak muda dan festival								Event komunitas anak muda yang rutin dilakukan	- Kepemudaan & Olahraga - Pariwisata
	Prog.29 Pulu Kota Sehat	- Program Pulu Kota Sehat didukung dari sisi kesehatan fisik dan mental - Memerog kesehatan keluarga - Turunnya persentase stunting - Meningkatnya rumah sehat - Pelatihan di puskesmas dan penyediaan model contoh								Pencapaian Kota Sehat	Kesehatan
	Prog.30 Reward Prestasi SD & SMP < 5Miliar	- Total reward Rp 2 miliar untuk sekolah terbaik - Pesilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari sisi sekolah berprestasi, pengembangan, inovasi, dan kriteria lainnya								- Jumlah SD terbaik per tahun - Jumlah SMP terbaik per tahun	Pendidikan
	Prog.31 Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kualitas SD & SMP	- Pemerataan pembinaan guru - Pemerataan pembangunan sekolah								Pemerataan kualitas SD & SMP	Pendidikan
	Prog.32 Update Berkala Kompetensi dan Kapasitas Guru/ Pengajar	- Still ongoing dilakukan pada setiap sekolah - Peningkatan kemampuan guru dari sisi ilmu dan non ilmu, termasuk pemahaman konsep psikologi peserta didik								Pelatihan dan peningkatan peningkatan kompetensi per tahun	Pendidikan
	Prog.33 Kepala Sekolah Mengajar	- Kepala sekolah SMP akan ditugaskan di sekolah berprestasi pada skala nasional - Target seluruh kepala sekolah SMP se- Kota Palu								- Kegiatan mengajar per tahun - Jumlah kepala sekolah mengajar (SD & SMP)	Pendidikan
	Prog.34 Urban Farming & Living Fresh Market	- Bangunan green house untuk hidroponik dan mini biotek di masing-masing kelurahan - Toko sayur-sayuran fresh dari produk urban farming - Harga khusus bagi DTKS/DTSN - Dintegrasikan dengan pasar Palupangan & Sangapala								30 unit green house	- Pertanian - Pangan - Koperasi, UKM
	Prog.25 Pusat Layanan Sosial	- Layanan bagi Pemula Pelayanan Kesejahteraan Sosial (20 kelompok) - Layanan perbaikan dan pemertahanan: berlaku data registrasi sosial, DTKS/DTSN, dan PRH, baik Kota Provinsi, dan Pusat - Layanan penyelesaian persoalan sosial bagi seluruh masyarakat dan difasilitasi - Layanan hingga ke setiap kelurahan - Tim reaksi cepat khusus penanganan masalah sosial: Respon cepat tidak lebih dari 24 jam harus selesai - Akan tersedia dalam bentuk bangunan fisik Pusat Layanan Sosial dan non fisik di dalam Sangapala								- Pusat layanan sosial yang terbentuk - Bangunan/ ruang pusat layanan sosial 1 sistem terintegrasi	- Sosial - Kesehatan - Pengendalian Penyakit & Keluarga Berencana
	Prog.29 Sekolah Khusus Keluarga	- Pembinaan dan pendampingan keluarga, keluarga baru, calon keluarga, anak, ibu, dan ayah - Pendampingan dan pembinaan keluarga menjadi keluarga produktif, sehat, peduli lingkungan, dan sejahtera								- Sekolah khusus keluarga yang terbentuk - Kegiatan sekolah khusus keluarga yang berjalan	- Pengendalian Penyakit & Keluarga Berencana - Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - Kesehatan

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/Unsur
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		- Pemberian penguatan dan pendampingan usaha keluarga untuk peningkatan ekonomi keluarga - Fokus: kesejahteraan keluarga, stunting, kesehatan keluarga, parenting, tumbuh kembang anak, literasi keluarga, kecukupan pangan, KDR, lingkungan, rumah layak, usaha keluarga, dan lain-lain keluarga lainnya							- Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan - Peningkatan kualitas keluarga	- Pendidikan - Koperasi, UKM - Perdagangan - Perindustrian - Perpustakaan - Lingkungan Hidup - Sekretariat Daerah
	Prog.30 Beasiswa Pelatihan Keadilan dan Kemerempuhan	- Beasiswa pelatihan bagi profesional muda - Kerjasama dengan asosiasi profesi - Terintegrasi menjadi fitur di dalam Sanguptu							Jumlah penerima pelatihan	- Tenaga Kerja - Perindustrian - Pendidikan - Kepemudaan & Olahraga
	Prog.31 1.000 Pendukung untuk Nelayan	- Bantuan 1 persia bagi 1 keluarga nelayan - Dapat dimanfaatkan ke dalam kelompok nelayan							Jumlah unit kapal (sesuai data nelayan)	Kelautan & Perikanan
	Prog.32 CSR Forum	- Terbentuknya 1 forum - Pengalokasian pendampingan dengan dana CSR guna mendukung program prioritas dan program unggulan							2 CSR forum - Tingkat penyuluhan CSR dalam mendukung pembangunan kota	- Sosial - Premasman
	Prog.33 Peningkatan Kesejahteraan & Kualitas Kerja Masyarakat Pulau Raha	- Meningkatnya nilai insentif padat karya secara bertahap hingga Rp 1 juta/orang - Pembagian wilayah kerja per orang per run jalan - Usia > 40 tahun akan dipeminatikan dari padat karya							Berkas home anggota Padat Karya	- Sekretariat Daerah - Kewilayahan
	Prog.34 Pulu Berbagi	- Dapat berupa bahan yang diberikan Pemerintah kepada keluarga miskin maupun ke daerah lain - Dapat berupa pengabdian dana bersama untuk kegiatan bersama, dsb							- Kegiatan sosial yang dilakukan - Kerjasama pengumpulan dan penyaluran sukut dengan lembaga yang berwenang	- Sosial - Sekretariat Daerah
	Prog.35 Pulu Ramah Disabilitas	- Menyusun peraturan daerah terkait disabilitas - Pemberian pelatihan dan modal usaha							- Pada/Perwaj tentang disabilitas - Kegiatan pemberdayaan disabilitas	- Sosial - Koperasi, UKM - Perindustrian
	Prog.36 BPJS Gratis Warga Tidak Mampu	- Pemutakhiran data penerima langsung oleh RT/RW dan kelurahan - Pemberian BPJS gratis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan							Masyarakat yang terdaftar BPJS	Sosial
	Prog.37 Tunjangan Kesehatan & Santunan Duka RT/RW & Petugas Rumah Bidad	- Seluruh ketua RT dan ketua RW 1 orang petugas per 1 rumah bidad							- Ketua RT dan ketua RW yang mendapatkan jaminan sosial - Petugas rumah bidad yang mendapatkan jaminan sosial	- Sosial - Sekretariat Daerah
	Prog.38 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu	Total 1.000 beasiswa yang akan diberikan bertahap setiap tahun							Jumlah penerima beasiswa	- Pendidikan - Sekretariat Daerah
	Prog.39 Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan	- Terintegrasi dengan program nasional - Kerjasama dengan instansi/ lembaga pelatihan kerja - Tenaga kerja bersertifikat akan diberikan mengikuti program kerjasama kemitraan dengan daerah lainnya							- Jumlah tenaga kerja yang dilatih 10 kegiatan pelatihan	Tenaga Kerja
	Prog.40 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honor	- Reformasi sistem penerimaan honor - Meningkatkan jumlah honor - Meningkatnya nilai insentif honor - Mengembangkan sistem kepegawaian alternatif							Kerangka minimal honor yang diberikan	- Kepegawaian - Keuangan
	Prog.41 Festival Seni dan Budaya	- Fasilitasi dan pendampingan festival yang ada di masing-masing kelurahan - Festival seni budaya oleh Pemkot setiap tahun - Festival tematik yang dilakukan rutin atau berkala - Pelatihan khusus penyelenggaraan festival dan pelaksanaan kurasi festival yang difasilitasi oleh Pemkot							- Festival seni dan budaya yang terlaksana - Pelaksanaan festival seni dan budaya di kelurahan	- Parwisata - Kebudayaan - Kewilayahan
	Prog.42 Pembangunan Gedung Kerenan	1 gedung pusat kerentanan beserta pengembangan kewasatannya							2 gedung kerentanan	- Kelurahan - Kepegawaian Umum dan Penataan Ruang
	Prog.43 Rumah Pelayanan Rumah Bidad	- Fasilitasi pembangunan rumah bidad - Pembangunan rumah bidad lebih terencana dan teratur - Meningkatnya peran rumah bidad - Meningkatnya peran tokoh agama							Layanan rumah bidad yang diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah	Sekretariat Daerah

Visi/Misi	Program Unggulan	Uraian	Rencana Pelaksanaan						Target	Bidang Urusan/ Unsur
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
 Meningkatkan layanan dan profesionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang profesional	Prog.76. Puluh Belagi	- Memantapkan nilai-nilai keagamaan dalam koridor SDM kota - Meningkatkan kesetiaan antariksa korupasi - Dapat terintegrasi dengan pelayanan rumah ibadah - Meningkatkan peran rumah ibadah dan tokoh agama							Regulasi pendirian bangunan bagi rumah ibadah	- Sekretariat Daerah - Pendidikan - Kewilayahan
	Prog.77. Pelestarian Seni Budaya	Pertarung dan sarana pelestarian seni budaya pada gedung kesenian dan kawasannya							- Regulasi pelestarian seni budaya - Daftar rumah bagi pelaku seni budaya	- Pariwisata - Kebudayaan
	Prog.78. PNS Majang Literasi Sosial	- Memberikan kesempatan penyediaan insentif kerja bagi PNS di negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika, Singapura, dll - Memberikan lapangan workshop maupun short course bagi PNS di luar negeri							Jumlah PNS yang magang	- Kepengawasan - Pendidikan dan Pelatihan
	Prog.79. PNS Majang Nasional	- Majang PNS ke komunitas/keluarga BUMN 3 @ PNS per OPD - PNS yang mengikuti program diaduksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan							Jumlah PNS magang	Kepengawasan
 Meningkatkan layanan dan profesionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang profesional	Prog.80. Open & Responsive Government	- Menghadirkan transparansi data dan kemudahan akses informasi oleh masyarakat ke Pemkot - Menghadirkan kanal Operanet dan Operanip yang terintegrasi dengan Sanggahu							- Tingkat keterbukaan informasi kepada publik - Peningkatan kecepatan dan	- Sekretariat Daerah - Komunikasi dan Informatika - Ketentransan - Kesetiaan Unsur
	Prog.79. Audit APED oleh Auditor Independen	- Meningkatkan kecepatan respon atau oleh Satgas Cepat Tanggap - Meningkatkan kecepatan layanan Pemkot kepada masyarakat - Meningkatkan kecepatan penanganan pelaporan masyarakat melalui fitur Laporan pada Sanggahu							Kecepatan respon terhadap aduan/laporan masyarakat serta kejadian bencana/berbahaya	- dan Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa & Politik - Keuangan
	Prog.81. City Branding	Audit keuangan terhadap proyek dan BUMD							Jumlah audit yang dilakukan	- Pengawasan - Keuangan
	Prog.82. E-Government	- Membangun citra kota sebagai lokasi promosi kota untuk menarik kedatangan orang dan investasi masuk - City branding secara komprehensif melalui musik, tarian, kuliner, kriya, budaya, dll							Brand city yang terbentuk	Pariwisata
	Prog.83. One Touch Iden Kota Palu	- Penerapan smart city - Pengembangan e-planning, e-budgeting, e-monitoring, dll							Sistem yang dikembangkan dan diterapkan	Komunikasi dan Informatika
	Prog.84. One Touch Iden Kota Palu	- Seri aplikasi digital untuk seluruh layanan pemerintah dan berbagai informasi - Bank data							7 aplikasi	Komunikasi dan Informatika
	Prog.85. Pusat Layanan Digital	- Menghadirkan Pusat Layanan Digital bagi seluruh OPD dan masyarakat - Meningkatkan transformasi digital dalam pelayanan - Pembentukan UPTD Pusat Layanan Digital							1 pusat layanan digital - Integrasi seluruh sistem digital Pemerintah Kota Palu 1 bangunan/ ruang command center	Komunikasi dan Informatika
	Prog.86. Satgas Cepat Tanggap	- Teknisnya 1 satgas yang beranggotakan lima OPD - Terselenggara SOP pelaksanaan tugas - Terintegrasi dengan web/aplikasi laporan							- Satgas yang terbentuk - Kepastian penanganan aduan dan kejadian	- Ketentransan - Kesetiaan Unsur - dan Perlindungan Masyarakat - Sosial - Kesehatan
	Prog.87. Trans-formasi Puskesmas menjadi Klinik Modern	- Pelayanan dan fasilitas puskesmas berskala klinik modern - Pengadaan dokter spesialis di puskesmas yang menjadi klinik modern							5 unit puskesmas yang bertransformasi	Kesehatan
	Prog.88. Satu Ambulans Satu Kelurahan	Ambulans dapat berupa mobil siaga yang ditempatkan di kelurahan							22 unit ambulans	- Kesehatan - Kewilayahan
 Meningkatkan layanan dan profesionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang profesional	Prog.89. Bina Gratis untuk Siswa	- Bis gratis khusus bagi anak sekolah 3 koridor bus gratis setiap pagi dan sore							3 unit bus	Perhubungan
	Prog.90. Quick Service License	Penyusunan SOP pelayanan publik							100% Peningkatan kecepatan layanan	- Sekretariat Daerah - Perencanaan Midat - Keuangan
	Prog.91. Penerapan ISO atau Pelayanan Publik di Semua Instansi	Penerapan ISO Pelayanan Publik							3 unit kerja dan layanan	Sekretariat Daerah
 Meningkatkan layanan dan profesionalitas dalam tata kelola pemerintahan yang profesional	Prog.92. Pelayanan Perumahan KIP, KIP, & Akta Lahir di Kelurahan	- Seluruh urusan dokumen legalisir akan selesai di kelurahan - Desentralisasi data administratif secara menyeluruh - Terbuka dengan sistem digital							5 kecamatan	- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kewilayahan

Setiap program prioritas akan diterjemahkan ke dalam kegiatan strategis perangkat daerah secara konsisten dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mengedepankan prinsip money follow program dan money follow result. Penganggaran dilakukan melalui pendekatan berbasis hasil, disertai mekanisme evaluasi yang terukur dan transparan. Selain itu, pelaksanaan program prioritas juga diarahkan untuk mendorong sinergi antar tingkat pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, guna memastikan keberhasilan pembangunan secara komprehensif.

Dengan pendekatan program prioritas yang tajam, terukur, dan berdampak nyata, Pemerintah Kota Palu berkomitmen mendorong pembangunan yang bukan hanya bersifat sektoral dan fisik, tetapi juga transformasional dan manusiawi, menuju kota yang mandiri, aman, nyaman, dan tangguh yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa depan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Selaras dengan strategi pembangunan daerah, disorot arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Palu mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2025–2030 disusun sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Palu Mantap Berkelanjutan. Arah kebijakan ini mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, inklusivitas, ketahanan, dan kemajuan teknologi dalam setiap aspek pembangunan, serta diturunkan secara langsung dari misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.8 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palu 2025-2030

Misi	Arah Kebijakan
 Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing	1. Meningkatkan daya saing ekonomi, dunia usaha, dan investasi 2. Meningkatkan pengembangan industri pengolahan dan industri kecil menengah 3. Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusi 4. Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan kewirausahaan 5. Mengembangkan inkubator bisnis menjadi akselerator bisnis 6. Mengembangkan klaster industri dan klaster perdagangan/jasa 7. Mendorong pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular 8. Mendorong pengembangan ekonomi syariah 9. Meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus 10. Meningkatkan pertumbuhan investasi 11. Meningkatkan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, dan penanaman modal 12. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 13. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata 14. Meningkatkan kelembagaan dan SDM pariwisata 15. Meningkatkan promosi pariwisata dan mengembangkan <i>city branding</i> 16. Meningkatkan pengembangan ekonomi dan industri kreatif 17. Menghadirkan <i>creative hub</i> dan ruang kolaborasi 18. Meningkatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah 19. Meningkatkan akses dan jangkauan pasar bagi produk lokal 20. Mengembangkan pasar digital dan <i>market place</i> 21. Meningkatkan digitalisasi ekonomi 22. Meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan, baik G-G, G-B, maupun B-B 23. Membentuk dan melakukan transformasi BUMD
	1. Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman

Misi

Arah Kebijakan

Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni

3. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau
5. Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kemitraan pengelolaan sampah
7. Meningkatkan kinerja pelaksana pengelolaan sampah di kecamatan dan kelurahan
8. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 9R di tingkat kelurahan dan RT/RW
9. Menerapkan konsep hidup peduli lingkungan dan memulai gerakan bebas sampah
10. Meningkatkan penguatan infrastruktur berketahanan bencana
11. Meningkatkan pengembangan infrastruktur inklusi, responsif gender, ramah difabel, dan ramah anak
12. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan
13. Meningkatkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu, aman, dan ramah lingkungan
14. Meningkatkan kualitas sistem jaringan drainase
15. Meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air
16. Meningkatkan cakupan layanan air minum
17. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
18. Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik
19. Meningkatkan layanan sanitasi aman dan layak
20. Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
21. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman
22. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh
23. Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi
24. Melakukan penataan titik parkir tepi jalan
25. Mengembangkan infrastruktur kota yang aman berbasis kawasan dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan kota
26. Mengembangkan pusat kegiatan kota sesuai dengan rencana tata ruang
27. Melakukan penataan kota berbasis kawasan tematik
28. Mengembangkan sistem inovatif dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
29. Meningkatkan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
30. Meningkatkan ketahanan kota dan pengurangan risiko bencana
31. Meningkatkan kapasitas kota dalam penanggulangan bencana
32. Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi bencana
33. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi
34. Meningkatkan pelayanan peringatan dini multiancam bencana
35. Meningkatkan kinerja satuan respon cepat terhadap kejadian bencana dan kejadian lainnya
36. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
37. Meningkatkan pengendalian ketenteraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan
38. Meningkatkan pengawasan ketertiban lingkungan kota dan penanganan pelanggaran peraturan daerah
39. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat



Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk manusia berkualitas dan produktif
2. Meningkatkan akses layanan pendidikan
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak, budi pekerti, dan karakter
4. Meningkatkan prestasi pendidikan
5. Memberikan beasiswa dan dukungan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, serta pemerataan kualitas sekolah
7. Mengembangkan sistem dan manajemen pendidikan berbasis elektronik
8. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi

Misi

Arah Kebijakan

9. Meningkatkan jumlah sekolah berakreditasi sangat baik
10. Meningkatkan akses layanan kesehatan
11. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
12. Menghadirkan layanan kesehatan mental
13. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan
14. Memberikan jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
15. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu, anak, dan difabel
16. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
17. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan pencegahan stunting
18. Meningkatkan sistem layanan kesehatan berbasis elektronik
19. Memastikan ruang khusus bagi dunia usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
20. Memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat dan usaha masyarakat
21. Meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda
22. Meningkatkan daya saing dan profesionalisme pemuda
23. Mendorong peningkatan kewirausahaan sosial
24. Melakukan pertukaran pemuda dan pelajar di dalam dan luar negeri
25. Meningkatkan partisipasi dan prestasi olahraga
26. Meningkatkan pengembangan minat dan bakat
27. Meningkatkan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
28. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial
29. Meningkatkan layanan sosial yang terintegrasi
30. Meningkatkan kualitas kota yang bagi ramah difabel dan layak anak
31. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
32. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan
33. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
34. Meningkatkan kualitas keluarga dan pemberdayaan keluarga
35. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan anak
36. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan dan petani
37. Meningkatkan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
38. Memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja
39. Mengembangkan kerja sama ketenagakerjaan
40. Meningkatkan pelayanan terhadap rumah ibadah dan petugas rumah ibadah
41. Meningkatkan peran rumah ibadah dalam pengembangan masyarakat
42. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
43. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kesatuan bangsa
44. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
45. Meningkatkan promosi budaya dan penguatan kearifan lokal dan nilai kebangsaan
46. Mengembangkan kurikulum muatan lokal
47. Meningkatkan kesadaran minat baca dan literasi masyarakat
48. Menghadirkan ruang literasi di ruang-ruang public



Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional

1. Memantapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Memantapkan sistem manajemen talenta ASN
3. Memantapkan sistem meritokrasi ASN
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada ASN
6. Melakukan magang ASN di dalam dan luar negeri
7. Memantapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu
8. Melakukan penataan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien
9. Meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah
10. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional
11. Mendorong penganggaran berbasis ekologi
12. Meningkatkan pembiayaan pembangunan non pemerintah
13. Meningkatkan pengelolaan aset daerah
14. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
15. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah

Misi

Arah Kebijakan

16. Memantapkan inovasi pada setiap OPD, internal OPD, antar OPD, dan antar OPD dengan *stakeholder* lainnya
17. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi
18. Memantapkan pengembangan *smart city* dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya
19. Membentuk pusat layanan digital
20. Meningkatkan akses digital di seluruh wilayah kota
21. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi
22. Memantapkan sistem satu data dan satu peta secara lengkap, terintegrasi, dan terdigitalisasi
23. Meningkatkan sistem keamanan data dan keamanan digital
24. Menerapkan standar pelayanan berkualitas berstandar nasional dan internasional
25. Mengembangkan sistem pelayanan pemerintah yang terbuka, cepat, dan akurat
26. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon pemerintah terhadap laporan dan aduan masyarakat
27. Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pengelolaan kota
28. Meningkatkan penataan regulasi daerah dan kualitas kebijakan pemerintah kota
29. Meningkatkan pembangunan dan perlindungan hukum

Arahan kebijakan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan setiap organisasi perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pengalokasian anggaran daerah. Dengan arah kebijakan yang terfokus dan sistematis, Pemerintah Kota Palu optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial, berkelanjutan dan layak huni secara lingkungan, dan profesional secara tata kelola pemerintahan.

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)



Bab. 4

**PROGRAM PERANGKAT
DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Palu pada RPJMD 2025–2029 memiliki Visi “Terwujudnya Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”. Untuk mencapai visi, setiap perangkat daerah didorong untuk menjalankan program yang selaras dengan visi-misi kepala daerah dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah. Seluruh perangkat daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan sesuai tujuan tercapainya visi Kepala Daerah dan sinergi dengan visi pembangunan jangka panjang. Dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah dan partisipasi publik yang luas, RPJMD Kota Palu 2025–2029 akan menjadi landasan kuat untuk “Terwujudnya Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif” dengan 53+35 Program Unggulan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Palu 2025-2045 “Palu sebagai Global City yang Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan tag line “Palu Global City” yang diwujudkan dengan menyelesaikan tugas tahapan Milestone RPJPD Kota Palu Tahun 2025-2045 Tahap I melalui RPJMD Kota Palu 2025-2029, yaitu Kota Palu sebagai green city, resilient city, livable city, dan geopark city. Berikut disampaikan penjabaran dari green city, resilient city, livable city, dan geopark city untuk dapat dijadikan panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan.

Green City

Tujuan:

Kota Ekologis dan Ramah Lingkungan yang terencana dan didisain dengan baik sehingga tercipta kualitas layanan yang mendukung kenyamanan warga, kebahagiaan, dan kesejahteraan berkelanjutan.

Indikator

- 1) Perencanaan dan Desain (Green Planning & Design)

Penerapan perencanaan dan desain kota yang menguatkan citra sebagai kota hijau.

- 2) Tanah (Green Soil)

Menjaga tanah sehat: Pengelolaan limbah tanpa pencemaran; Pengaturan penggunaan air tanah aman berkelanjutan.

- 3) Air (Green Water)

Pengelolaan air mandiri: Air bersih dan sehat; Air dapat langsung diminum; efisiensi penggunaan air; penanganan kebocoran sistem distribusi air.

- 4) Udara (Green Air)

Penerapan udara bersih: Transportasi publik hijau ramah lingkungan; Penggunaan electric vehicle (kendaraan listrik) dan moda transportasi sepeda.

- 5) Tata Guna Lahan dan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space)

Rencana Tata Ruang Ekologis Berkelanjutan; Peningkatan luas lahan hijau melalui pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; Konservasi kawasan-kawasan rawan bencana.

- 6) Bangunan (Green Building)

Penerapan konsep bangunan hijau pada bangunan publik dan bangunan privat termasuk bangunan di kawasan perumahan.

- 7) Energi Terbarukan (Green Energy)

Penggunaan energi terbarukan: Penggunaan panel surya untuk penerangan umum di ruang terbuka dan bangunan publik.

- 8) Sampah dan limbah (Green Waste)

Pengurangan sampah dan limbah; Pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah berkelanjutan; Pengolahan sampah menjadi energi.

- 9) Transportasi (Green Transportation)

Penyelenggaraan transportasi hijau publik dan privat. Pengurangan kemacetan: penggunaan transportasi publik; tersedianya jalur sepeda dan parkir sepeda serta peningkatan penggunaan sepeda.

- 10) Komunitas Hijau (Green Community)

Pengembangan komunitas hijau: Penataan pekarangan rumah dengan konsep taman keluarga, kebun keluarga yang asri dan dapat memiliki tematik khusus yang mendukung citra sebagai kota wisata yang hijau.

Resilient City

Tujuan:

Katahanan dan Ketangguhan Kota Berkelanjutan

Indikator

1) Energi

Kemampuan menghindari kekurangan energi melalui optimalisasi penyediaan energi, energi baru dan terbarukan; Kemampuan segera pulih jika terjadi krisis energi.

2) Air

Kemampuan menghindari kekurangan air melalui penyediaan air bersih dan sehat yang cukup; Kemampuan segera pulih jika terjadi krisis air.

3) Pangan

Kemampuan menghindari kekurangan pangan dengan akses pangan yang merata bagi seluruh warga; Kemampuan segera pulih jika terjadi krisis pangan.

4) Kesehatan

Kondisi masyarakat sehat dan produktif berkelanjutan; Kemampuan segera pulih dari sakit dengan dukungan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis yang berkualitas.

5) Iklim

Kemampuan dan ketangguhan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

6) Bencana dan Kondisi Tidak Normal

Kesiagaan bencana dan kesiagaan serta ketangguhan dari berbagai kondisi tidak normal termasuk perang, pandemi, disertai ketangguhan mitigasi dan pulih dengan cepat untuk memperbaiki kondisi.

7) Infrastruktur, Sarana Publik dan Bangunan

Kemampuan menyiapkan infrastruktur, sarana publik dan bangunan tahan bencana utamanya gempa; Kemampuan segera pulih jika terjadi kerusakan infrastruktur, sarana publik, dan bangunan.

8) Ekonomi

Ketahanan, kestabilan, dan ketangguhan ekonomi masyarakat; Kemampuan segera pulih jika terjadi gangguan ekonomi di masyarakat.

9) Keamanan

Wilayah kota yang aman dari berbagai ancaman dan gangguan; Kemampuan pulih dengan cepat apabila terjadi gangguan keamanan.

Livable City

Tujuan:

Kota Inklusif dan Layak Huni

Indikator

1) Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan

Pemerintahan yang bersih, melayani, dan mengayomi; Pemimpin yang mengayomi, responsif, dan transparan.

2) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Tata ruang dengan lingkungan yang ekologis dan tanggap bencana.

3) Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Infrastruktur jalan memadai: Transportasi publik cepat, aman, terjangkau; Ketersediaan dan kecukupan serta akses mudah untuk semua utilitas dasar (air bersih, air minum, listrik, dan internet); Infrastruktur perumahan yang layak dan terjangkau; Ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam; Kuantitas dan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memenuhi kebutuhan dan terjaga dalam kondisi baik dan selalu siap digunakan.

4) Kesehatan dan Kesejahteraan

Ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang baik; lingkungan yang mendukung pola hidup sehat; Kemampuan akses pangan warga; Ketersediaan sanitasi sehat; Angka Harapan Hidup tinggi.

5) Keamanan dan Keselamatan

Perencanaan dan desain kota yang mempertimbangkan mitigasi risiko bencana; Wilayah kota yang aman sehingga warga merasa aman dan nyaman berjalan di seluruh wilayah kota; Tingkat kriminalitas rendah; Penegakan hukum efektif; Kepercayaan warga terhadap aparat; Rasa aman di ruang publik terutama untuk kelompok rentan; Tanggap darurat dan manajemen bencana yang efektif.

6) Akses ke Pendidikan dan Budaya

Ketersediaan, kecukupan, dan akses ke fasilitas pendidikan dan budaya; Kesempatan yang sama untuk mengembangkan budaya dan kreativitas, pelestarian warisan budaya dan sejarah.

7) Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan beragam; Upah yang layak sesuai standar biaya hidup; Peningkatan kewirausahaan; Ekonomi masyarakat yang stabil; Tingkat ketimpangan yang rendah; Tingkat kemiskinan yang rendah.

8) Partisipasi Masyarakat

Tingkat kuantitas dan kualitas keterlibatan warga dan komunitas dalam pengambilan keputusan; Akses informasi yang cepat dan transparan;

Toleransi sosial tinggi; Keadilan sosial yang inklusif.

9) Perumahan dan Rumah

Ketersediaan dan kecukupan perumahan yang layak, terjangkau dengan lingkungan perumahan yang bebas kumuh, bersih dengan rumah tahan gempa dan layak huni; Akses perumahan dekat dengan fasilitas umum dan transportasi.

10) Tata Kelola Perkotaan

Perencanaan dan desain kota yang fungsional, harmoni, estetis, ekologis, dan berkelanjutan; Regulasi dan kebijakan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan; Kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan kota; dan Inovasi dalam pengelolaan kota.

Geopark City

Tujuan:

Pembangunan kepariwisataan berbasis geowisata, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan.

Geopark City Kota Palu merupakan upaya penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan berbasis geowisata yang dilakukan secara partisipatif dan inklusif, ekologis, berbasis pengetahuan kebencanaan; Penerapan mitigasi bencana di semua destinasi wisata; Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis sejarah kebencanaan yang didukung potensi geowisata bentang alam, budaya, dan berbagai keunikan yang menjadi ciri Kota Palu.

Geopark City Kota Palu bukan ditujukan untuk mendapatkan status sebagai Geopark, namun diarahkan kepada upaya membangun 'budaya yang adaptif bagi masyarakat Kota Palu yang tinggal dan yang sedang berada di wilayah rawan bencana melalui penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan berbasis geowisata, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan yang didukung oleh budaya lokal.

Geopark City Kota Palu menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan geowisata inklusif, adil, dan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Indikator

1) Perencanaan dan Manajemen

Perencanaan dan Manajemen Pariwisata: tersedia perencanaan jangka panjang

pembangunan kepariwisataan kota atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota yang berkelanjutan; OPD pengampu kepariwisataan memiliki Rencana Strategis yang sinergi dengan RPJPD, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota, dan RPJMD yang berjalan; Tersedia manajemen pengelolaan penyelenggaraan kepariwisataan secara umum dan manajemen pengelolaan tiap destinasi wisata.

2) Tata Ruang

Tata ruang kepariwisataan berkelanjutan berbasis dimensi bentang alam Kota Palu: Perencanaan, desain, dan penataan kawasan destinasi wisata yang ekologis dan tanggap bencana.

3) Konservasi

Konservasi Kawasan Pariwisata Rawan Bencana: Konservasi kawasan sempadan sesar Palu Koro; Konservasi Kawasan Segi Tiga Sejarah Kebencanaan Kota Palu (Segi Tiga Geo Koro), yaitu area eks tsunami di Teluk Palu, area eks likuefaksi di Petobo dan Balaroa; Konservasi kawasan-kawasan lainnya yang rawan bencana dengan penataan yang aman, nyaman, estetis, sehingga menjadi bagian dari pembangunan kepariwisataan.

4) Edukasi

Pendidikan kebencanaan dan kepariwisataan berbasis masyarakat dan sekolah.

5) Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM untuk menunjang pariwisata berkelanjutan.

6) Kolaboratif, Partisipasi dan Inklusif

Kolaborasi serta partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan secara umum dan secara khusus pembangunan kepariwisataan.

7) Infrastruktur

Kuantitas dan kualitas infrastruktur di kawasan destinasi wisata

8) Fasilitas

Kelengkapan fasilitas wisata di kawasan destinasi wisata

9) Dukungan Pemerintah Daerah

Regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang ekologis dan berkelanjutan.

10) Komunitas

Partisipasi kelompok sadar wisata, gerakan masyarakat sadar wisata, peran warga kota

Keberadaan program tahun 2030 dalam RPJMD 2025–2029 merupakan upaya konkrit untuk

Penyusunan program tahun 2030 menjadi wahana untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor, dalam merumuskan agenda-agenda prioritas yang dapat diwariskan dan dilanjutkan oleh pemerintahan daerah berikutnya. Pendekatan ini sekaligus mencegah terjadinya diskontinuitas atau pemutusan arah pembangunan karena adanya perubahan kepemimpinan. Oleh karena itu, target tahun 2030 dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dapat dipandang sebagai "jembatan strategis" yang menyatukan dua periode pemerintahan daerah, memastikan kesinambungan visi pembangunan, serta memperkuat legitimasi arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Palu. Berikut disampaikan daftar Program Perangkat Daerah untuk RPJMD Kota Palu 2025-2029.

Kategorie	Produkt	Kategorie	Produkt	Lagerbestand und Verkaufssituation									
				Lagerbestand	Verkauf	Lagerbestand	Verkauf	Lagerbestand	Verkauf	Lagerbestand	Verkauf	Lagerbestand	Verkauf
1	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	52	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	94	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	96	...	...	...	...	...						

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 188 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 189 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 190 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 191 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 192 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 193 dari 241

RPJMD Kota Palu 2025-2029 - Hal. 194 dari 241

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	Persen (%)	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,20	4,25-4,35	4,35-4,45	4,45-4,60	4,60-4,75	4,75-4,90	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen (%)	73,25	75,00-77,00	77,00-79,00	79,00-81,00	81,00-84,00	84,00-86,00	
4	Indeks Infrastruktur Daerah	Persen (%)	50,66	55,00-56,00	58,00-61,00	61,00-64,00	64,00-69,00	69,00-75,00	
5	Indeks Risiko Bencana	Poin	119-115	110-118	108-110	106-108	104-106	102-104	
6	Indeks Kewaspadaan Nasional	Persen	73,00	75,00-77,50	77,50-80,00	82,5-85,00	85,00-87,50	87,50-90,00	
7	Indeks Kualitas Manusia	Poin	0,69	0,70-0,71	0,71-0,72	0,72-0,74	0,74-0,76	0,76-0,78	
8	Indeks Pembangunan Inklusif	Poin	8,85	7,00-7,15	7,15-7,30	7,30-7,60	7,60-7,90	7,90-8,15	
9	Indeks Aktualisasi Pancasila	Persen (%)	83,25	84,00-85,50	85,50-87,00	87,00-88,00	88,00-91,00	91,00-92,50	
10	Indeks Sistem Merit	Poin	0,55	0,55-0,60	0,60-0,70	0,70-0,80	0,80-0,85	0,85-0,90	
11	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen (%)	70,92	75,00-79,00	79,00-83,00	83,00-87,00	87,00-91,00	91,00-95,00	
12	Indeks Inovasi Daerah	Persen (%)	55,91	60,00-65,00	65,00-70,00	70,00-75,00	75,00-80,00	80,00-90,00	
13	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,54	3,60-4,00	4,00-4,20	4,20-4,10	4,10-4,70	4,70-4,90	

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (1-100)	82,43	83,15	83,15	83,15	83,15	83,15	
2	Nilai Kota Pangan Aman	Angka (1-100)	60-62	63-63	66-68	69-71	72-73	74-75	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1621	1832,57	2054,14	2315,71	2431,50	2663,07	
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	101,95	107,32	112,98	118,93	125,21	131,81	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka (1-100)	76,0	76,20	77,00	78,20	80,35	80,40	
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	106,15	111,83	117,78	124,05	130,65	137,6	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	%	72,00	73,64	75,29	76,93	77,75	79,39	

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
	Pengolahan Sampah (%)								
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	60,00	62,56	63,71	65,37	70,00	72,56	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ eq.)	%	279.789,04	317.429,60	355.070,16	392.710,73	430.351,29	467.991,53	
10	Prevalensi ketidak cukupan pangan	%	6,20	5,50	5,40	5,00	4,50	4,40	RPJPD 2023-2045
11	Indeks Kualitas Air	Angka	60,75	62,00	63,00	63,50	63,55	63,55	RPJPD 2023-2045
12	Indeks Kualitas Udara	Angka	57,44	57,55	57,65	57,82	57,93	57,93	RPJPD 2023-2045
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	112-113	110-112	108-110	106-108	104-106	102-104	
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka (0-1)	0,65	0,7-0,72	0,72-0,73	0,73-0,79	0,79-0,83	0,83-0,90	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,02	1,19	1,35	1,60	1,56	2,17	
16	Rasio Penduduk	%	100,33	100,21	100,10	99,99	99,57	99,76	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	995	1.009	1.020	1.031	1.042	1054	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,69	3,56	3,43	3,30	3,17	3,04	RPJPD 2023-2045
2	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kecamatan	%	2,00	1,90	1,80	1,70	1,63	1,60	RPJPD 2023-2045
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	49,07	50,15	51,23	52,31	52,33	53,41	RPJPD 2023-2045
4	Indeks Wiliamson	Nilai IW	0,30	0,25	0,27	0,26	0,23	0,25	RPJPD 2023-2045
5	PDRB Perkapita (Juta)	Juta Rupiah/Orang/Tahun	59,00-91,00	91,00-92,00	92,00-93,00	93,00-94,50	94,50-96,50	96,50-97,61	RPJPD 2023-2045
6	Rasio Gini	Nilai	0,330	0,328	0,325	0,315	0,304	0,303	RPJPD 2023-2045
7	Pertumbuhan PDRB	4,61	5,00 - 5,12	5,00 - 5,55	5,55 - 6,01	6,01 - 6,34	6,34 - 6,625	6,63 - 6,91	
8	Kontribusi PDRB Kota	%	7,20-7,55	7,59-8,20	8,21-8,50	8,51-8,95	8,95-9,10	9,10-9,40	RPJPD 2023-2045
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-5,12	5,00-5,55	5,55-6,01	6,01-6,34	6,34-6,63	6,63-6,91	RPJPD 2023-2045
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	54,20	54,70	55,00	55,55	55,95	56,00	RPJPD 2023-2045
11	Rata-Rata Nilai PISA : Literasi Membaca SD	Nilai	64,91	67,41	69,91	72,41	74,91	77,41	RPJPD 2023-2045

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
12	Rata-Rata Nilai PISA : Literasi Membaca SMP	Nilai	72,91	74,01	75,11	76,21	77,31	78,41	RPJPD 2023-2043
13	Rata-Rata Nilai PISA : Numerasi SD	Nilai	34,19	37,09	39,99	42,89	45,79	48,69	RPJPD 2023-2043
14	Rata-Rata Nilai PISA : Numerasi SMP	Nilai	63,65	65,15	66,65	68,15	69,65	71,15	RPJPD 2023-2043
15	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun	Tahun	11,79	11,83	11,88	11,92	11,96	12	RPJPD 2023-2043
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,60	16,65	16,76	16,84	16,92	17	RPJPD 2023-2043
17	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	79,82	RPJPD 2023-2043
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	79,82	RPJPD 2023-2043
19	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,95	74,00	74,05	75,00	75,05	76,00	RPJPD 2023-2043
20	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	120,00	110,00	100,00	89,00	88,00	87,00	RPJPD 2023-2043
21	Prevalensi Stunting %	%	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,36	RPJPD 2023-2043
22	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	435,00	405,00	385,00	355,00	330,00	305,00	RPJPD 2023-2043
23	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) %	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	RPJPD 2023-2043
24	Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) %	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	RPJPD 2023-2043
25	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional %	%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	RPJPD 2023-2043
26	Tingkat Kemiskinan	%	3,90	3,40	4,90	4,40	3,90	3,50	RPJPD 2023-2043
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	35,00	35,00	35,00	35,00	47,50	47,50	RPJPD 2023-2043
28	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	RPJPD 2023-2043

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
29	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	RPJPD 2023-2045
30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	56,01	56,43	56,55	57,25	57,71	58,17	RPJPD 2023-2045
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai (0-1)	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	RPJPD 2023-2045
32	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	70,29	72,77	75,25	77,73	80,21	82,68	RPJPD 2023-2045
33	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Skala (0-100)	63,94	67,05	68,16	69,27	70,38	72,66	RPJPD 2023-2045
34	Tingkat Inflasi	%	2% - 1 %	2% - 1 %	2% - 1 %	2,5% - 1 %	2,5% - 1 %	2,5% - 1 %	RPJPD 2023-2045
35	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (%)	%	10,55	12,35	25,75	20,25	24,51	24,51	RPJPD 2023-2045
36	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	0,03	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	RPJPD 2023-2045
37	Nilai Transaksi Saham per Kapita Kota Palu	Angka	16.345.000	17.229.655	18.114.375	18.999.063	19.883.750	19.883.750	RPJPD 2023-2045
38	Total Kredit/PDRB	%	12,5	17,3	21,5	26,3	27	31,5	RPJPD 2023-2045
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Angka	6,90 - 6,95	6,97 - 7,30	7,32 - 7,53	7,90 - 8,25	8,30 - 8,65	8,75 - 9,15	RPJPD 2023-2045
2	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	41,6	43,6	43,6	45,5	53,9	53,9	RPJPD 2023-2045
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	6,90 - 6,95	6,97 - 7,30	7,32 - 7,53	7,90 - 8,25	8,30 - 8,65	8,75 - 9,15	RPJPD 2023-2045
4	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah %	%	2,3	2,41	2,53	2,64	2,79	2,90	RPJPD 2023-2045
5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	75,00	RPJPD 2023-2045
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	62,94	63,35	64,33	65,54	68,34	68,34	RPJPD 2023-2045
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	RPJPD 2023-2045
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks (0-7)	4,21	4,35	4,50	5,35	6,65	7,00	RPJPD 2023-2045
9	Persentase pembiayaan inovatif	%	5	5,44	11,55	15,32	15,75	22,19	RPJPD 2023-2045
10	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kota Palu	Skala huruf A hingga F (Level of Service/LOS)	44	56	58	110	132	154	

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
11	Rasio konektivitas simpul transportasi antar wilayah kecamatan-kelurahan	%	80	80	80	90	90	90	RPJPD 2025-2045
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	RPJPD 2025-2045
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,50	3,00	3,10	3,20	3,30	3	RPJPD 2025-2045
14	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah %	%	12,33%	13,44%	14,54%	15,65%	16,75%	17,86%	RPJPD 2025-2045
15	Rasio kewirausahaan daerah %	%	0,023%	0,027%	0,029%	0,032%	0,034%	0,037%	RPJPD 2025-2045
16	Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum di sektor Pariwisata	Angka	0,55	1-2%	1-2%	2-3%	2-3%	2-3%	RPJPD 2025-2045
17	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu)	Jumlah orang	3,00 – 4,00	4,00 – 4,80	4,82 – 5,70	5,73 – 6,40	6,50 – 7,30	7,50 – 8,00	RPJPD 2025-2045
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK (%)	%	0,57	0,90	1,01	1,09	1,23	1,45	RPJPD 2025-2045
19	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	%	95,33	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	RPJPD 2025-2045
20	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	4,97	4,98	4,99	5,00	5,01	5,02	
21	Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah	5	5	5	5	5	5	RPJPD 2025-2045
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,49	0,53	0,57	0,62	0,76	0,81	RPJPD 2025-2045
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	30,29	33,00	40,00	45,00	47,72	48,99	RPJPD 2025-2045
3	Persentase Kondisi Mantap untuk jalan kota	%	0,76	0,80	0,84	0,88	0,93	0,97	RPJPD 2025-2045
4	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	66,32	68,32	70,32	72,32	74,74	75,74	RPJPD 2025-2045
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	20,15	40,15	50,15	60,15	70,15	75,15	RPJPD 2025-2045

N O.	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN RPJMD (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
6	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh/kapita/tahun	1.621	1.775,00	1.900,00	1.900,00	2.026,25	2.200,00	RPJPD 2023-2045
7	Persentase Rumah Layak Huni	%	78,200	78,400	78,600	78,800	79,100	79,200	RPJPD 2023-2045
8	Return on Asset (ROA) BUMD/Perusda	Angka	2,00	2,20	2,55	2,75	2,85	2,85	RPJPD 2023-2045
9	Indeks Reformasi Hukum	Angka	95,20	95,35	95,50	95,65	95,80	95,85	RPJPD 2023-2045
10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,00	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	RPJPD 2023-2045
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,01	82,30	85,01	87,30	90,01	91,00	RPJPD 2023-2045
12	Indeks Integritas Nasional	Angka	60	65	70	75	80	85	RPJPD 2023-2045
13	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100	RPJPD 2023-2045
14	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	52	53,5	55,5	56,5	58,5	59,5	RPJPD 2023-2045
15	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	53,5	53,75	54	54,25	54,5	54,75	RPJPD 2023-2045
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,75	77	77,25	77,5	77,75	78	RPJPD 2023-2045

4.2.3 Target Keberhasilan Pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	65,25	71,32	74,36	77,40	80,44	83,40	86,37	Forman dari 15/2020 (LFPD)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,63	95,63	95,63	95,63	95,63	95,63	100	Forman dari 15/2020 (LFPD)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	100	Forman dari 15/2020 (LFPD)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	45,45	53,69	60,16	66,67	73,16	73,92	74,65	Forman dari 15/2020 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	dalam pendidikan kesetaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42,71	43,73	46,74	51,76	54,77	57,79	60,80	Perman dagri 26/2017
6	Angka Partisipasi Kasar	106,22	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
7	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	59,43	59,43	59,43	59,43	59,43	59,43	60,43	Perman dagri 26/2017
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,55	96,57	97,25	97,94	98,63	99,31	100	Perman dagri 26/2017
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,51	83,50	84,15	84,57	85,56	86,24	100	Perman dagri 26/2017
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,63	95,63	95,63	95,63	95,63	95,63	100	Perman dagri 26/2017
11	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	95,27	100	Perman dagri 26/2017
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97,21	97,35	97,54	97,71	97,88	98,04	98,21	Perman dagri 26/2017
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	96,66	Perman dagri 26/2017
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	37,45	37,45	37,45	37,45	37,45	37,45	38,45	Perman dagri 26/2017
19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	01:15	01:16	01:16	01:17	01:17	01:18	01:18	Perman dagri 26/2017
20	Rasio guru terhadap murid	01:13	01:14	01:14	01:15	01:15	01:16	01:16	Perman dagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pendidikan menengah								
21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,042	Forman dagri 26/201 7
22	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,130	Forman dagri 26/201 7
23	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100	100	100	100	100	100	100	Forman dagri 26/201 7
24	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	100	Forman dagri 26/201 7
25	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	100	Forman dagri 26/201 7
26	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	95,54	Forman dagri 26/201 7
B	Kesehatan								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	4,61	4,50	4,53	4,60	4,63	4,70	4,73	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,60 %	97,00 %	97 %	98 %	98 %	99 %	100 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,45 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94 %	94 %	94 %	93 %	93 %	96 %	96 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,03 %	92 %	92 %	93 %	93 %	94,00 %	94,00 %	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,63 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,30%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,41%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	105,49 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71,65%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	109%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	126,16%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3,5	3	3	3	4	4	4	Perman dagri 26/201 7
16	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9942	0,9950	0,9950	0,9950	0,9960	0,9960	0,9960	Perman dagri 26/201 7
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Perman dagri 26/201 7
18	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,6	3	3	3	4	4	4	Perman dagri 26/201 7
19	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	79	120	110	100	89	88	87	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Presentasi Posyandu Siklus hidup yang aktif	15,34%	20,96%	23,58%	26,20%	28,82%	31,44%	34,06%	Forman dagri 26/201 7
21	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Forman dagri 26/201 7
22	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Forman dagri 26/201 7
23	Rasio dokter per satuan penduduk	2,03	3,17	4,29	5,41	6,53	7,65	8,77	Forman dagri 26/201 7
24	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,30	3,42	4,54	5,66	6,78	7,90	9,02	Forman dagri 26/201 7
25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90%	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	Forman dagri 26/201 7
26	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	99,45 %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Renstra Kemenk sa RI 2020- 2029
27	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	89,13	85%	85%	87%	87%	90%	90%	Forman dagri 26/201 7
28	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 7
29	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	109%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 7
30	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	66,64%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	Forman dagri 26/201 7
31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	109%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	Forman dagri 26/201 7
32	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	25,87	24,3	22,76	21,23	19,77	18,32	16,91	Forman dagri 26/201 7
33	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	69%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	Forman dagri 26/201 7
34	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	77%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Forman dagri 26/201 7
35	Cakupan penemuan dan penanganan	77%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Forman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	penderita penyakit DBD Penderita diare yang ditangani	147,01	100	100	100	100	100	100	Forman dagri 26/201 r
37	Angka kejadian Malaria	0,052	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Forman dagri 26/201 r
38	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,51	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	Forman dagri 26/201 r
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	1,28%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,25%	Forman dagri 26/201 r
40	Cakupan kunjungan bayi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 26/201 r
41	Cakupan puskesmas	175%	175%	175%	175%	175%	175%	175%	Forman dagri 26/201 r
42	Cakupan pembantu puskesmas	63,04%	63,22%	63,22%	63,22%	63,22%	63,22%	63,22%	Forman dagri 26/201 r
43	Cakupan kunjungan Ibu hamil K+	93 %	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	Forman dagri 26/201 r
44	Cakupan pelayanan nifas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 26/201 r
45	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 26/201 r
46	Cakupan pelayanan anak balita	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	96 %	96 %	Forman dagri 26/201 r
47	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	88,7 %	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Forman dagri 26/201 r
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	50,14%	51%	51,30%	52%	52,50%	53%	53,30%	Forman dagri 26/201 r
49	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 26/201 r
50	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Forman dagri 26/201 r
51	Jumlah kasus TBC yang harus ditemukan	Angka	1.521	1.305	1.130	1.003	907	832	Buat Kasus Pencap an Kasus TB 2023- 2029

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI	%	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00	Rencana Memenuhi RI 2020-2029
53	Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil	%	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
54	Pemberian tablet tambah darah / multiple micronutrient supplementation (MMS) sebanyak 150 butir selama masa kehamilan	%	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
55	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
56	Praktik inisiasi menyusui dini	%	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
57	Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	62,00	63,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
58	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) beragam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
59	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
60	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	90,50	90,50	91,00	91,50	91,50	92,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
61	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
62	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi rutin lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
63	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
64	Anak usia 6-23 bulan mendapat oba cacing (POPM)	%	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	Keputusan Bupati 200.3.7-1622/2023
65	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan Bupati 200.3.7-

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mendapat tata laksana gizi buruk								1925 2025
66	Anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
67	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
68	Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
69	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	%	76,50	76,50	77,00	77,50	77,50	78,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
70	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
71	Skrining anemia terhadap remaja putri	%	96,00	96,20	96,50	96,50	97,00	97,20	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
72	Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan	%	73,50	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
73	Akses terhadap air minum aman	%	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	Keputusan daerah 2025.7- 1925 2025
74	Usia harapan hidup	Tahun	73,93	74,00	74,03	75,00	75,03	76,00	Survei Kecamatan 2024- 2025
75	Jumlah kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	21	19	18	12	9	6	Survei Kecamatan 2024- 2025
76	Jumlah kematian balita	per 1.000 kelahiran hidup	40	35	30	25	20	15	Survei Kecamatan 2024- 2025
77	Prevalensi stunting	%	3,41	3,4	3,39	3,35	3,37	3,36	Survei Kecamatan 2024- 2025
78	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Survei Kecamatan 2024- 2025
79	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Survei Kecamatan 2024- 2025
80	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	83,00	83,50	84,00	84,50	86,00	86,50	Survei Kecamatan 2024- 2025

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S1	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Surat Edaran Menteri ca 2022-2023
S2	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Surat Edaran Menteri ca 2022-2023
S3	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	65,00	66,10	67,90	69,70	70,80	71,90	Surat Edaran Menteri ca 2022-2023
S4	Akses terhadap sanitasi aman	%	55,20	55,30	55,30	59,00	59,20	59,30	Surat Edaran Menteri ca 2022-2023
S5	Kepemilikan JKN	%	53,00	53,50	54,00	54,5	56,00	56,50	Keputusan dari 200.5.7-1022 2023
S6	Anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keputusan dari 200.5.7-1022 2023
S7	Persentase balita gizi buruk	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	
S8	Prevalensi balita gizi kurang	5,33	5,31	5,29	5,27	5,25	5,22	5,00	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64	68,94	73,76	78,93	84,45	90,36	96,69	Permen dari 15/2020 (LPPD)
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96,2	96,42	96,73	97,11	97,33	98,06	98,62	Permen dari 15/2020 (LPPD)
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,00	75,00	76,01	77,69	79,67	81,65	84,21	Permen dari 15/2020 (LPPD)
4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permen dari 15/2020 (LPPD)
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	74,00	76,27	80,09	84,09	88,29	92,71	97,35	Permen dari 15/2020 (LPPD)
6	Rasio tenaga operator/teknisi	62,00	65,02	72,04	75,63	78,88	81,75	84,25	Permen dari 15/2020

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi								0 (LPFD)
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 15/202 0 (LPFD)
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,64	0,66	0,69	0,70	0,72	0,74	0,76	Perman dagri 26/201 7
9	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2,46	2,41	2,36	2,32	2,27	2,23	2,19	Perman dagri 26/201 7
10	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	64,00	65,70	67,67	69,70	71,79	73,95	76,17	Perman dagri 26/201 7
11	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5,00	5,53	7,61	9,59	12,53	16,71	18,35	Perman dagri 26/201 7
12	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,69	0,64	0,59	0,53	0,47	0,41	0,34	Perman dagri 26/201 7
13	Persentase rumah tinggal bersanitasi	10,15	13,69	18,21	18,21	18,21	21,52	0	Perman dagri 26/201 7
14	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	9,60	8,96	8,25	7,61	6,93	6,26	3,59	Perman dagri 26/201 7
15	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tersumbat	63,00	58,41	54,02	49,62	45,22	40,83	36,43	Perman dagri 26/201 7
16	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	37,56	30,03	24,04	19,23	15,39	12,31	9,55	Perman dagri 26/201 7
17	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	64,00	68,94	73,76	78,93	84,45	90,36	96,69	Perman dagri 26/201 7
18	Rasio Jaringan Irigasi	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	Perman dagri 26/201 7
19	Persentase penduduk berakses air minum	96,00	96,62	97,33	98,49	99,30	99,55	99,69	Perman dagri 26/201 7
20	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	94,00	94,74	95,64	97,52	98,32	98,59	98,71	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	perkotaan dan perdesaan								
21	Rasio Ruang Terbuka Hijau perSatuan Luas Wilayah berHPL/HGB	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	20,90%	Perman dagri 26/201 7
22	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	22,11	22,63	23,15	23,67	24,19	24,71	25,23	Perman dagri 26/201 7
23	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	34,81%	35,17%	35,57%	36,01%	36,49%	37,01%	37,59%	Perman dagri 26/201 7
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59,64	62,94	63,46	63,98	64,5	65,02	65,54	Perman dagri 26/201 7
25	Ketaatan terhadap RTRW	93,43%	93,46%	93,47%	93,48%	93,49%	93,50%	93,51%	Perman dagri 26/201 7
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	555	20	90	100	125	125	95	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	767	0	0	200	200	200	167	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	18,43	28,53	28,26	25,15	25,2	25,19	0	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.298	170	150	200	200	200	275	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16.366	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
6	Rasio rumah layak huni	0,146	0,203	0,264	0,323	0,382	0,441	0,50	Perman dagri

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Rasio permukiman layak huni	0,2	0,203	0,264	0,323	0,382	0,441	0,50	Forman dari 26/2017
8	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	Forman dari 26/2017
9	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	95,36	95,36	95,36	95,36	95,36	95,36	95,36	Forman dari 26/2017
10	Persentase pemukiman yang tertata	13,26	15,36	23,86	29,17	34,47	39,78	45,08	Forman dari 26/2017
11	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,25	0,22	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10	Forman dari 26/2017
12	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	86,06	79,17	72,29	65,40	58,52	51,63	44,75	Forman dari 26/2017
13	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	11,29	11,06	10,53	10,61	10,35	10,16	9,93	Forman dari 26/2017
F	Trantibumlinmas								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	Forman dari 15/2020 (LPPD)
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	Forman dari 15/2020 (LPPD)
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	231.396	242.968	255.116	267.572	281.266	295.329	310.095	Forman dari 15/2020 (LPPD)
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.090	3.243	3.407	3.577	3.756	3.944	4.141	Forman dari 15/2020 (LPPD)
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	445	467	491	515	541	568	596	Forman dari 15/2020 (LPPD)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	98,02 % (245/250*100)	97,85%	97,95%	98,02%	98,40%	98,50%	99,20%	Forman dari 15/2020 (LPPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,04 Menit (2036 Menit/253)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
8	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	2,9	3,00	3,00-4,00	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00	Forman dagri 26/201 7
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	100	100	100	100	100	100	Forman dagri 26/201 7
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75,94 (300/395,06)	84,04 %	112%	112%	112%	112%	112%	Forman dagri 26/201 7
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98,02 % (245/253*100)	97,65%	97,95%	98,02%	98,40%	98,60%	99,20%	Forman dagri 26/201 7
12	Persentase Penegakan PERDA	-	100	100	100	100	100	100	Forman dagri 26/201 7
G	Sosial								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	10,81	12%	12%	13%	12%	11%	11%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	104,62	0%	55%	53%	55%	55%	55%	Forman dagri 26/201 7
4	Persentase PMKS yang tertangani	104,62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 7
5	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Perman dagri 26/201 7
7	Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	59 panti	59 panti	59 panti	59 panti	59 panti	59 panti	59 panti	Perman dagri 26/201 7
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	5%	5%	10%	15%	15%	15%	Perman dagri 26/201 7
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
H	Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,5%	20%	20%	20%	20%	20%	20	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	9,32%	9,53%	9,69%	9,84%	10,21%	10,37%	10,57%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	0,75%	1%	1,12%	1,25%	1,37%	1,50%	1,62%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)								
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	14,97%	16,67%	18,33%	20%	21,67%	23,33%	25%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	20%	15%	10%	5%	5%	5%	Perman dagri 26/201 7
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	43,73%	30%	30%	30%	60%	60%	60%	Perman dagri 26/201 7
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	14,97%	16,67%	18,33%	20%	21,67%	23,33%	25%	Perman dagri 26/201 7
9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	69,21%	69,28%	69,33%	69,42%	69,49%	69,56%	Perman dagri 26/201 7
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	Perman dagri 26/201 7
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	20%	25%	30%	35%	40%	50%	Perman dagri 26/201 7
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	25%	30%	35%	40%	50%	25%	Perman dagri 26/201 7
13	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	5%	6%	10%	12%	15%	15%	Perman dagri 26/201 7
I	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	29,55%	30,57%	32,39%	34,61%	36,63%	38,63%	40,67%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	instansi terkait Kabupaten/Kota Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	36,54%	33,34%	33,15%	31,25%	29,13%	26,33%	25,20%	Perman dagri 12/2020 (LFPD)
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,90%	12,11%	12,35%	12,65%	12,98%	13,12%	13,42%	Perman dagri 26/2017
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	23,38%	23,58%	Perman dagri 26/2017
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	55,95%	56,23%	56,53%	56,79%	56,94%	57,13%	57,42%	Perman dagri 26/2017
7	Rasio KDRT	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	Perman dagri 26/2017
9	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	2,82%	2,75%	2,64%	2,49%	2,17%	1,99%	1,76%	Perman dagri 26/2017
10	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,99%	1,49%	1,95%	2,45%	2,97%	3,46%	3,96%	Perman dagri 26/2017
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/2017
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/2017
13	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,24%	0,23%	Perman dagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	terhadap perempuan dan anak								
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	93,88%	93,98%	96,15%	96,30%	96,48%	96,60%	97,05%	Perman dagri 26/201 7
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	82,81%	83,13%	83,46%	83,75%	83,90%	84,03%	84,11%	Perman dagri 26/201 7
17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,30%	0,37%	0,62%	0,66%	0,69%	0,73%	0,75%	Perman dagri 26/201 7
18	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,10%	0,30%	0,50%	0,70%	0,90%	1,10%	1,30%	Perman dagri 26/201 7
J	Pangan								
1	Ketersediaan pangan utama	1128	2400	2400	2400	2400	2400	2400	Perman dagri 26/201 7
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	30,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	Perman dagri 26/201 7
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	85	87	89	91	93	95	Perman dagri 26/201 7
K	Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	94,79%	94,80%	94,81%	94,82%	94,83%	94,84%	94,85%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0	0	0	Perman dagri 26/201 n
6	Persentase luas lahan bersertipikat	27,84%	30,62%	33,68%	37,03%	40,76%	44,83%	49,31%	Perman dagri 26/201 n
7	Penyelesaian izin lokasi	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	Perman dagri 26/201 n
I	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,69	72,05	72,44	72,82	73,21	76,945	80,26	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	80 (Pelaku Usaha)	60 (Pelaku Usaha)	65 (Pelaku Usaha)	70 (Pelaku Usaha)	75 (Pelaku Usaha)	80 (Pelaku Usaha)	85 (Pelaku Usaha)	Perman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Persentase Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat/kabupaten kota yang ditindak lanjuti/ditangan i	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penerapan Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	59,66	60,78	61,4	62,02	62,64	63,26	63,88	Perman dagri 26/201 n
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	91,53	97,44	97,54	97,64	97,74	97,83	97,93	Perman dagri 26/201 n
7	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	59,64	62,94	63,46	63,98	64,5	65,02	65,54	Perman dagri 26/201 n
8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	26 (Pelaku Usaha)	63 (Pelaku Usaha)	65 (Pelaku Usaha)	73 (Pelaku Usaha)	75 (Pelaku Usaha)	83 (Pelaku Usaha)	87,93	Perman dagri 26/201 n

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota								
9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	59,64	62,94	63,46	63,98	64,5	65,02	65,54	Formen dagri 26/201 r
10	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	6 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	8 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	9 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	10 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	11 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	12 Dokumen Hasil Identifikasi i MHA per Lokasi Kegiatan	Formen dagri 26/201 r
11	Terverifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	6 Dokumen Hasil Validasi MHA per Lokasi Kegiatan	8 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	9 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	10 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	11 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	12 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	Formen dagri 26/201 r
12	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	6 Dokumen Hasil MHA per Lokasi Kegiatan	8 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	9 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	10 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	11 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	12 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	Formen dagri 26/201 r
13	Penetapan hak MHA	-	6 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	8 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	9 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	10 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	11 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	12 Dokumen Hasil Verifikasi MHA per Lokasi Kegiatan	Formen dagri 26/201 r
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	1 Unit Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	1 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	2 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	3 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	4 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	5 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	6 Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahunan	Formen dagri 26/201 r
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Tahun 2024	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	1 Dokumen Hasil Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kota Palu Per Tahun Anggaran	Formen dagri 26/201 r
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	7 Entitas	12 Entitas	16 Entitas	20 Entitas	24 Entitas	27 Entitas	35 Entitas	Formen dagri 26/201 r

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
M	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Perekaman KTP Elektronik	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	59,67%	59,75%	60,00%	60,10%	60,20%	60,30%	60,40%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Kepemilikan akta kelahiran	96,69%	96,73%	96,99%	97,50%	97,60%	98,00%	99,75%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
5	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	99,75%	99,76%	99,77%	99,78%	99,10%	99,80%	99,81%	Forman dagri 06/201 7
6	Rasio bayi berakte kelahiran	98,10%	98,20%	98,30%	99,00%	99,10%	99,50%	99,75%	Forman dagri 06/201 7
7	Rasio pasangan berakte nikah	81,47%	81,50%	81,60%	81,75%	82,00%	82,30%	82,75%	Forman dagri 06/201 7
8	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	1	1	1	1	1	1	1	Forman dagri 06/201 7
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	395,291	396,291	397,291	398,291	399,291	400,291	401,291	Forman dagri 06/201 7
10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	279,339	280,339	281,339	282,339	283,339	284,339	285,339	Forman dagri 06/201 7
11	Cakupan penerbitan akta kelahiran	267,732	267,742	267,730	268,000	268,062	268,132	268,300	Forman dagri 06/201 7
N	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	36,36	13,33	25,59	51,11	73,33	88,89	100	Forman dagri 06/201 7
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	75,00	83,33	84,62	86,96	90,91	92,50	95,56	Forman dagri 06/201 7
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	45,75	60,95	73,17	80,49	87,80	95,12	100,00	Forman dagri 06/201 7
4	Persentase kebijakan inovasi	80,00	84,00	86,67	87,88	88,89	89,74	90,24	Forman dagri

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang diterapkan di daerah.								26/2017
O	Pengendalian Penduduk dan KB								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,05	2,05	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05	Permenagri 15/2020 (LPPD)
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,17	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	35,7	Permenagri 15/2020 (LPPD)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3,65	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	6,60	Permenagri 15/2020 (LPPD)
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,53	65,94	67,03	68,16	69,27	70,38	72,66	RPJPD 2023-2025
5	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	Permenagri 26/2017
6	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,05	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05	Permenagri 26/2017
7	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	43,90	43,90	46,3	46,3	46,3	48,7	48,7	Permenagri 26/2017
8	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	9,76	9,76	12,19	12,19	12,19	14,63	14,63	Permenagri 26/2017
9	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	1	1	1	1	Permenagri 26/2017
10	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil	17	17	17	17	17	17	17	Permenagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan								
11	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	26	30	30	30	30	30	41	Permen dagri 26/2017
12	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	Permen dagri 26/2017
13	Ratio Akseptor KB	68,16	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	69,10	Permen dagri 26/2017
14	Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15-49	74,60	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	69,10	Permen dagri 26/2017
15	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	30,6	22,39	22,13	21,87	21,61	21,35	21,15	Permen dagri 26/2017
16	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,41	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	Permen dagri 26/2017
17	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,63	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	6,60	Permen dagri 26/2017
18	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKUP)	19,87	31,37	31,37	31,37	31,37	32,07	32,07	Permen dagri 26/2017
19	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	3,53	10,23	10,23	10,23	10,23	9,73	9,73	Permen dagri 26/2017
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	50,94	53,44	53,44	59,94	59,94	64,44	64,44	Permen dagri 26/2017
21	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	73,40	74,54	74,54	75,69	75,69	76,82	76,82	Permen dagri 26/2017
22	Cakupan anggota Bina	32,89	36,39	36,39	39,89	39,89	43,39	43,39	Permen dagri

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Keluarga Lansia (BKL) ber-KB								26/2017
23	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	112,5	100	100	100	100	100	100	Permenagri 26/2017
24	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	512,5	512,5	512,5	512,5	512,5	512,5	512,5	Permenagri 26/2017
25	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	100	Permenagri 26/2017
26	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	0	1	1	1	1	1	1	Permenagri 26/2017
27	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	Permenagri 26/2017
28	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	47,93	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	Permenagri 26/2017
29	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	71,15	71,15	72,27	72,27	72,27	75,00	75,00	Permenagri 26/2017
30	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	55	55	57	57	90	90	Permenagri 26/2017
31	Persentase remaja yang terkena Infeksi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permenagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Menular Seksual (IMS)								
32	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui s fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	100	Forman dagri 26/201 7
33	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	44,36	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	47,10	Forman dagri 26/201 7
34	Rata-rata usia kawin pertama wanita		21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	22,4	Forman dagri 26/201 7
35	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APEDes	0,67	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Forman dagri 26/201 7
36	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern	72,7	75,89	79,00	82,025	84,97	87,841	89,98	
37	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	68,5	70,7	72,5	74,4	76,2	78,1	80,0	
38	Presentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	17,8	17,29	16,78	16,27	15,76	15,25	14,8	
P	Perhubungan								
1	Rasio konektivitas	39	42	44	47	50	54	57	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	B (0,30)	B (0,29 - 0,20)	B (0,28 - 0,20)	B (0,27 - 0,20)	B (0,26 - 0,20)	A (0,00 - 0,19)	A (0,00 - 0,15)	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	134.724,00	147.437,00	161.350,00	176.573,00	193.235,00	211.472,00	231.427,00	Forman dagri 26/201 7
4	Rasio ijin trayek	0,000025	0,000027	0,000026	0,000023	0,000024	0,000023	0,000022	Forman dagri 26/201 7
5	Jumlah uji kir angkutan umum	893	903	915	925	935	943	955	Forman dagri 26/201 7
6	Jumlah Pelabuhan	3	3	3	3	3	3	3	Forman dagri

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Laut/Udara/Terminal Bis								26/2017
7	Persentase layanan angkutan darat	12,90%	13%	12%	12%	12%	12%	12%	Forman dagri 26/2017
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	Forman dagri 26/2017
9	Pemasangan Rambu-rambu	3,37	8,33	25	42,67	62,5	79,17	100	Forman dagri 26/2017
10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0026	0,0021	0,0018	0,0014	0,0012	0,0010	0,0008	Forman dagri 26/2017
11	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	190.541	273.061	314.632	363.604	421.444	469.921	571.181	Forman dagri 26/2017
12	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	134.724,00	147.437,00	161.350,00	176.373,00	193.235,00	211.472,00	231.427,00	Forman dagri 26/2017
Q	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 15/2020 (LFPD)
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 15/2020 (LFPD)
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	2,80	3,00	3,10	3,20	3,30	3	RPJPD 2023- 2025
5	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok	1	2	4	5	5	5	5	Forman dagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan								
6	Cakupan Layanan Telekomunikasi	< 90%	< 90%	< 90%	< 90%	< 90%	< 90%	< 90%	Forman dagri 26/201 7
7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Forman dagri 26/201 7
8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Forman dagri 26/201 7
9	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Forman dagri 26/201 7
R	Koperasi dan UMKM								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	21%	21,46%	21,91%	22,37%	22,83%	23,28%	23,74%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,14%	0,59%	1,18%	1,77%	2,36%	2,95%	3,56%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
3	Persentase koperasi aktif	37,44%	38,36%	39,27%	40,18%	41,10%	42,01%	42,92%	Forman dagri 26/201 7
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	N/A	46,40%	49,38%	50,76%	51,94%	53,13%	54,31%	Forman dagri 26/201 7
S	Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di KEK Palu	0,73	0,59	0,53	0,41	0,42	0,26	0,14	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	22	24	25	27	28	30	Forman dagri 26/201 7
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.191.874.509.137	1.391.874.509.137	2.891.874.509.137	4.091.874.509.137	5.791.874.509.137	7.291.874.509.137	8.291.874.509.137	Forman dagri 26/201 7
4	Rasio daya serap tenaga kerja	66	1,82	1,67	0,80	1,45	0,71	1,33	Forman dagri 26/201 7
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	110.413.470.513	-0,09	1,00	0,23	-0,40	0,33	-0,13	Forman dagri 26/201 7
6	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-48,50%	0,75%	0,76%	0,77%	0,78%	0,79%	0,80%	Forman dagri 15/202 0 (LFPD)
7	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	5.357	7.000	7.350	7.718	8.103	8.509	8.934	Forman dagri 26/201 7
8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	655.131.493.756,75	660.000.000.000	665.000.000.000	670.000.000.000	675.000.000.000	680.000.000.000	685.000.000.000	Forman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Rasio daya serap tenaga kerja	7	7	7	8	8	9	9	Perman dagri 26/2017
10	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4,84%	0,75%	0,76%	0,77%	0,78%	0,79%	0,80%	Perman dagri 26/2017
T	Penanaman Modal								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,45	34,12	37,65	41,02	46,78	49,26	52,14	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,94	3,65	4,29	6,52	7,89	8,95	9,66	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Jumlah Perolehan Medali Nasional dan Internasional)	47	50	52	54	56	58	60	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
U	Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	0	0	10%	20%	25%	30%	60%	Perman dagri 26/2017
V	Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	16%	21%	23%	27%	30%	32%	35%	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah								
W	Kebudayaan								
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9	4	4	4	4	4	4	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
2	Jumlah cagar budaya	9	4	4	4	4	4	4	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	2	2	2	2	2	Permen dagri 26/2017
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9	4	4	4	4	4	4	Permen dagri 26/2017
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	14	10	10	10	10	10	10	Permen dagri 26/2017
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	4	4	4	4	4	3	Permen dagri 26/2017
X	Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,92	74,20	75,1	77,2	79,30	83,50	90,1	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	91,10	91,21	91,24	91,24	91,34	91,46	92,06	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
Y	Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	84,13	88,02	88,36	91,71	94,79	97,73	100	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	84,33	86,56	89,53	92,68	95,33	97,97	100	Permen dagri 15/2020 (LFPD)
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	27,39	33,64	49,42	64,37	71,27	86,24	100	Permen dagri 26/2017

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	195	139	199	240	281	322	363	Perman dagri 26/2017
Z	Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	2210	2.431	2.490	2.529	2.580	2.631	2.654	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Produksi perikanan	175	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
3	Konsumsi ikan	74,02	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	Perman dagri 26/2017
4	Cakupan bina kelompok nelayan	72,73	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	Perman dagri 26/2017
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	2079	2.153	2.292	2.407	2.527	2.653	2.756	Perman dagri 26/2017
6	Nilai tukar nelayan	93,61	100	100	100	100	100	100	Perman dagri 26/2017
A	Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	4,90	4,92	4,94	4,96	4,96	4,96	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
3	Tingkat Hunian Akomodasi	101.899	81,51	83,58	89,66	93,73	93,73	93,73	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRE harga berlaku	1,07	1-3%	1-3%	1-4%	2-3%	3-6%	4-7%	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,178%	0,85-0,99%	1-4%	1-3%	2-3%	3-6%	4-7%	Perman dagri 15/2020 (LFPD)
6	Kunjungan wisata	495.130	319.837	344.643	369.400	394.156	618.913	643.669	Perman dagri 26/2017
7	Lama kunjungan Wisata	1.356	1.424	1.492	1.559	1.627	1.695	1.763	Perman dagri 26/2017
8	PAD sektor pariwisata	65.526.056.071,20	68.802.390.374,76	70.178.438.182,26	71.554.485.959,75	72.930.533.797,25	74.306.581.604,74	75.682.629.412,24	Perman dagri 26/2017
A	Pertanian								
1	Persentase Penurunan	-	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	Perman dagri 15/2020

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular								0 (LFPD)
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	176,35	179,91	183,51	187,15	190,92	194,74	198,63	Formasi daerah 2025/2030 %
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	117,96	100	100	100	100	100	100	Formasi daerah 2025/2030 %
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,75	4,80	4,85	4,89	4,94	4,99	5,04	Formasi daerah 2025/2030 %
5	Cakupan bina kelompok petani	65,5	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Formasi daerah 2025/2030 %
A C	Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4,95%	4,95	5,00	5,03	5,04	5,09	5,12	Formasi daerah 15/2020 (LFPD)
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	722,92	100	100	100	100	100	100	Formasi daerah 15/2020 (LFPD)
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,32	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00	4,67	Formasi daerah 15/2020 (LFPD)
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Formasi daerah 15/2020 (LFPD)
5	Cakupan bina kelompok pengrajin	31,25	43,75	56,25	68,75	81,25	93,75	100	Formasi daerah 2025/2030 %
A D	Perencanaan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Formasi daerah 2025/2030 %

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERK ADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Permen dagri 26/201 7
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Permen dagri 26/201 7
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Permen dagri 26/201 7
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Permen dagri 26/201 7
6	Penjabaran Konsistensi Program RPKD kedalam APBD	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Permen dagri 26/201 7
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permen dagri 26/201 7
A F	Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,51	10,01	10,51	11,01	11,51	12,01	12,51	
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23,93	24,33	24,93	25,33	25,93	26,33	26,93	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	51,49	51,99	52,49	52,99	53,49	53,99	54,49	
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Persentase SILPA	0,65	0,63	0,59	0,53	0,49	0,43	0,35	
7	Persentase SILPA terhadap APBD	0,65	0,63	0,59	0,53	0,49	0,43	0,35	
8	Persentase program yang tidak terlaksana	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Persentase belanja	27,07	>20	>20	>20	>20	>20	>20	

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pendidikan (20%)								
11	Persentase belanja kesehatan (10%)	19,76	>10	>10	>10	>10	>10	>10	
12	Belanja Operasi dan Belanja Modal	100,00	100	100	100	100	100	100	
13	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	3,99	3,49	2,99	2,49	1,99	1,49	0,99	
16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	17,51	16,51	15,51	14,51	13,51	12,51	11,51	
17	Assets Management	+	+	+	+	+	+	+	
18	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,77	0,72	0,67	0,62	0,57	0,52	0,47	
A G	Pengadaan								
1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	76,23%	50,00%	53,00%	55,00%	57,00%	60,00%	62,00%	Perman. dagri. 15/2020 (LFPD)
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	46,07%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	Perman. dagri. 15/2020 (LFPD)
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-13,05%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	Perman. dagri. 15/2020 (LFPD)
A H	Kepegawaian								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,40	71,61	71,82	72,03	72,24	72,44	72,65	Perman. dagri. 15/2020 (LFPD)
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak	21,73%	21,73%	21,73%	21,73%	21,73%	21,73%	21,73%	Perman. dagri. 15/2020

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)								0 (LFPD)
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,23%	29,7%	30,6%	31,6%	32,6%	34,0%	35,2%	Perman daagri 15/202 0 (LFPD)
4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	Perman daagri 26/201 7
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,34%	0,34%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	Perman daagri 26/201 7
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	7,90%	7,90%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	Perman daagri 26/201 7
7	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39 Orang	39	39	39	39	39	39	Perman daagri 26/201 7
8	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1864	1864	1864	1864	1864	1864	1864	Perman daagri 26/201 7
9	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4610 Orang	4610 Orang	4610 Orang	4610 Orang	4610 Orang	4610 Orang	4610 Orang	Perman daagri 26/201 7
AI	Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya Keuangan yang tersedia untuk pelayanan	97,46	97,76	98,06	98,36	98,66	98,96	99,26	Perman daagri 15/202 0 (LFPD)
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perman daagri 15/202 0 (LFPD)
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	-	4,97	4,98	4,99	5,00	5,01	5,02	
A J	Pengawasan								
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Perman daagri 15/202 0 (LFPD)

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISAS I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase tindak lanjut temuan	76,57%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	Perman dagri 26/201 7
3	Persentase pelanggaran pegawai	0,36%	0,35%	0,34%	0,30%	0,25%	0,15%	0,10%	Perman dagri 26/201 7
4	Jumlah temuan BPK	17 Temuan	16 Temuan	13 Temuan	14 Temuan	13 Temuan	12 Temuan	11 Temuan	Perman dagri 26/201 7
A K	Sekretariat Dewan								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		193 Dok	196 Dok	199 Dok	202 Dok	205 Dok	208 Dok	Perman dagri 26/201 7
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	2 Prog	2 Prog	2 Prog	1 Prog	1 Prog	1 Prog	1 Prog	Perman dagri 26/201 7
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	2 Prog	2 Prog	2 Prog	2 Prog	2 Prog	2 Prog	2 Prog	Perman dagri 26/201 7
A L	Unsur Kewilayahan								
	Kecamatan Tatanga								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	Perman dagri 26/201 7
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		5,83	6,17	6,33	6,50	6,67	6,83	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase LSM aktif		0%	17%	33%	50%	67%	100%	Perman dagri 26/201 7
4	Persentase LPM Berprestasi		0%	17%	33%	50%	67%	100%	Perman dagri 26/201 7
5	Persentase PKK aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
6	Persentase Posyandu aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
Kecamatan Ulujadi									
8	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1	1,2	Perman dagri 26/201 7
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5,53	6,17	6,33	6,50	6,67	6,83	6,99	Perman dagri 26/201 7
10	Persentase LSM aktif	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Perman dagri 26/201 7
11	Persentase LPM Berprestasi	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Perman dagri 26/201 7
12	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
13	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
14	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
Kecamatan Palu Selatan									
15	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1	Perman dagri 26/201 7
16	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1	Perman dagri 26/201 7
17	Persentase LSM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
18	Persentase LPM Berprestasi	0%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	Perman dagri 26/201 7
19	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
21	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
	Kecamatan Palu Utara								
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,5	0,4	0,6	0,5	1	1,2	1,4	Perman dagri 26/201 7
23	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20	8,20	Perman dagri 26/201 7
24	Persentase LSM aktif	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
25	Persentase LPM Berprestasi	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
26	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
27	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
28	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
29	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,00	Perman dagri 26/201 7
	Kecamatan Palu Barat								
30	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7,33	7,67	7,83	8,00	8,17	8,33	8,33	Perman dagri 26/201 7
31	Persentase LSM aktif	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Perman dagri 26/201 7
32	Persentase LPM Berprestasi	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Perman dagri 26/201 7
33	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
34	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
35	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan Palu Timur								
36	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,4	0,6	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	Perman dagri 26/201 7
37	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	11,8	12,00	12,20	12,40	12,60	12,80	13,00	Perman dagri 26/201 7
38	Persentase LSM aktif	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
39	Persentase LPM Berprestasi	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
40	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
41	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
42	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
	Kecamatan Mantikulore								
43	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,125	0,125	0,125	0,25	0,25	0,25	0,25	Perman dagri 26/201 7
44	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	Perman dagri 26/201 7
45	Persentase LSM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
46	Persentase LPM Berprestasi	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	Perman dagri 26/201 7
47	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
48	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
49	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perman dagri 26/201 7
	Kecamatan Tawaeli								
50	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,2	Perman dagri 26/201 7

N O.	URUSAN DAN INDIKATOR KINRJA	REALISASI I 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
51	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5,83	6,17	6,33	6,50	6,67	6,83	6,83	Forman dagri 26/201 r
52	Persentase LSM aktif	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Forman dagri 26/201 r
53	Persentase LPM Berprestasi	0%	17%	33%	50%	67%	83%	83%	Forman dagri 26/201 r
54	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 r
55	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 r
56	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Forman dagri 26/201 r

(Halaman ini Sengaja dikosongkan)





Bab. 5

PENUTUP

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu penjabaran dari perencanaan pembangunan yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana arah perkembangan Kota Palu dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2025-2029); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah. Periode RPJMD Kota Palu ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2029. RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2025-2045, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041 ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Palu, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palu. Selanjutnya RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Palu untuk periode satu tahun. RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, pemangku kepentingan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya.
- 2) Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dan dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2025 hingga 2029.
- 3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- 4) Perangkat Daerah Pemda Kota Palu berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemda Kota Palu.
- 5) Penyusunan RKPD Kota Palu harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diawali dengan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
- 6) RKPD Kota Palu harus menjadi acuan utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan berbasis kinerja melalui pendekatan rasional, realistis, dan proporsional;
- 7) Keberadaan RKPD Kota Palu berkaitan dengan keuangan daerah, merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap Tahun anggaran, terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 8) Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) hingga lahirnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- 9) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, Bappeda Kota Palu berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
- 10) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Wali Kota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Palu serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota. Selanjutnya, untuk menjamin pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Palu.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 akan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait.

5.2 Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman resmi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Kaidah ini mengatur prinsip, mekanisme, serta tata cara pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan RPJMD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun daerah, guna menjamin legitimasi pelaksanaan pembangunan.
- 2) Konsistensi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memastikan keselarasan seluruh program dan kegiatan

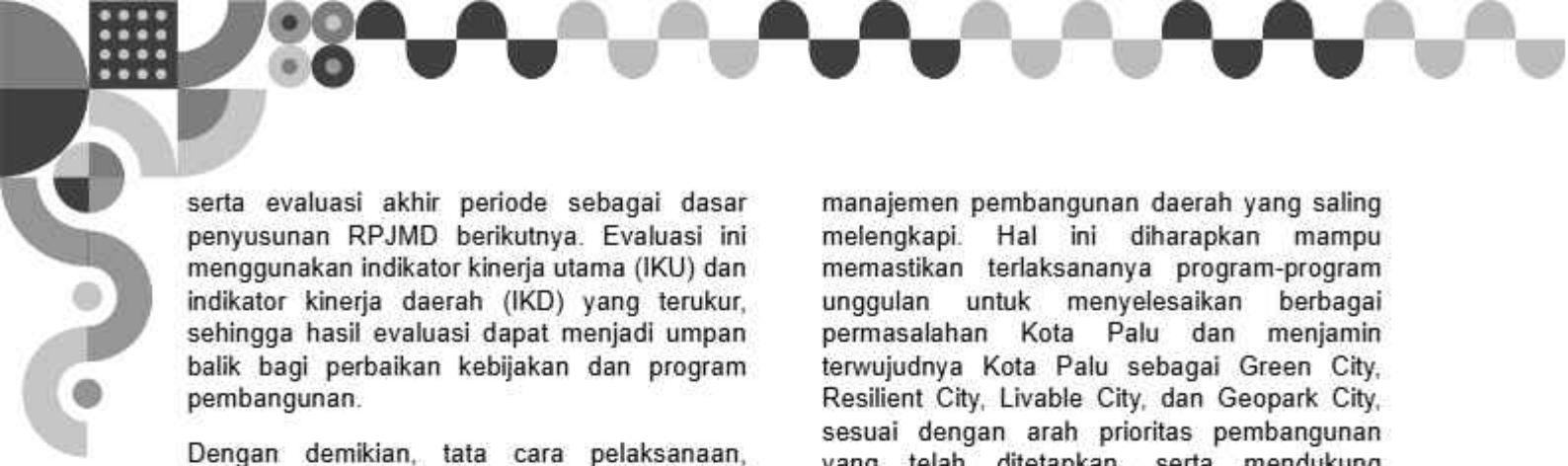
dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan.

- 3) Koordinasi dan sinergi antar-perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menghindari tumpang tindih program.
- 4) Pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, untuk memantau capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.
- 5) Transparansi dan akuntabilitas, melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang jelas dan dapat diukur.
- 6) Partisipasi aktif masyarakat, sebagai wujud penguatan demokrasi partisipatif dalam seluruh tahapan pembangunan daerah.

Dengan diterapkannya kaidah pelaksanaan di atas, RPJMD Kota Palu diharapkan menjadi acuan strategis yang mampu mengarahkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palu. RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui penjabaran program dan kegiatan pembangunan daerah ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Pemerintah Kota Palu melaksanakan pengendalian yang berfungsi memantau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Pengendalian dilakukan secara berjenjang, mulai dari evaluasi internal oleh OPD, koordinasi lintas sektor, hingga supervisi oleh Pemerintah Kota bersama DPRD. Mekanisme pengendalian ini menekankan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi juga dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi tengah periode untuk mengukur capaian jangka menengah,



serta evaluasi akhir periode sebagai dasar penyusunan RPJMD berikutnya. Evaluasi ini menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang terukur, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program pembangunan.

Dengan demikian, tata cara pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD Kota Palu 2025–2029 merupakan satu kesatuan sistem

manajemen pembangunan daerah yang saling melengkapi. Hal ini diharapkan mampu memastikan terlaksananya program-program unggulan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Kota Palu dan menjamin terwujudnya Kota Palu sebagai Green City, Resilient City, Livable City, dan Geopark City, sesuai dengan arah prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya visi jangka panjang Kota Palu Tahun 2025–2045.



*Palu City
Five Dimensions City
the Pearl of the Equator*